



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2022



LPPD 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kewajiban kami dalam mengemban amanah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 dengan baik dan lancar. Atas izin Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Wakil Pemerintahan Pusat. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Secara substansi sesuai aturan yang ada tersebut maka akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good government* dan *clean governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, laporan ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah. Selain substansi tersebut di atas, LPPD juga memuat laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2022 Nomor : 100.2.2.7/9136/OTDA Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.

Melalui LPPD Kabupaten Bangka Barat ini diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengakomodir aspirasi yang terdapat pada setiap lapisan masyarakat dan mempertanggungjawabkannya secara transparan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan wujud tertib pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah, sekaligus sebagai bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Tentunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, tantangan maupun hambatan namun demikian dengan tekad dan semangat yang kuat serta dengan mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki dan dengan dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Dan yang menjadi harapan kita semua bahwa kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan semakin baik dan meningkat setiap tahunnya.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintah Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sudah berupaya secara optimal. Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2022 ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan laporan dimaksud dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian dokumen laporan ini semoga Allah SWT

selalu memberikan Ridha— Nya kepada kita semua untuk terus berkarya bagi kemajuan Kabupaten Bangka Barat yang kita cintai bersama. Semoga LPPD Tahun Anggaran 2022 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjadi telaah pertimbangan yang strategis dalam menentukan kebijakan daerah di masa depan serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik secara penyajian maupun substansi materi yang disajikan. Untuk itu, kami tetap mengharapkan berbagai kritik saran sebagai masukan yang membangun bagi pemerintah daerah untuk lebih menyempurnakan laporan ini di masa mendatang. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Bangka Barat yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam membangun Bangka Barat dan kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Barat.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2022 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk "Terwujudnya Bangka Barat Yang Maju, Mandiri, dan Bermartabat". Semoga Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa mendatang akan lebih baik lagi dan membawa dampak pada kemajuan pembangunan daerah yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Bangka Barat.

Mentok, Maret 2023
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN, SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.1.1. Penjelasan Umum.....	I.1
a. Dasar Hukum.....	I.1
b. Data Geografis Wilayah.....	I.2
c. Jumlah Penduduk (Data Demografi).....	I.5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	I.6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Dan Pegawai Pemerintah.....	I.7
f. Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.....	I.9
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I.14
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	I.14
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I.16
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	I.17
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	I. 19
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	I.251
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II.1
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II.1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II.1
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II.2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II.28
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Usuran Pemerintahan.....	II.38
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	II.40
2.3.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	II.40
2.3.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II.42
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III.1
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	III.1

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten.....	III.1
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	III.2
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh	
Daerah Kabupaten.....	III.2
3.1.1. Target Kinerja.....	III.2
3.1.2. Realisasi.....	III.5
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh	
Daerah Kabupaten.....	III.7
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	III.7
3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	III.8

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL.....	IV.1
4.1. Urusan Pendidikan.....	IV.4
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.4
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV.4
4.1.3. Realisasi.....	IV.4
4.1.4. Alokasi Anggaran.....	IV.10
4.1.5. Dukungan Personil.....	IV.11
4.1.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.11
4.2. Urusan Kesehatan.....	IV.12
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.12
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV.13
4.2.3. Realisasi.....	IV.13
4.2.4. Alokasi Anggaran.....	IV.32
4.2.5. Dukungan Personil.....	IV.33
4.2.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.36
4.3. Urusan Pekerjaan Umum.....	IV.36
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.36
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV.37
4.3.3. Realisasi.....	IV.37
4.3.4. Alokasi Anggaran.....	IV.42
4.3.5. Dukungan Personil.....	IV.43
4.3.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.43
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	IV.43
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar.....	IV.43
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	IV.43
4.4.3. Realisasi.....	IV.44
4.4.4. Alokasi Anggaran.....	IV.49
4.4.5. Dukungan Personil.....	IV.49
4.4.6. Permasalahan dan Solusi.....	IV.50
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan	
Perlindungan Masyarakat.....	IV.50

4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.50
4.5.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.51
4.5.3.	Realisasi	IV.51
4.5.4.	Alokasi Anggaran	IV.58
4.5.5.	Dukungan Personil	IV.60
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.61
4.6.	Urusan Sosial	IV.61
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV.61
4.6.2.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	IV.62
4.6.3.	Realisasi	IV.62
4.6.4.	Alokasi Anggaran	IV.65
4.6.5.	Dukungan Personil	IV.66
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi	IV.66
4.7.	Program dan Kegiatan	IV.67
BAB V	PENUTUP	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2022.....	I.7
Tabel I.2	LAPORAN REALISASI ANGGARAN per 31 Desember 2022	I.12
Tabel I.3	Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat.....	I.18
Tabel I.4	Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat.....	I.20
Tabel I.5	MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	I.255
Tabel I.6	Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang berkaitan Dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I.255
Tabel I.7	Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026.....	I.255
Tabel I.8	Penetapan Indikator inerja Kunci Daeah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berkaitan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026.....	I.255
Tabel II.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan 2022.....	II.1
Tabel II.2	Capaian Indikator Kinerja Keluaran (<i>Output</i>) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	II.2
Tabel II.3	Capaian Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	II.28
Tabel II.4	Capaian Indikator Kinerja Hasil (<i>Outcome</i>) Fungsi Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	II.38
Tabel II.5	Penilaian Capaian Tahunan.....	II.41
Tabel II.6	Penilaian Capiian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD	II.41
Tabel II.7	Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	II.42
Tabel II.8	Indikator Tujuan Tahun 2022	II.43
Tabel II.9	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 - 2022 (persentase)	II.44
Tabel II.10	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2022	II.46
Tabel II.11	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Dengan Tahun Sebelumnya.....	II.46

Tabel II.12	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2022	II.49
Tabel II.13	Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Serta Perbandingan Dengan Provinsi dan Nasional.....	II.50
Tabel II.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2022	II.50
Tabel II.15	Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2022	II.50
Tabel II.16	Hasil Evaluasi Instansi Leading Sektor 2021 - 2022	II.51
Tabel II.17	Hasil Evaluasi Komponen Hasil Sektor 2022	II.51
Tabel II.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.53
Tabel II.19	Perubahan Dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMI/07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	II.53
Tabel II.20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022.....	II.54
Tabel II.21	Daftar Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	II.55
Tabel II.22	Data Jenis Industri Pengolahan di Kabupaten Bangka Barat	II.56
Tabel II.23	Data Jenis Industri Kecil di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	II.57
Tabel II.24	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 (Persentase)	II.59
Tabel II.25	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 -2022 (Persentase).....	II.60
Tabel II.26	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 -2022 (Miliar Rupiah)	II.61
Tabel II.27	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja tahun Sebelumnya.....	II.63
Tabel II.28	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.63
Tabel II.29	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022	II.64
Tabel II.30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II.65
Tabel II.31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja.....	II.66

Tabel II.32	Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021.....	II.66
Tabel II.33	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.68
Tabel II.34	Capaian Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.68
Tabel II.35	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2022	II.69
Tabel II.36	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun2022	II.70
Tabel II.37	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kerja.....	II.70
Tabel II.38	Nilai Indeks Konentivitas Perdesa Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	II.70
Tabel II.39	Tabel Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat tahun 2022.....	II.73
Tabel II.40	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.75
Tabel II.41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.75
Tabel II.42	Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022	II.76
Tabel II.43	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022	II.76
Tabel II.44	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kerja.....	II.76
Tabel II.45	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.77
Tabel II.46	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022	II.77
Tabel II.47	Perbandingan Indikator Pembentuk Indeks Kualitas 2021 dan Tahun 2022 Lingkungan Hidup Tahun Kabupaten Bangka Barat.....	II.78
Tabel II.48	Data Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat.....	II. 79
Tabel II.49	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat.....	II.99

Tabel II.50	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan tahun 2022	II.80
Tabel II.51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2022	II.82
Tabel II.52	Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.82
Tabel II.53	Perbandingan Capaian Indeks Resiko Per Ancaman Tahun 2022 dan tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat	II.83
Tabel II.54	Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2022 dan Tahun 2021 di Kabupaten Bangka Barat.....	II.83
Tabel II.55	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.84
Tabel II.56	Analisis Program Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	II.85
Tabel II.57	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022.....	II.85
Tabel II.58	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kerja	II.86
Tabel II.59	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya	II.86
Tabel II.60	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022	II.87
Tabel II.61	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.87
Tabel II.62	Analisis Program Pendukung Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” Tahun 2022	II.90
Tabel II.63	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022.....	II.91
Tabel II.64	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kerja	II.92
Tabel II.65	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.92
Tabel II.66	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.93
Tabel II.67	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022	II.93
Tabel II.68	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 - 2022	II.93
Tabel II.69	Analisis Program Pendukung Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran “ Tahun 2022	II.95

Tabel II.70	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022	II.95
Tabel II.71	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Perjanjian Kerja.....	II.95
Tabel II.72	Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2022	II.98
Tabel II.73	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya.....	II.99
Tabel II.74	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.99
Tabel II.75	Analisis Program Sasaran meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan.....	II.99
Tabel II.76	Capain Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat terhadapPerjanjian Kerja	II.100
Tabel II.77	Angka Harapan Hidup Tahun 2011 s.d 2022	II.101
Tabel II.78	Indikator Sub Indeks Dalam IPKM Kabupaten Bangka Barat 2018.....	II.102
Tabel II.79	Angka Kematian Bayi dan Neonates Selama 5 Tahun.....	II.103
Tabel II.80	Kondisi Stunting Di Kabupaten Bangka Barat	II.106
Tabel II.81	Hasil Evaluasi Pemetaan Program Dari Tim Percepatan Penurunan Stunting	II.108
Tabel II.82	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun Sebelumnya	II.110
Tabel II.83	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.110
Tabel II.84	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kualiatas Kesehatan Masyarakat	II.111
Tabel II.85	Efisiensi Anggaran.....	II.111
Tabel II.86	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kerja	II.112
Tabel II.87	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.112
Tabel II.88	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.113
Tabel II.89	Program Pendukung Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022	II.113

Tabel II.90	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022.....	II.114
Tabel II.91	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II.114
Tabel II.92	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Terhadap Perjanjian Kerja	II.116
Tabel II.93	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat Terhadap Target Akhir RPJMD	II.116
Tabel II.94	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat.....	II.117
Tabel II.95	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntabel Terhadap Perjanjian Kerja ..	II.118
Tabel II.96	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntabel Terhadap Perjanjian Kerja ..	II.119
Tabel II.97	Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	II.119
Tabel II.98	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntabel Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.119
Tabel II.99	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Akuntabel Tahun 2022 Terhadap target Akhir RPJMD.....	II.119
Tabel II.100	Rincian Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	II.123
Tabel II.101	Kualitas Sasaran Strategis.....	II.124
Tabel II.102	Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	II.124
Tabel II.103	Tahap Pencapaian Tujuan Di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Didasarkan Pada Nilai SAKIP Tahun 2021.....	II.125
Tabel II.104	Uraian Penilaian SPBE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	II.126
Tabel II.105	Aspek Penilaian SPBE	II.126
Tabel II.106	Perbandingan Indeks SPBE Secara Nasional Tahun 2022.....	II.127
Tabel II.107	Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator.....	II.127
Tabel II.108	Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN	II.128
Tabel II.109	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Professional dan Akuntabel Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.129
Tabel II.110	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Yang Profesional dan Akuntabel	II.132

Tabel II.111	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Terhadap Perjanjian Kerja.....	II.133
Tabel II.112	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Terhadap Tahun Sebelumnya.....	II.133
Tabel II.113	Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelayanan Publik (UPP) Tahun 2022	II.134
Tabel II.114	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD.....	II.135
Tabel II.115	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah Tahun 2022	II.135
Tabel II.116	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2022	II.136
Tabel II.117	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2022	II.136
Tabel II.118	Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	II.137
Tabel II.119	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 ..	II.137
Tabel II.120	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022	II.137
Tabel II.121	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Dibandingkan Tahun Sebelumnya.....	II.138
Tabel II.122	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian pemerintah Daerah Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD	II.138
Tabel II.123	Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2022	II.139
Tabel II.124	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	II.139
Tabel III.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	III.1
Tabel IV.1	Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/Kota	IV.1
Tabel IV.2	Tabel Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	IV.4
Tabel IV.3	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020.....	IV.5
Tabel IV.4	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2022.....	IV.7
Tabel IV.5	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Tahun2022.....	IV.8

Tabel IV.6	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022.....	IV.9
Tabel IV.7	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	IV.10
Tabel IV.8	Dukungan Personil Dalam Mendukung Pelayanan Standar Minimal Urusan Pendidikan	IV.11
Tabel IV.9	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV.13
Tabel IV.10	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Bangka Barat Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2020	IV.14
Tabel IV.11	Jumlah Ibu Hamil Yang Tidak Mendapatkan Layanan Sesuai Dengan Standar Berdasarkan Faktor Penyebab.....	IV.17
Tabel IV.12	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Hamil Tahun 2022.....	IV.17
Tabel IV.13	Data Jumlah Ibu Hamil yang Tidak Mendapat Pelayanan Ibu Melahirkan....	IV.19
Tabel IV.14	Data Tenaga Kesehatan (Bidan) dan Jumlah Dukun Beranak di Kabupaten Bangka Barat.....	IV.19
Tabel IV.15	Data Kematian Ibu Menurut Penyebab Per Puskesmas Tahun 2022.....	IV.20
Tabel IV.16	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Melahirkan Tahun 2022 ...	IV.20
Tabel IV.17	Data Kematian Bayi Menurut Penyebab Per Puskesmas Tahun 2022	IV.21
Tabel IV.18	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bayi Baru Lahir Tahun 2022 ...	IV.21
Tabel IV.19	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Balita Tahun 2022.....	IV.22
Tabel IV.20	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pendidikan Dasar Tahun 2022	IV.23
Tabel IV.21	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2022.....	IV.23
Tabel IV.22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2022	IV.24
Tabel IV.23	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Usia Produktif Tahun 2022	IV.25
Tabel IV.24	Capaian Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2022	IV.25
Tabel IV.25	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2022.....	IV.26
Tabel IV.26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Hipertensi Tahun 2022.....	IV.27
Tabel IV.27	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Hipertensi Tahun 2022.....	IV.28
Tabel IV.28	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Diabetes Melitus Tahun 2022.....	IV.29
Tabel IV.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2022.....	IV.29
Tabel IV.30	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan ODGJ Tahun 2022.....	IV.30

Tabel IV.31	Jumlah Terduga Tuberculosis, Kasus Tuberculosis Anak dan Treatment Coverage Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.30
Tabel IV.32	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Tuberculosis Tahun 2022	IV.31
Tabel IV.33	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Tahun 2022	IV.32
Tabel IV.34	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	IV.32
Tabel IV.35	Dukungan Personil Dalam Mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.34
Tabel IV.36	Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.35
Tabel IV.37	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perkerjaan Umum	IV.37
Tabel IV.38	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	IV.38
Tabel IV.39	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat.....	IV.40
Tabel IV.40	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Minum Tahun 2022.....	IV.40
Tabel IV.41	Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat	IV.41
Tabel IV.42	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Limbah Tahun 2022.....	IV.42
Tabel IV.43	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.42
Tabel IV.44	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat	IV.44
Tabel IV.45	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	IV.45
Tabel IV.46	Data Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.46
Tabel IV.47	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2022	IV.48
Tabel IV.48	Capaian Pemenuhan Mutu Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	IV.48
Tabel IV.49	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.49

Tabel IV.50	Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas	IV.51
Tabel IV.51	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020	IV.52
Tabel IV.52	Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Yang Ditegakkan Tahun 2022	IV.53
Tabel IV.53	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022	IV.54
Tabel IV.54	Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2022	IV.55
Tabel IV.55	Capaian Pemenuhan Mutu Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2022	IV.56
Tabel IV.56	Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022 Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV.56
Tabel IV.57	Jumlah Evakuasi Kejadian Bencana Di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan 2022	IV.57
Tabel IV.58	Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2022	IV.57
Tabel IV.59	Data Kejadian Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.58
Tabel IV.60	Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.58
Tabel IV.61	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	IV.59
Tabel IV.62	Indikator dan Target Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV.62
Tabel IV.63	Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, 2021 dengan 2020	IV.63
Tabel IV.64	Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2022l Kabupaten Bangka Barat	IV.64
Tabel IV.65	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	IV.65
Tabel IV.66	Alokasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	IV.67

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I.1	Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	I.5
Diagram I.2	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	I.6
Diagram I.3	Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat Usia Produktif (15-64 tahun) dengan Usia Non Produktif Tahun 2022.....	I.6
Diagram I.4	Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	I.6
Diagram I.5	PNS Kabupaten Bangka Barat Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022	I.8
Diagram I.6	Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2022	I.10
Diagram I.7	Persentase Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	I.10
Diagram I.8	Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	I.11

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2022.....	II.45
Grafik II.2	Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022.....	II.46
Grafik II.3	Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2018 - 2022.....	II.47
Grafik II.4	IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022.....	II.48
Grafik II.5	IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2022.....	II.48
Grafik II.6	IPM Nasional , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	II.49
Grafik II.7	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)	II.56
Grafik II.8	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)	II.57
Grafik II.9	Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDB/PDRB (ADHB) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)	II.61
Grafik II.10	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.80
Grafik II.11	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022	II.86
Grafik II.12	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 - 2022	II.88
Grafik II.13	Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 - 2022	II.89
Grafik II.14	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022	II.96
Grafik II.15	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.....	II.97
Grafik II.16	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022	II.97
Grafik II.17	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	II.98
Grafik II.18	Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2022.....	II.134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

b. Data Geografis Wilayah

Wilayah Kabupaten Bangka Barat berada di ujung barat Pulau Bangka. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Barat berbatasan dengan laut, hal tersebut menjadikan setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Barat memiliki garis pantai dan laut (gambar 1).

Gambar I.1
Letak Geografis Kabupaten Bangka Barat



Sumber: www.wikipedia.org

Kabupaten yang dikenal juga dengan “Negeri Sejiran Setason” ini memiliki posisi yang strategis sebagai jembatan menuju pusat-pusat ekonomi regional Asia Tenggara seperti Singapura, Johor dan Kuala Lumpur (Malaysia), serta Bangkok (Thailand). Dengan memanfaatkan posisi yang strategis ini dan telah ditetapkannya Kota Muntok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maka peluang kerjasama jasa dan perdagangan (intra-regional) dengan Palembang, Batam, Jakarta, dan Pontianak terbuka lebar. Hal tersebut menjadikan Kabupaten Bangka Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam penciptaan pusat pertumbuhan wilayah, baik pada skala regional maupun nasional.

Secara geografis posisi Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi antara 105° 00'-106° 00' Bujur Timur dan 01° 00'-02° 10' Lintang Selatan dan terletak di ujung barat Pulau Bangka yang membentuk semenanjung dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Sesuai dengan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 - 2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat sekitar 284.886,05 ha. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ±214,85 ha dan sebagian dari pulau-pulau tersebut belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat juga memiliki

kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai yang dimiliki adalah 297,38 km.

Gambar I.2
Peta Geografis Kabupaten Bangka Barat



Wilayah daratan Kabupaten Bangka Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka. Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Desa-desa di Kabupaten Bangka Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Tuik Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- 2) Kelurahan Kelapa Kecamatan Kelapa yang berbatasan dengan Desa Banyuasin Kecamatan Riau Silip dan Desa Maras Senang Kabupaten Bangka;
- 3) Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
- 4) Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Saing Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 5) Desa Sangku Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka;
- 6) Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang yang berbatasan dengan Dusun Sungai Dua Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Iklim di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam iklim tropis dan basah, yaitu daerah dengan bulan basah selama 7–9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Bangka Barat berkisar > 2.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan tahunan rata-rata > 200 hari/tahun. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm–406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari. Intensitas penyinaran matahari

rata-rata bervariasi antara 19,0%-57,3% dengan tekanan udara antara 1008,9-1011,1 mbs. Intensitas penyinaran matahari rata-rata 1,8 sampai 3,7 jam per hari pada musim hujan dan 3,8 sampai 6,7 jam per hari pada musim kemarau dengan kecepatan angin rata-rata antara 1,6 sampai 4,4 knots tiap bulannya. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari dari arah Utara, pada bulan April dari arah Barat kemudian pada bulan berikutnya bergeser ke arah Selatan, Tenggara dan Timur dan pada bulan Nopember kembali ke arah Barat. Suhu udara per bulannya rata-rata antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan suhu minimum rata-rata 23,50°C dan suhu maksimum rata-rata 31,10°C serta tingkat kelembaban rata-rata berkisar 80% - 87%.

Topografi Kabupaten Bangka Barat relatif bervariasi yaitu dengan kemiringan lereng antara 0-40%. Secara umum topografi Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 4% berbukit, 51% berombak dan bergelombang, 20% datar dan 25% nya adalah rawa-rawa.

Sungai-sungai di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 470 sungai dan tersebar di seluruh kecamatan. Sungai Kampak, Sungai Antan, Sungai Penyampak, Sungai Kayu Arang, Sungai Muntok, Sungai Menduyung, Sungai Sukal dan Sungai Pelanggar adalah sungai-sungai besar yang ada di Bangka Barat. Namun sungai-sungai tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk sektor lain, terutama karena sungai-sungai tersebut sudah mulai berkurang debit airnya dan kualitas air yang menurun disebabkan masalah lingkungan dan dampak dari penambangan timah rakyat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luas keseluruhan DAS mencapai 96.513 ha, dengan DAS terluas adalah DAS Mancung (59.844 ha)

Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat masih banyak terdapat jenis binatang liar, seperti rusa, lutung, beruk, monyet, babi, trenggiling, napuh, musang. Di kawasan hutan wilayah Bangka Barat juga masih dapat ditemukan jenis burung dan unggas liar seperti beberapa jenis murai, tekukur, pipit, kalong, elang, ayam hutan dan lain-lain. Selain itu, seperti lazimnya daerah beriklim tropis, hutan di wilayah ini juga dihuni oleh berbagai jenis ular-ular besar, salah satunya adalah beberapa jenis ular phyton, jenis ular-ular berbisa seperti ular sendok/kobra, ular tepung ari dan beberapa jenis buaya. Walaupun berada dalam tataran Kepulauan Sumatera, kawasan hutan Bangka Barat tidak dihuni oleh jenis binatang-binatang seperti gajah, harimau dan lainnya.

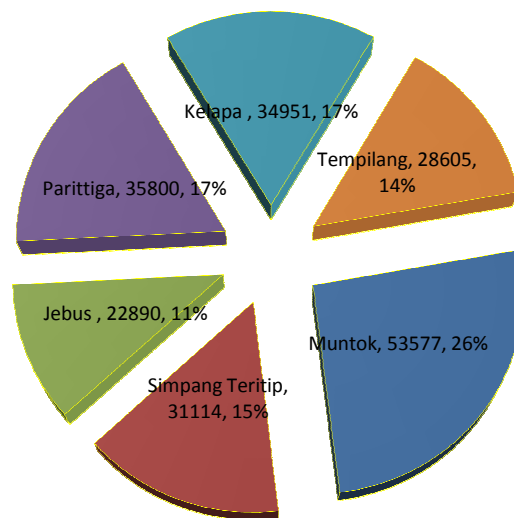
Jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di kawasan hutan wilayah Bangka Barat terdiri dari berbagai macam kayu dan bunga seperti ramin, meranti, kapak, jelutung, pulai, gelam, bilangor, meranti rawa, cempedak air, mahang, bakau, anggrek hutan, ketakung (kantong semar) dan lain sebagainya. Jenis kayu khas yang hanya terdapat di Pulau Bangka adalah Pohon Pelawan (*ipoa mangarawan*).

c. Jumlah Penduduk (Data Demografi)

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai etnis seperti Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku lainnya dari daratan Pulau Sumatera. Mayoritas penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah pemeluk agama Islam.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat per Semester II tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 206.937 jiwa yang terdiri dari 106.552 jiwa laki-laki (51,49%) dan 100.385 jiwa perempuan (48,51%). Jumlah tersebut meningkat 691 jiwa atau 0,33% dari jumlah penduduk tahun 2021 yang sebesar 206.246 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dikarenakan berbagai faktor seperti adanya kenaikan angka kelahiran, rendahnya angka kematian serta dampak dari migrasi masuk di Kabupaten Bangka Barat.

Diagram I.1
Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

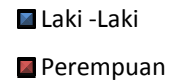


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Dalam diagram 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dan sebaran penduduk terbanyak masih didominasi oleh Kecamatan Muntok. Hal tersebut disebabkan karena Kecamatan Muntok adalah kecamatan yang menjadi ibukota Kabupaten yang merupakan pusat perekonomian dan pemerintahan.

Komposisi jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki, namun dengan persentase yang tidak terlalu besar (perbandingan persentase dimaksud dapat dilihat pada diagram 2).

Diagram I.2
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat
1 Tahun 2022

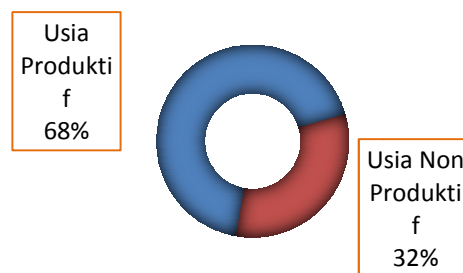


Sumber

bupaten Bangka Barat Tahun 2022

Sedangkan untuk komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia, jumlah kelompok usia produktif yaitu usia 15 - 64 tahun masih mendominasi dengan jumlah 140.154 jiwa atau 67,73% dari total jumlah penduduk. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Diagram I.3
Persentase Penduduk Kabupaten Bangka Barat
Usia Produktif (15-64 tahun) dengan Usia Non Produktif Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif, wilayah di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 6 (enam) kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Muntok memiliki 5 kelurahan dan 4 desa;
- 2) Kecamatan Simpang Teritip memiliki 13 desa;
- 3) Kecamatan Jebus memiliki 11 desa;
- 4) Kecamatan Kelapa memiliki 1 kelurahan dan 13 desa;
- 5) Kecamatan Tempilang memiliki 9 desa; dan
- 6) Kecamatan Parittiga memiliki 10 desa.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 – 2034, Kecamatan Simpangteritip dan Kecamatan Kelapa merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

Diagram I.4
Luas dan Sebaran Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)



ahun 2014- 2034

Jarak Kota Muntok (ibukota Kabupaten Bangka Barat) ke Kota Pangkalpinang (ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) adalah 138 km. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh dengan Kota Muntok adalah Kecamatan Tempilang (108 km) dan kecamatan terdekat adalah Kecamatan Simpang Teritip (54 km).

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 nomor 23 menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Pasal 208 ayat (1) bahwa kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas (1) sekretariat daerah; (2) sekretariat DPRD; (3) inspektorat; (4) dinas; (5) badan; dan (6) kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat memiliki perangkat daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 16 dinas;
- e. 4 (empat) badan; dan
- f. 6 (enam) kecamatan.

Dalam tabel di bawah ini, disajikan rincian perangkat daerah, tipe perangkat daerah dan jumlah pegawai (Pegawai Negeri Sipil) per perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat :

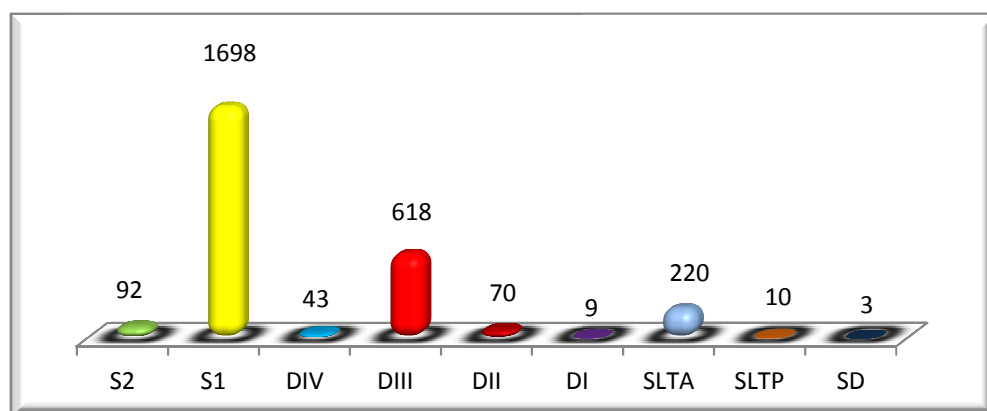
Tabel I.1
Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, Tipe dan Jumlah Pegawai per Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)
1	Sekretariat Daerah	A	63
2	Sekretariat DPRD	C	16
3	Inspektorat	B	28
A	Dinas		
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	A	1.275
2	Dinas Kesehatan	A	529
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	36
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	B	31
5	Dinas Pertanian dan Pangan	A	94
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A	25
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	B	19

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	TIPE PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PEGAWAI (PNS)
8	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A	31
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	23
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	17
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	17
12	Dinas Lingkungan Hidup	A	21
13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	B	26
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	A	19
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	B	21
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	C	12
B	Badan		
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B	28
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	B	31
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B	27
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	A	24
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		13
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		15
C	Kecamatan		
1	Kecamatan Muntok	A	11
	a. Kelurahan Sungaibaru		5
	b. Kelurahan Sungaidaeng		5
	c. Kelurahan Tanjung		7
	d. Kelurahan Menjelang		3
	e. Kelurahan Keranggan		6
2	Kecamatan Simpang Teritip	A	16
3	Kecamatan Jebus	A	25
4	Kecamatan Kelapa	A	18
	▪ Kelurahan Kelapa		8
5	Kecamatan Tempilang	A	17
6	Kecamatan Parittiga	A	17
	Unit Organisasi Bersifat Khusus		
1	Rumah Sakit Umum Daerah	C	184

Pada tahun 2022, pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 2.763 orang. Jumlah PNS dengan lulusan strata 1 (S1) merupakan jumlah PNS terbanyak di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, yaitu 1.698 orang atau 61,45%. Berikut adalah diagram PNS Kabupaten Bangka Barat berdasarkan pendidikan :

Diagram I.5
PNS Kabupaten Bangka Barat
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022



Sumber : BKPSDM Kabupaten Bangka Barat

PNS berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan PNS yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu berjumlah 1.713 orang dibandingkan 1.050 orang. Sedangkan rasio pegawai negeri sipil (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 1,34 persen, dimana setiap 100 orang penduduk dilayani oleh 1 atau 2 orang PNS.

f. Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Sedangkan penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Untuk mengantisipasi dinamika kondisi yang terjadi pada tahun berjalan, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Perubahan tersebut meliputi semua komponen APBD baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

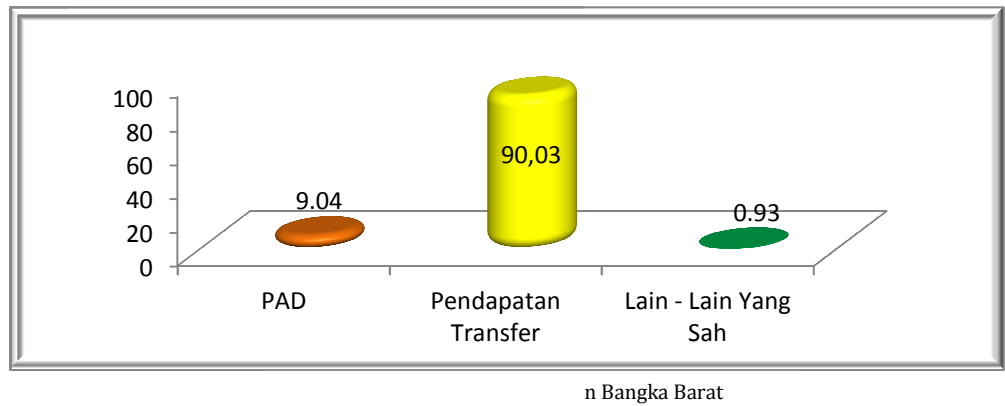
1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan dalam APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Total target Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 931.058.006.642,39 dengan realisasi sebesar Rp 979.314.076.666,73 atau 105,18%, yang meliputi

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); target PAD pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 104.667.737.165,43 dengan realisasi sebesar Rp 88.534.802.222,73 atau sebesar 84,59%.
- b) Pendapatan Transfer; target yang ditetapkan untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2022 sebesar Rp 811.275.802.666,96 dan terealisasi sebesar Rp 881.663.212.072 atau 108,68%.
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 15.114.466.810,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.116.562.372,00 atau sebesar 90,13%.

Berikut adalah diagram kontribusi (target) masing-masing jenis pendapatan terhadap Pendapatan Daerah :

Diagram I.6
Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pendapatan
Terhadap Pendapatan Daerah (Realisasi) Tahun Anggaran 2022



Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa Dana Pendapatan Transfer dalam struktur APBD Kabupaten Bangka Barat masih menjadi penyangga utama terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar 90,03%.

2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah menurut jenis belanja terdiri dari 4 jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Dalam APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022, jumlah total Belanja Daerah adalah sebesar Rp 945.504.695.023,00 dengan realisasi sebesar Rp 872.663.380.153,69 (92,30%), yang meliputi :

- a) Belanja Operasi; anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 725.144.329.431,00 dengan realisasi anggaran sebesar 679.269.096.778,36 atau sebesar 93,67%.
- b) Belanja Modal; anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 105.401.098.002,00 dengan realisasi Rp 79.178.814.360,33 atau sebesar 75,12%.
- c) Belanja Tak Terduga; anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 684.313.075,00 dengan realisasi Rp 0,00 atau sebesar 0%.
- d) Transfer; anggaran Transfers Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 114.274.954.515,00 dengan realisasi Rp 114.215.469.015,00 atau sebesar 99,95%

Diagram I.7
Persentase Anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

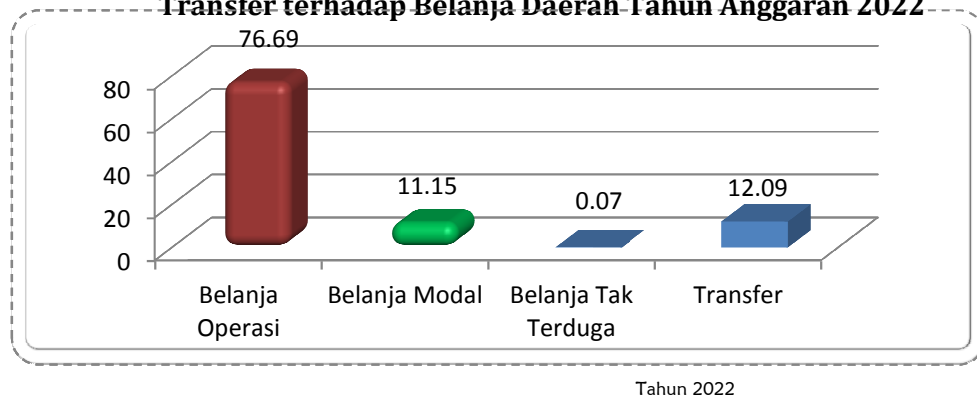
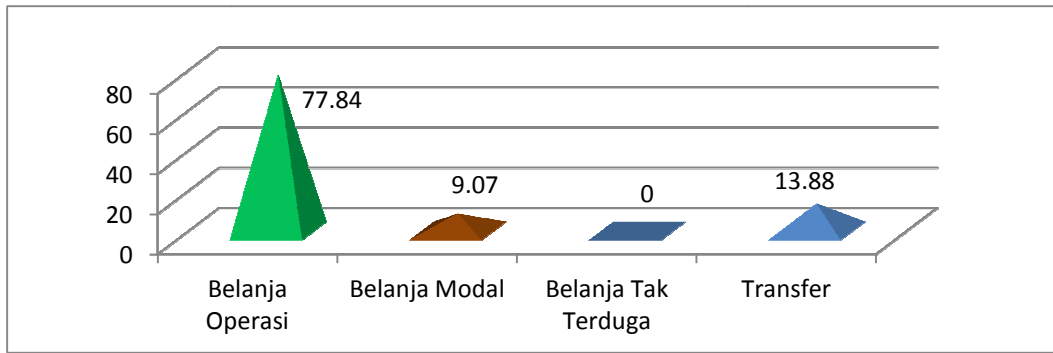


Diagram I.8

Persentase Kontribusi Realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022



ahun 2022

3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2022 ditargetkan Rp 14.446.688.380,61 dan terealisasi Rp 14,383,364,630.61 atau 99,56%. Penerimaan Pembiayaan Daerah merupakan **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**, yaitu sebesar Rp 14.346.688.380,61 dengan realisasi sebesar Rp 14.346.688.380,61 (100,00%) dan **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman** yang ditargetkan sebesar Rp 100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.676.250,00 atau 36,68%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**, pada tahun 2021 tidak dianggarkan **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**.

Rincian anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
per 31 Desember 2022

CAMA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
1	PENDAPATAN	931,058,006,642.39	979,314,076,666.73	105.18 %	879,865,272,394.06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104,667,737,165.43	88,534,302,222.73	84.59 %	59,693,509,555.86
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	30,163,590,000.00	21,724,751,484.90	72.02 %	20,041,982,581.75
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10,173,665,155.00	7,355,787,438.00	72.30 %	4,430,974,655.25
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5,115,000,000.00	5,306,960,199.78	103.75 %	4,856,440,070.26
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59,215,482,010.43	54,146,803,100.05	91.44 %	30,364,112,248.60
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	811,275,802,666.96	881,663,212,072.00	108.68 %	70.387.409.405,04
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	739.452.909.732	822.128.933.357	111,18 %	82.676.023.625
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	71.822.892.934,96	59.534.278.715	82,89 %	(12.288.614.219,96)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15,114,466,810.00	9,116,562,372.00	60.32 %	(5.997.904.438)
1.3.1	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00	0.00	0.00 %	(5,000,000,000.00)
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,114,466,810.00	9,116,562,372.00	90.13 %	(997.904.438)
2	BELANJA	945,504,695,023.00	872,663,380,153.69	92.30	(72.841.314.869,31)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	448.369.478.520,00	477.540.034.738,00	106,51%	(19.595.181.765)
2.1.1	Belanja Pegawai	342.968.380.518,00	340.605.114.827,00	99,31%	(14.148.643.027)
2.1.4	Belanja Hibah	33.503.134.672,00	14.715.495.375,00	43,92%	(4.446.055.292)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	44.990.309.999,00	8.003.955.521,00	17,79%	(256.684.871)
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	25.252.420.250,00	0,00	0,00%	(684.313.075)
2.1.7	Belanja Bagi Hasil	1.655.233.081,00	4.033.725.515,00	243,70%	0
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	110.181.743.500,00	110.181.743.500,00	99,95%	(59.485.500)
2.2	BELANJA LANGSUNG	448.369.478.520,00	395.123.345.415,69	88,12%	(53.246.133.104,31)
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	342.968.380.518,00	315.944.531.055,36	92,12%	(27.023.849.462,64)
2.2.3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.503.134.672,00	31.558.761.085,00	94,20%	(1.944.373.587)

CAMA	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
2.2.4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.990.309.999,00	23.708.809.580,03	52,70%	(21.281.500.418,97)
2.2.5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.252.420.250,00	23.794.316.695,30	94,23%	(1.458.103.554,7)
2.2.6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.655.233.081,00	116.927.000	7,06%	(1.538.306.081)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.876.562.701.665,39)	(1.851.977.456.820,42)	98,69%	24.585.244.844,97
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	14,446,688,380.61	14,383,364,630.61	99.56 %	(63.323.750)
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	14,346,688,380.61	14,346,688,380.61	100.00 %	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000.00	36,676,250.00	36.68 %	(63.323.750)
	PEMBIAYAAN NETTO	14,446,688,380.61	14,383,364,630.61	99.56 %	(63.323.750)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0.00	121,034,061,143.65	0.00 %	121,034,061,143.65

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan adalah proses awal untuk merancang suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan juga merupakan blueprint pelaksanaan kegiatan pembangunan yang mempertimbangkan dan mendayagunakan segala potensi atau sumberdaya yang tersedia. Melalui perencanaan pembangunan yang baik, daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bangka Barat telah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan. Dokumen tersebut kemudian dituangkan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat disusun dengan melakukan analisis terhadap perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik target yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti MDGs yang diperbaharui menjadi SDGs, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti RPJMN dan SPM maupun target-target yang telah ditetapkan oleh dokumen perencanaan pembangunan periode sebelumnya yang belum tercapai. Analisis standar dimaksud tentunya adalah standar pencapaian pembangunan pada saat dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun.

Sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026, permasalahan-permasalahan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi, hal – hal yang mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat meliputi :
 - a) Industri pengolahan yang didominasi pengolahan timah mengalami kontraksi di tahun 2020;
 - b) Belum optimalnya sektor pertanian;
 - c) Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata;
 - d) Koperasi dan UMKM yang belum berdaya saing; dan
 - e) Iklim usaha dan peningkatan investasi yang belum optimal.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka, meliputi :
 - a) Keterbatasan lapangan kerja; dan
 - b) Kualitas tenaga kerja yang masih rendah.
- 3) Angka Kemiskinan, meliputi :
 - a) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin; dan
 - b) Keterbatasan akses dan minimnya ketersediaan pangan.

- 4) Indeks Pembangunan Manusia, yang meliputi :
 - a) Masih rendahnya capaian RLS dan HLS
 - b) Belum optimalnya capaian AHH; dan
 - c) Pengeluaran perkapita masih relatif rendah.
- 5) Infrastruktur, yang meliputi
 - a) Jaringan irigasi, jalan, dan penanganan banjir belum optimal;
 - b) keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi belum optimal;
 - c) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak masih rendah; dan
 - d) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal.
- 6) Lingkungan Hidup, permasalahan utama lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat meliputi :
 - a) Belum optimalnya capaian kualitas lingkungan hidup; dan
 - b) Pengelolaan persampahan yang belum ditangani secara optimal.
- 7) Kemandirian Keuangan Daerah, meliputi
 - a) Kemandirian daerah masih sangat rendah;
 - b) Kapasitas fiskal masih sangat rendah; dan
 - c) Minimnya transfer pusat di luar Dana Alokasi Umum.
- 8) Reformasi Birokrasi, meliputi
 - a) Kualitas penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan pada tingkat Perangkat Daerah belum cukup baik dan merata;
 - b) Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun perangkat daerah belum memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif;
 - c) Monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala untuk menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat pemerintah kabupaten maupun tingkat perangkat daerah;
 - d) Deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan pelayanan, sehingga upaya yang dilakukan cenderung administratif, belum serius melakukan revisi-revisi atas regulasi yang menghambat kinerja birokrasi;
 - e) Peta proses bisnis yang disusun belum sepenuhnya mengacu pada kinerja utama baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah, sehingga struktur organisasi yang terbentuk belum sepenuhnya ideal dan belum menunjukkan bentuk penyederhanaan organisasi yang berbasis kinerja;
 - f) Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya rancangan induk pengembangan aplikasi antarperangkat daerah, sehingga belum optimal pemanfaatannya. Salah satu di antaranya adalah penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi antara perencanaan,

penganggaran, pelaporan maupun sebagai sarana penilaian capaian kinerja individu;

- g) Tindaklanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382—393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh
- h) Belum optimalnya penguatan sistem manajemen SOP antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karier individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan (HCDP)* belum dilakukan menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan pegawai dalam suatu jabatan;
- i) Implementasi sistem akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga sudah berjalan, namun mengingat bahwa proses bisnis yang ada masih belum berdasarkan kinerja utama maka masih terdapat beberapa tujuan/sasaran serta indikator kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada hasil. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada penjabaran kinerja ke level dibawahnya, dan akan berdampak pada ketidaksesuaian pemberian *rewards and punishment*;
- j) Implementasi kebijakan pengawasan internal juga masih perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas terdapatnya kebijakan akan pengawasan serta sosialisasinya, namun lebih harus ditingkatkan pemanfaatannya dan harus dilakukan monitoring serta evaluasi atas kebijakan tersebut;
- k) Upaya-upaya peningkatan pada pelayanan publik sudah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, mulai dari perbaikan sarana prasarana maupun fasilitas lainnya, termasuk juga menerapkan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar perangkat daerah. Namun, yang menjadi catatan adalah hasil dari survei tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan dijadikan dasar perbaikan untuk menjawab permasalahan yang ada yang diharapkan oleh pengguna layanan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka pembangunan daerah yang memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk 5 (lima) tahun ke depan, Kabupaten Bangka Barat telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021

Berdasarkan RPJMD tersebut, visi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”**. Pernyataan visi di atas bermakna

“Peningkatan kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat di wilayah Bangka Barat, sehingga akan memberikan dampak pada kemajuan dalam hal pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik. Pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan diri pada setiap warga masyarakat Bangka Barat, menjadikan warga sebagai masyarakat yang bermartabat, tercermin dalam kehidupan keseharian, lebih mengedepankan moralitas, etika, dan hukum yang berlaku dengan landasan nilai-nilai spiritualitas”.

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026 adalah perencanaan pembangunan tahapan ke 4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 dengan visi **“Bangka Barat Bersih, Mandiri, dan Makmur 2025”**.

Untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026, telah disusun 3 (tiga) misi pembangunan yang merupakan komitmen dan rumusan umum dalam pelaksanaan agenda-agenda utama pembangunan di Kabupaten Bangka Barat. 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Misi 1 : Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.**

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

2) **Misi 2 : Memajukan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia.**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu yang berdaya saing dalam bidang pendidikan, kesehatan yang memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan berahlak mulia.

3) **Misi 3 : Memajukan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.**

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memaksimal kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah dan meningkatkan kemampuan keuangan Daerah. Pencapaian kualitas perencanaan yang berkelanjutan pada pembangunan di Kabupaten Bangka Barat merupakan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras terutama dengan RPJPD Kabupaten Bangka Barat 2005— 2025.

c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Tabel di bawah ini akan memberikan gambaran program prioritas kepala daerah dalam pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan penjabaran

dari Kebijakan Umum Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2026 :

Tabel I.3
Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat

Bidang	Program Unggulan
Petani	Mewujudkan masyarakat petani sejahtera yang kuat dari sisi ekonomi dengan sistem tata kelola perkebunan, pertanian, dan peternakan yang unggul dan terintegrasi.
UMKM	Mendorong kekuatan ekonomi masyarakat melalui kekuatan UMKM yang modern dan maju dengan fasilitas sistem pemasaran terpadu.
<i>Enterpreneurship</i>	Memperkuat Enterpreneur yang sudah ada dan mendorong calon pengusaha baru dengan sistem regulasi pemerintahan yang berpihak pada masyarakat Bangka Barat
Kesejahteraan Publik Pelayanan Publik	Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelayan publik agar dapat lebih maksimal memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
BUMD	Mewujudkan BUMD yang handal, terintegrasi dengan BUMDes dan koperasi sebagai basis kekuatan ekonomi kemasyarakatan
Nelayan	Mewujudkan nelayan yang handal, tangguh, dan sejahtera dengan ditopang oleh teknologi yang tepat guna
Pendidikan	Mewujudkan pendidikan yang religius, bermutu, berkualitas, dan gratis
Kesehatan	Mewujudkan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas, ramah, dan melayani serta berbasis teknologi
ASN	Membentuk ASN yang kuat, cerdas, berkualitas dan kompak dalam melakukan tugas pelayanan masyarakat
Seni dan Budaya	Memberi ruang dan tempat bagi pelaku seni dan budaya serta kaum milenial untuk berkreasi dan melakukan inovasi demi kemajuan Bangka Barat
Program Keummatan	Memperkuat landasan keagamaan ditengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan harmoni dengan pemahaman agama yang Benar
Olahraga dan Pemuda	Memberikan perhatian khusus buat dunia olah raga untuk masyarakat umum khusus penghargaan bagi atlet-atlet yang berprestasi
<i>Good Governance</i>	Mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang religius, humanis dan berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik dan benar
Pelayanan Publik	Mewujudkan sistem pelayanan publik yang tertata, cepat, mudah melayani yang berbasis teknologi sampai ke tingkat pedesaan
Muntok	Mengembalikan kejayaan Muntok sebagai kota pelabuhan dan perdagangan
Pariwisata	Mewujudkan Bangka Barat sebagai tujuan wisata dengan berbasis sejarah, kebudayaan, religius, kuliner dan keindahan alam serta masyarakat
Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas dan tepat sasaran
Penataan Kota dan Desa	Penataan kota dan desa yang indah, nyaman dan ramah lingkungan

d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja daerah dan pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Diantaranya adalah karena RKPD merupakan salah satu elemen penting dalam instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tersebut dapat diketahui sejauh mana target-target capaian kinerja dalam RPJMD telah tercapai karena RKPD merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian perkembangan pembangunan dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, maka dilakukan mekanisme perubahan terhadap RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Tabel I.4
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022
KABUPATEN BANGKA BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								613.180.854.365,00	436.600.440.681,00		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								263.684.209.800,00	225.734.350.221,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70,00				263.684.209.800,00	225.734.350.221,00		
				Opini BPK	WTP							
				Maturitas SPIP	Berkembang							
				Indeks SPBE	Cukup							
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60							
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,25 Tahun							
				Harapan Lama Sekolah	11,54 Tahun							
				Persentase Sekolah Terakreditasi A	24,32%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	169.321.296.000,00	171.763.045.000,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14.275.000,00	41.500.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	3.926.000,00	15.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.295.000,00	4.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.295.000,00	4.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.495.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.264.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	166.604.250.000,00	168.512.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.346 Orang/bulan	166.596.500.000,00	168.500.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.250.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.250.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	3.250.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	42.632.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	42.632.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.250.000,00	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.250.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	679.509.000,00	1.013.815.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.400.000,00	23.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.010.000,00	11.550.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	68.045.000,00	79.165.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.760.000,00	106.300.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.794.000,00	13.800.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	75.500.000,00	80.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00	700.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.723.190.000,00	1.794.730.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	158.250.000,00	158.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.557.940.000,00	1.629.480.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	256.190.000,00	382.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	3.000.000,00	45.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	128.190.000,00	207.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	120.000.000,00	125.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95,60%	94.341.983.800,00	53.946.305.221,00	
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	94,87%			
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95,09%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	94,75%	50.964.679.500,00	34.252.950.000,00	
	Penambahan Ruang kelas baru					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 ruang	299.350.000,00		Reses
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	5 Ruang	1.263.990.000,00		APBD (PIK)
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	20 Unit	3.398.851.000,00		APBD (PIK), Reses
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	1.778.285.000,00		APBD (PIK), Reses
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	145.131.000,00		APBD (PIK)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit	-		APBD (PIK)
	Pengadaan Mebel Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	-		APBD (PIK)
	Pengadaan Perlengkapan Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3.700 Unit	167.300.000,00	-	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 peserta didik	149.360.000,00	149.360.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	30 paket	3.237.920.000,00		APBD (PIK)
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	136 Satuan Pendidikan	3.565.000,00		-
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	46.802.500,00		-
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	755 Orang	16.105.330.000,00	15.934.650.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	37 orang	187.500.000,00	187.500.000,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	20 Satuan Pendidikan	79.640.000,00	20.000.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	24.101.655.000,00	17.961.440.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80,85%	19.656.220.200,00	9.820.970.000,00	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	589.360.000,00		APBD (PIK)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	-		APBD (PIK)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.612.552.000,00		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Tela Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	369.665.000,00		
	Pengadaan Mebel Sekolah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	-		APBD (PIK)
	Pengadaan Perlengkapan Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	3.300 Paket	222.280.000,00	129.725.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	157.410.000,00	125.000.000,00	
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	62 Paket	13.339.000,00	15.000.000,00	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa						Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	131.000.000,00		
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.640 Peserta Didik	6.689.200,00	10.000.000,00	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	193 Peserta Didik	73.655.000,00	75.000.000,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	261 Orang	5.604.520.000,00	2.443.650.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	13 orang	68.000.000,00	125.315.000,00	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	10.802.205.000,00	6.877.280.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	5.545.000,00	20.000.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90,25%	11.978.052.100,00	3.997.803.221,00	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	5 Unit	554.554.000,00		
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.000 Paket	47.755.600,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta Didik	133.627.500,00	142.590.000,00	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD						Jumlah Alat Praktikum dan Peraga PAUD yang Tersedia	1 Paket	27.900.000,00		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.220 Orang	6.915.580.000,00	3.758.245.000,00	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 orang	-	15.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	160.000.000,00	31.968.221,00	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD						Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	4.138.635.000,00		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4,95%	11.743.032.000,00	5.874.582.000,00	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	439 Peserta Didik	3.290.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	975 Orang	10.176.530.000,00	5.859.582.000,00	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	1.556.672.000,00		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	6.540.000,00	10.000.000,00	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	70,54%	20.930.000,00	25.000.000,00	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik	43,15%	20.930.000,00	25.000.000,00	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	20.930.000,00	25.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
	DINAS KESEHATAN								204.651.133.783,00	162.285.910.960,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				204.651.133.783,00	162.285.910.960,00		
				Opini BPK	WTP							
				Maturitas SPIP	Berkembang							
				Indeks SPBE	Cukup							
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60							
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,41 Tahun							
				Prevalensi Stunting	8,75%							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	72.087.362.500,00	69.467.310.280,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	15.600.000,00	10.000.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.200.000,00	4.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.200.000,00	4.000.000,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.200.000,00	2.000.000,00		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	68.057.750.000,00	66.306.000.000,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	719 Orang/bulan	68.054.000.000,00	66.300.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.250.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.250.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.250.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	-	12.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	351.120.500,00	986.072.080,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	57.611.000,00	129.034.644,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.360.000,00	6.524.760,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.565.000,00	67.667.124,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 2 Paket	27.700.000,00	71.669.400,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 2 Dokumen	4.500.000,00	6.007.200,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	32.384.500,00	85.968.952,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	619.200.000,00	
	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Persen	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	3.557.850.000,00	1.576.338.200,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.800.000,00	153.780.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	35.050.000,00	65.276.200,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.383.000.000,00	1.357.282.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	105.042.000,00	576.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	7.752.000,00	288.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	97.290.000,00	288.200.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	51.230.276.900,00	44.194.144.580,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	7.505.966.000,00	8.744.241.700,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengembangan Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1.469.830.000,00	1.469.830.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	209.520.000,00	524.520.000,00	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	22.760.000,00	719.635.700,00	APBD
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	218 Unit	1.850.225.000,00	1.850.225.000,00	
	Pengadaan Obat, Vaksin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan,	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	2.387.988.376,00	2.387.988.376,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
						Semua Kelurahan					
	Pengadaan Bahan Habis Pakai						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1.233.189.624,00	1.233.189.624,00	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 unit	136.540.000,00	362.940.000,00	APBD
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	195.913.000,00	195.913.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	43.714.708.500,00	35.300.552.880,00	
							Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 Persen			
							Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 Persen			
							Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 Persen			
							Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			
							Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen			
							Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 Persen			
							Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			
							Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen			
							Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen			
							Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen			
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	100 Persen			
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	100 Persen			
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen			
							Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98340 Jiwa			
							Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100 Persen			
							Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.449 Orang	1.543.492.000,00	1.543.492.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.405 Orang	319.832.000,00	331.041.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.096 Orang	310.000,00	20.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	39.381 Orang	33.763.000,00	99.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137.178 Orang	51.125.000,00	69.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.395 Orang	65.615.000,00	99.250.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49.547 Orang	27.090.000,00	39.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.052 Orang	1.010.818.100,00	1.022.745.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	492 Orang	26.270.000,00	26.270.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.930 Orang	491.871.000,00	519.771.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.029 Orang	164.140.000,00	181.326.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	110.660.000,00	110.660.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	130.000,00	5.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	320.966.000,00	417.021.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	20.580.000,00	20.580.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	43.188.000,00	45.950.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	18.150.000,00	21.150.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang		19.770.000,00	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	439.471.500,00	471.163.000,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	38.740.489.900,00	15.422.619.920,00	APBD
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	0 Dokumen	-	112.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen		14.104.413.960,00	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	8 Unit	237.492.000,00	350.000.000,00	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah <i>Public Safety Center</i> (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	3.005.000,00	200.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12.752 Keluarga	31.250.000,00	31.250.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas	90 persen	5.951.400,00	36.850.000,00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	2.966.900,00	24.200.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	2.984.500,00	12.650.000,00	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	100%	3.651.000,00	112.500.000,00	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	3.651.000,00	25.000.000,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	-	62.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	0 Dokumen	-	25.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	7.259.045.600,00	6.525.738.600,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	7.254.795.600,00	6.156.755.600,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	194 Orang	7.254.795.600,00	6.156.755.600,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	91 persen	4.250.000,00	368.983.000,00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 orang	4.250.000,00	368.983.000,00	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	75 persen	229.112.000,00	107.000.000,00	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT berizin	70 persen	220.000,00	32.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	220.000,00	32.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Persentase Industri Rumah Tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan Izin Produksi	70 persen	121.610.000,00	25.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	121.610.000,00	25.000.000,00	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Persentase hasil permintaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100%	130.000,00	50.000.000,00	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	130.000,00	50.000.000,00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Persentase hasil permintaan pemeriksaan post-market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100 %	107.152.000,00	107.152.000,00	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	107.152.000,00	107.152.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	40 persen	246.974.000,00	407.286.500,00	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas						Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS	5.041 RT	246.459.000,00	268.329.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	246.459.000,00	268.329.000,00	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rata-rata capaian indikator PHBS	42 Persen	515.000,00	28.957.500,00	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	515.000,00	28.957.500,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	0 Persen	-	110.000.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	-	110.000.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJIRAN SETASON								53.902.032.000,00	21.500.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	100%	38.300.000.000,00	21.500.000.000,00	
	Peningkatan Pelayanan BLUD						Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	100%	38.300.000.000,00	21.500.000.000,00	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	38.300.000.000,00	21.500.000.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	15.602.032.000,00	19.200.000.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	4.965.332.000,00	200.000.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0 Unit	-	100.000.000,00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit	4.865.332.000,00		
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	APBD
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	10.636.700.000,00	19.000.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	10.636.700.000,00	19.000.000.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muntok								3.422.582.000,00	3.163.612.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	3.299.102.000,00	3.040.132.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	57.072.000,00	57.072.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8.098 Keluarga	57.072.000,00	57.072.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	3.242.030.000,00	2.983.060.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.041 Orang	52.740.000,00	52.740.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	987 Orang	24.720.000,00	24.720.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.612 Orang	156.780.000,00	156.780.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.845 Orang	77.400.000,00	77.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.911 Orang	62.460.000,00	62.460.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.086 Orang	48.600.000,00	48.600.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.542 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.026 Orang	19.620.000,00	19.620.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	109 Orang	2.880.000,00	2.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	491 Orang	20.280.000,00	20.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.581 Orang	19.440.000,00	19.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	170.880.000,00	170.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	14.520.000,00	14.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	14.640.000,00	14.640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	61.080.000,00	61.080.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	51.000.000,00	51.000.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	30.360.000,00	30.360.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	86.220.000,00	86.220.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.325.530.000,00	2.066.560.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	123.480.000,00	123.480.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	123.480.000,00	123.480.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	123.480.000,00	123.480.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus								2.498.029.100,00	2.605.803.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	2.323.234.100,00	2.431.008.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	22.440.000,00	22.440.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	1.237 Keluarga	22.440.000,00	22.440.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	2.300.794.100,00	2.408.568.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	386 Orang	50.800.000,00	50.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	371 Orang	2.640.000,00	2.640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	360 Orang	31.680.000,00	31.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.279 Orang	107.440.000,00	107.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.203 Orang	77.880.000,00	77.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.714 Orang	24.240.000,00	24.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.778 Orang	66.240.000,00	66.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	8.640.000,00	8.640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	246 Orang	5.280.000,00	5.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	489 Orang	2.640.000,00	2.640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	144.840.000,00	144.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	20.880.000,00	20.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	9.720.000,00	9.720.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	65.700.000,00	65.700.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	36.348.000,00	36.348.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	99.000.000,00	99.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.546.226.100,00	1.654.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,41 Tahun		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	123.480.000,00	123.480.000,00	
				Prevalensi Stunting	8,75%		Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	123.480.000,00	123.480.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	123.480.000,00	123.480.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	40 persen	51.315.000,00	51.315.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	65 persen	51.315.000,00	51.315.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	51.315.000,00	51.315.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput								1.553.870.000,00	1.529.420.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	1.449.910.000,00	1.425.460.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	9.000.000,00	9.000.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	750 Keluarga	9.000.000,00	9.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	1.440.910.000,00	1.416.460.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	428 Orang	16.920.000,00	16.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	408 Orang	2.280.000,00	2.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	402 Orang	1.560.000,00	1.560.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.285 Orang	27.000.000,00	27.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.449 Orang	31.140.000,00	31.140.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.394 Orang	38.880.000,00	38.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.063 Orang	28.800.000,00	28.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	286 Orang	7.380.000,00	7.380.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	501 Orang	4.320.000,00	4.320.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	139.065.000,00	139.065.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	25.310.000,00	25.310.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2.370.000,00	2.370.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	27.840.000,00	27.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	39.280.000,00	39.280.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	13.140.000,00	13.140.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	100.450.000,00	100.450.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	929.175.000,00	904.725.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	93.960.000,00	93.960.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	93.960.000,00	93.960.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	93.960.000,00	93.960.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	45 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	65 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa								3.251.477.353,00	3.424.320.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	3.123.707.353,00	3.296.550.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	25.200.000,00	25.200.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	300 Keluarga	25.200.000,00	25.200.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	3.098.507.353,00	3.271.350.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	611 Orang	123.240.000,00	123.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang	20.160.000,00	20.160.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	573 Orang	20.520.000,00	20.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.209 Orang	78.600.000,00	78.600.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.940 Orang	44.280.000,00	44.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.147 Orang	68.640.000,00	68.640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.474 Orang	46.560.000,00	46.560.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	8.040.000,00	8.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	322 Orang	24.300.000,00	24.300.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	767 Orang	17.880.000,00	17.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	168.000.000,00	168.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	76.320.000,00	76.320.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	65.520.000,00	65.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	46.130.000,00	46.130.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	156.620.000,00	156.620.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2.127.457.353,00	2.300.300.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	93.960.000,00	93.960.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	93.960.000,00	93.960.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	93.960.000,00	93.960.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	40 persen	33.810.000,00	33.810.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	8,75%		Persentase Posyandu Aktif	65 persen	33.810.000,00	33.810.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	33.810.000,00	33.810.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang								2.777.284.636,00	2.880.620.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	2.676.729.636,00	2.780.065.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	32.400.000,00	32.400.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh TenagaKesehatan Puskesmas	430 Keluarga	32.400.000,00	32.400.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	2.644.329.636,00	2.747.665.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	509 Orang	93.480.000,00	93.480.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	20.880.000,00	20.880.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	463 Orang	9.360.000,00	9.360.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.794 Orang	87.000.000,00	87.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.992 Orang	65.400.000,00	65.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.582 Orang	8.280.000,00	8.280.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.250 Orang	54.000.000,00	54.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang	21.240.000,00	21.240.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	204 Orang	9.360.000,00	9.360.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	621 Orang	14.760.000,00	14.760.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	159.630.000,00	159.630.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	28.080.000,00	28.080.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	77.340.000,00	77.340.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	29.435.000,00	29.435.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.860.000,00	10.860.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	148.200.000,00	148.200.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.803.664.636,00	1.907.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	93.960.000,00	93.960.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	93.960.000,00	93.960.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	93.960.000,00	93.960.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	40 persen	6.595.000,00	6.595.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	65 persen	6.595.000,00	6.595.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.595.000,00	6.595.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simpangteritip								2.672.721.850,00	2.813.336.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	2.505.371.850,00	2.645.986.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	37.440.000,00	37.440.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	450 Keluarga	37.440.000,00	37.440.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	2.467.931.850,00	2.608.546.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	423 Orang	84.700.000,00	84.700.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	408 Orang	5.040.000,00	5.040.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	400 Orang	3.840.000,00	3.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.190 Orang	112.720.000,00	112.720.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.162 Orang	85.535.000,00	85.535.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.716 Orang	71.880.000,00	71.880.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.533 Orang	37.800.000,00	37.800.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	29.994.000,00	29.994.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	205 Orang	26.520.000,00	26.520.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	498 Orang	4.680.000,00	4.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	154.260.000,00	154.260.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	16.500.000,00	16.500.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	42.840.000,00	42.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	12.367.000,00	12.367.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.360.000,00	9.360.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	67.550.000,00	67.550.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.693.945.850,00	1.834.560.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	123.480.000,00	123.480.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	123.480.000,00	123.480.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	123.480.000,00	123.480.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	40 persen	43.870.000,00	43.870.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	65 persen	43.870.000,00	43.870.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	43.870.000,00	43.870.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru								2.098.862.398,00	2.235.980.000,00	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	1.959.302.398,00	2.096.420.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	30.000.000,00	30.000.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	826 Keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	1.929.302.398,00	2.066.420.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	65.160.000,00	65.160.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	716 Orang	50.460.000,00	50.460.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.416 Orang	42.540.000,00	42.540.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7.998 Orang	27.360.000,00	27.360.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	985 Orang	14.160.000,00	14.160.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	25 Orang	10.680.000,00	10.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	122 Orang	7.440.000,00	7.440.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang	8.400.000,00	8.400.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	125.170.000,00	125.170.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	12.840.000,00	12.840.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	6.540.000,00	6.540.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	25.680.000,00	25.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	43.770.000,00	43.770.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.640.000,00	11.640.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	84.140.000,00	84.140.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1.366.322.398,00	1.503.440.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	123.480.000,00	123.480.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	123.480.000,00	123.480.000,00	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	123.480.000,00	123.480.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,41 Tahun		Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	40 persen	16.080.000,00	16.080.000,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	8,75%		Persentase Posyandu Aktif	65 persen	16.080.000,00	16.080.000,00	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	16.080.000,00	16.080.000,00	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundi								1.421.503.446,00	1.431.340.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Persentase capaian SPM bidang kesehatan	92 persen	1.298.023.446,00	1.307.860.000,00	
							Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80			
							Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	77			
							Persentase baduta Stunting	9,50 persen			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	33.600.000,00	33.600.000,00	
							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
							Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	400 Keluarga	33.600.000,00	33.600.000,00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	50 persen	1.264.423.446,00	1.274.260.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131 Orang	49.680.000,00	49.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	124 Orang	14.560.000,00	14.560.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	125 Orang	2.640.000,00	2.640.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	595 Orang	14.600.000,00	14.600.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.520 Orang	26.230.000,00	26.230.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.587 Orang	21.600.000,00	21.600.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	671 Orang	12.960.000,00	12.960.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	29 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	62 Orang	7.680.000,00	7.680.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	196 Orang	1.920.000,00	1.920.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	95.235.000,00	95.235.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	39.950.000,00	39.950.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	6.120.000,00	6.120.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	23.255.000,00	23.255.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	7.560.000,00	7.560.000,00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	55.990.000,00	55.990.000,00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	878.563.446,00	888.400.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 persen	123.480.000,00	123.480.000,00	
							Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	60 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran	
							Program/Kegiatan/Subkegiatan					
							Tolok Ukur	Target				
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	123.480.000,00	123.480.000,00		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	123.480.000,00	123.480.000,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				111.616.729.783,00	15.089.983.000,00		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			Opini BPK	WTP					111.594.740.968,00	15.089.983.000,00	
				Maturitas SPIP	Berkembang							
				Indeks SPBE	Cukup							
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60							
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,70							
				Indeks Bangunan Gedung	Sedang							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.135.643.830,00	7.592.318.000,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	19.460.000,00	41.500.000,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.560.000,00	15.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.390.000,00	4.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.390.000,00	4.000.000,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	5.560.000,00	10.000.000,00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.560.000,00	8.500.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.106.910.000,00	4.112.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.390.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.760.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.760.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.170.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.170.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.680.000,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah						Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1.680.000,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.390.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.390.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	500.303.980,00	629.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.280,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.470.700,00	3.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.827.000,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.670.000,00	6.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	83.660.000,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.037.000,00	500.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.640.000,00	5.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	-	-	
	Pengadaan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.019.289.850,00	1.818.640.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162.000.000,00	120.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	19.859.850,00	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.836.430.000,00	1.676.640.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	482.440.000,00	957.178.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.250.000,00	57.178.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	260.190.000,00	300.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	178.000.000,00	225.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	250.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	125.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	38 persen	2.666.374.020,00	3.482.400.000,00	
							Persentase titik banjir yang dimitigasi	43 persen			
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi	8 Titik	1.493.638.900,00	1.034.400.000,00	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0 KM	-		
	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,24 KM	981.654.900,00		
	Normalisasi/Restorasi Sungai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,1 KM	261.984.000,00	684.400.000,00	
	- Normalisasi Sungai Culong					Kec. Muntok					
	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					Kab. Bangka Barat, Parittiga, Kelabat	Panjang <i>Breakwater/Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,2 KM	250.000.000,00	350.000.000,00	
	- Operasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai Belembang					Kec. Parittiga					
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	42,43%	1.172.735.120,00	2.448.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	3 Dokumen	444.735.120,00	548.000.000,00	
	- SID Jaringan Irigasi Air Nyatoh (230 HA)					Kec. Simpang Teritip					
	- SID Jaringan irigasi Dendang (120 Ha)					Kec. Kelapa					
	- Fisibilities Study (FS) (5 Ha)										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung Kab. Bangka Barat, Tempilang, Simpang Yul	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	-	500.000.000,00	
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Sawah Kacung					Desa Kacung					
	- Pembangunan Bangunan Pelengkap Irigasi Sawah Simpang Yul					Desa Simpang Yul					
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung Kab. Bangka Barat, Kelapa, Air Bulin	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,2 KM	300.000.000,00	500.000.000,00	
	- Rehabilitasi Bangunan Sadap D.I Kacung					Kec. Kelapa					
	- Rehabilitasi Saluran Irigasi D.I. Tebing Bulin					Kec. Kelapa					
	- Rehabilitasi Bangunan Saluran D.I Tebing Bulin					Kec. Kelapa					
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Peradong Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus Kab. Bangka Barat, Tempilang, Buyan Kelumbi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,27 KM	300.000.000,00	550.000.000,00	
	- Normalisasi Sungai D.I. Paradong					Kec. Simpang Teritip		150 m			
	- Normalisasi Sungai D.I. Buyan Kelumbi					Kec. Tempilang		100 m			
	- Normalisasi Sungai D.I. Jebus					Kec. Jebus		20 m			
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa					Kab. Bangka Barat, Jebus, Limbung Kab. Bangka Barat, Kelapa, Mancung	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,11 KM	128.000.000,00	350.000.000,00	
	-Normalisasi Sungai D.I.R Kebayan Limbung					Kec. Jebus		10 m			
	-Normalisasi Sungai D.I.R Mancung Belit					Kec. Kelapa		100 m			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	81,77 persen	29.312.546.218,00	3.190.265.000,00	
							Persentase jembatan dalam kondisi baik	94,55 persen			
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	82,17 persen	29.312.546.218,00	3.190.265.000,00	
							Persentase jembatan dalam kondisi baik	95,28 persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					Kab. Bangka Barat, Kelapa, Air Bulin Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	4 Dokumen	539.010.000,00	218.510.000,00	
	DED Jalan Simpang Bulin - Petar										
	Dokumen perencanaan jalan pendukung kawasan strategis										
	Dokumen Perencanaan Jln. Lingkar Air Nyatoh - Mayang										
	DED Jembatan Air Nibung Kec. Simpang teritip										
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	131.705.000,00	109.255.000,00	
	Pembangunan Jalan					Desa Air limau, Kecamatan Muntok	Panjang Jalan yang Dibangun	5,6 KM	891.248.800,00		
	Pembangunan jalan belakang vila batu di Muntok					Kecamatan Muntok		1,5 KM			
	Pembangunan jalan Gang Duren, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru					Gang Duren, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru		2,5 KM			
	Pembangunan Jalan dari Jl. Begadang RT 03 tembus ke Jl. Setapak RT 02, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa					dari Jl. Begadang RT 03 tembus ke Jl. Setapaak RT 02, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa		1,6 KM			
	Rekonstruksi Jalan						Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	13 KM	13.131.402.418,00		
	Rehabilitasi siring RT 02 RW 03 Dusun Kampak, Kab. Bangka Barat							0,1 km			
	Rehabilitasi siring Jalan Air Pangkal RT 02 RW 01 Dusun Jebus, Kab. Bangka Barat					Jalan Air Pangkal RT 02 RW 01 Dusun Jebus, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus		0,35 km			
	Pembangunan Siring Jl. Payak RT 01, Kab. Bangka Barat							0,02 km			
	Pembangunan Siring jalan Jebus - Sungai Buluh (dekat rumah Bapak Man) Desa Sungai Buluh					dekat rumah Bapak Man, Kab. Bangka Barat, Jebus, Jebus, Seluruh Kelurahan/Desa		1,2 km			
	Rehabilitasi siring jalan RT 01 RW 02 Dusun Kerang, Kab. Bangka Barat							0,03 km			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan Berkala Jalan di Kelurahan kelapa, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat							0,6 km			
	Peningkatan Jalan Gang 25 RT 11 Rw 05 Kelurahan Kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat					kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa		0,2 km			
	Pembangunan lingkaran hutan larang lestari, kelapa, Kab. Bangka Barat					kelapa, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa		0,25 km			
	Rehabilitasi Siring Jalan Mari ayu, kelapa, Kab. Bangka Barat							0,2 km			
	Rehabilitasi siring Jalan P2DT (RT,05 dan RT 07) Desa Kacung							0,6 km			
	Peningkatan jalan kp. Baru (RT 04 sampai RT 01) Desa Kacung					Desa Air Putih, Kec. Muntok		0,3 km			
	Peningkatan jalan Gang Sanyot RT 05 Kelapa Timur, Kab. Bangka Barat					Desa Kundi		0,3 km			
	Peningkatan Jalan Belakang SMPN 4 Muntok - Kuburan Dusun III - Dusun III belak, Kab. Bangka Barat					Kel. Sungai Baru		0,3 km			
	Rehabilitasi siring jalan kampung sidorejo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Daeng					Desa Sungai Buluh, Jebus		0,25 km			
	Peningkatan jalan argotirto gang nila, Kab. Bangka Barat					Desa Tumbak Petar, Jebus		0,15 km			
	Peningkatan jalan gang taqwa depan masjid asshogiri, Kab. Bangka Barat					Cupat		0,3 km			
	Pembangunan siring jalan RT 05 Gang Alfisuaimi, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut					Puput		0,3 km			
	Peningkatan Jalan gang makmur RT 01 kelurahan menjelang, Kab. Bangka Barat					Sekarbiru		0,35 km			
	Peningkatan Jalan gg damai RT 03 menjelang, Kab. Bangka Barat					Teluk Limau		0,175 km			
	Peningkatan jalan Pemakaman Dusun 1, Kab. Bangka Barat					Teluk Limau		0,7 km			
	Peningkatan jalan gang cong sipen, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau					Air Bulin		0,3 km			
	Peningkatan jalan tembus Gg. Cek kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat					Dendang		0,3 km			
	Pembangunan Siring kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat					Kacung		0,2 km			
	Peningkatan Jalan Kadur Dalam					Kelapa		0,2 km			
	Pembangunan siring Dusun Gudang Papan RT 02					Pangkal Beras		0,3 km			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembangunan Siring Jalan Kampung Jawa RT.17 Desa Cupat, Kab. Bangka Barat					Tempilang		0,3 km			
	Peningkatan jalan gang nangka ke gang melinjo (Bakir) Desa Cupat, Kab. Bangka Barat					kampung sidorejo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Daeng		0,25 km			
	Peningkatan jalan rambutan gang somad Bpk. Sugianto Desa Cupat, Kab. Bangka Barat					RT 05 Gang Alfisuaimi, Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut		0,25 km			
	Pembangunan siring jalan raya dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat					Jalan lintas / rintis, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo		0,2 km			
	Pembangunan Siring depan gereja dusun cupat, Kab. Bangka Barat					jalan raya dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat		0,4 km			
	Peningkatan jalan dusun tambang 25 (arah Kuburan dan RT 3), Kab. Bangka Barat					dusun tambang 25, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Cupat		0,406 km			
	Pembangunan Siring Jalan Dusun parit 4, Kab. Bangka Barat					jalan masuk gereja, Kab. Bangka Barat, Parittiga, Sekar Biru		0,2 km			
	Peningkatan Jalan masuk gereja dusun parit 4, Kab. Bangka Barat					RT 10 dusun tayu, Kab. Bangka Barat, Jebus, Ketap		0,08 km			
	Rehabilitasi siring dusun parit 4 desa sekar biru kecamatan parittiga, Kab. Bangka Barat					kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Baru		0,25 km			
	Peningkatan Jalan desa air mendukung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat					jalan air mas dusun 2, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau		0,6 km			
	Pembangunan Siring Jalan desa air mendukung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat					kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat, Mentok, Sungai Baru		0,5 km			
	Peningkatan Jalan AMD Desa kundi, Kab. Bangka Barat					jalan gang cong sipen, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Limau		0,75 km			
	Peningkatan jalan limau purut dusun tegek desa benteng kota kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat					desa kundi, Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Kundi		0,35 km			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Peningkatan jalan bukit mensirak dusun tegek desa benteng kec. Tempilang, Kab. Bangka Barat					jalan gg damai RT 03 menjelang, Kab. Bangka Barat, Tanjung		0,1 km			
	Pembangunan jalan RT 5 Desa Benteng Kota					jl simpang 4 RT 06, Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kacung		0,3 km			
	Pemeliharaan Berkala Jalan						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3 KM	6.333.752.500,00		
	Pemeliharaan berkala jalan desa pusuk					Kel. Sungai Daeng, Kec. Muntok		0,37 km			
	Pemeliharaan berkala jalan TPU Air Belo, Kab. Bangka Barat, Mentok, Air Belo					Kel. Keranggan, Muntok		0,55 km			
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kelanci - Air Lintang (DAK)					Desa Ketap, Jebus		1,3 km			
	Pemeliharaan Berkala Jalan Telum Limau - Cupat (DAK)					Desa Pusuk		0,5 km			
	Pemeliharaan Rutin Jalan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	300 KM	5.267.940.000,00	2.000.000.000,00	
	Pembangunan Jembatan						Panjang Jembatan yang Dibangun	29 M	2.519.875.000,00		
	Pembangunan Jembatan sawah adin desa dendang, Kab. Bangka Barat							7 m			
	Pembangunan Jembatan Hilarius Dusun Parit 4 Desa Sekar Biru, Kab. Bangka Barat							12 m			
	Pembangunan Jembatan menuju perkuburan Dusun Sadar Jaya, Kab. Bangka Barat							10 m			
	Rehabilitasi Jembatan					Kab. Bangka Barat, Parittiga, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	60 M	399.710.000,00	542.500.000,00	
	Rehabilitasi Jembatan Air Tenam					Kec. Parittiga		1 unit			
	Rehabilitasi Jembatan Kayu Dusun Sadar Daya					Desa Simpang Gong		1 unit			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	26 M	97.902.500,00	320.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	22,51 persen	84.489.575,00	400.000.000,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n	40 Orang	84.489.575,00	300.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	40 Orang	84.489.575,00	300.000.000,00	
	Penyelenggara Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								-	50.000.000,00	
	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50.000.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								-	50.000.000,00	
	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	14,28 persen	208.111.140,00	425.000.000,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						Jumlah RTRW dan RRTR yang sudah ditetapkan	1 Peraturan	106.024.340,00	275.000.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen (RDTR Muntok)	106.024.340,00	150.000.000,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				125.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						Persentase objek ruang yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	102.086.800,00	150.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	102.086.800,00	150.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	15 persen	8.251.073.800,00	100.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100 persen	8.251.073.800,00	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					22 Desa Pasca Pamsimas	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	60 SR	895.467.800,00		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	6.330.514.920,00		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Pedesaan atau SPAM Tematik Tertentu	2 Liter/Detik	926.146.080,00		
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2 Unit	98.945.000,00	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	14,29 persen	709.980.000,00		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi	1 unit	709.980.000,00		
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	60 Rumah Tangga	709.980.000,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	2,74 persen	4.551.647.185,00	600.000.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100 persen	4.551.647.185,00	600.000.000,00	
	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	101 Rumah Tangga	905.637.600,00	200.000.000,00	RESES
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					(Tangi Septik Individual) Desa bukit terak, Belo Laut, Tanjung Niur, Tugang, Peradong, (Ipal Komunal) Kec. Muntok	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	333 Unit	198.848.400,00	200.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	231 Rumah Tangga	228.011.185,00	200.000.000,00	
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT						Kapasitas IPLT Terbangun	48 M ³ /Hari	3.219.150.000,00		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	86 persen	58.230.000.000,00	1.100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani;Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan SLF	100%	58.230.000.000,00	1.100.000.000,00	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	58.230.000.000,00	1.100.000.000,00	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	30 persen	444.875.200,00	-	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani tahun n	100%	444.875.200,00	-	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	444.875.200,00		
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN								21.988.815,00	-	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	15 persen	-	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100 persen	-	-	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan					22 Desa Pasca Pamsimas	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR			
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik			
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Pedesaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik			
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	14,29 persen	-		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi	1 unit	-		
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rumah Tangga			
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak	2,74 persen	21.988.815,00	-	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100 persen	21.988.815,00	-	
	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga			
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					(Tanki Septik Individual) Desa bukit terak, Belo Laut, Tanjung Niur, Tugang, Peradong. (Ipal Komunal) Kec. Muntok	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit			
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	21.988.815,00		
	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT						Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	86 persen	-	-	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani; jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan SLF	100%	-	-	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	30 persen	-	-	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani tahun n	100%	-	-	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan			
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN								10.637.178.000,00	7.146.884.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%				10.637.178.000,00	7.146.884.000,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,70%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.813.898.000,00	5.756.884.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14.020.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.700.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.175.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	-	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.595.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.550.000,00	8.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.505.875.000,00	3.512.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.175.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.350.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.350.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.800.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	2.800.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0 Persen	-	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	-	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.125.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.125.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	673.905.900,00	671.800.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.999.900,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.315.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	23.459.000,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	276.625.000,00	170.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	4.800.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	52.848.000,00	65.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	312.859.000,00	390.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.400.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.277.788.100,00	1.184.490.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	689.100.000,00	89.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.048.100,00	10.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.576.640.000,00	1.082.890.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	334.384.000,00	313.094.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2.310.000,00	2.310.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	332.074.000,00	310.784.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100%	374.920.000,00	180.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	1 dokumen	14.920.000,00	30.000.000,00	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	14.920.000,00	30.000.000,00	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi bagi Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	75 Unit	360.000.000,00	150.000.000,00	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	75 Unit Rumah	360.000.000,00	150.000.000,00	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	3.13 persen	1.719.600.000,00	300.000.000,00	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	20%	1.719.600.000,00	300.000.000,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Kawasan Kumuh Kabupaten	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit Rumah	52.500.000,00	300.000.000,00	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	-		
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh					Kawasan Kumuh Kabupaten	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha	377.100.000,00	-	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	30 Unit	1.290.000.000,00		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	11,74 persen	787.880.000,00	560.000.000,00	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun/direhabilitasi pada Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit	787.880.000,00	560.000.000,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	787.880.000,00	500.000.000,00	APBD & APBD (PIK)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	-	60.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	8,30%	940.880.000,00	350.000.000,00	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi baik	100%	940.880.000,00	350.000.000,00	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					Tanjung, Kec Muntok	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	940.880.000,00	350.000.000,00	APBD (PIK)
	- Pembuatan Jalan Setapak Pembangunan Jalan Beton RT 001 - RW 014										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%				13.567.805.324,00	18.702.412.500,00	
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Cukup						
	KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								9.335.912.160,00	11.549.651.500,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	4.762.296.400,00	5.789.111.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	19.175.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.900.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.475.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.475.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.900.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.425.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.807.375.000,00	3.812.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.475.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.950.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.950.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.425.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.425.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.495.000,00	263.395.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	252.395.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.495.000,00	11.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	262.936.400,00	617.800.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.700.000,00	5.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.060.000,00	3.300.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	22.626.000,00	44.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	60.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	5.500.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25.000.900,00	55.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	187.229.000,00	440.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.820.500,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	529.240.000,00	706.099.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten /Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.760.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000,00	46.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	3.610.000,00	11.869.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	481.870.000,00	646.030.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	136.650.000,00	339.317.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	-	43.175.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	128.600.000,00	236.445.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	55.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	3.050.000,00	4.697.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	100%	4.133.825.010,00	5.298.540.500,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	3.867.964.300,00	4.807.506.000,00	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	24 Kasus	73.937.000,00	88.000.000,00	
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	62 Kasus	141.378.000,00	33.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	31.802.500,00	82.500.000,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	134 Orang	3.586.255.000,00	4.422.506.000,00	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	34.591.800,00	181.500.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	265.860.710,00	491.034.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota									170.500.000,00	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48 Laporan	12.743.200,00	212.734.500,00	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	253.117.510,00	107.800.000,00	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	16%	439.790.750,00	462.000.000,00	
							Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	0%			
							Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	100%			
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100%	420.716.250,00	362.000.000,00	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	126.226.250,00	120.000.000,00	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	294.490.000,00	242.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	19.074.500,00	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	38 Orang	19.074.500,00	100.000.000,00	
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,91				4.231.893.164,00	7.152.761.000,00	
				Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	41,18%						
				Indeks Resiko Bencana	Tinggi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.908.828.164,00	5.789.111.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.150.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4.600.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.390.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.390.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	4.600.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4.170.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.135.545.000,00	3.812.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	2.129.330.000,00	3.800.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.415.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	2.400.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.400.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.675.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	2.675.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.650.000,00	263.395.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	252.395.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2.650.000,00	11.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	216.702.164,00	617.800.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	2.700.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	1.885.000,00	3.300.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	20.990.000,00	44.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	17.140.000,00	60.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.250.000,00	5.500.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	30.991.164,00	55.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	139.071.000,00	440.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.675.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	427.621.000,00	706.099.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	991.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	42.000.000,00	46.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.170.000,00	11.869.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	381.460.000,00	646.030.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	107.485.000,00	339.317.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	27.775.000,00	43.175.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	66.660.000,00	236.445.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	10.000.000,00	55.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	3.050.000,00	4.697.000,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1.323.065.000,00	1.363.650.000,00	
							Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%			
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						Ketersediaan data/informasi rawan bencana	100%	127.700.000,00	150.000.000,00	
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	127.700.000,00	150.000.000,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	234.875.000,00	290.213.000,00	
							Terlaksananya Pelayanan pasca bencana	100%			
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 orang	13.820.000,00	30.965.000,00	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 dokumen	1.715.000,00	23.980.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 orang	219.340.000,00	235.268.000,00	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	960.490.000,00	1.073.437.000,00	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	19.405.000,00	132.352.000,00	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	941.085.000,00	941.085.000,00	
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								9.023.797.675,00	7.640.900.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal	Pemenuhan SPM	100%				9.023.797.675,00	7.640.900.000,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,70%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	6.198.450.000,00	5.194.800.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.900.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.170.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.390.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.390.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.170.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.780.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.506.950.000,00	3.012.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.390.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestern SKPD	3 laporan	2.780.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.780.000,00	5.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.780.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.780.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	6.560.000,00	10.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.560.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	558.365.000,00	930.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.375.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	440.350.000,00	800.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.640.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	985.895.000,00	1.029.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	750.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	44.475.000,00	76.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.750.000,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	936.920.000,00	941.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	120.000.000,00	162.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000,00	35.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	80.000.000,00	100.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	22.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						Persentase PSKS yang aktif	100%	600.500.000,00	879.500.000,00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi	100%	600.500.000,00	879.500.000,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74 Orang	445.500.000,00	666.000.000,00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	36.000.000,00	79.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	119.000.000,00	119.000.000,00	
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	-	15.000.000,00	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	100%	1.884.027.675,00	927.600.000,00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	100%	1.884.027.675,00	867.600.000,00	
	Penyediaan Permakanan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	875 Orang	1.729.747.875,00	665.600.000,00	
	Penyediaan Sandang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	20.020.000,00	22.000.000,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	19.730.000,00	100.000.000,00	
	Pemberian Layanan Rujukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	114.529.800,00	80.000.000,00	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	0%	-	60.000.000,00	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	60.000.000,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	48.700.000,00	413.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS	100%	48.700.000,00	413.200.000,00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	66.882 Orang	6.300.000,00	35.000.000,00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	21.812 Keluarga	8.700.000,00	25.000.000,00	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.529 Keluarga	13.700.000,00	353.200.000,00	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	20.000.000,00		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	292.120.000,00	225.800.000,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100%	115.295.000,00	60.800.000,00	
	Penyediaan Makanan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	115.295.000,00	60.800.000,00	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana	100%	176.825.000,00	165.000.000,00	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	176.825.000,00	165.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								95.873.039.674,00	66.208.146.514,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								5.390.451.050,00	5.695.689.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Indeks Gini Kabupaten lebih rendah dari Provinsi	< 0,255				5.390.451.050,00	5.695.689.500,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,94%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	5.004.867.500,00	5.182.980.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14.975.000,00	46.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.375.000,00	20.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.200.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.150.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.700.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.550.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.706.410.000,00	3.712.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.150.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	2.630.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.630.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.425.000,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.425.000,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.165.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.165.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	349.477.500,00	465.040.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.180.000,00	5.040.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	38.500.000,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	233.855.000,00	342.500.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.442.500,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	831.225.000,00	828.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.400.000,00	86.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	5.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	738.325.000,00	740.350.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	100.190.000,00	105.190.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.250.000,00	38.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	36.940.000,00	36.940.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	30.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 unit	5.000.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	15.000.000,00		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	35%	333.887.500,00	422.407.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi yang dilaksanakan tahun n	4 jenis pelatihan	333.887.500,00	422.407.500,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	333.887.500,00	422.407.500,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	35%	6.218.500,00	14.727.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						Jumlah pencari kerja berdasarkan (ak-1) dan yang diberdayakan yang ditempatkan	30 orang	6.218.500,00	14.727.000,00	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	30 orang	6.218.500,00	7.877.000,00	
	Job Fair/Bursa Kerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Orang	-	6.850.000,00	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100%	45.477.550,00	75.575.000,00	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						Persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diselesaikan	100%	45.477.550,00	75.575.000,00	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara	6.515.000,00	9.910.000,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2.262.550,00	4.835.000,00	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	29.725.000,00	50.000.000,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.682 Orang	6.975.000,00	10.830.000,00	
									5.007.267.347,00		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								5.007.267.347,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72 TAHUN						
				Persentase Balita Gizi Buruk	0%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	90,67						
				Status Kabupaten Layak Anak	Pratama						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	4.110.832.000,00	3.660.720.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	24.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.000.000,00	2.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.708.000.000,00	2.106.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.700.000.000,00	2.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	6.000.000,00	2.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	6.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	191.349.000,00	345.762.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000,00	14.842.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.920.000,00	4.920.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	114.929.000,00	200.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	997.620.000,00	943.180.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.500.000,00	67.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	923.620.000,00	869.180.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	181.863.000,00	251.778.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	-	40.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 unit	146.863.000,00	176.778.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	30%	141.003.347,00	153.173.240,00	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						Penerapan PUG di lembaga pemerintah daerah	100%	11.400.000,00	19.573.750,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	11.400.000,00	19.573.750,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	30%	129.603.347,00	133.599.490,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	129.603.347,00	133.599.490,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	124.744.000,00	124.744.000,00	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase Jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti	100%	124.744.000,00	124.744.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	124.744.000,00	124.744.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	70%	-	106.856.724,00	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase layanan Kualitas Keluarga yang aktif	75%	-	76.757.763,00	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Dokumen	-	76.757.763,00	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah unit layanan bagi Keluarga	2 unit	-	30.098.961,00	
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Layanan	-	30.098.961,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	55%	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota						Cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100%	-	-	
	Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 dokumen	-		
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	70%	124.667.000,00	83.213.420,00	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						Tersedianya pemenuhan hak anak di Kabupaten Bangka Barat		-	17.992.110,00	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi konvensi hak anak			17.992.110,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Persentase penguatan kualitas hidup anak	75%	124.667.000,00	65.221.310,00	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	124.667.000,00	65.221.310,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	506.021.000,00	506.021.000,00	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						Persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen	157.815.000,00	157.815.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	157.815.000,00	157.815.000,00	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak	100%	240.800.000,00	240.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	240.800.000,00	240.800.000,00	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	100%	107.406.000,00	107.406.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	107.406.000,00	107.406.000,00	
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								14.409.850.759,00	13.668.870.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				14.409.850.759,00	13.668.870.000,00	
		Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33%						
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,70%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	14.012.263.450,00	13.300.370.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	19.724.500,00	39.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.999.800,00	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.524.900,00	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.524.900,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.099.900,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.575.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	10.907.624.500,00	9.115.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	10.900.000.000,00	9.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.524.900,00	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.049.800,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	3.049.800,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.650.000,00	10.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.650.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	3.049.800,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	3.049.800,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	695.556.850,00	1.327.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.950,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		50.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.075.340,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.438.300,00	85.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.930.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.520.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	38.393.260,00	75.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	551.450.000,00	1.000.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	7.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.278.942.800,00	2.326.370.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98.523.800,00	120.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.379.000,00	35.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.161.540.000,00	2.169.370.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	102.715.000,00	460.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76 Unit	96.040.000,00	250.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	6.675.000,00	210.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						Tingkat konsumsi pangan AKE	2.100 kkal/kap/hr	211.319.190,00	123.500.000,00	
							Tingkat konsumsi pangan AKE	57 gr/kap/hr			
							Tingkat ketersediaan pangan AKE	1.245 kkal/kap/hr			
							Tingkat ketersediaan pangan AKP	59,00 gr/kap/hr			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	90%	33.803.800,00	43.500.000,00	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	13.399.600,00	20.000.000,00	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	0 Laporan	-		
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	20.404.200,00	23.500.000,00	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0 Unit	-		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						Tercapainya target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	90%	177.515.390,00	80.000.000,00	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	12.515.850,00	15.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	164.999.540,00	65.000.000,00	
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						Persentase penanganan daerah rawan pangan	50%	115.273.579,00	160.000.000,00	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						Dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 Dokumen	52.504.100,00	75.000.000,00	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	52.504.100,00	75.000.000,00	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						Dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten	1 Dokumen	62.769.479,00	85.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.787.100,00	40.000.000,00	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	34.982.379,00	45.000.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	70.994.540,00	85.000.000,00	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90%	70.994.540,00	85.000.000,00	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	20.139.000,00	25.000.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.855.540,00	60.000.000,00	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								1.592.079.500,00	325.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				1.592.079.500,00	325.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,70						
				Indeks Bangunan Gedung	Sedang						
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	1.482.586.000,00	175.000.000,00	
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	1.482.586.000,00	175.000.000,00	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	1.482.586.000,00	175.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG						Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	40 persen	-	150.000.000,00	
	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						Terlaksananya kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1 Kegiatan	-	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong			50.000.000,00	
	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong	50 persil	-	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan	-	100.000.000,00	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	12 persen	109.493.500,00	-	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota						Ketersediaan Data Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	50 persil	109.493.500,00	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 persil	109.493.500,00	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	-	-	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								19.700.916.205,00	6.673.933.600,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				19.700.916.205,00	6.673.933.600,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,91						
				Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	41,18%						
				Indeks Resiko Bencana	Tinggi						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	4.860.402.265,00	4.749.532.100,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.110.500,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.164.500,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.150.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.150.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.896.000,00	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.750.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.206.350.000,00	2.612.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ bulan	3.200.000.000,00	2.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.150.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2.600.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.600.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.560.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.560.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.650.000,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	1.650.000,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.050.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.050.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	254.157.975,00	445.892.100,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.814.490,00	8.596.500,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.603.100,00	2.695.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.986.900,00	33.094.600,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	46.961.680,00	44.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.002.500,00	6.006.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	24.999.805,00	44.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.390.000,00	302.500.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.399.500,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.310.023.790,00	1.443.530.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.810.000,00	6.182.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.960.000,00	222.156.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.473.790,00	14.520.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.079.780.000,00	1.200.672.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	67.500.000,00	172.610.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	67.500.000,00	137.610.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				35.000.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	36%	140.258.960,00	180.000.000,00	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun	100%	-	-	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-	-	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	100%	140.258.960,00	180.000.000,00	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	140.258.960,00	180.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	274.363.200,00	684.250.500,00	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Persentase terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	246.288.200,00	636.554.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	48.468.500,00	165.000.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	14.268.500,00	21.554.500,00	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	183.551.200,00	450.000.000,00	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100%	28.075.000,00	47.696.000,00	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	28.075.000,00	47.696.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	33,33%	-	25.000.000,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	100%	-	25.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Orang	-	25.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	13%	-	30.000.000,00	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3						Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha	100%	-	30.000.000,00	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	-	30.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL- UPL)	100%	39.405.000,00	230.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	39.405.000,00	230.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	60.000.000,00	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	39.405.000,00	110.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	60.000.000,00	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	16%	32.943.000,00	46.541.000,00	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	32.943.000,00	46.541.000,00	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Entitas	32.943.000,00	46.541.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						Jumlah sampah yang dikelola	5.157,29 Ton/Tahun	14.353.543.780,00	728.610.000,00	
	Pengelolaan Sampah						Persentase sampah yang dikelola	100,00%	14.353.543.780,00	728.610.000,00	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	0 Dokumen	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	8.985.183.180,00	5.513.000.000,00	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.157,29Ton	5.368.360.600,00	728.610.000,00	
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								6.525.382.002,00	5.468.377.027,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				6.525.382.002,00	5.468.377.027,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,52						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	6.166.132.002,00	4.873.010.070,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.698.100,00	45.650.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.600.000,00	16.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.344.000,00	4.400.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.344.000,00	4.400.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.377.400,00	11.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.032.700,00	9.350.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.106.721.400,00	2.113.750.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.344.000,00	2.750.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.688.700,00	5.500.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.688.700,00	5.500.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.032.700,00	9.350.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.032.700,00	9.350.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.344.000,00	24.750.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	13.750.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.344.000,00	11.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.368.720.122,00	616.472.148,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.489.680,00	14.312.320,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	951.246.620,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.532.800,00	15.943.158,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	17.800.000,00	45.694.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	43.784.952,00	62.436.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.320.000,00	5.500.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	145.968.370,00	169.586.670,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	247.500.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.577.700,00	5.500.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-		
	Rehab Berat Gedung Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-		
	Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Gedung								-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.620.587.450,00	1.889.376.885,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.467.800,00	77.712.800,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.529.650,00	139.015.085,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.517.590.000,00	1.670.449.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.047.028.230,00	173.661.037,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	15.821.850,00	42.310.939,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	19.981.380,00	56.951.598,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	7 unit	3.775.000,00	34.501.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1.007.450.000,00	39.897.000,00	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	79,50%	287.110.000,00	296.220.276,00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	196.360.000,00	189.927.958,00	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1.000 Dokumen	2.800.000,00	20.382.318,00	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	193.560.000,00	169.545.640,00	
	Penataan Pendaftaran Penduduk						Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	90.750.000,00	106.292.318,00	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	25.000 Dokumen	90.750.000,00	106.292.318,00	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	66,01%	34.313.300,00	205.579.110,00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil						Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil	100%	21.163.300,00	115.819.880,00	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5.000 Dokumen	13.738.300,00	37.485.800,00	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	7.425.000,00	78.334.080,00	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	13.150.000,00	62.909.770,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	13.150.000,00	39.250.420,00	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	23.659.350,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								-	26.849.460,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	26.849.460,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						Persentase ketersediaan data kependudukan	46,67%	27.736.700,00	56.811.940,00	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat	100%	6.739.400,00	25.432.440,00	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	2.658.700,00	12.965.480,00	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	2.090.000,00	4.456.320,00	
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.990.700,00	8.010.640,00	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara dengan baik	100%	6.300.900,00	10.510.190,00	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	2.445.700,00	9.285.540,00	
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	3.855.200,00	1.224.650,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100%	14.696.400,00	20.869.310,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	3.110.000,00	6.941.000,00	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	11.586.400,00	13.928.310,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%	10.090.000,00	36.755.631,00	
	Penyusunan Profil Kependudukan						Persentase Penyusunan profil kependudukan	100%	10.090.000,00	36.755.631,00	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.755.700,00	5.346.990,00	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	7.334.300,00	31.408.641,00	
	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								4.159.316.900,00	2.100.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33%				4.159.316.900,00	2.100.000.000,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,52						
	PROGRAM PENATAAN DESA						Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	100%	15.740.000,00	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Penataan Desa						Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa	60 Desa	15.740.000,00	100.000.000,00	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	60 Desa	15.740.000,00	60.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataannya	0 Desa	-	40.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						Persentase kerja sama yang diimplementasi	28,33%	16.270.000,00	160.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa						Jumlah kerjasama yang terbentuk antar desa	7 kerjasama	16.270.000,00	160.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	30.000.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	13 Dokumen	16.270.000,00	50.000.000,00	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	0 Dokumen	-	80.000.000,00	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	100%	3.253.330.000,00	510.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60 desa	3.253.330.000,00	510.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0 Dokumen	-	30.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	15.546.000,00	50.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	0 Dokumen	-	50.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	12.013.500,00	30.000.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				40.000.000,00	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	80.000.000,00	APBD & APBD (PIK)
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	3.082.625.500,00	-	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Laporan	-	20.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa	60 Dokumen	6.002.500,00	20.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	5.845.000,00	20.000.000,00	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	71 Orang	15.405.000,00	50.000.000,00	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	0 Laporan	-	20.000.000,00	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	65.892.500,00	100.000.000,00	APBD & APBD (PIK)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	70%	873.976.900,00	1.330.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50%	873.976.900,00	1.330.000.000,00	
							Lembaga adat desa yang aktif	13 lembaga adat			
							Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	2 alat			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	14.217.500,00	150.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	70.000.000,00	100.000.000,00	APBD & APBD (PIK)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7 Dokumen	287.895.000,00	400.000.000,00	APBD & APBD (PIK)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	-	80.000.000,00	APBD & APBD (PIK)
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	-	100.000.000,00	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	501.864.400,00	500.000.000,00	
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELURGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								3.278.999.734,00	2.288.234.883,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,41 Tahun					3.278.999.734,00	2.288.234.883,00	
			Prevalensi Stunting	8,75%							
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	1 kebijakan	131.985.660,00	142.585.660,00	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang disusun	100%	131.985.660,00	142.585.660,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	3.390.000,00	3.390.000,00	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	35.395.660,00	45.995.660,00	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	93.200.000,00	93.200.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	79,78%	1.806.183.324,00	1.773.068.324,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	529.519.750,00	476.054.750,00	
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 Organisasi	4.375.000,00	4.375.000,00	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal						Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	26.250.000,00	26.250.000,00	
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	103.464.750,00	49.999.750,00	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	98.280.000,00	98.280.000,00	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	255.150.000,00	255.150.000,00	
	Pengendalian Program KKBPK						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						Cakupan PLKB yang berdaya guna	100%	684.391.000,00	715.936.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	13 Laporan	361.831.000,00	393.376.000,00	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	264 Orang	322.560.000,00	322.560.000,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	320.652.574,00	309.457.574,00	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	8 Laporan	90.759.174,00	79.564.174,00	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	200 Orang	125.735.400,00	125.735.400,00	
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 Unit	97.858.000,00	97.858.000,00	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5 Laporan	6.300.000,00	6.300.000,00	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	100%	271.620.000,00	271.620.000,00	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung	271.620.000,00	271.620.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	78,70%	1.340.830.750,00	372.580.899,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	75,00%			
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pemdampingan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	1.340.830.750,00	372.580.899,00	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Unit	173.150.000,00	173.150.000,00	
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	108 Orang	76.311.100,00	30.878.249,00	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	465 Orang	1.084.063.650,00	161.246.650,00	
	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	7.306.000,00	7.306.000,00	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN								1.948.641.100,00	1.410.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				1.948.641.100,00	1.410.000.000,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0,70						
				Indeks Bangunan Gedung	Sedang						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	21,36%	1.924.950.400,00	1.310.000.000,00	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						Terlaksananya penetapan Rencana Induk Jaringan Jalan	82%	-	-	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 dokumen (update)	-		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						Tersedianya Perlengkapan Jalan di Kabupaten	100%	1.161.522.400,00	850.000.000,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					Air Belo, Kec Muntok serta Mislak dan Sinar Manik Kec Jebus, Kab. Babar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	107 unit	934.174.900,00		APBD (PIK) + RESES
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	725 Unit	227.347.500,00	850.000.000,00	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	100 persen	294.884.800,00		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	294.884.800,00		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Persentase jumlah kendaraan yang telah melakukan uji KIR	100%	83.488.700,00	50.000.000,00	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	8 unit	83.488.700,00	50.000.000,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Persentase Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Tahun n	100 persen	120.127.000,00	110.000.000,00	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	60.000.000,00	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000,00		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	20.127.000,00	50.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 persen	264.927.500,00	300.000.000,00	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 Laporan	264.927.500,00	250.000.000,00	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	50.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100 persen	23.690.700,00	100.000.000,00	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Kondisi Baik	100 persen	23.690.700,00	100.000.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	23.690.700,00	100.000.000,00	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								7.487.707.180,00	8.025.072.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				7.487.707.180,00	8.025.072.000,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70						
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100 Persen	4.477.298.800,00	4.274.890.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.260.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.220.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.345.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.345.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.220.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.130.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.606.745.000,00	2.612.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.345.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.700.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.700.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.110.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.110.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.345.000,00	135.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	125.000.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.345.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	584.263.800,00	624.880.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.894.400,00	7.900.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	4.974.400,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.931.000,00	4.980.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	499.989.000,00	500.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.475.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	934.485.000,00	689.710.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.500.000,00	94.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	61.900.000,00	62.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	777.085.000,00	531.210.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	109.980.000,00	162.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	99.980.000,00	100.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000,00	50.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	5.000.000,00	12.800.000,00	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	219.110.000,00	-	
	Pengadaan aset tak berwujud						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	-		
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-		
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	219.110.000,00		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	720	718.404.780,00	1.575.182.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	550 informasi	718.404.780,00	1.575.182.000,00	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	28.099.280,00	57.255.000,00	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	9.864.000,00	36.270.000,00	
	Pelayanan Informasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	147.692.000,00	388.632.000,00	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	216 Orang	82.995.000,00	152.645.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	449.754.500,00	940.380.000,00	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	20%	2.292.003.600,00	2.175.000.000,00	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Jumlah OPD dan Desa/Kelurahan yang memiliki domain dan sub domain yang telah ditetapkan	53%	313.290.000,00	350.000.000,00	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	43.440.000,00	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 Unit	269.850.000,00	300.000.000,00	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah layanan e-government yang dikelola	37 Layanan E-Government	1.978.713.600,00	1.825.000.000,00	
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	45.000.000,00	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	50.894.000,00	65.000.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.822.825.000,00	800.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	55.929.600,00	75.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50.000.000,00	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 unit	29.470.000,00	750.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	19.595.000,00	40.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN								5.557.750.822,00	6.013.954.856,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 - 5,34				5.557.750.822,00	6.013.954.856,00	
				Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	22,50%						
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100 Persen	4.502.052.822,00	4.835.756.856,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.868.600,00	28.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.899.000,00	6.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.249.800,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.249.800,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.970.000,00	14.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.904.998.500,00	2.908.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.249.500,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.249.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.749.000,00	6.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.749.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.249.000,00	2.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.249.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	383.875.442,00	675.660.850,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.997.770,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.419.600,00	7.290.850,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.094.200,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.940.000,00	65.940.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.500.000,00	4.860.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	31.133.872,00	47.570.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	249.790.000,00	505.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.048.712.280,00	1.059.496.006,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000,00	5.000.002,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	119.776.000,00	119.776.002,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	926.436.280,00	934.720.002,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	141.600.000,00	156.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.360.000,00	48.360.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	68.240.000,00	68.240.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.000.000,00	40.000.000,00	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	58,65%	515.670.000,00	549.570.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4%	515.670.000,00	549.570.000,00	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit usaha	487.500.000,00	495.300.000,00	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	5 unit usaha	28.170.000,00	54.270.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	50%	115.059.000,00	115.059.000,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Koperasi yang di berdayakan dan memperoleh Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50%	115.059.000,00	115.059.000,00	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	50 orang	115.059.000,00	115.059.000,00	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19,23%	120.406.000,00	120.406.000,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19,23%	120.406.000,00	120.406.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 orang	120.406.000,00	120.406.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	4%	134.474.000,00	138.074.000,00	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	134.474.000,00	138.074.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 unit usaha	4.600.000,00	8.200.000,00	
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60 unit usaha	129.874.000,00	129.874.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	3,45%	170.089.000,00	255.089.000,00	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,20%	170.089.000,00	255.089.000,00	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	132 unit usaha	170.089.000,00	255.089.000,00	
									685.240.000,00	1.337.021.250,00	
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								685.240.000,00	1.337.021.250,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 - 5,34						
				Laju pertumbuhan investasi	2%						
			Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Tersedianya kantor perizinan terpadu satu pintu (one stop service).	ADA						
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	805 Milyar Rupiah						
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						Persentase peningkatan layanan penanaman modal	8,95%	198.300.000,00	67.701.250,00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase perusahaan baru dan pengembangan yang mendapatkan fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	100%	6.025.000,00	9.325.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	6.025.000,00	9.325.000,00	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						Jumlah Pemetaan potensi dan Peluang Investasi	1 Peta Potensi Daerah	192.275.000,00	58.376.250,00	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	192.275.000,00	58.376.250,00	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	65%	-	1.131.755.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	-	1.131.755.000,00	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	-	1.131.755.000,00	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	81	99.295.000,00	117.565.000,00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah perizinan berusaha beresiko yang dikeluarkan	1.050 izin	99.295.000,00	117.565.000,00	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	54.745.000,00	117.565.000,00	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	44.550.000,00	-	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	17,5%	387.645.000,00	20.000.000,00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1 Laporan	387.645.000,00	20.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	87 Kegiatan Usaha	8.450.000,00	10.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	212 Pelaku Usaha	275.095.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	87 Kegiatan Usaha	104.100.000,00	9.500.000,00	
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								8.323.505.300,00	1.247.365.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	72 TAHUN				8.323.505.300,00	1.247.365.000,00	
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Cukup						
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	35%	746.470.000,00	747.365.000,00	
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						Jumlah keikutsertaan pemuda dalam paskibraka tingkat provinsi	3 orang	746.470.000,00	747.365.000,00	
	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	100 orang	746.470.000,00	747.365.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						Pencab Aktif	27	7.227.035.300,00	500.000.000,00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 event	3.027.035.300,00	500.000.000,00	
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan <i>Multi Event</i> dan <i>Single Event</i> Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3.027.035.300,00	500.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga						Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	4.200.000.000,00		
	Pengembangan organisasi keolahragaan						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	4.200.000.000,00		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	5	350.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						Jumlah gugus depan yang berpartisipasi dalam organisasi kepramukaan	50 gugus depan	350.000.000,00		
	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan						Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	350.000.000,00		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								160.145.000,00	259.110.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				160.145.000,00	259.110.000,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70						
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	65%	160.145.000,00	259.110.000,00	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	65%	160.145.000,00	259.110.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	32.435.000,00	50.000.000,00	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	57.570.000,00	60.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	35 Orang	30.950.000,00	44.110.000,00	
	Pengembangan Infrastruktur					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	8.950.000,00	60.000.000,00	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	30.240.000,00	45.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								39.755.000,00	70.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				39.755.000,00	70.000.000,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70						
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	20%	39.755.000,00	70.000.000,00	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang mempunyai keamanan informasi	6,90%	13.852.500,00	35.000.000,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	13.852.500,00	35.000.000,00	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang mempunyai akun <i>Government Secured Intramail</i>	2 OPD	25.902.500,00	35.000.000,00	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	2 Perangkat Daerah	25.902.500,00	35.000.000,00	
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								6.009.539.615,00	6.494.384.944,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan wisatawan per tahun	300.000				6.009.539.615,00	6.494.384.944,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.485.120.000,00	4.801.345.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.810.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.650.000,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.390.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.390.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.360.000,00	8.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4.020.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.106.950.000,00	3.110.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.390.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	2.780.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.780.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.020.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	4.020.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.640.000,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	1.640.000,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.340.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	1.340.000,00	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	256.140.000,00	530.125.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	20.000.000,00	73.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	33.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.500.000,00	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	40.000.000,00	91.125.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000,00	300.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.640.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	865.420.000,00	866.420.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250.800.000,00	250.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	613.620.000,00	613.620.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	232.800.000,00	235.300.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.250.000,00	39.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	183.550.000,00	183.550.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	13,16%	841.632.140,00	915.705.000,00	
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Fasilitasi acara Adat dan Kesenian	10 Fasilitasi	278.168.640,00	315.350.000,00	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	15 objek	278.168.640,00	315.350.000,00	
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Fasilitasi atas pelaku seni berprestasi	18 ceremoni	76.532.000,00	80.000.000,00	
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	76.532.000,00	80.000.000,00	
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah lembaga adat yang dibina	1 Lembaga Adat	486.931.500,00	520.355.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi	12 unit	70.576.500,00	104.000.000,00	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	64 orang	416.355.000,00	416.355.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	1	139.148.300,00	200.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah fasilitasi kesenian kepada masyarakat pada tahun n	1 Fasilitasi	139.148.300,00	200.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	139.148.300,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	2	197.687.405,00	62.658.105,00	
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang dilakukan	3 kegiatan	197.687.405,00	62.658.105,00	
	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	200 orang	144.041.935,00	200.000.000,00	
	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	53.645.470,00	62.658.105,00	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						Persentase cagar budaya yang dilestarikan	54,17%	312.731.770,00	317.136.839,00	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	11 objek	312.731.770,00	317.136.839,00	
	Pelindungan Cagar Budaya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	11 objek	312.731.770,00	317.136.839,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						Persentase museum dalam kondisi baik	100%	33.220.000,00	197.540.000,00	
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						Jumlah Museum yang dikelola	100%	33.220.000,00	197.540.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	2 Orang	26.220.000,00	190.540.000,00	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	7.000.000,00	7.000.000,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								5.538.062.630,00	5.031.133.454,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah secara profesional, kompeten, efektif dan efisien	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik	82				5.538.062.630,00	5.031.133.454,00	
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,25 Tahun						
				Harapan Lama Sekolah	11,54 Tahun						
				Persentase Sekolah Terakreditasi A	24,32%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.353.771.080,00	4.769.566.996,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	13.299.500,00	20.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	2.699.900,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.299.800,00	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	5.299.800,00	8.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.708.979.400,00	2.714.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	1.379.700,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	5.299.800,00	8.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.299.900,00	4.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	224.269.130,00	361.300.996,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8.030.250,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	1.238.880,00	1.299.996,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	25.000.000,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000,00	225.001.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	670.108.700,00	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	154 unit	625.108.700,00	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	45.000.000,00	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.509.706.000,00	1.491.026.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	500.000,00	500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	249.996.000,00	249.996.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.259.210.000,00	1.240.530.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	227.408.350,00	183.240.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.250.000,00	71.070.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	102.170.000,00	102.170.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	10.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	79.988.350,00	79.988.350,00	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	38,89%	180.181.550,00	255.830.458,00	
							Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	11,54%			
							Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	10,43%			
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	42.530.090,00	71.200.000,00	
							Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi minimal B	21			
							Jumlah perpustakaan Desa yang terakreditasi minimal B	6			
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	550 eksemplar	35.494.090,00	60.000.000,00	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16 dokumen	7.036.000,00	11.200.000,00	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan sekolah	2,3	137.651.460,00	184.630.458,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan promosi budaya baca	1000			
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	4 Lokus	95.711.460,00	123.530.458,00	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	-	15.150.000,00	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	28.350.000,00	28.350.000,00	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	13.590.000,00	17.600.000,00	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						Jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustakaan	-	4.110.000,00	5.736.000,00	
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya naskah kuno yang dapat dijadikan referensi dan daya tarik wisata pendidikan di perpustakaan daerah	-	4.110.000,00	5.736.000,00	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18 orang	4.110.000,00	5.736.000,00	
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								58.429.530,00	100.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB				58.429.530,00	100.000.000,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70						
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	30%	11.584.925,00	20.000.000,00	
							Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	5,88%			
							Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%			
							Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	100%			
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya kualitas tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	55%	11.584.925,00	20.000.000,00	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	3 laporan	11.584.925,00	20.000.000,00	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	1	46.844.605,00	80.000.000,00	
							Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	1 tema			
							Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	4,76%			
	Pemusnahan Arsip Dilindungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun						Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui penyusunan JRA	15%	23.529.850,00	40.000.000,00	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 arsip	11.764.925,00	20.000.000,00	
	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 berkas	11.764.925,00	20.000.000,00	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						Tersedianya Daftar Pencarian Arsip (DPA) arsip statis/sejarah peembentukan Kabupaten Bangka Barat	1	17.239.865,00	30.000.000,00	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 arsip	11.164.925,00	20.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5 arsip	6.074.940,00	10.000.000,00	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						Meningkatnya kualitas penilaian dan penetapan arsip statis daerah yang dinyatakan hilang yang sesuai dengan NSPK	1 tema	6.074.890,00	10.000.000,00	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 arsip	6.074.890,00	10.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								8.525.937.859,00	11.129.732.705,00	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN								3.112.813.300,00	5.466.343.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 - 5,34				3.112.813.300,00	5.466.343.000,00	
			Terwujudnya kesetaraan (pengurangan ketimpangan antardaerah), pembangunan yang bersifat inklusif (Pro-poor dan Pro-job), merata; dan profitable (menguntungkan)	Pembangunan desa yang produktif dan berkelanjutan (desa mandiri)	3,33%						
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.899.048.500,00	3.145.345.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14.449.900,00	24.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.550.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	6.799.900,00	12.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	5.100.000,00	8.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.706.225.000,00	1.710.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.125.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2.550.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.550.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	244.542.800,00	424.980.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.502.800,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	39.980.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	35.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	2.500.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	168.540.000,00	300.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	753.041.500,00	760.455.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	55.940.000,00	55.940.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	111.400.000,00	111.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	585.701.500,00	593.115.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	180.789.300,00	225.910.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	165.910.000,00	165.910.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	50.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	4.963.500,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	4.915.800,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						Produksi Perikanan Tangkap	33.422 ton/tahun	14.749.900,00	1.302.773.000,00	
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	20%	14.749.900,00	1.102.773.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 dokumen	14.749.900,00	14.750.000,00	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Alat Bantu Penangkapan Ikan, Mesin , Coolbox dll)					Desa Ibul				694.487.000,00	APBD (PIK)
						Desa Kapit					
						Desa Telak					
						Desa Dendang					
						Desa Tuik					
						Desa Pangkalberas					
						Desa Beruas					
						Desa Mancung					
						Desa Penyampak					
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Kapal dan Alat Penangkap Ikan)					Desa Rambat				393.536.000,00	APBD (PIK)
						Desa Telak					
						Desa Dendang					
						Desa Kayu Arang					
						Desa Kayu Arang					
						Desa Dendang					
					Desa Penyampak						
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	0	-	100.000.000,00	
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	45.000.000,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	0 kelompok	-	50.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0 unit usaha	-	50.000.000,00	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0%	-	100.000.000,00	
	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	dokumen	-	100.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						Produksi Perikanan Budidaya	182,84 ton/tahun	45.080.000,00	672.000.000,00	
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	100%	-	260.000.000,00	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	60.000.000,00	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 kelompok	-	200.000.000,00	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	20%	45.080.000,00	412.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 dokumen	-	-	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 unit	45.080.000,00	300.000.000,00	APBD
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		100.000.000,00	APBD
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	dokumen		12.000.000,00	APBD
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	50%	90.730.000,00	240.000.000,00	
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum	100%	90.730.000,00	240.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			-	40.000.000,00	
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	90.730.000,00	200.000.000,00	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	15%	63.204.900,00	106.225.000,00	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	20%	63.204.900,00	63.205.000,00	
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 dokumen	63.204.900,00	63.205.000,00	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	10%	-	43.020.000,00	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 unit usaha	-	43.020.000,00	APBD
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								2.432.332.284,00	2.403.859.575,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan wisatawan per tahun	300.000				2.432.332.284,00	2.403.859.575,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						Peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	6 DTW	1.396.085.534,00	1.237.250.000,00	
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						Potensi Daya Tarik wisata yang dikembangkan	10 DTW	71.364.875,00	82.290.000,00	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	10 lokasi	64.804.925,00	72.290.000,00	
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota						Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.559.950,00	10.000.000,00	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah Destinasi yang dikelola	3 Destinasi	1.318.160.709,00	1.144.960.000,00	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	195 unit	435.156.499,00	250.000.000,00	
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 lokasi	883.004.210,00	894.960.000,00	
	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota						Pengelolaan data pelaku usaha pariwisata daerah	21,43%	6.559.950,00	10.000.000,00	
	Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 laporan	6.559.950,00	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						Peningkatan kunjungan wisatawan (DTW Unggulan)	50.000 orang	357.246.850,00	487.609.675,00	
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah paket wisata yang dipasarkan	20 Paket	357.246.850,00	487.609.675,00	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	59.143.800,00	107.949.800,00	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 laporan	283.862.945,00	350.684.925,00	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	7.725.130,00	18.974.950,00	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	6.514.975,00	10.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	100%	17.664.900,00	17.664.900,00	
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota								-	-	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	unit	-	-	
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						Jumlah pengembangan ekonomi kreatif	20 Dokumen	17.664.900,00	17.664.900,00	
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	20 Dokumen	17.664.900,00	17.664.900,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100%	661.335.000,00	661.335.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	200 orang	661.335.000,00	661.335.000,00	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	120 orang	396.801.000,00	396.801.000,00	
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	0 laporan	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 orang	264.534.000,00	264.534.000,00	
									1.721.559.135,00	1.722.430.000,00	
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN								1.721.559.135,00	1.722.430.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 - 5,34				1.721.559.135,00	1.722.430.000,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	5%	265.085.200,00	595.000.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						Jumlah lokasi saptas pertanian yang berkembang	6 Kecamatan	-	250.000.000,00	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	-		
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan	-	250.000.000,00	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100%	161.468.750,00	195.000.000,00	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	81.440.000,00	100.000.000,00	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					Kab. Bangka Barat, Simpang Teritip, Pelangas	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	14.598.300,00	20.000.000,00	
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	65.430.450,00	75.000.000,00	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						Pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1 Ha	103.616.450,00	150.000.000,00	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ekor	-	100.000.000,00	APBD & APBD (PIK)
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain					Kab. Bangka Barat, Kelapa, Kelapa	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,5 Ton	103.616.450,00	50.000.000,00	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	2%	853.832.620,00	365.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengembangan Prasarana Pertanian						Optimalisasi prasarana Pertanian	100%	299.455.820,00	350.000.000,00	
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	256.733.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan	42.722.820,00	100.000.000,00	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0 dokumen	-	250.000.000,00	
	Pembangunan Prasarana Pertanian						Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	3 unit	551.200.000,00	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					Kab. Bangka Barat	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	551.200.000,00		APBD (PIK) + Reses
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah Dokumen pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	1 Dokumen	3.176.800,00	15.000.000,00	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	3.176.800,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	100%	264.622.515,00	212.430.000,00	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen pemetaan penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah Kabupaten Bangka Barat	1 Dokumen	189.551.015,00	160.000.000,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	150.699.455,00	90.000.000,00	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	38.851.560,00	70.000.000,00	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	52.430.000,00	52.430.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	52.430.000,00	52.430.000,00	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Medik Veteriner	100%	22.641.500,00		
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan						Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	22.641.500,00		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	20%	215.508.400,00	300.000.000,00	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100%	215.508.400,00	300.000.000,00	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	225 Ha	215.508.400,00	300.000.000,00	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						Persentase pengendalian izin usaha pertanian	100%	18.326.600,00		
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	100%	18.326.600,00		
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	18.326.600,00		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	100%	104.183.800,00	250.000.000,00	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						Persentase penyelenggaraan penyuluhan pertanian	100%	104.183.800,00	250.000.000,00	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 unit	94.634.800,00	180.000.000,00	
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 unit	9.549.000,00	70.000.000,00	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								447.344.080,00	670.560.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Peningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang mengedepankan prinsip legal, taat asas, dan keterbukaan	Kesesuaian dengan tata ruang	100%				447.344.080,00	670.560.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	0	447.344.080,00	670.560.000,00	
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100%	447.344.080,00	670.560.000,00	
	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bibit yang tersedia untuk penanaman di Lahan Rehabilitasi TAHURA (tanaman kehutanan dan MPTS)	4 Ha	-	100.000.000,00	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	12 Operasi	254.790.250,00	80.000.000,00	
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha		200.000.000,00	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	5 Desa	-	25.000.000,00	
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	192.553.830,00	265.560.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN								527.148.800,00	427.983.800,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pergeseran struktur ekonomi ke arah perdagangan dan jasa	22,50%				527.148.800,00	427.983.800,00	
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	33,33%	227.800.000,00	11.705.000,00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 unit	227.800.000,00	-	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	227.800.000,00		
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						Akses Distribusi perdagangan yang tertib dan Kondusif	0 Kegiatan	-	11.705.000,00	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0 dokumen	-	11.705.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3,90%	67.420.000,00	100.675.000,00	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 kali	55.250.000,00	82.675.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	17.725.000,00	18.000.000,00	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0 laporan	-	15.675.000,00	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	37.525.000,00	49.000.000,00	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	12.170.000,00	18.000.000,00	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	12.170.000,00	18.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	20%	136.125.000,00	185.300.000,00	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	136.125.000,00	185.300.000,00	
	Pameran Dagang Nasional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	85.550.000,00	120.050.000,00	
	Pameran Dagang Lokal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	50.575.000,00	65.250.000,00	
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	100 Persen	95.803.800,00	130.303.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100 Persen	95.803.800,00	130.303.800,00	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	510 unit	47.748.800,00	68.543.800,00	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	50 orang	48.055.000,00	61.760.000,00	
									284.740.260,00	438.556.330,00	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN								284.740.260,00	438.556.330,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya perekonomian yang menitikberatkan pada growth, kompetitif (berdaya saing), dan komparatif (keunggulan daerah)	Pertumbuhan PDRB	3,18 - 5,34						
		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	5,50%						
				Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	5,70%						
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,38%						
				Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27,03%						
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						Jumlah Sentra IKM	1 unit	223.775.260,00	320.506.330,00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen	223.775.260,00	320.506.330,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	71.475.260,00	86.451.330,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	55.260.000,00	84.180.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industr dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	97.040.000,00	149.875.000,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	100%	39.665.000,00	77.450.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Dokumen	39.665.000,00	77.450.000,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100 Dokumen	22.740.000,00	46.450.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	16.925.000,00	31.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50%	21.300.000,00	40.600.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6 kali	21.300.000,00	40.600.000,00	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	21.300.000,00	40.600.000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								84.935.275.838,00	93.948.827.262,00	
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70						
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	SEKRETARIAT DAERAH								36.709.924.995,00	39.014.029.591,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	29.095.009.772,00	29.757.330.639,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.071.433,00	28.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.399.850,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.340.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.336.583,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5.000.000,00	8.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4.995.000,00	8.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	9.006.163.000,00	9.010.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.270.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	2.446.500,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.446.500,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.825.000,00	6.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.825.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	16.200.000,00	19.300.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	9.300.000,00	9.300.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	6.900.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.562.283.000,00	4.103.736.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	552.250.000,00	547.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	178.470.000,00	132.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.268.350.000,00	1.344.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	141.270.000,00	175.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 dokumen	107.736.000,00	107.736.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	191.800.000,00	225.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.051.132.000,00	1.500.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.275.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	6.118.927.500,00	6.005.960.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	900.000.000,00	900.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	322.000.000,00	322.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4.894.927.500,00	4.781.960.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	427.826.400,00	465.826.400,00	
	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	8.750.000,00	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	427.826.400,00	455.826.400,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.818.466.639,00	7.055.026.639,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	445.150.000,00	518.350.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	729.490.000,00	892.850.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	5.519.229.639,00	5.519.229.639,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	198 unit	124.597.000,00	124.597.000,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Terpenuhinya administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	809.660.000,00	809.660.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 paket	77.660.000,00	77.660.000,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	132.000.000,00	132.000.000,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	447.610.000,00	244.510.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	246.520.000,00	89.670.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket	126.920.000,00	92.170.000,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	7 Paket	74.170.000,00	62.670.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penataan Organisasi						Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan	3 kebijakan	355.926.800,00	614.588.000,00	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	147.347.000,00	267.145.000,00	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	76.937.000,00	137.197.000,00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	55.961.000,00	91.312.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	37.980.750,00	59.862.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	37.701.050,00	59.072.000,00	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan	100%	1.511.050.000,00	1.860.550.000,00	
	Fasilitasi Keprotokolan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	95.050.000,00	95.550.000,00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.384.500.000,00	1.730.000.000,00	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	31.500.000,00	35.000.000,00	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	6.930.871.550,00	8.586.226.952,00	
							Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%			
							Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	100%			
	Administrasi Tata Pemerintahan						Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan	6 kebijakan	197.761.650,00	314.893.952,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	98.601.650,00	167.585.920,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 dokumen	53.775.000,00	75.083.032,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	45.385.000,00	72.225.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan	3 kebijakan	6.249.566.900,00	7.548.952.500,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 dokumen	2.950.707.500,00	2.950.707.500,00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	3.290.067.400,00	4.584.340.000,00	APBD & APBD (PIK), Reses
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	8.792.000,00	13.905.000,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum	3 kebijakan	454.023.000,00	638.150.500,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	85 dokumen	109.683.000,00	165.795.500,00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 kasus	78.920.000,00	106.880.000,00	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 dokumen	265.420.000,00	365.475.000,00	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah						Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan	1 kebijakan	29.520.000,00	84.230.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 dokumen	29.520.000,00	43.400.000,00	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0 Laporan	-	40.830.000,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3	684.043.673,00	670.472.000,00	
							Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%			
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	297.701.500,00	196.937.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	211.017.000,00	64.307.000,00	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	53.006.000,00	80.615.000,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	33.678.500,00	52.015.000,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	80.797.374,00	122.095.000,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	80.797.374,00	122.095.000,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	3 kebijakan	305.544.799,00	351.440.000,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	154.773.113,00	171.985.000,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 dokumen	54.746.862,00	83.430.000,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	96.024.824,00	96.025.000,00	
	SEKRETARIAT DPRD								48.225.350.843,00	54.934.797.671,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
		Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70						
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	27.443.237.985,00	28.361.382.431,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.409.800,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.445.700,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.300.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.300.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.445.700,00	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.918.400,00	6.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.336.775.000,00	3.010.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	3.330.000.000,00	3.000.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.275.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	2.750.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.750.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.716.400,00	6.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.716.400,00	6.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	6.457.820,00	10.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.457.820,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.887.292.535,00	1.728.045.975,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	357.060.000,00	350.900.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	219.185.720,00	45.502.420,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	363.590.050,00	412.823.990,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	407.502.620,00	377.893.120,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	67.200.000,00	67.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	221.226.445,00	221.226.445,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.527.700,00	2.500.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.494.887.601,00	2.734.860.000,00	
	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Unit	823.920.001,00	658.920.001,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	650.788.000,00	622.340.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	19 Unit	758.090.600,00	680.020.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	1.262.089.000,00	773.579.999,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.178.802.000,00	2.177.902.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	373.364.000,00	368.364.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.804.438.000,00	1.807.538.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	531.047.999,00	2.433.637.999,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	-	171.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	59.020.000,00	202.980.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	206.529.999,00	1.785.159.999,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	244 Unit	265.498.000,00	274.498.000,00	
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	14.685.654.737,00	14.780.506.754,00	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/bulan	13.968.384.254,00	13.968.384.254,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 paket	336.532.485,00	337.563.500,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	380.737.998,00	474.559.000,00	
	Layanan Administrasi DPRD						Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100%	1.301.194.093,00	1.454.429.703,00	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan	545.194.110,00	698.429.720,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	755.999.983,00	755.999.983,00	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						Terintegrasinya Program - Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	20.782.112.858,00	26.573.415.240,00	
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100%	717.769.432,00	586.257.870,00	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen	660.916.872,00	509.418.950,00	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 Dokumen	56.852.560,00	76.838.920,00	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	140.632.860,00	188.627.320,00	
	Pembahasan APBD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	140.632.860,00	188.627.320,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Peningkatan Kapasitas DPRD						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	3.919.840.500,00	4.683.071.260,00	
	Pendalaman Tugas DPRD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	2.777.234.500,00	3.507.646.000,00		
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	441.000.000,00	441.000.000,00		
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 orang	321.250.000,00	321.270.000,00		
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	270.000.000,00	270.000.000,00		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	110.356.000,00	143.155.260,00		
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	648.155.000,00	648.155.000,00		
	Pelaksanaan Reses				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	648.155.000,00	648.155.000,00		
	Fasilitasi Tugas DPRD					Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	15.355.715.066,00	20.467.303.790,00		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	75 Dokumen	15.355.715.066,00	20.467.303.790,00		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								141.559.934.874,00	159.331.678.765,00	
	PERENCANAAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				6.627.623.272,00	10.220.750.000,00	
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH								6.627.623.272,00	10.220.750.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.207.240.500,00	6.168.310.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	12.875.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.500.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	875.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	875.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	3.500.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.125.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.603.875.000,00	3.612.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	875.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.500.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.500.000,00	5.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.625.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	2.625.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	4.489.000,00	122.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	4.489.000,00	10.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				50.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	344.346.500,00	954.187.800,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	11.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.750.000,00	30.690.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.997.500,00	44.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	44.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.474.000,00	5.497.800,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	44.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	770.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.125.000,00	5.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	22.000.000,00	-	
	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	22.000.000,00		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.016.910.000,00	1.064.439.200,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.000.000,00	112.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	58.500.000,00	71.896.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	855.410.000,00	878.143.200,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	200.120.000,00	364.683.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.250.000,00	51.656.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	73.870.000,00	81.257.000,00	
	Pemeliharaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	25.000.000,00		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	55.000.000,00	220.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5.000.000,00	11.770.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	100 Persen	425.229.372,00	1.023.000.000,00	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan	100 Persen	246.910.850,00	500.500.000,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	13.482.250,00	27.500.000,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	58.523.600,00	143.000.000,00	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	24 Usulan	21.495.000,00		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	153.410.000,00	330.000.000,00	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	90.282.522,00	220.000.000,00	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	40 Masukan	44.018.630,00	110.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 Orang	46.263.892,00	110.000.000,00	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100%	88.036.000,00	302.500.000,00	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	39.325.000,00	165.000.000,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	48.711.000,00	137.500.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	995.153.400,00	3.029.440.000,00	
							Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%			
							Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan renstra perangkat daerah	100%	449.102.800,00	1.000.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	77.280.000,00	100.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	33.529.900,00	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	36.029.000,00	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	82.280.000,00	200.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	79.770.000,00	100.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	38.519.900,00	100.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	45.714.000,00	100.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	55.980.000,00	200.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						Persentase keselarasan subkegiatan pada renja bidang perekonomian dan SDA dengan Renstra Perangkat Daerah	100%	279.686.400,00	979.440.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	21.270.800,00	83.685.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 Perangkat Daerah	20.303.300,00	81.480.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 Perangkat Daerah	19.345.800,00	79.275.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	88.120.800,00	210.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	21.248.800,00	105.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	20.354.800,00	105.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	19.419.800,00	105.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	69.622.300,00	210.000.000,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan renstra perangkat daerah	100%	266.364.200,00	1.050.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	36.242.300,00	105.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	20.303.300,00	105.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	19.019.800,00	105.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	88.121.100,00	210.000.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	31.665.900,00	105.000.000,00	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 Perangkat Daerah	20.326.100,00	105.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 Perangkat Daerah	19.019.800,00	105.000.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	31.665.900,00	210.000.000,00	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				651.520.355,00	779.341.693,00	
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	90%	651.520.355,00	779.341.693,00	
							Jumlah Inovasi Daerah	2 inovasi			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 Dokumen	181.943.650,00	159.355.790,00	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4 Laporan	181.943.650,00	159.355.790,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Penelitian	61.313.405,00	73.324.623,00	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	61.313.405,00	73.324.623,00	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Penelitian	319.411.000,00	373.345.390,00	
	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	167.968.800,00	192.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	151.442.200,00	180.845.390,00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						Jumlah inovasi daerah	2 inovasi	88.852.300,00	173.315.890,00	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	88.852.300,00	103.864.090,00	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		69.451.800,00	
	KEUANGAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				126.793.142.782,00	139.582.243.911,00	
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								117.796.189.982,00	128.854.684.311,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100 Persen	5.135.841.514,00	5.474.678.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	13.529.600,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.099.800,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.260.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.260.000,00	4.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.099.800,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.810.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.505.700.000,00	3.512.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.260.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	1.900.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.540.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.146.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.146.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.433.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	5.433.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	526.994.914,00	623.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	175.000.000,00		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.960.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	29.996.054,00	75.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.999.100,00	40.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.640.000,00	4.800.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	34.992.760,00	60.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.985.000,00	425.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.422.000,00	5.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	-	472.500.000,00	
	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	-	472.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.021.708.000,00	1.045.988.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	115.300.000,00	110.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.588.000,00	14.588.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	883.820.000,00	919.400.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	59.330.000,00	219.890.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	2.500.000,00	39.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	41.830.000,00	150.140.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	15.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	10.000.000,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	100 Persen	111.941.797.318,00	122.677.726.011,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						Persentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu	100%	1.109.704.750,00	1.399.550.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	146.555.000,00	153.300.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	133.180.000,00	157.500.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	28.600.000,00	50.000.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	25.880.000,00	50.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	39.860.000,00	50.750.000,00	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	42.952.250,00	57.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	270.532.000,00	300.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	287.194.200,00	300.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	40.640.000,00	164.250.000,00	
	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 Orang	94.311.300,00	116.250.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						Persentase layanan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100%	300.131.768,00	524.960.000,00	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	6.318.000,00	43.300.000,00	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	522.500,00	28.856.000,00	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	8.627.230,00	46.030.000,00	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	12.180.000,00	26.879.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	103.542.600,00	108.376.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	8.290.000,00	43.440.000,00	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	160.221.438,00	199.215.000,00	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85 Orang	430.000,00	28.864.000,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	242.669.600,00	378.110.000,00	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	5.588.800,00	46.556.000,00	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	5.816.800,00	53.395.000,00	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	58.029.000,00	97.005.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	71.135.000,00	79.050.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	102.100.000,00	102.104.000,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	100%	110.289.291.200,00	120.375.106.011,00	
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 Laporan	132.341.000,00	300.000.000,00	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	105.354.403.600,00	116.886.465.001,00	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	765.075.000,00	1.000.000.000,00	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.037.471.600,00	2.188.641.010,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundangundangan	100%	718.551.150,00	702.280.300,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah						Persentase Laporan BMD yang disusun dengan tepat waktu	100%	718.551.150,00	702.280.300,00	
	Penyusunan Standar Harga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	37.075.000,00	54.865.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	32.590.300,00	47.329.870,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	111.503.000,00	183.553.700,00	
	Pengamanan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	285.857.650,00	73.353.020,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penilaian Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	78.252.000,00	75.440.580,00	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	171.529.000,00	235.591.370,00	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	1.744.200,00	5.267.160,00	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	-	26.879.600,00	
	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	8,87%				8.996.952.800,00	10.727.559.600,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100 Persen	7.642.336.000,00	8.191.750.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.710.000,00	10.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.720.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.600.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	990.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.800.000,00	2.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.600.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.705.150.000,00	5.706.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	990.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.080.000,00	2.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.080.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.600.000,00	2.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.600.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	-	12.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	354.495.000,00	721.920.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000,00	20.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.995.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	70.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	52.600.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.500.000,00	4.320.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40.000.000,00	145.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	425.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.453.627.000,00	1.489.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	324.247.000,00	356.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.128.380.000,00	1.130.600.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	107.754.000,00	249.830.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	-	47.490.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	82.754.000,00	141.340.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	20.000.000,00	53.500.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						Persentase peningkatan pajak daerah	3,96%	1.354.616.800,00	2.535.809.600,00	
							Persentase peningkatan retribusi daerah	3,21%			
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	17 Laporan	1.354.616.800,00	2.535.809.600,00	
							Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	11 Laporan			
							Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah, Penyelesaian Pajak daerah dan Pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	3 Laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	472.497.000,00	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	171.070.000,00	168.000.000,00	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	42.867.300,00	95.600.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 unit	-	10.000.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	129.682.500,00	181.380.000,00	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	132.936.900,00	274.558.000,00	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4.250 Obyek Pajak	27.533.500,00	181.380.000,00	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	17.670.000,00	173.697.000,00	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12 Layanan	5.308.000,00	10.000.000,00	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen	164.027.800,00	378.120.100,00	
	Penagihan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	253.845.000,00	304.837.000,00	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	36.396.900,00	117.968.500,00	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	53.141.900,00	103.000.000,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	320.137.000,00	64.772.000,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH								6.400.419.865,00	7.395.980.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	KEPEGAWAIAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				6.400.419.865,00	7.395.980.500,00	
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100 Persen	5.034.355.347,00	5.742.090.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.775.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.500.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.400.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.500.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.975.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.407.000.000,00	3.410.300.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.400.000,00	2.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.800.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.800.000,00	2.800.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.200.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.200.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	36.401.500,00	71.500.000,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	31 Unit	7.499.000,00	15.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	6.935.000,00	10.000.000,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	12.590.000,00	20.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	9.377.500,00	14.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	374.237.000,00	780.600.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.950.000,00	35.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.640.000,00	90.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	46.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.500.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	42.500.000,00	86.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.997.000,00	462.500.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.650.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1.040.001.800,00	1.067.190.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.400.000,00	300.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	33.236.800,00	52.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	705.365.000,00	712.790.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	154.740.047,00	362.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	39.250.000,00	43.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	75.500.000,00	75.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	39.990.047,00	150.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	0 unit	-	94.000.000,00	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	95,02%	1.366.064.518,00	1.653.890.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	38 Orang			
							Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	75 Orang			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	20%	442.341.668,00	526.835.000,00	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.210.000,00	40.000.000,00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	156.766.150,00	234.069.000,00	
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	6.584.500,00	10.728.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	18.205.000,00	25.916.000,00	
	Evaluasi Pemberhentian ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	13.021.000,00	19.122.000,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	79.752.518,00	12.000.000,00	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	17.750.000,00	30.000.000,00	
	Pengelolaan Data Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	139.052.500,00	155.000.000,00	
	Mutasi dan Promosi ASN						Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100%	371.640.000,00	381.432.500,00	
	Pengelolaan Mutasi ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	12.925.000,00	20.840.000,00	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	17.965.900,00	32.696.000,00	
	Pengelolaan Promosi ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	340.749.100,00	327.896.500,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengembangan Kompetensi ASN						Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100%	382.646.150,00	442.570.000,00	
	Pengelolaan Assessment Center					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	178.232.500,00	185.100.000,00	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	36 orang	134.000.000,00	140.984.000,00	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	37.433.400,00	48.483.000,00	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang	13.855.250,00	24.659.000,00	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	14 Orang	13.660.000,00	21.600.000,00	
	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	5.465.000,00	21.744.000,00	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84%	169.436.700,00	303.053.000,00	
							Persentase Pelayanan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	82%			
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	64.204.700,00	90.000.000,00	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	10.680.000,00	10.500.000,00	
	Pembinaan Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	26.517.500,00	42.500.000,00	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	31.860.000,00	90.566.000,00	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	31.129.500,00	47.731.000,00	
	Evaluasi Disiplin ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	5.045.000,00	21.756.000,00	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				1.087.228.600,00	1.353.362.661,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH								1.087.228.600,00	1.353.362.661,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	68,11%	1.087.228.600,00	1.353.362.661,00	
							Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	420 Orang			
							Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	1.592 Orang			
	Pengembangan Kompetensi Teknis						Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	154.295.100,00	229.479.000,00	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	34.801.500,00	51.715.000,00	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 orang	116.818.600,00	166.950.000,00	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	2.675.000,00	10.814.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	932.933.500,00	1.123.883.661,00	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	7.775.500,00	13.700.000,00	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	919.586.500,00	1.070.046.661,00	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	5.571.500,00	40.137.000,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70				6.409.450.450,00	8.277.126.000,00	
				Opini BPK	WTP						
				Maturitas SPIP	Berkembang						
				Indeks SPBE	Cukup						
				Indeks Profesionalitas ASN	64,60						
	INSPEKTORAT DAERAH								6.409.450.450,00	8.277.126.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100 Persen	4.789.998.550,00	5.252.726.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14.731.000,00	41.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.362.500,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.375.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.255.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.362.500,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.376.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.706.025.000,00	3.712.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.375.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.325.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.325.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.379.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.379.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	-	12.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	373.453.550,00	672.506.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.789.000,00	6.789.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.716.000,00	5.432.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.994.500,00	50.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	39.999.950,00	60.485.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.400.000,00	4.800.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	49.999.000,00	115.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.987.000,00	425.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.568.100,00	5.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	-	300.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	300.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	541.570.000,00	554.420.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67.200.000,00	67.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.450.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	470.920.000,00	480.220.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	150.840.000,00	250.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	38.250.000,00	47.490.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	107.590.000,00	190.510.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000,00	7.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						indeks manajemen resiko	1,60 indeks	1.306.579.900,00	2.565.350.000,00	
							Indeks efektivitas pengendalian korupsi	1 indeks			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang sesuai rekomendasi	100%	1.238.705.000,00	2.565.350.000,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 Laporan	111.080.000,00	223.400.000,00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	31 Laporan	179.735.000,00	367.260.000,00	
	Reviu Laporan Kinerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	43 Laporan	278.765.000,00	578.150.000,00	
	Reviu Laporan Keuangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	56.200.000,00	113.750.000,00	
	Pengawasan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30 Laporan	251.920.000,00	555.890.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	361.005.000,00	726.900.000,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	100%	67.874.900,00	139.874.000,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1.249.900,00	1.874.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5 Laporan	66.625.000,00	138.000.000,00	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						Level Kapabilitas APIP	2+ level	312.872.000,00	459.050.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi						Level IACM	3 level	312.872.000,00	459.050.000,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	11.065.000,00	23.450.000,00	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	14.295.000,00	29.900.000,00	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	268.002.000,00	375.800.000,00	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	19.510.000,00	29.900.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN	Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	70,00				32.774.677.745,00	28.600.603.999,00	
	KECAMATAN MUNTOK								11.862.892.649,00	7.886.957.999,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.795.832.999,00	6.820.387.999,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	18.695.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.800.000,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	6.000.000,00	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.895.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.307.400.000,00	4.310.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.500.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.950.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.950.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.000.000,00	6.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	4.000.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.500.000,00	2.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.500.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	359.313.000,00	360.063.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.260.000,00	5.260.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	7.102.000,00	7.102.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	200.145.000,00	200.145.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22.377.000,00	22.377.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4.792.000,00	4.792.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	37.487.000,00	37.487.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.750.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2.032.355.000,00	2.033.755.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	275.000,00	275.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	88.800.000,00	88.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	12.900.000,00	12.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.930.380.000,00	1.931.780.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	72.569.999,00	82.569.999,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	30.300.000,00	30.300.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	27.269.999,00	27.269.999,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15.000.000,00	15.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 unit	-	10.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	36.462.000,00	53.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	150 orang	20.087.000,00	27.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	17.537.000,00	23.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.550.000,00	4.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	16.375.000,00	26.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	6.875.000,00	11.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	9.500.000,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	94.660.000,00	76.750.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	90 orang	15.455.000,00	22.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	15.455.000,00	22.000.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	54.825.000,00	54.750.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga/Kemasyarakatan	44.025.000,00	42.750.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	10.800.000,00	12.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Jumlah lembaga kemasyarakatan	3 lembaga	24.380.000,00	36.000.000,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.380.000,00	36.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	158.740.000,00	28.520.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	140 orang	158.740.000,00	28.520.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	150.000.000,00	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	8.740.000,00	13.520.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan tugas umum pemerintah yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	42.935.000,00	100.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 urusan	42.935.000,00	100.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	31.055.000,00	75.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.880.000,00	25.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	16.857.500,00	28.950.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	57 orang	16.857.500,00	28.950.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	4.040.000,00	6.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	3.785.000,00	6.400.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	905.000,00	1.800.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	8.127.500,00	14.750.000,00	
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Tanjung								1.013.603.150,00	163.710.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	163.710.000,00	163.710.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.910.000,00	127.910.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.600.000,00	2.600.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.350.000,00	4.350.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000,00	22.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.260.000,00	13.260.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	34.500.000,00	34.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	30.800.000,00	30.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	5.600.000,00	5.600.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	849.893.150,00		-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan kelurahan yang terakomodir pada saat musrenbang kecamatan	100%	849.893.150,00		-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	54.140.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	795.753.150,00		
									1.361.565.260,00	162.010.000,00	
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Sungai Baru										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	162.010.000,00	162.010.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.910.000,00	127.910.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.600.000,00	2.600.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.350.000,00	4.350.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000,00	22.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.260.000,00	13.260.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	34.500.000,00	34.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	29.100.000,00	29.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	1.199.555.260,00	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan kelurahan yang terakomodir pada saat musrenbang kecamatan	100%	1.199.555.260,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	491.960.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	707.595.260,00		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Sungai Daeng								903.569.540,00	153.610.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	153.610.000,00	153.610.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.910.000,00	127.910.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.600.000,00	2.600.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.350.000,00	4.350.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000,00	22.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.260.000,00	13.260.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	34.500.000,00	34.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	20.700.000,00	20.700.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	2.700.000,00	2.700.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	749.959.540,00	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan kelurahan yang terakomodir pada saat musrenbang kecamatan	100%	749.959.540,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	10.797.500,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	739.162.040,00		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Keranggan								756.362.200,00	153.010.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	150.010.000,00	153.010.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.910.000,00	127.910.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.600.000,00	2.600.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.350.000,00	4.350.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000,00	22.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.260.000,00	13.260.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	34.500.000,00	34.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	22.100.000,00	22.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	500.000,00	500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	-	3.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	3.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	606.352.200,00	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	606.352.200,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	25.700.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	580.652.200,00		
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Menjelang								682.305.000,00	147.010.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	144.010.000,00	147.010.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	127.910.000,00	127.910.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2.600.000,00	2.600.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.350.000,00	4.350.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000,00	22.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	13.260.000,00	13.260.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	34.500.000,00	34.500.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	16.100.000,00	16.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	500.000,00	500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	-	3.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	3.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	538.295.000,00	-	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	538.295.000,00	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	750.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	537.545.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	KECAMATAN SIMPANGTERITIP								3.933.983.550,00	4.023.214.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.653.741.900,00	3.719.014.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.416.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.444.000,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.200.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.200.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.600.000,00	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	3.972.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.905.900.000,00	2.910.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.150.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	2.350.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.400.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.500.000,00	6.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3.500.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.200.000,00	14.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.200.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	146.521.900,00	184.820.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.000.000,00	3.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	15.001.500,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	4.320.000,00	4.320.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	17.500.400,00	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	85.000.000,00	90.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.700.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	490.410.000,00	477.900.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	300.000,00	300.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	25.200.000,00	25.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	464.910.000,00	452.400.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	89.794.000,00	99.794.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	32.200.000,00	32.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	42.594.000,00	42.594.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	5.000.000,00	15.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	14.630.500,00	31.200.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	105 orang	12.125.500,00	23.200.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	10.349.000,00	20.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.776.500,00	3.200.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	2.505.000,00	8.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	2.505.000,00	8.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	36.832.500,00	62.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	16.594.300,00	22.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16.594.300,00	22.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Dibina	3 Lembaga	20.238.200,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.238.200,00	40.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100%	112.934.150,00	30.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	112.934.150,00	30.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	105.485.950,00	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	7.448.200,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	69.797.500,00	103.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	69.797.500,00	103.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	53.400.000,00	75.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	16.397.500,00	28.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	46.047.000,00	78.000.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169 Orang	46.047.000,00	78.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	16.450.000,00	40.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	14.089.500,00	28.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	3.005.500,00	10.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	12.502.000,00	-	
	KECAMATAN JEBUS								3.806.062.100,00	3.971.160.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.328.652.450,00	3.471.160.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	16.675.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.050.000,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.300.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.300.000,00	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.050.000,00	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.975.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.406.000.000,00	2.410.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.300.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	2 laporan	2.350.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.350.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.975.000,00	6.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	3.975.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.575.000,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	1.575.000,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.450.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.450.000,00	10.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	179.224.950,00	213.000.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.999.950,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	17.960.000,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.500.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	20.492.000,00	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	111.198.000,00	110.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.575.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	543.422.500,00	543.750.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	300.000,00	300.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	29.100.000,00	29.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	514.022.500,00	514.350.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	176.330.000,00	249.910.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	32.200.000,00	32.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	134.130.000,00	134.130.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5.000.000,00	72.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	5.000.000,00	11.580.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	193.371.450,00	218.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	13.865.000,00	26.000.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	11.500.000,00	22.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.365.000,00	4.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	177.006.500,00	180.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	177.006.500,00	180.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	2.499.950,00	12.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	2.499.950,00	12.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	38.904.250,00	80.000.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200 orang	18.282.900,00	35.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	18.282.900,00	35.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga	20.621.350,00	45.000.000,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.621.350,00	45.000.000,00		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100%	133.836.200,00	30.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 orang	133.836.200,00	30.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	126.122.000,00	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	7.714.200,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	74.986.300,00	115.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	74.986.300,00	115.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	62.000.000,00	80.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	12.986.300,00	35.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	36.311.450,00	57.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173 orang	36.311.450,00	57.000.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	8.909.250,00	35.000.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	9.254.600,00	12.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	2.333.700,00	5.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	15.813.900,00	5.000.000,00	
	KECAMATAN PARITTTIGA								3.375.877.800,00	3.670.882.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.759.980.100,00	2.915.178.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	15.935.000,00	26.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4.875.000,00	8.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.350.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.350.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.825.000,00	8.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.535.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.906.375.000,00	1.910.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.275.000,00	2.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.550.000,00	4.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.550.000,00	4.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.850.000,00	6.000.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3.850.000,00	6.000.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.614.500,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	1.614.500,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.375.000,00	15.750.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	13.750.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.375.000,00	2.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	162.008.200,00	208.992.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.500.000,00	4.500.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	995.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	14.999.500,00	30.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	14.999.700,00	15.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.492.000,00	4.992.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	17.497.000,00	35.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	105.000.000,00	115.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.525.000,00	2.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	583.880.000,00	610.566.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	300.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	35.500.000,00	39.050.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	548.080.000,00	569.316.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	84.942.400,00	135.370.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	-	34.870.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	69.946.000,00	73.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4.996.400,00	16.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	5.000.000,00	6.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	370.139.400,00	427.204.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 orang	13.097.000,00	27.060.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	11.787.500,00	23.210.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1.309.500,00	3.850.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	349.845.000,00	396.044.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	349.845.000,00	396.044.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kependudukan, Perizinan, Pertanahan)	8 urusan	7.197.400,00	4.100.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	7.197.400,00	4.100.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	33.840.100,00	80.000.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	13.113.200,00	30.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	13.113.200,00	30.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Bina	3 lembaga	20.726.900,00	50.000.000,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	20.726.900,00	50.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100%	106.095.000,00	30.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	180 Orang	106.095.000,00	30.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	97.780.000,00	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	8.315.000,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	76.328.700,00	110.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	76.328.700,00	110.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	62.741.200,00	75.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	13.587.500,00	35.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	29.494.500,00	108.500.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160 Orang	29.494.500,00	108.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	8.382.500,00	30.500.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	8.860.000,00	15.500.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	2.470.000,00	7.500.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	9.782.000,00	55.000.000,00	
	KECAMATAN KELAPA								6.151.602.350,00	4.937.840.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.541.301.900,00	4.626.680.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	18.100.000,00	41.500.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.500.000,00	15.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.500.000,00	4.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.400.000,00	10.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4.200.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.606.900.000,00	3.612.500.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.500.000,00	2.500.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.700.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.700.000,00	5.000.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3.900.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3.900.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.915.000,00	2.500.000,00	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	1.915.000,00	2.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.475.000,00	22.500.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	12.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	1.475.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	166.329.900,00	212.700.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	4.441.400,00	10.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	15.046.500,00	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.350.000,00	2.700.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	27.494.000,00	30.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	91.250.000,00	110.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	1.748.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	651.180.000,00	656.480.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	300.000,00	2.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	62.400.000,00	62.400.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	568.480.000,00	572.080.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	91.502.000,00	70.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	2.550.000,00	25.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	83.952.000,00	35.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	10.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	414.314.000,00	38.000.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Orang	16.820.000,00	28.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	16.820.000,00	23.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	-	5.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Urusan	391.514.000,00	356.620.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	391.514.000,00	356.620.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	5.980.000,00	10.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	5.980.000,00	10.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	36.475.000,00	35.000.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Orang	14.500.000,00	25.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	14.500.000,00	25.000.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	-	10.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga/Kemasyarakatan		5.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas			
	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan		5.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN	3 Lembaga	21.975.000,00	45.000.000,00	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		2 Lembaga Kemasyarakatan	21.975.000,00	45.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100%	99.703.000,00	30.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	99.703.000,00	30.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 laporan	91.413.000,00	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1 laporan	8.290.000,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	80.385.000,00	101.360.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	80.385.000,00	101.360.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 orang	63.750.000,00	75.000.000,00	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 dokumen	16.635.000,00	26.360.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	52.625.000,00	106.800.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 orang	52.625.000,00	106.800.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	10.990.000,00	11.900.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	13.585.000,00	45.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	4.700.000,00	16.900.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	23.350.000,00	33.000.000,00	
	Sub Unit Organisasi : Kelurahan Kelapa								926.798.450,00	27.000.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	152.150.950,00	22.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	152.150.950,00	22.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	152.150.950,00	22.000.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	774.647.500,00	5.000.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	774.647.500,00	5.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.155.000,00	5.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	119.685.000,00		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	645.852.500,00		
	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 laporan	3.955.000,00	5.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	KECAMATAN TEMPILANG								3.644.259.296,00	4.110.550.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.369.057.450,00	3.732.030.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	18.325.500,00	48.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.700.000,00	16.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.399.000,00	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.399.000,00	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.700.000,00	12.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	4.127.500,00	10.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.606.999.000,00	2.613.000.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.399.000,00	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2.800.000,00	5.000.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.800.000,00	5.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.800.000,00	8.500.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	2.800.000,00	8.500.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.426.000,00	58.300.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	48.300.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1.426.000,00	10.000.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	161.301.850,00	408.150.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-	65.100.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	2.866.500,00	6.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	14.996.600,00	41.050.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15.000.000,00	20.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.826.000,00	6.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	17.498.850,00	40.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	101.461.400,00	220.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.652.500,00	5.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	475.130.000,00	455.100.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	2.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	24.000.000,00	33.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	451.130.000,00	419.500.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	103.075.100,00	140.980.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	32.700.000,00	32.700.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	55.380.000,00	83.280.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5.009.000,00	15.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	4.989.800,00	5.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4.996.300,00	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	17.549.750,00	34.200.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150 orang	13.999.250,00	26.700.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	11.591.800,00	23.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	2.407.450,00	3.700.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	3.550.500,00	7.500.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	3.550.500,00	7.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Persentase Desa yang Berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	38.361.600,00	65.200.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	15.758.150,00	25.200.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	15.758.150,00	25.200.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 lembaga	22.603.450,00	40.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	22.603.450,00	40.000.000,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Terlaksananya Kordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga.	100%	101.248.600,00	30.000.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40 orang	101.248.600,00	30.000.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	93.138.600,00	15.000.000,00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	8.110.000,00	15.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	76.045.046,00	136.000.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	76.045.046,00	136.000.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	100 orang	61.543.696,00	100.000.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
							Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	14.501.350,00	36.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Cakupan Pembinaan Yang diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	41.996.850,00	113.120.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117 Orang	41.996.850,00	113.120.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 dokumen	7.777.500,00	27.770.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	9.127.350,00	36.000.000,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	2.530.000,00	17.100.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	22.562.000,00	32.250.000,00	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatkan Kualitas Ketatalaksanaan Pemerintahan	Terwujudnya pemerintahan yang transparan, anti korupsi, dan berintegritas	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB				5.065.865.560,00	4.773.507.000,00	
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Cukup						
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								5.065.865.560,00	4.773.507.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	100 Persen	2.679.774.560,00	2.283.835.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	17.875.000,00	11.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.500.000,00	2.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.375.000,00	2.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.375.000,00	2.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.500.000,00	2.200.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	4.125.000,00	2.200.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.981.045.000,00	1.206.600.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.974.170.000,00	1.200.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.375.000,00	2.200.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.750.000,00	2.200.000,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.750.000,00	2.200.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	4.125.000,00	2.200.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.125.000,00	2.200.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1.375.000,00	255.200.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	23.100.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	1.375.000,00	2.200.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				220.000.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				9.900.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	202.786.160,00	283.500.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.999.300,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	1.300.000,00	1.430.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.996.300,00	16.500.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.999.810,00	13.200.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.320.000,00	2.970.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	19.998.750,00	25.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	149.997.000,00	220.000.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.175.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	399.754.400,00	442.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	2.200.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.999.800,00	38.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.984.600,00	5.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	358.770.000,00	396.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	72.814.000,00	83.135.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.250.000,00	42.075.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	25.600.000,00	28.160.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	8.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15 Unit	3.964.000,00	4.400.000,00	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	0 kasus	533.728.800,00	738.500.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 persen	533.728.800,00	738.500.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	531.728.900,00		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang		700.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	1.999.900,00	38.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	1.490.369.750,00	915.772.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	1.490.369.750,00	915.772.000,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.367 Orang	1.444.785.000,00	880.000.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23 Orang	23.016.500,00	17.072.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	22.568.250,00	18.700.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						persentase ormas yang aktif	100 Persen	46.775.100,00	71.500.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	46.775.100,00	71.500.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	24.527.000,00	55.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	22.248.100,00	16.500.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	0 kasus	103.676.900,00	332.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 Persen	103.676.900,00	332.000.000,00	
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	364 Orang	70.000.000,00	166.000.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	364 Orang	33.676.900,00	166.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 Persen	211.540.450,00	431.900.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	211.540.450,00	431.900.000,00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja		PAGU INDIKATIF	Prakiraan Maju (Rp.)	Sumber Anggaran
							Program/Kegiatan/Subkegiatan				
							Tolok Ukur	Target			
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183 Orang	35.248.400,00	46.900.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang	43.840.100,00	220.000.000,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	32.115.050,00	165.000.000,00	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.336.900,00		
									988.325.036.365,00	808.870.062.926,00	

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mana aturan ini merupakan aturan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pemenuhan dalam 1 (satu) tahun harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar maka hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memberikan *insentif* dan *disinsentif* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil pelaporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam penilaian kinerja perangkat daerah; pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; serta penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah disampaikan bahwa anggaran Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan akan menjadi indek penghitungan besaran tranfer DAU ke daerah. Dengan adanya kebijakan pusat tersebut dapat memberikan intervensi kepada daerah bahwa penerapan SPM tidak dapat dipandang sebelah mata. Sehingga diperlukan komitmen dari masing-masing stakeholder terkait untuk dapat focus dalam hal penerapan SPM di Kabupaten Bangka Barat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan kepada 6 (enam) bidang urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari : 1). Pendidikan; 2). Kesehatan; 3). Pekerjaan Umum; 4). Perumahan Rakyat; 5). Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat 6). Sosial. Keenam urusan wajib Pemerintah Daerah ini telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 yang telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah dimulai sejak tahun 2017 yang lalu dengan berpedoman kepada regulasi yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang di koordinir oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Namun sejak di ubahnya peraturan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di koordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melibatkan lintas instansi yang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, 6 (enam) Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bagian Hukum, serta bagian Organisasi.

Sampai dengan tahun 2022, upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat sudah terus dilakukan dalam berbagai macam kegiatan yang tentunya diperuntukkan bagi optimalisasi penerapan Standar pelayanan Minimal di daerah. Adapun berbagai hal yang telah dilakukan dalam upaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal setiap tahun;
- b. Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah;
- c. Penyusunan Roadmap/ Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
- d. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar pelayanan Minimal dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah secara berkala;
- e. Koordinasi lintas sektor dengan tim Sekretarat Standar Pelayanan Minimal pusat dan Provinsi
- f. Serta hal-hal lain yang bersifat menunjang dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dalam penerapan SPM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri, tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dilakukan oleh masing bidang urusan SPM, namun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya penganggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sehingga membuat belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan minimal di Kabupaten Bangka Barat sendiri. Namun Kabupaten Bangka Barat sendiri terus melakukan pembenahan dalam hal penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan berbagai hal yang dinilai dapat mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang tentunya dapat

mengcover seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dalam pemenuhan pelayanan dasar tersebut.

Adapun untuk dasar hukum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 58 Tahun 2019 Seri E).

Sedang untuk kebijakan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) yang akan diterjemahkan dalam perencanaan dan penganggaran Daerah.

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai pendanaan jangka menengah Daerah, dan menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan Daerah berdasarkan strategi yang dipilih untuk mencapai indikator kinerja sasaran, yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bangka Barat, dirumuskan berbagai kebijakan umum dan program pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Kebijakan umum pembangunan Daerah ini memberikan arah pembangunan Daerah selama jangka 2021-2026, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah.
- b) Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi .
- c) Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi'
- d) Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.
- e) Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan.
- f) Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan.
- g) Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat.
- h) Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- i) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel I.5
MISI 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	KONDISI AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2026	PROGRAM	BIDANG URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Melakukan pendataan capaian SPM pada pelayanan dasar sebagai baseline	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	n/a	80%	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Kesehatan	Dinkes		
						Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinkes		
						Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dikpora		
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dikpora		
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
		Optimalisasi pelayanan dasar Pemerintah Daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan						Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
								Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
								Program Bantuan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Di dalam Kebijakan daerah tersebut di atas telah secara jelas disampaikan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah tertuang dalam Misi 2 Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Periode 2016-2021. Di dalam Misi 2 tersebut juga penerapan Standar Pelayanan Minimal kemudian diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan yang salah satunya adalah terkait dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di daerah yang selanjutnya menjadi arah kebijakan daerah. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tabel I.6
Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021—2026 yang berkaitan dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2: Memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia		
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan; b. Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu; c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah.
	1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat; b. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga Kesehatan; c. Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat; d. Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan e. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera.

Adapun Arah kebijakan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang berkaitan dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.7
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan
		Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat	
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	
		Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat	
		Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	
		Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera	

Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal salah satunya melalui optimalisasi ketersediaan data penerima manfaat dalam Standar Pelayanan Minimal Daerah yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Di tahun 2022, untuk alokasi anggaran SPM mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan Tahun 2021 yang lalu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan daerah untuk tetap mempertahankan alokasi penganggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal walupun ditengah keterbatasan anggaran daerah. Ini dilakukan agar pemenuhan kebutuhan minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat layanan tetap terpenuhi dan menjadi prioritas daerah yang merupakan sebuah kewajiban Pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan minimal tersebut.

Kemudian di dalam RPJMD tersebut juga telah mengakomodir Indikator Standar pelayanan Minimal menjadi Indikator Kinerja Kunci daerah sebagai ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. IKK atau *key performance indicator* (KPI) atau dikenal pula sebagai *key success indicators* (KSI) bertujuan membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan guna mencapai tujuan- tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Seberapa besar pencapaian IKK tersebut tergantung ukuran yang ditetapkan. Berikut ini diuraikan target capaian IKK yang merupakan Indikator Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022—2026.

Tabel I.8
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang berkaitan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022-2026

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target				Kondisi Akhir RPJMD	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Pendidikan									
	APK PAUD	Angka	87,55	88,26	88,78	89,82	92,93	96,04	99,15	99,15
	APK SD/MI/Paket A	Angka	103,94	104,42	105,02	105,67	105,89	118,28	135,26	135,26
	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	91,43	92,56	93,20	94,34	96,78	96,92	97,82	97,82
	APM SD/MI/Paket A	Angka	94,37	94,96	95,02	96,27	96,78	96,93	98,20	98,20
	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	82,67	84,34	87,90	89,35	90,80	92,25	93,70	93,70
	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	94,37	94,62	94,87	95,12	95,32	95,57	95,57	95,57
2	Kesehatan									
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,61	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	%	97,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,38	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan balita	%	93,34	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	78,32	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	%	70,23	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	84,99	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	%	105,3	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	70,95	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	%	105,38	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	%	94,61	97,28	100,55	103,82	107,09	107,09	113,63	113,63
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,48	88,53	88,58	88,63	88,68	88,73	88,78	88,78
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	12,21	12,77	15	17,78	23,7	25,68	27,66	27,66
	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	N/A	N/A	2,74	3,59	4,72	5,83	6,91	6,91
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Sosial									
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	325,49	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	%	174,35	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Penerapan SPM di masing-masing daerah juga harus dilakukan dengan baik serta terkendali. Ini dilakukan agar pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kabupaten Bangka Barat dapat memenuhi seluruh standar kebutuhan warna negara yang akan menjadi tolok ukur untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan SPM. Tentunya dalam pelaksanaan penerapan SPM ini harus didasari dengan komitmen yang baik antar para pemangku kepentingan untuk focus dalam pemenuhan pelayan dasar di daerah. Keberhasilan dari penerapan SPM di daerah tidak akan dapat tercapai jika tidak ada kerjasama yang baik antar para pemangku kepentingan yang di mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran serta monitoring evaluasi pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat harus dapat merealisasikan hal tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar warga Negara Indonesia secara merata.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dasar. pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel II.1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan 2021

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2021	CAPAIAAN KINERJA TAHUN 2022	PERUBAHAN (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	70,12	
2	Angka Kemiskinan	2,75	2,46	
3	Angka Pengangguran	3,83	4,86	
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,21	2,01	
5	Pendapatan Per Kapita	74.688.000.000.000,00	80.031.700.000.000	
6	Ketimpangan Pendapatan	0,25	0,21	

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran.dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Keluaran (*Output*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data		
Pendidikan							
	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	100 lembaga	105 lembaga	
			2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	6181 siswa	5888 siswa	
			3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	789 siswa	5888 siswa	
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	547 orang	442 orang	
			5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	520 orang	532 orang	
			6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	191 orang	309 orang	
			7	Jumlah Kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	64 orang	76 orang	
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 126 SMP : 30	SD : 137 dan SMP 48	
			2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	SP	5305 orang	
			3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	SP	2418 orang	
			4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2795 orang	5305 orang	
			5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1856 orang	2418 orang	
			6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	906 orang	1439 orang	
			7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	317 orang	657 orang	
			8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1411 orang	1406 orang	
			9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	647 orang	672 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data			
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	556 orang	568 orang			
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	230 orang	240 orang			
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	459 orang	439 orang			
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	260 orang	280 orang			
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1233 orang	1277 orang			
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	599 orang	626 S1. 244 bersertifikasi			
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	136 orang	134 berijazah S1 dan 132 bersertifikat pendidik			
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	46 orang	48 orang			
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	205 orang	242 orang			
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	123 orang	152 orang			
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD : 126 SMP : 30	SD : 137 dan SMP 48	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		SP		5305 orang	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		SP		2418 orang	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan		2795 orang		5305 orang	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan		1856 orang		2418 orang	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar		906 orang		1439 orang	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		317 orang		672 orang	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		1411 orang		1406 orang	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama		647 orang		672 orang	
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar		556 orang		568 orang		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
			11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	230 orang	240 orang		
			12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	459 orang	439 orang		
			13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	260 orang	280 orang		
			14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1233 orang	1277 orang		
			15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	599 orang	626 S1. 244 bersertifikasi		
			16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	136 orang	134 berijazah S1 dan 132 bersertifikat pendidik		
			17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	46 orang	48 orang		
			18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	205 orang	242 orang		
			19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	123 orang	152 orang		
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	1 satuan	4 PKBM		
			2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1058 orang	365 orang		
			3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1058 orang	365 orang		
			4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	53 orang	89 orang		
			5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	48 orang	70 orang		
			6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	39 orang	59 orang		
			7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	TIDAK PERLU DI ISI	TIDAK PERLU DI ISI		
			8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	TIDAK PERLU DI ISI	TIDAK PERLU DI ISI		
	Kesehatan							
		1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 RS	1 RS	
2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 RS	2 RS		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3725	3641	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	771 orang	164 orang	
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3524	3463	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	771 orang	164 orang	
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3493	3425	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	771 orang	167 orang	
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11708	11541	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	803 orang	72 orang	
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	37506	37541	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	858 orang	172 orang	
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	133183	133	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	844 orang	146 orang	
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	16395	17125	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	844 orang	64 orang	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	48094	48523		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	804 orang	40 orang		
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3934	3968		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	847 orang	48 orang		
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	492	487		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	847 orang	18 orang		
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1749	2266		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	871 orang	32 orang		
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4862	5432		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	860 orang	45 orang		
Pekerjaan Umum							
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	24831 ha	129,48 ha	
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	51671 m	15142 m	
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	38,29 ha	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38,29 ha	3829 m	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	3 dok	5 dok	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	3 dok	4 dok	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	i. Bangunan perkuatan tebing (m) = 8727 m ii. Tanggul sungai (m) = 25.722m iii. Kanal bajir (m) = 80 m iv. Pintu air/bendung pengendali = 2 unit banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan = 0 unit Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) = 0 unit vii. Breakwater (m) = 0 unit viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)= 0 unit	ada	
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	24831 ha	38,29 ha	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	51671 m	15142 m	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	38,29 ha	38,29 ha	
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	38,29 ha	3829 m		
	5	Rencana Tata Pengaturan airdantata pengairan/rencanapengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	3 dok	5 dok		
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	3 dok	4 dok		
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi olehinfrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota				

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	i. Bangunan perkuatan tebing (m) = 8727 m ii. Tanggul sungai (m) = 25.722m iii. Kanal bajir (m) = 80 m iv. Pintu air/bendung pengendali = 2 unit banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan = 0 unit Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) = 0 unit vii. Breakwater (m) = 0 unit viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)= 3829 m	idem	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	93,60%	93,72%	
2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	93,00%	93,00%		
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	97,63%	85,50%		
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	Ada	
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	Ada		
3		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	1 BUMD		
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	1 BUMD		
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Ada	Ada		
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	783 RT	1096	
2		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	1057 RT	1063		
3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1866 RT	2159 RT		
4		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	SP	164		
5		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	SP	164		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data			
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	1057 RT	2159			
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	93,3%	91,6%			
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALDS akses aman	SP	3,38%			
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	99,44%	11,95%			
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1,60%	4,19%			
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	50%	75%			
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	48 m3	100%			
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	99,44%	99,44%			
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	SP	7,6%			
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	SP	SP	
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	99	33			
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Tidak			
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	SP	Ada			
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	24	24			
6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	SP	SP					
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	202	3428					
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	24	2939					
	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	700,92 km	809.305 km		
			2	Panjang jalan yang dibangun	47078 km	32051 km		
			3	Panjang jembatan yg dibangun	1100,1 km	1181,1 km		
			4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	18677 km	156,98 km		
			5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	155 km	214 km		
			6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	103,047 km	104,247 km		
			7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	SP	70,4 km		
			8	Panjang jalan yang dipelihara	8543 km	131053 km		
			9	Panjang jembatan yang dipelihara	66 km	138 km		
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3 kali	3 kali		
			2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	208 orang	279 orang		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
		3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	82 orang	237 orang	
		4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada (Tidak Ada)	Tidak ada	
		5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	SP	SP	
		6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	SP	SP	
		7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	SP	SP	
		8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	SP	34	
		9 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Ada	
		10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada	Ada	
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Ada	
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	Ada	
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	SP	SP	
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	SP	SP	
		15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	Ada	
		17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP	
		18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	31 Badan Usaha	37 Badan Usaha	
		19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	SP	SP	
		20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	SP	34	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	SP	SP		
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	SP	SP		
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	SP	SP		
	9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
Perumahan Rakyat							
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2 RT	67 RT	
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	2 RT	67 RT	
			3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	2 RT	67 RT	
			4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2 RT	66 RT	
			5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	2 RT	1 RT	
			6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	SP	SP	
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	SP	SP	
			8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2 RT	67 RT	
			9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	SP	SP	
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
			2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
			3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	
			4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	SP	SP		
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	SP	SP		
	3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	9,52 Ha	9,52 Ha	
			2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	1 unit	30 unit	
			3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	70,42 Ha	70,42 Ha	
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1	Jumlah rumah di kab/kota	43255 unit	50058 unit	
			2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	211 unit	321 unit	
			3	Jumlah rumah tidak layak huni	3566 unit	3468 unit	
			4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	SP	SP	
			5	Rasio rumah dan KK	150,72%	133,61%	
			6	Jumlah rumah pembangunan baru	SP	30	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	SP	270	
			2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	SP	270	
			3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	SP	270	
			4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	SP	270	
			5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	SP	SP	
			6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	SP	SP	
			7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	SP	0	
			8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	SP	12	
9			Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	SP	12		
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	65	6	
			2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	129 orang	510 orang	
			3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5 perda	5 perda	
			4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 orang	1 orang	
			5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SP	6 SOP	
			6	Tersedianya sarana prasarana minimal	38 jenis	19 jenis	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	SP	7,45%		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	5,42%	5,53%	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	SP	100%	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	SP	100%	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	6,63%	100%	
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	3,14%	8,61%	
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	SP	SP	
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	SP	SP	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	100%	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	SP (100%)	100%	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	10 kebakaran dan 65 non kebakaran	117 Kejadian	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Tidak Ada	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	8 orang	18 orang	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	SP	SP	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	38 jenis	38 jenis	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	2 orang	2 orang	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	SP	120	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	8 kegiatan	10 Kegiatan	
	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
SOSIAL						
	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	17948 orang	67577 orang
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	17948 orang	28457orang
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	47	1
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	17948 orang	1708 orang
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3 buah	3 buah
			6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1348 orang	1510 orang
			7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 unit	1 unit
			8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	8 orang	180 orang
			9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	127 orang	18 orang
			10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	7 buah	7 buah
			11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	SP	SP
			12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	SP	SP
			13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	1 orang	7 orang
			14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	130 orang	130 orang
			15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	24 orang	68 orang
			16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	SP	1
			17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	2 orang	33 orang
			18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	17948 orang	1708 orang
			19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	14 orang	23 orang

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
			20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4 orang	21 orang	
			21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	6 orang	36 orang	
	2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	3317 orang	502 orang	
			2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	83 orang	493 orang	
			3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	6 unit	SP	
			4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	17 orang	160 orang	
			5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	SP	Ada	
			6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	130 orang	130 orang	
Ketenagakerjaan							
	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	1 RTKD	
			2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	SP	44,95	
			3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	2 perusahaan	3 Perusahaan	
	2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100%	100%	
			2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	100%	
			3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	9%	10%	
			4	Persentase LPK yang terakreditasi	11,76%	11,76%	
			5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	29,41%	29,41%	
			6	Jumlah penganggur yang dilatih	42,06%	20,94%	
			7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	100%	
			8	Persentase penyerapan lulusan	82%	45%	
			9	Lulusan bersertifikat kompetensi	100%	100%	
			10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	SP	100%	
	11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	SP	100%			
	3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	SP (36,36%)	SP	
2			Data tingkat produktivitas total	SP	Nihil		
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	36,36%	31,82%		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
	BPJS Ketenagakerjaan)	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	100%	80%		
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5 Perusahaan	5 Perusahaan		
		4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	90,91%	100%		
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100,00%	82,14%		
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	5,19%	0,51%		
		7	Jumlah mogok kerja	SP	SP		
		8	Jumlah penutupan perusahaan	SP	SP		
		9	Jumlah perselisihan kepentingan	SP	SP		
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	SP	SP		
		11	Jumlah perselisihan PHK	3	SP		
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	3	SP		
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	2	SP		
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 unsur	1 unsur		
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	16,67%	100%		
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	13	12
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		107 orang	191 orang		
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		5	5		
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		SP	SP		
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		1 orang	1 orang		
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		SP	SP		
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota		46 perusahaan 648 pekerja	SP		
	8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		60	94		
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	SP		100%			
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	SP		100%			
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	SP		SP			

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
			12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	SP	SP	
			13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	SP	SP	
			14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	SP	SP	
Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak							
	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	30 OPD	31 OPD	
			2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	27 program	30 program	
	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	5 jenis	1 jenis	
			2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 lembaga	1 lembaga	
			3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100,00%	100%	
			4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	
			5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	SP	1 lembaga	
	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	8 LSM	5 LSM	
			2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	48 orang	13 orang	
			3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	8 LSM	3 LSM	
			4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3 lembaga	3 lembaga	
			5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 kebijakan	1 kebijakan	
			6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	3 lembaga	8 lembaga	
			7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	
Pangan							
	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Ada	
			2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	SP	Ada	
			3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	SP	Tidak	
			4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada	
			5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Ada	
			6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	Ada	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
			7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak	Ada	
			8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada	
Pertanahan							
	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	3 izin	3 izin	
			2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	SP	SP	
			3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	SP	SP	
			4	Dokumen Izin membuka tanah	SP	SP	
			5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	100%	
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum					
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal					
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat						
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi						
Lingkungan Hidup							
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap : 1. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) Indeks tutupan hutan 2. (ITH) 3. Indeks Tutupan Hutan 4. (ITH)	IKA =65,79; IKU = 89,71; IKL= 37,16	IKA =66,67; IKU = 89,20; IKL= 37,41	
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. 15 unit, 6 unit, 1 amrol 2. 82,4984 ton/ ta 3. 38.238,75 ton, total TPST sebanyak 3 unit (Air Limau, Kelapa dan Parittiga)	1) motor roda tiga 20 unit, dump truk 6 unit, 2 unit amrol 2) Kapasitas TPA 38.238,75 ton/ ta, timbulan sampah 30.765,82 ton/tahun 3) TPST sebanyak 2 unit (Kelapa dan Parittiga), TPS3R 5 unit (air limau, pelangas, bakit, parittiga, tempilang), bank sampah induk 1 unit (air limau)	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
	3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	SP	100%	
		2 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	SP	3,17%	
		3 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	SP	SP	
		4 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	SP	SP	
		5 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	SP	SP	
		6 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	100%	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	1 Perekaman KTP Elektronik	1 Penerbitan akta perkawinan	51,32%	56,06%	
		2 Penerbitan akta perceraian	64,56%	66,63%	
		3 Penerbitan akta kematian	96,58%	100%	
		4 Penyajian data kependudukan	50,00%	50,00%	
	2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				
	3 Kepemilikan akta kelahiran				
	4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama				
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6 desa	56 desa	
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	6 desa	50 desa	
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1 lembaga 13 desa	121 lembaga	
		4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	15 desa	127 lembaga	
	2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	6 desa	56 desa	
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	6 desa	50 desa	
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	1 lembaga 13 desa (75%)	121	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
			4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	15 desa	127		
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Ada		
			2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	25 tahun	25 tahun		
			3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate /ASFR 15-19)	3,24	0,384987893		
			4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	96,85%	100%		
			5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	25 OPD	25 OPD		
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	100%		
			2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	80,60%	8,34%		
			3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	212 pokja (15 yang di kabupaten +197 di desa)	213 pokja (15 yang di kabupaten +198 di desa)		
			4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	25,14%	11,47%		
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	44,12%	44,63%		
			2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	75,70%	33,17%		
	Perhubungan							
		1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	74,07%	74,07%	
				2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	27,48%	28,52%	
3				Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	SP	SP		
4				Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	SP (100%)	56,69%		
	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu lintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	SP (40,65%)	56,69%		
Komunikasi dan Informatika								
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	100,00%		
			2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	54,84%	100,00%		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
		3 Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya	Ada	
	2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1 Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	48,65%	40,54%	
		2 Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	51,61%	51,61%	
		3 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	51,61%	100,00%	
		4 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasipemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	12,90%	100,00%	
		5 Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	50,00%	25,00%	
		6 Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	75,00%	87,50%	
		7 Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	12,50%	37,50%	
		8 Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	19,35%	54,84%	
		9 Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	19,35%	48,39%	
		10 Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	19,35%	48,39%	
		11 Persentase data yang dapat berbagi pakai	40%	36%	
		12 Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	9,68%	19,35%	
		13 Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	50,00%	75,00%	
		14 Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	Ada	
	3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	78,57%	78,57%	
		2 Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	66,67%	100,00%	
		3 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	95,00%	100%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP	
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5,60%	21,82%	
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,91%	34,00%	
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	40,00%	2764,55%	
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP (0,33%)	1,47%	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	SP	
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	SP	TIDAK PERLU DI ISI	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	54,40%	63,64%	
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	SP	42,10%	
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3 KOPERASI	3 KOPERASI	
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100%	100%	
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	8,00%	9,09%	
	2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	29,97%	1,14%	
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	15,02%	15,26%	
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	2,23%	5,16%	
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,77%	0,96%	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,09%	0,55%	
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,28%	0,94%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
			7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0,26%	0,82%	
Penanaman Modal							
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	SP	SP	
			2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SP	SP	
			3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	SP	SP	
			4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	8 kali	8 kali	
			5	Kegiatan pameran penanaman modal	SP	SP	
			6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	SP	2	
			7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	23	37 konsultasi	
			8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2574	12518 (perizinan dan non perizinan)	
			9	Laporan realisasi penanaman modal	989.379.113.260	1.403.739.200.387	
			10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	7 kali	8 kali	
			11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	54 kali	33 kali	
			12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	192,86%	155%	
Kepemudaan dan Olahraga							
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	10 orang	11 orang	
			2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	10 orang	11 orang	
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	16 orang	28 orang	
			2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1 organisasi	16 organisasi	
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	40 orang	40	
			2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	4 event	6	
Statistik							
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1	Tersedianya buku profil daerah	Ada	Ada	
			2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3 survei	12 Survei	
			3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	
			4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3 survei	1 survei	
			5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	3 jenis	0 jenis	
			6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100,00%	100,00%	
			7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100,0%	100,00%	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
Persandian							
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	SP	SP	
			2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	SP	100%	
			3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0,00	0,00	
			4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100,00%	100,00%	
Kebudayaan							
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	11 objek	11 objek	
			2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1 objek	1 objek	
			3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1 objek	1 objek	
			4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	SP	SP	
			5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	24 CB	24 CB	
			6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	24 CB	24 CB	
			7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	SP	SP	
			8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	SP	SP	
			9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	SP	SP	
			10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	SP	SP	
			11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	4257 orang	7786 orang	
			12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	SP	SP	
			13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	17 orang	17 orang	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
			14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	5 orang	5 orang	
			15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5 orang	5 orang	
			16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	6 orang	7 orang	
			17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	SP	SP	
			18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	10 buah	10 buah	
			19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	SP	SP	
Perpustakaan							
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1167,80%	302,36%	
			2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	50,51%	70,33%	
			3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,18%	0,19%	
			4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	79,37%	15,81%	
			5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca dimasyarakat	12 kegiatan	20 kegiatan	
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	SP	16 lembar	
			2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	SP	16 lembar	
			3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	4094	456	
Kearsipan							
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	100%	
			2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	100%	
			3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	85,35%	
			4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	SP	100%	
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	SP	2496	
			2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	SP	SP	
			3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	SP	SP	
			4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	SP	SP	
			5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	SP	SP	
			6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	SP	SP	

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
Perikanan						
	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	4480 RTP nelayan dan 398 RTP Budidaya	4480 RTP nelayan dan 412 RTP Budidaya
			2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0%	0%
			3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	36 izin	87 izin
			4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	111 orang	398 orang
			5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	4884062 ekor	4620470 ekor
Pariwisata						
	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	37 unit	37 unit
			2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	37 unit	37 unit
			3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	39	329
			4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6 orang	234
			5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	SP	8 event
			6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	SP	SP
			7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	SP	SP
			8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	14,81%	65,22%
			9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	100%
			10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	13 lokasi	13 lokasi
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota				
	3	Tingkat Hunian Akomodasi				
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku				
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD				
	Pertanian					
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	prasarana 3172	4 jenis
			2	Prasarana pertanian yang digunakan	3144	3144
			3	Penerbitan izin usaha pertanian	3 kali	3 kali
			4	Persentase prasarana yang digunakan	99,12%	99,12%
			5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	SP	SP

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data	
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	1	Persentase fasilitas penanggulangan bencana	100,00%	84,85%		
Kehutanan								
			1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Ada	Ada		
			2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Tidak Ada	SP		
			3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Tidak Ada	SP		
			4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Tidak Ada	1 kasus		
Energi dan Sumber Daya Mineral								
	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		SP		
Perdagangan								
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a) Pusat perbelanjaan b) Toko swalayan	100%	100%		
			2	Persentase penerbitan TDG	100%	100%		
			3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	SP	SP		
			4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	SP	SP		
			5		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	SP	SP	
			6		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	SP	0	
			7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	1		
			8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,63	3,45%		
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,0004%	0,00001%		
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100,0%	72%		
			2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	SP	SP		
Perindustrian								
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	SP	0%		
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50%	50%		

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome		Indikator Kinerja Kunci Output		Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	88,55%	88,55%	
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	SP	SP	
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota					
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	1,76%	1,76%	
Transmigrasi							
			1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	3 SKP	3 SKP	
			2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 SKP	1 SKP	
			3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	1 SKP	1 SKP	

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Hasil (*Outcome*) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
Pendidikan					
	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 Tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	97,83%	95,83 %
	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar / Jumlah anak usia 7 -12 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	99,89%	98,90%
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan x 100%	83,34%	90,15 %
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan / Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan x 100%	5,50%	37,24 %
Kesehatan					
	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan / Jumlah penduduk di Kabupaten/kota	0,084%	0,101 %
	2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi / Jumlah RS di kabupaten/kota x100%	100%	66,67 %
	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota x100%	92,86%	100.00%
	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan / Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota x100%	95,01%	100,00 %
	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota x100%	95,73%	100,00 %
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / jumlah balita di kabupaten/kota x100%	93,36%	100,00 %
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar / Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota x100%	98,36%	100,00 %
	8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota x100%	83,65%	100,00 %

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota x100%	83,90%	100,00 %	
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota x100%	87,97%	100,00 %	
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita DM di kabupaten/kota x100%	103,71%	100,00%	
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota x100%	100,00%	100,00%	
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota x100%	61,58%	100,00%	
	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota x100%	107,96%	100,00%	
Pekerjaan Umum						
	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha) / Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota(ha) x100%	42,54%	57,01%	
	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) / Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten /kota (m) x100%	30,63%	30,63%	
	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun(ha), ditingkatkan(ha), direhabilitasi(ha), dioperasi dan pelihara(ha) / Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota x100%	38,43%	38,43%	
	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota / Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x100%	92,48%	92,19%	
	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah di kabupaten kota x100%	54,99%	96,15%	
	6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya / Jumlah IMB yang berlaku x100%	100%	100%	
	7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten kota x100%	81,6%	72,12%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
	8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis / Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	219 orang	100 %	
	9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi / Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x100%	SP	100%	
Perumahan Rakyat						
	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x100%	100%	100%	
	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian Hak atas penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah tangga penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima penyediaan Rumah Layak Huni / Jumlah total rumah terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi Kriteria penerima pelayanan x100%	SP	100 %	
	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) / Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x100%	SP	39,81	
	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni / Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x100%	8,24%	6,93%	
	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / Jumlah unit rumah kab/kota x100%	SP	31,99 %	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x100%	100%	100%	
	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x100%	13,5%	13,51%	
	3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	148 orang	25,00%	
	4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	190 orang	8,61%	
	5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	7042 orang	100%	
	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pmeadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah / Jumlah Kejadian kebakaran di kabupaten/kota x100%	60%	77,78%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
	7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10 menit	8,02	
SOSIAL					
	1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti / populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x100%	100,00%	100,00%	
	2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x100%	100%	100,00%	
Ketenagakerjaan					
	1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x100%	100%	60%	
	2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah tenaga kerja keseluruhan x100%	0,46%	6,36%	
	3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga Kerja x100%	10303558%	144,59%	
	4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x100%	28,57%	28,57%	
	5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan / Jumlah pencaker yang terdaftar x100%	56,07%	49,21%	
Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD / Jumlah seluruh belanja langsung di APBD x100%	2,92%	0,55%	
	2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten kota yang didampingi / Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 Tahun) x100%	0,02%	0,02%	
	3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x100%	4,99%	0,003%	
Pangan					
	1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah Cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan x100%	127,63%	161,74%	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
Pertanahan					
	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi / seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi x100%	100%	100%
	2	Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum / Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitasi umum x100%	100%	100%
	3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi / Luas izin lokasi yang diterbitkan x100	100%	100%
	4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha / Jumlah penerima tanah obyek landreform x100%	SP	100%
	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah / Luas izin membuka tanah yang diterbitkan x100%	SP	100%
	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani / Jumlah pengaduan sengeketa tanah garapan x100%	SP	100%
Lingkungan Hidup					
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	69,21	69,39
	2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani / total volume timbunan sampah kabupaten/kota x100%	101,33%	20,10%
	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kota / Usaha atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x100%	17,46%	30,16%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	1	Perekaman KTP Elektronik		99,25%	97,93%
	2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) jari yang sudah memiliki KIA / Jumlah anak usia 0-17 Tahun x100%	45,88%	47,34%
	3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir / jumlah anak usia 0-18 Tahun x100%	94,55%	97,17%
	4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama / Jumlah OPD x100%	16,13%	20,00%
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa membangun / Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) x100%	0	100%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME		RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
	2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks membangun per tahun / Jumlah desa bekembang (per awal tahun n) $\times 100\%$	5,13%	15,38%	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur $\text{bi} = \text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur } i \text{ pada tahun tertentu}$ $\text{pi} = \text{Jumlah penduduk perempuan kelompok umur } i \text{ pada pertengahan tahun yang sama}$ $i = \text{kelompok umur (} i=1 \text{ untuk kelompok umur } 15-19, 1=2 \text{ utk kelompok umur)}$	2,38	2,45	
	2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern/ Jumlah pasangan usia subur $\times 100\%$	80,60%	73,75%	
	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		19,40%	17,63%	
Perhubungan						
	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) <ul style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) § Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP § Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu 	3,5	0,68	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
		<p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8</p> <p>c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p>			
	2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,55	0,55
Komunikasi dan Informatika					
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x100%	100,00%	100,00%
	2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x100%	18,92%	25,00%
	3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten atau kota / Jumlah Penduduk x100%	72,58%	70,46%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi yang meningkat berdasarkan kualitasnya RAT, Volume usaha dan aset / Jumlah seluruh koperasi x100%	45,60%	58,18%
	2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x100%	2,64%	14,61%
Penanaman Modal					
	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	(Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota / Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota x100%	137,21%	18,65%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
Kepemudaan dan Olahraga					
	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda(16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16 - 30 tahun) di kabupaten/kota $\times 100\%$	0,44%	5,82%
	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	(Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota $\times 100\%$	0,002	0,75%
	3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	23 buah	36
Statistik					
	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah / Jumlah OPD $\times 100\%$	100%	100%
	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah / Jumlah OPD $\times 100\%$	100%	100%
Persandian					
	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi / Jumlah area penilaian $\times 100\%$	100,00%	0
Kebudayaan					
	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan / Jumlah cagar budaya yang terdata $\times 100\%$	79,17%	83,33%
Perpustakaan					
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	SP	49,57
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	35,48	3,407
Kearsipan					
	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,00	100%

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA	
	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	16,6	16,67	
Perikanan						
	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	29505,6 ton	101,91%	
Pariwisata						
	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 x100%	-96,72%	3800%	
	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n - jumlah wisatawan tahun n-1 / Jumlah wisatawan tahun n-1 x100%	29,43%	160,20%	
	3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar terjual / Jumlah kamar tersedia x100%	61,33%	28,00%	
	4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,32%	2,52%	
	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,50%	3,15%	
Pertanian						
	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produk pertanian pangan per hektar per tahun / Luas Panen x100%	319,42%	3,78	
	2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian atau kasus hewan menular tahun sebelumnya / Jumlah kejadian atau kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x100%	100	-100%	
Kehutanan						
Energi dan Sumber Daya Mineral						
	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi x100%		100	

URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	SUMBER DATA
Perdagangan					
	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten atau kota x100%	1,40%	100%
	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi / RDKK x100%	24,26%	1,60%
	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab atau Kota x100%	88%	72,40%
Perindustrian					
	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-Jumlah industri kecil dan menengah n-1 / Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x100%	5,69%	5,58%
	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	50	100
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x100%	100%	60%
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x100%	SP	100%
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / Jumlah izin yang dikeluarkan x100%	SP	100%
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	100	100
Transmigrasi					
				3 SKP	100

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.4
Capaian Indikator Kinerja Hasil (Outcome) Fungsi Penunjang Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan) Kabupaten/Kota					
	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah Belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan / Jumlah APBD	10,76%	12,00%
	2	Rasio PAD	Jumlah PAD / Jumlah PDRB Non Migas $\times 100\%$	0,38%	9,04%
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures / Jumlah belanja APBD $\times 100\%$	71,55%	75,26%
	6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	WTP*	WTP
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota					
	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n / Jumlah kontrak keseluruhan tahun n $\times 100\%$	SP	100%
	2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif $\times 100\%$	6,41%	53,30%
	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan / Total belanja langsung $\times 100\%$	92,06%	93,93%
	4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) / Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) $\times 100\%$	9,47%	107,23%
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota					
	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas / Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah $\times 100\%$	90,66%	26,06%
	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) / Seluruh jumlah pegawai pemerintahan (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\times 100\%$	24,40%	28,87%
	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi / Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\times 100\%$	53,63%	57,88%

Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Rumus	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Sumber Data
Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota					
	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	(Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi / total belanja APBD) -1 x100%	7,41%	0,92
	2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	(Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi / total PAD dalam APBD) -1 x100%	22,27%	0,85
	3	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	YA
	4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA / Total belanja anggaran tahun sebelumnya x100%	1,15%	1,64%
Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota					
	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda/ realisasi belanja unit pelayanan dapat diakses di website pemda x100%	95,16%	99,11%
	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda / Total jumlah dokumen yang telah dirinci x100%	100%	100%

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Selanjutnya untuk menilai kinerja yang telah dicapai, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya serta dilakukan analisa atas pencapaian kinerja dengan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran.

2.3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran kinerja berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Metode perbandingan capaian kinerja tersebut dilakukan antara rencana dengan realisasi kinerja (*performance plan*) yang selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*). Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun kerangka pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 adalah dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, dalam penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 digunakan 2 (dua) skala penilaian yaitu :

1. Pengukuran Capaian Tahunan

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian tahunan menggunakan 4 (empat) kategori yaitu "**Baik Sekali**", "**Baik**", "**Cukup**" dan "**Kurang**". Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja dilakukan dengan membuat rata-rata atas capaian indikator kinerja. Kategori ini digunakan untuk memperlihatkan secara jelas ketercapaian dan keberhasilan masing-masing indikator kinerja sehingga dapat menjadi peringatan dan perhatian selanjutnya untuk dapat menjadi perbaikan kedepan dalam rangka mencapai target indikator dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel II.5
Penilaian Capaian Tahunan

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Baik Sekali
80 s.d. < 100	Baik
60 s.d. < 80	Cukup
< 60	Kurang

2. Pengukuran Capaian Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Untuk pengukuran capaian Perbandingan dengan Tahun sebelumnya, dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "Meningkat", "Tetap" dan "Menurun".

3. Pengukuran Capaian Akhir RPJMD

Untuk pengukuran capaian akhir RPJMD, dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran yang dibagi menjadi 3 (tiga) skala dengan 3 (tiga) kategori yaitu "**Tercapai**", "**Optimis Tercapai**" dan "**Perlu Upaya Lebih**".

Tabel II.6
Penilaian Capaian Kinerja Sasaran terhadap Target Akhir RPJMD

Nilai Capaian (%)	Kategori
≥ 100	Tercapai
≥75 s.d <100	Optimis tercapai
<75	Perlu Upaya

2.3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, telah ditetapkan 4 Sasaran Tujuan dan 13 Sasaran Strategis yang harus dicapai di Tahun 2022 dengan target dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel II.7
Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	2,01	40,93
1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	%	5.5	12,50	227,56
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB)	%	5.7	7,56	132,63
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.38	2,32	97,48
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,03	25,01	92,53
Rata-rata Capaian						137,55
1.2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar Rupiah	805	1.403	174,28
Rata-rata Capaian						174,28
1.3	Meningkatnya keredediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0.7	0,72	103
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	100
Rata-rata Capaian						101,5
1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70.91	69,39	97,85
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	41.18	52,94	128,55
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100
Rata-rata Capaian						108,8
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rp	12,605	12,790	101,47
2.1	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.85	2,46	113,68
2.2	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.64	4,86	66,46
Rata-rata Capaian						90,07
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.57	70,12	100,79
3.1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.59	7,46	98,28
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.72	11,72	100
		Persentase sekolah Terakreditasi A	%	24.32	20,53	84,41
Rata-rata Capaian						94,23
3.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70.41	70,25	99,77
		Prevelensi stunting	%	8.75	9,56	90,74
Rata-rata Capaian						95,25

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks pembangunan gender	Indeks	90.67	90,30	99,30
		Status kabupaten layak anak	Kategori	Pratama	Pratama	100
Rata-rata Capaian						99,65
3.4	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks kesalehan sosial	Kategori	Cukup	Tinggi	>100
Rata-rata Capaian						>100
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	Kurang	Cukup	89,13
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70	68,66	98,08
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100
		Maturasi SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100
		Indeks SPBE	Kategori	Cukup	Cukup	100
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64.6	63,52	98,63
Rata-rata Capaian						99,34
4.2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81.52	83,06	101,88
Rata-rata Capaian						101,88
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0.26	>100	>100
5.1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat otonomi fiskal daerah	%	8.87	9,14	103,04
Rata-rata Capaian						103,04

Berdasarkan Sasaran Tujuan dan Target indikator yang telah ditetapkan beserta capaian kinerja masing-masing sasaran, dilakukan analisis dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel II.8
Indikator Tujuan Tahun 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI 2022	CAPAIAN %	
				2022	2026		2022	2026
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,91	4,10	2,01	40,93	49,02
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu (Rp)	12.605	15.245	12.790	101,47	83,90
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,57	70,60	70,12	100,79	99,32
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Kategori	Kurang	Baik	Cukup	89,13	76,14
5.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,26	0,26	1,73	>100	>100

Tujuan Strategis 1 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

Tujuan Strategis pembangunan ke 1 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dengan indikator dengan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengukur capaian pembangunan khususnya dibidang ekonomi, salah satu indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB ADHK (rill) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan publikasi BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 sebesar 2,01 persen mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen. Jika dibandingkan dengan target daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 4,91 persen, maka indikator ini hanya mencapai sebesar 40,93 persen atau kurang sebesar 2,90 persen. Hal ini dikarenakan oleh dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih serta kondisi Geopolitik Global yang tidak stabil yang juga mempengaruhi kondisi perekonomian global, regional serta nasional.

Tabel II.9
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,53	0,01	4,03
B	Pertambangan dan Penggalian	-13,82	10,11	1,82
C	Industri Pengolahan	-7,00	-4,46	-1,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,30	8,54	-3,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,50	3,97	3,31
F	Konstruksi	-1,46	1,71	1,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,17	5,81	9,21
H	Transportasi dan Pergudangan	-12,99	8,29	11,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,65	6,29	9,94
J	Informasi dan Komunikasi	18,32	5,93	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,44	5,36	8,60
L	Real Estate	5,02	4,29	8,19
M,N	Jasa Perusahaan	-9,11	4,09	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,63	4,64	-0,44
P	Jasa Pendidikan	-0,77	1,86	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	9,24	2,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	-4,69	2,20	7,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-5,35	0,20	2,01

Keterangan : *) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

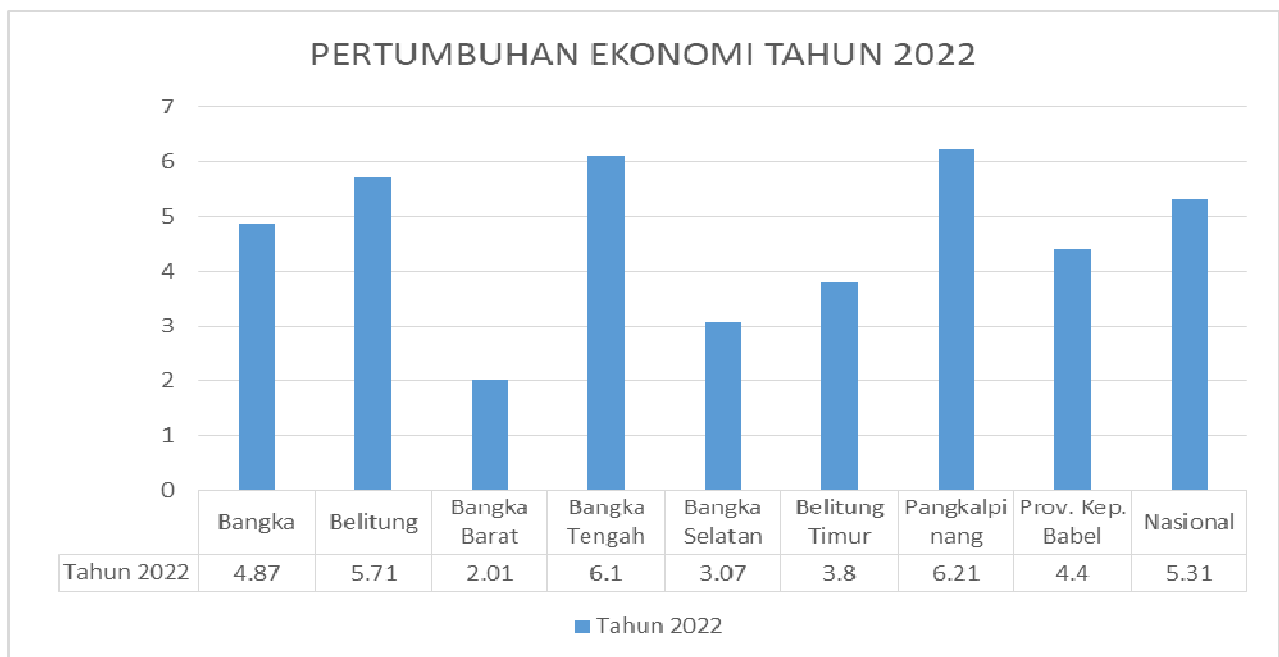
Pada tahun 2022, dari 17 kategori lapangan usaha pembentuk PDRB, hanya 11 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, sementara 3 kategori lapangan usaha mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang negatif dan 3 kategori lapangan usaha mengalami penurunan.

Tiga kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah **Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum** serta **Jasa Keuangan dan Asuransi**. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tertinggi adalah pada lapangan usaha **Pengadaan Listrik dan Gas**.

Jika dilihat selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 merupakan capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi, sementara Tahun 2020 merupakan kondisi terendah dalam perekonomian Kabupaten Bangka Barat.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 berada pada posisi terendah diikuti oleh Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Sementara jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun nasional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 4,40 persen dan nasional dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen.

Grafik II.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tujuan Strategis 2 “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Tujuan Strategis pembangunan ke 2 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dengan indikator Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Indikator pengeluaran per kapita ini merupakan salah satu dari indikator dari Indeks Pembangunan Manusia

untuk mengukur dimensi standar hidup layak. Capaian indikator kinerja tujuan beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.10
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12.605	12.790	101,47	<i>Baik Sekali</i>

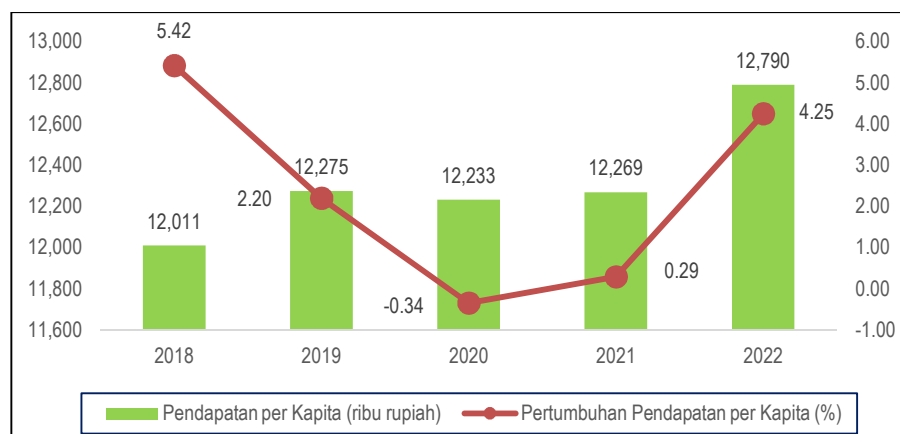
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar 12.790 ribu rupiah dengan ketercapaian 101,47% jika dibandingkan dengan target di Tahun 2022 sebesar 12.605 ribu rupiah. Pada Tahun 2022 pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,25% .

Tabel II.11
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12.269	12.790	104,24	<i>Meningkat</i>

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan Pengeluaran per Kapita 12.269 ribu rupiah. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 15.245 ribu rupiah, maka telah tercapai 83,90%.

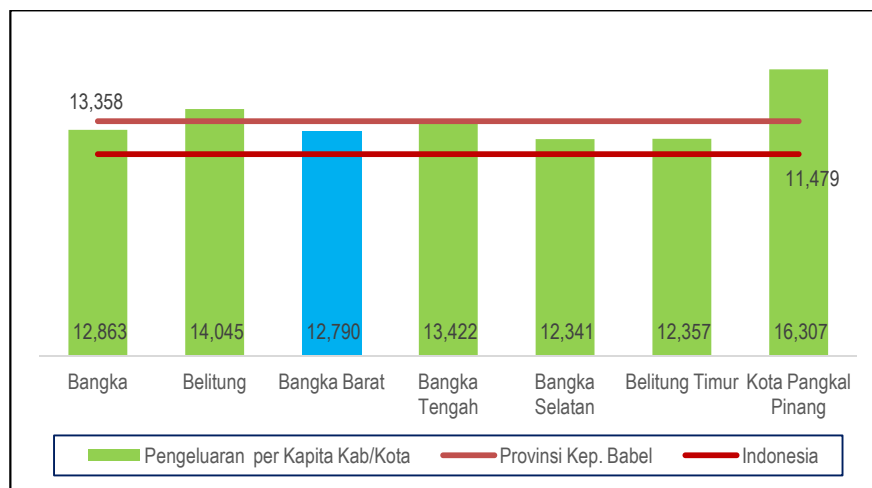
Grafik II.2
Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selama 5 tahun terakhir, Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat secara tren terus mengalami peningkatan, sementara jika dilihat dari pertumbuhannya mengalami fluktuasi yaitu sempat terjadi perlambatan pertumbuhan di masa Covid-19 namun terus mengalami perbaikan pasca Covid-19 dengan pertumbuhan yang cukup tinggi di Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya semakin meningkat. Meningkatnya Pengeluaran per Kapita ini salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan harga barang dan jasa yang akan dibayarkan oleh masyarakat.

Grafik II.3
Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota dilingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat berada di posisi 3 terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (13.358 ribu rupiah), maka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Bangka Barat lebih rendah, namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional (11,479 ribu rupiah).

Tujuan Strategis 3 “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”

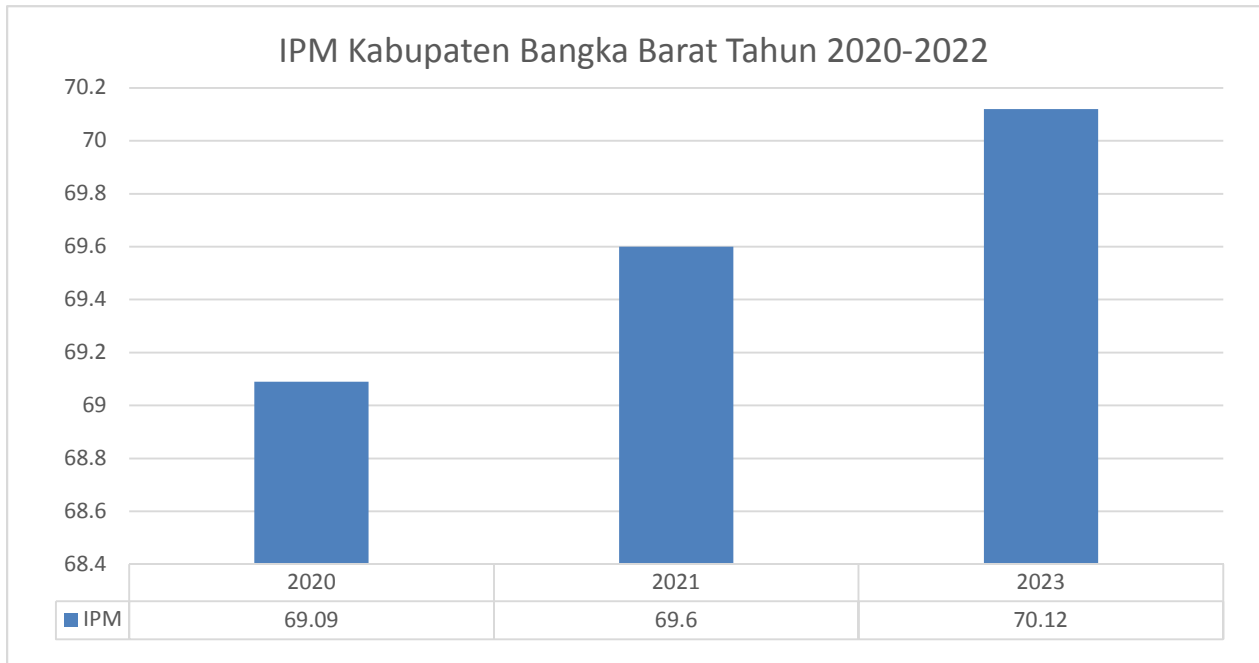
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur Sasaran Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM.

Nilai IPM Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar 70,12 dan jika dibandingkan dengan target IPM dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 69,92, maka melebihi mencapai target dengan capaian sebesar 100,28 persen atau kategori **“Baik Sekali”**.

Jika dilihat dari perkembangan antar waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Bangka Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,75 persen. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan nilai 69,60 IPM Kabupaten Bangka Barat hanya meningkat sebesar 0,52 poin. Perkembangan ini secara umum menunjukkan perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Bangka Barat meskipun pertumbuhannya cenderung lambat. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD

Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dengan nilai sebesar 70,60, maka telah mencapai sebesar 99,32 persen. maka target akhir RPJMD untuk IPM optimis tercapai

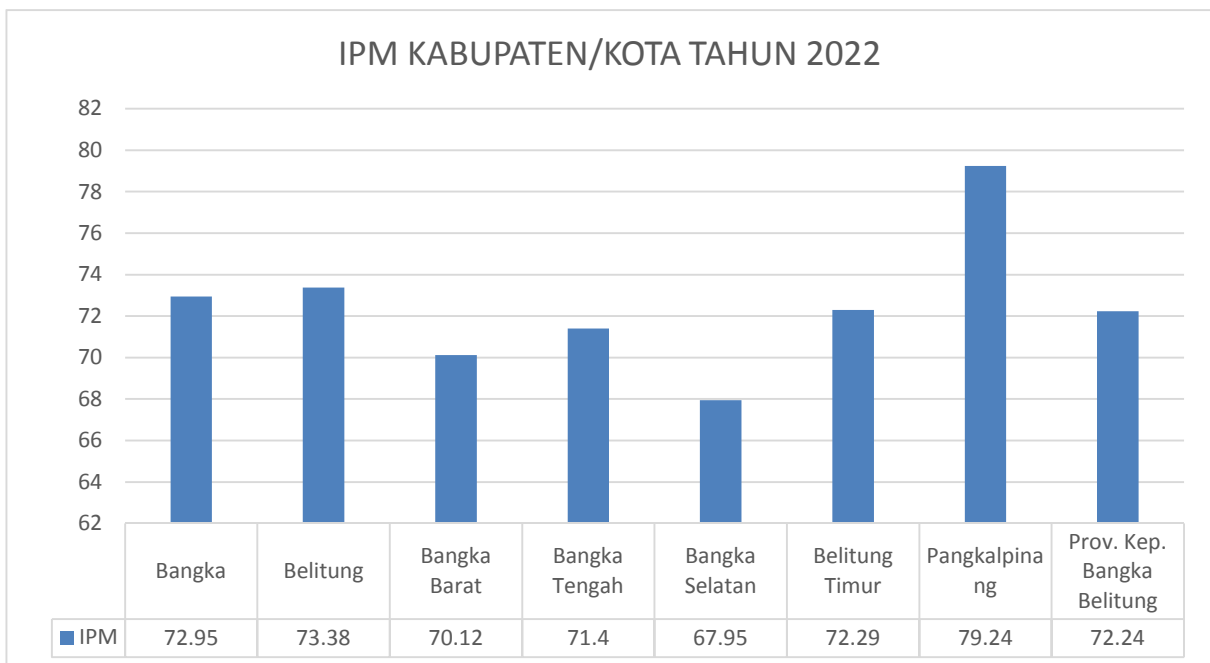
Grafik II.4
IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022



Sumber Data BPS Tahun 2023

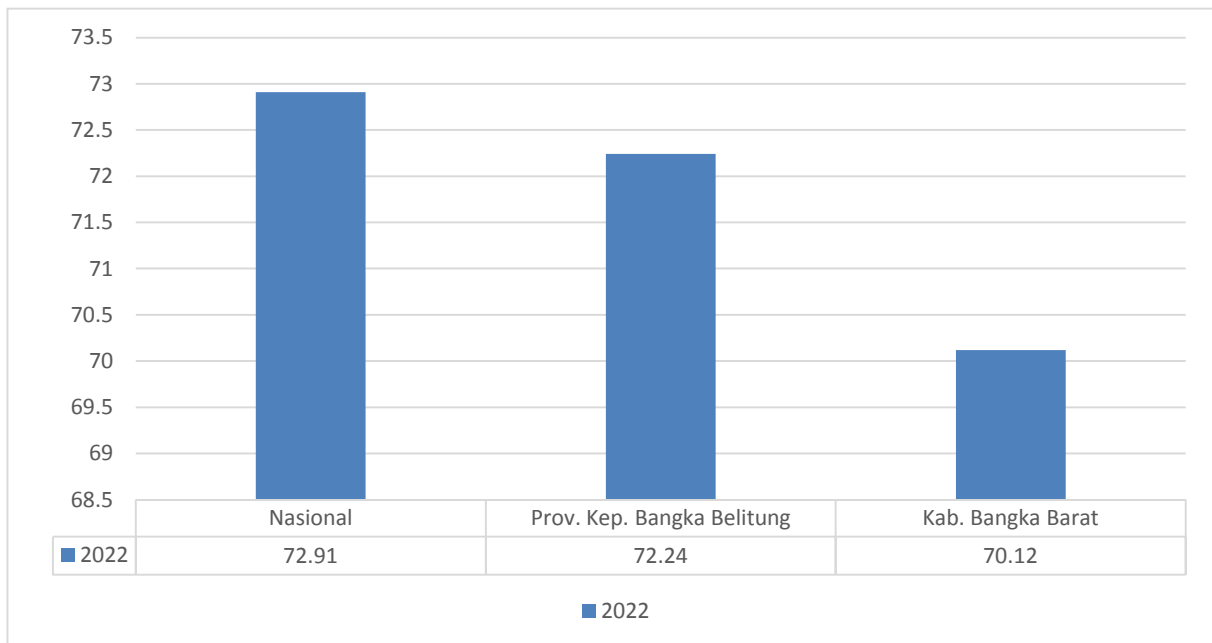
Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat masih berada di peringkat ke-6 (enam) atau terendah kedua setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan IPM Nasional, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,12 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2,79 poin dari IPM Nasional.

Grafik II.5
IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik II.6
IPM Nasional , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Berubahnya status pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Status pembangunan manusia berdasarkan capaian IPM diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Sampai dengan Tahun 2020, status Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat masih masuk kedalam kelompok sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), sedangkan status Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional telah masuk di kelompok tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$).

Untuk melihat perkembangan IPM, tidak terlepas dari 3 komponen pembentuknya. Dilihat dari 3 komponen pembentuk IPM di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat (Umur Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah) dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan. Sementara dimensi standar hidup layak (Pengeluaran Per Kapita) selama enam tahun terakhir mengalami penurunan di Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan masih terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kondisi perekonomian internasional, nasional dan regional turut berdampak.

Tabel II.12
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2022

Komponen IPM	2021	2022
UHH (tahun)	70,08	70,25
HLS (tahun)	11,70	11,72
RLS (tahun)	7,44	7,46
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	11.269	12.790
IPM	69,60	70,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Sementara jika dibandingkan antara Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, ada 3 nilai komponen IPM Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 lebih rendah dari Nasional dan 4 komponen lebih rendah dari Provinsi.

Tabel II.13
Komponen IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022
serta perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Komponen IPM	UHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	IPM
Indonesia	71,85	13,10	8,69	11.479	72,91
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,98	12,18	8,11	13.358	72,24
Kabupaten Bangka Barat	70,25	11,72	7,46	12.790	70,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Ket : UHH (Umur Harapan Hidup)
HLS (Harapan Lama Sekolah)
RLS (Rata-rata Lama Sekolah)

Tujuan Strategis 4. “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Sasaran Strategis 4 **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik** dengan indikator Indek Reformasi Birokrasi. sebagaimana kita ketahui Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan berkelas dunia.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60	53,48	89,13	Baik

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 adalah 53,48 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.15
Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	10,13	11,27
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,75	5,61
	III. Reform	30,00	4,06	4,88
	Total Komponen Pengungkit	60,00	17,38	21,76

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,82	7,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83	8,56
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,46	7,89
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,77	7,46
Total Komponen Hasil		40,00	30,88	31,72
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	49,60	53,48

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Berikut hasil antara dari masing-masing instansi *leading sector* berdasarkan hasil evaluasi yang telah diterbitkan tahun 2020.

Tabel II.16
Hasil evaluasi Instansi Leading Sektor 2021-2022

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1.	Indeks Sistem Merit	0-400	89,0		KASN
2.	Indeks Kualitas Kebijakan	0-100	50,83		LAN
3.	Indeks Profesionalitas ASN	0-100	67,42	46 , 64	BKN
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,27	2,30	Kementerian PANRB
5.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	48,66	77,90	LKPP
6.	Indeks Pelayanan Publik	0-5	2,33	3,08	Kementerian PANRB
7.	Kapabilitas APIP	0-5		2	BPKP
8.	Maturitas SPIP	0-5	2	2	BPKP
9.	Indeks Pengawasan Kearsipan	0-100	67,92	56,08	ANRI
10.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	70,49	81,51	Ombudsman Republik Indonesia
11.	Reformasi Hukum	0-100		56,08	Kementerian Hukum dan HAM

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.17
Hasil evaluasi Komponen Hasil Sektor 2022

NO	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	68,65	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik IPKP	0-100	85,60	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	78,88	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK
5	Survei Internal Organisasi	0-100	83,83	SPI Internal oleh KPK

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Selain hal tersebut, komponen hasil juga mencakup capaian penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.2 Tahun 2022 dan penghargaan-penghargaan lain yang diterima.

Target Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2022 adalah sebesar 60 dengan Kategori Cukup (CC), apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 53,48 dengan Kategori "CC", maka realisasi tercapai sebesar 89,13 persen dengan kategori **Baik** Pemerintah Kabupaten Bangka Barat perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai target minimal indeks RB > 60 atau predikat "B". Berbagai upaya telah dilakukan untuk menaikkan nilai Indeks Reformasi, antar lain :

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:

- a. Mendorong Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan dan menajamkan program reformasi birokrasi;
- b. Internalisasi nilai core value ASN di tingkat PD oleh agen perubahan;
- c. Menyusun katalog Perda dan Perbup untuk memudahkan klasifikasi dan inventarisasi peraturan daerah yang berlaku;
- d. Mempermudah layanan dokumen kependudukan melalui digitalisasi program layanan;
- e. Melakukan analisis jabatan pada perangkat daerah;
- f. Penjenjangan kinerja pada PD sudah sampai ke tingkat pelaksana.

Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi Birokrasi adalah:

- a. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level PD. Program-program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level PD diharapkan dapat fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
- b. Menetapkan agen perubahan secara baik sehingga dapat menciptakan budaya kinerja yang lebih baik pada masing-masing unit kerja sesuai dengan targettarget yang diharapkan;
- c. C. Memetakan kebijakan yang ada agar dapat mendeteksi kebijakan yang tidak harmonis, dan kebijakan yang tumpang tindih antara kebijakan Pusat/Pemda dan PD;
- d. Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan e-government yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan dan evaluasi secara berkala;
- e. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia, antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan asesmen pegawai secara menyeluruh, menyusun HCDP dan pemetaan talenta pegawai sebagai dasar penempatan jabatan yang bersifat kritikal/suksesi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja yang telah dibangun dan menyusun pedoman akuntabilitas kinerja sebagai acuan dalam mencapai kinerja yang diharapkan;

- g. Pelaksanaan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System*, pengelolaan pengaduan masyarakat, benturan kepentingan, serta penerapan sistem pengendalian internal pemerintah baik di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat PD; dan
- h. Mengimplementasikan sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar. Selanjutnya, meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil survei pelayanan publik secara berkala.

Tabel II.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif
Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	53,48	61	87,67	Optimis Tercapai

Jika dilihat dari target pada indikator indeks reformasi birokrasi di akhir Tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat sebesar 61, maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2022 Optimis mencapai target akhir RPJMD.

Tujuan Strategis 5. “Meningkatnya kemampuan Keuangan Daerah”

Tujuan ke-5 adalah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang diukur dari indikator Indeks Kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, indeks/rasio kapasitas fiskal daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 sebesar 1,733 atau pada kategori “Sedang”.

Hasil penghitungan rasio kapasitas fiskal daerah tahun 2022 “tidak dapat diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya (2021), terhadap Perjanjian Kinerja dan target di RPJMD karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdapat beberapa perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMI/07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yaitu antara lain sebagai berikut:

Tabel II.19
Perubahan Dari Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMI/07/2021
tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

No	Unsur	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 116/PMI/07/2021	Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.07/2022
1.	Penggunaan istilah	Indeks	Rasio
2.	Formula penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota	$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$ Keterangan: $KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota	$KFD_{kabupaten/kota-i} = [\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]$ Keterangan: $KFD_{kabupaten/kota-i}$ = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota

3.	Formulasi penghitungan indeks/rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota	$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$ <p>Keterangan:</p> <p>IKFD_{kabupaten/kota-i} = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota</p> <p>KFD_{kabupaten/kota-i} = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota</p> <p>∑KFD_{kabupaten/kota} = Total Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota</p> <p>n = 508 (lima ratus delapan) daerah kabupaten/kota</p>	$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i}}$ <p>Keterangan:</p> <p>RKFD_{kabupaten/kota-i} = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota</p> <p>KFD_{kabupaten/kota-i} = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota</p> <p>Belanja Pegawai_{kabupaten/kota-i} = Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota</p>																								
4.	Rentang kategori RKFD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rentang IKFD</th> <th>Kategori Kapasitas Fiskal Daerah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IKFD < 0,530</td> <td>sangat rendah</td> </tr> <tr> <td>0,530 ≤ IKFD < 0,727</td> <td>rendah</td> </tr> <tr> <td>0,727 ≤ IKFD < 1,053</td> <td>sedang</td> </tr> <tr> <td>1,053 ≤ IKFD < 1,838</td> <td>tinggi</td> </tr> <tr> <td>IKFD ≥ 1,838</td> <td>sangat tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	IKFD < 0,530	sangat rendah	0,530 ≤ IKFD < 0,727	rendah	0,727 ≤ IKFD < 1,053	sedang	1,053 ≤ IKFD < 1,838	tinggi	IKFD ≥ 1,838	sangat tinggi	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rentang RKFD</th> <th>Kategori Kapasitas Fiskal Daerah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RKFD < 1,171</td> <td>sangat rendah</td> </tr> <tr> <td>1,171 ≤ RKFD < 1,504</td> <td>rendah</td> </tr> <tr> <td>1,504 ≤ RKFD < 1,838</td> <td>sedang</td> </tr> <tr> <td>1,838 ≤ RKFD < 2,171</td> <td>tinggi</td> </tr> <tr> <td>2,171 ≤ RKFD</td> <td>sangat tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	RKFD < 1,171	sangat rendah	1,171 ≤ RKFD < 1,504	rendah	1,504 ≤ RKFD < 1,838	sedang	1,838 ≤ RKFD < 2,171	tinggi	2,171 ≤ RKFD	sangat tinggi
Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah																										
IKFD < 0,530	sangat rendah																										
0,530 ≤ IKFD < 0,727	rendah																										
0,727 ≤ IKFD < 1,053	sedang																										
1,053 ≤ IKFD < 1,838	tinggi																										
IKFD ≥ 1,838	sangat tinggi																										
Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah																										
RKFD < 1,171	sangat rendah																										
1,171 ≤ RKFD < 1,504	rendah																										
1,504 ≤ RKFD < 1,838	sedang																										
1,838 ≤ RKFD < 2,171	tinggi																										
2,171 ≤ RKFD	sangat tinggi																										

Sasaran Strategis 1.1 "Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah"

Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, dan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB yang seluruhnya dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	%	5,5	12,50	227,56	Sangat Baik
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB)	%	5,7	7,56	132,63	Sangat Baik
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,38	2,32	97,48	Baik
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADH)	%	27,03	25,01	92,53	Baik

Pencapaian sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" diukur dari (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB), Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan (ADHB), Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB), Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADH). Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 ada 2 (dua) indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori "Baik Sekali" dan 2 (dua) indikator belum mencapai target yang terdiri 2 (dua) indikator dengan kategori "Baik", dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Sasaran 1.1.1 " Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)".

Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar 12,50% dan jika dibandingkan dengan

target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 5,50%, maka tercapai 227,56% dengan status capaian “Sangat Baik”.

Indikator Kontribusi Sektor Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dihitung dari penjumlahan dari distribusi PDRB (ADHB) pada 3 (tiga) lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
a. Tanaman Pangan
b. Tanaman Hortikultura
c. Tanaman Perkebunan
d. Peternakan
e. Jasa Pertanian dan Perburuan
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu
3. Perikanan

Kabupaten Bangka Barat sebagai Daerah kepulauan tentu memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat dibedakan atas perikanan tangkap dan perikanan Budidaya, perikanan Tangkap dibedakan dengan perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap perairan umum, sedangkan perikanan Budidaya diklasifikasikan atas Budidaya laut Tambak kolam aramba dan sawah. Berikut produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022:

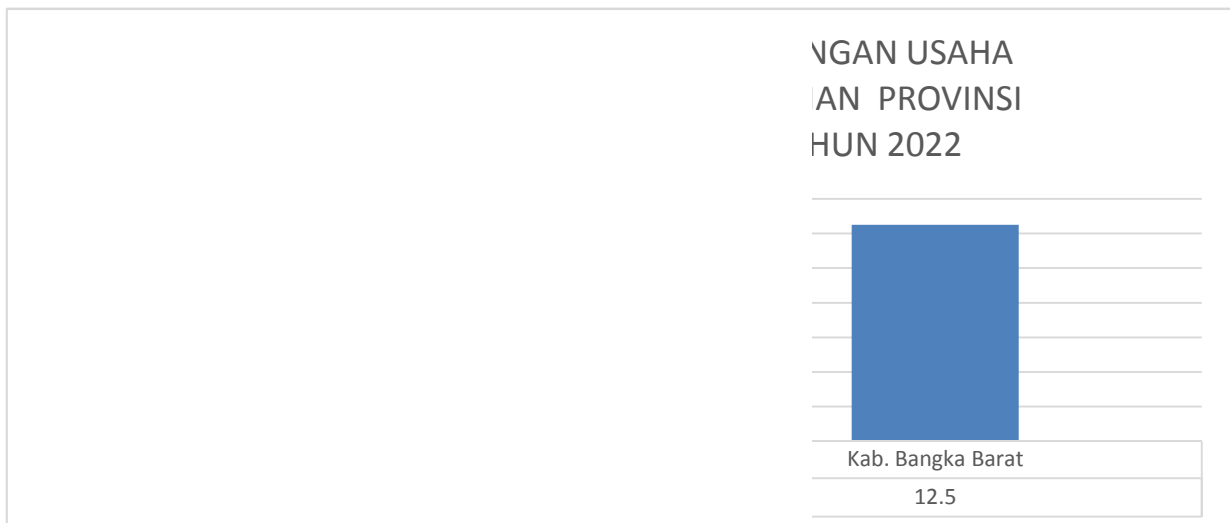
Tabel II.21
Daftar Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO.	JENIS PRODUKSI	PRODUKSI TON					
		Muntok	S.Teritip	Kelapa	Jebus	Paritiga	Tempilang
1.	Perikanan Tangkap	8,355.36	5,805.65	3,502.39	3,923.35	5,509.62	5,940.88
2.	Perikanan Budidaya	390.40	697.67	15.36	14.86	102.72	8.28

Sumber DKP Bangka Barat

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 8,17 %, maka Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Tahun 2022 meningkat 4,33 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki peluang yang cukup baik di Kabupaten Bangka Barat dengan perkembangan yang positif, hal ini karena beberapa faktor mendukung yang menunjang kenaikan ini semisal Kebijakan Pemerintah yang memihak kepada petani dan nelayan seperti pemberian bantuan yang mendorong usaha pertanian dan perikanan untuk meningkatkan hasil produksinya, dan kebijakan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (Tahura) yang menjadi kewenangan Kabupaten yang memberikan kontribusi bukan hanya secara ekologis namun juga secara ekonomis dengan pemberdayaan masyarakat disekitar Tahura.

Grafik II.7
Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)



Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi sebesar 4,22 persen dibanding Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator Sasaran 1.1.2 "Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan"

Realisasi Indikator Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industry pengolahan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar 7,56 % dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 5,70%, maka tercapai 132,63 % dengan status capaian "Sangat Baik".

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 20,74 %, maka Indikator Pertumbuhan lapangan industry pengolahan terhadap PDRB di Tahun 2022 menurun sebesar 13,18 %. Hal ini menunjukkan bahwa sektor usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan di Kabupaten Bangka Barat, disebabkan Industri pengolahan yang terbesar di Kabupaten Bangka Barat yaitu Industri pengolahan Timah mengalami penurunan pasokan bahan baku olahan biji timah / *tin raw material*, hal ini disebabkan bahan baku yang tersedia di alam mulai berkurang serta regulasi yang semakin ketat terkait penambangan biji timah, serta kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih pasca pandemi covid-19.

Berikut data Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel II.22
DATA INDUSTRI PENGOLAHAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	KLASIFIKASI INDUSTRI	ALAMAT USAHA	TAHUN BERDIRI	JENIS USAHA	KAPASITAS PRODUKSI DESAIN	KAPASITAS AKTUAL
1	PT. SAWINDO KENCANA	JAP HARTONO	INDUSTRI BESAR	DESA TEMPILANG, KEC. TEMPILANG, KAB. BANGKA BARAT	2000	CPO DAN KERNEJ/ AGRO INDUSTRI	45 TON/JAM	43 TON/JAM
2	PT. BUMI PERMAI LESTARI PKS BUKIT PERAK	PT. BUMI PERMAI LESTARI PKS BUKIT PERAK	INDUSTRI BESAR	DESA KACUNG, KEC. KELAPA, KAB. BANGKA BARAT	1996	CPO DAN KERNEL	60 TON/JAM	57.3 TON/JAM

3	PT. MP. LEIDONG WEST INDONESIA	SINAR MAS GRUP	INDUSTRI BESAR	DESA TERENTANG, KEC. KELAPA, KAB. BANGKA BARAT	2001	CPO DAN KERNEL	60 TON/JAM	60 TON/JAM
4	PT. GUNUNG SAWIT BINA LESTARI	KARLI BOENJAMIN	INDUSTRI BESAR	DUSUN TERABIK, DESA BELO LAUT, KEC. MUNTOK, KAB. BANGKA BARAT	2003	CPO DAN KERNEL	80 TON/JAM	73.61 TON/JAM
5	PT. TIMAH TBK	PT. TIMAH, TBK.	INDUSTRI BESAR	JL. RAYA PELTIM, KEC. MUNTOK, KAB. BANGKA BARAT		TIMAH BATANGAN	BELUM ADA DATA	30000 TON/TH
6	PT. TIMAH NUSANTARA	PT. TIMAH NUSANTARA	INDUSTRI BESAR	JL. TEMPIULANG RAYA KM 1, KELURAHAN KELAPA KEC. KELAPA, BANGKA BARAT	-	TIMAH BATANGAN	7200 MT/TAHUN	1539 MT PADA TAHUN 2021
7	PT. ENERGI KARYA PERSADA	KENCANA AGRI GROUP	INDUSTRI BESAR	DESA TEMPILANG, KEC. TEMPILANG, KAB. BANGKA BARAT	2018	PENGADAAN LISTRIK	6 MW	4.5-5 MW

Sumber: DKUP Kabupaten Bangka Barat

Berikut data jenis Industri Kecil (UMKM) Pengolahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat :

Tabel II.23
DATA JENIS INDUSTRI KECIL
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022

NO	DAFTAR DIREKTORI	JUMLAH						
		MUNTOK	SIMP.TERITIP	JEBUS	PARIT TIGA	KELAPA	TEMPILANG	TOTAL
1	Kerajinan Sandang	66	62	26	27	59	48	288
2	Pengolahan Makan	530	230	295	327	384	269	2035
3	Pengolahan Makanan dari kedelai (Tempe/Tahu)	18	3	19	34	7	13	94
4	Pengrajin Genteng & Batako	14	4	9	6	13	10	56
5	Pertukangan Kayu	21	45	20	11	44	38	179
6	Air Minum Isi Ulang	36	13	8	16	18	16	107
7	Kerajinan	50	63	55	22	235	51	476
TOTAL		735	420	432	443	760	445	3235

Sumber DKUP Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan lapangan industri pengolahan di Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat lebih rendah sebesar 8,48 persen dibandingkan dengan Pertumbuhan lapangan industri pengolahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 16,04 persen.

Grafik II.8
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan
terhadap PDB/PDRB (ADHB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)



Indikator Sasaran 1.1.3 “Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)”

Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah” terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB, dan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB yang seluruhnya dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya

Capaian nilai kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari table di atas pada tahun 2022 adalah sebesar 2.32% dengan kata lain capaian sekitar 97.48 % atau dengan kategori Baik dari target yang telah ditetapkan sebesar 2,38%. Dari capaian ini dapat diartikan bahwa untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Barat berangsur-angsur membaik setelah pandemic Covid-19 menerjang. Nilai kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat dari Nilai dari Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha pada 2 (dua) jenis lapangan usaha yaitu transportasi dan pergudangan serta sector penyediaan akomodasi dan makan minum yang dihitung dari jumlah tingkat hunian akomodasi , data kunjungan wisatawan serta data pengeluaran wisatawan.

Kontribusi sektor pariwisata jika 4.50% dari capaian sebesar 2,22 % di tahun 2021 menjadi 2,32%. Hal ini menunjukkan bahwa geliat pariwisata di Kabupaten Bangka Belitung sudah mulai meningkat pasca pandemic Covid-19 di tahun 2020 -2021 yang membuat nilai kunjungan menjadi menurun dengan sangat signifikan. Tentunya hal ini merupakan sebuah upaya yang perlu diapresiasi oleh pemerintah Daerah dimana Pemerintah Daerah tidak tinggal diam untuk terus melakukan upaya dan strategi meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bangka Barat melalui berbagai penyelenggaraan event, pelaksanaan pemasaran yang optimal, hingga pembinaan tata kelola pariwisata.

Namun jika dilihat dari persentase kontribusi sektor pariwisata selama kurun waktu 5 (tahun) kebelakang cenderung mengalami kenaikan walaupun di tahun 2021 yang lalu menurun dikarenakan Pandemi Covid-19. Walaupun demikian, Pemerintah Daerah tidaklah tinggal diam setelah wabah Pandemi Covid-19 menyerang, dengan melakukan berbagai inovasi serta strategi untuk kembali meningkatkan kunjungan wisata ke Kabupaten Bangka Barat yang mana di tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan.

Tabel II.24
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Transportas dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,96	0,99	0,93	0,90	0,96
2.	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ <i>Accomodation and food service activities</i>	1,2	1,26	1,40	1,32	1,36
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)		2,16	2,25	2,33	2,22	2,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha di bawah ini, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, perikanan serta industri pengolahan. Sebagai ibukota provinsi, Bangka Barat menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kabupaten Bangka Barat. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 adalah 15,444,44 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang nilainya 13,416,40 miliar rupiah

Capaian Kontribusi sektor pariwisata jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 2,43%. dengan capaian tahun 2022 sebesar 2,32% atau dengan persentase sebesar 95,47%. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sangat optimis tercapai dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sesuai dengan target yang telah ditetapkan di akhir RPJMD. Melalui kolaborasi serta pemasaran yang optimal niscaya di tahun 2026 mendatang target RPJMD untuk Kontribusi Sektor Pariwisata dapat tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Upaya ini optimis tercapai jika melihat komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menggali potensi sector pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder yang bergelut dalam dunia pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Kemudian dengan adanya kolaborasi antara lintas sector baik peran pemerintah, dunia usaha, media, serta masyarakat diharapkan dapat menjadi sebuah arah yang sangat baik dalam memajukan sektor pariwisata daerah.

Indikator Sasaran 1.1.4 “Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB”

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB dihitung dari penjumlahan dari distribusi PDRB (ADHB) pada 9 (sembilan) lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estat*, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Lainnya.

Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar 25,01% dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 27,03%, maka tercapai 92,53%

dengan status capaian “Baik”. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha pembentuk Sektor Perdagangan dan Jasa, penyumbang kontribusi tertinggi adalah pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 14,38% dan yang terendah adalah lapangan usaha jasa perusahaan dengan kontribusinya sebesar 0,15%. Secara keseluruhan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan kontributor tertinggi kedua pada PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat setelah lapangan usaha industri pengolahan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 24,25%, maka Indikator Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB di Tahun 2022 meningkat 0,76%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sector usaha perdagangan dan jasa memiliki peluang yang cukup baik di Kabupaten Bangka Barat dengan perkembangan yang positif. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB pembentuk sektor ini, 5 (lima) lapangan usaha distribusinya mengalami peningkatan yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Real Estat, serta lapangan usaha Jasa Perusahaan. Sementara 3 (tiga) lapangan usaha distribusinya mengalami penurunan yaitu pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sedangkan pada lapangan usaha Jasa Lainnya tidak mengalami perubahan.

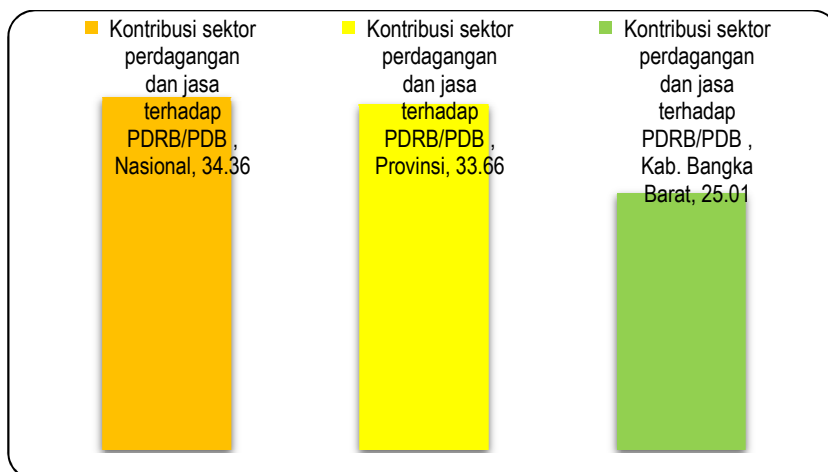
Meskipun Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021, namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih disebabkan pandemi Covid-19. Kategori lapangan usaha yang terkena dampak besar dari Covid-19 akan turut pulih dengan berangsur-angsur dengan pulihnya kondisi ekonomi sosial masyarakat.

Tabel II.25
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,55	14,06	14,11	13,28	14,38
2.	Informasi dan Komunikasi	0,33	0,37	0,45	0,42	0,43
3.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,45	0,47	0,45	0,49
4.	Real Estat	2,09	2,08	2,33	2,14	2,20
5.	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
6.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,73	5,16	4,71	4,35
7.	Jasa Pendidikan	1,82	1,91	2,11	1,92	1,85
8.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,85	0,91	0,88	0,85
9.	Jasa lainnya	0,31	0,32	0,34	0,31	0,31
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB		24,98	24,92	26,03	24,25	25,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

Grafik II.9
Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDB/PDRB (ADHB) Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 (25,01%) lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (33,66%) dan Nasional (34,36%). Ini menunjukkan bahwa sektor Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Bangka Barat masih belum secara maksimal berkontribusi dalam menopang perekonomian di Kabupaten Bangka Barat. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat masih sangat bergantung pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan distribusi terhadap PDRB (ADHB) di Tahun 2022 sebesar 44,65%.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 28,56%, Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB baru mencapai 87,57% dengan status capaian “Optimis Tercapai”. Dengan semakin membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 baik di lingkup daerah, regional, nasional maupun dunia, diharapkan target akhir RPJMD optimis dapat dicapai.

Berdasarkan letak strategis Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan, maka sangat berpotensi menunjang sektor perdagangan dan jasa. Selain itu dengan dikembangkannya Pelabuhan Tanjung Ular serta pengusulan sebagai Kawasan Industri Tanjung Ular akan menjadi potensi yang sangat besar di berbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, serta perhubungan transportasi darat dan laut. Sampai dengan saat ini upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah dengan secepatnya melakukan operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Ular dengan melibatkan pihak swasta dan BUMN serta pengajuan Kawasan Industri Terpadu Pelabuhan Tanjung Ular ke Kementerian terkait.

Tabel II.26
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1 666,97	1 605,94	1 777,85	1 923,30	2 163,70
2.	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1309,93	1176,26	1 007,12	1 345,49	1 332,66
3.	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6083,73	6456,63	5 761,64	6 956,87	7 483,26

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
4.	Pengadaan Listrik dan gas/ Electricity and Gas	8,19	9,59	11,60	12,52	12,27
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang / Water Supply, Sewarage, Waste Management and Remediation Activities	1,00	1,03	1,17	1,23	1,28
6.	Konstruksi/ Construction	997,15	1062,66	1050,24	1106,14	1186,65
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade, repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2010,13	1990,96	1892,64	2049,36	2410,50
8.	Transportas dan Pergudangan/ Transportation and Storage	132,36	139,70	124,39	139,01	160,36
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum/ Accomodation and food service activities	165,72	177,84	187,60	203,20	228,70
10.	Informasi dan Komunikasi/ Information and communication	45,71	51,69	61,02	65,15	71,48
11.	Jasa keuangan dan asuransi/ financial and insurance activities	289,22	295,08	313,19	330,37	368,92
12.	Real estat/ Real estate activities	20,25	20,96	20,37	21,81	24,30
13.	Jasa perusahaan/ business activities	624,89	669,57	692,13	727,36	728,46
14.	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib/ Pubic administration and defence, compulsory social security	251,83	269,78	282,51	296,81	310,77
15.	Jasa pendidikan/ Education	108,59	119,86	122,49	135,84	142,03
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/ Human Health and Social Work Activities	43,12	46,00	45,90	47,56	51,90
17.	Jasa lainnya/ pther services activities	13 817,30	14 157,20	13 414,98	15 431,57	16 759,68
Produk Domestik Regional Bruto / Gross Regional Domestic bruto		13 221,43	13 817,30	14 157,20	13 416,40	15 444,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan realisasi sebesar 24,25%, maka Indikator Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB di Tahun 2022 meningkat 0,76%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum sector usaha perdagangan dan jasa memiliki peluang yang cukup baik di Kabupaten Bangka Barat dengan perkembangan yang positif. Dari 9 (sembilan) lapangan usaha PDRB pembentuk sektor ini, 5 (lima) lapangan usaha distribusinya mengalami peningkatan yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, lapangan usaha Real Estat, serta lapangan usaha Jasa Perusahaan. Sementara 3 (tiga) lapangan usaha distribusinya mengalami penurunan yaitu pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, lapangan usaha Jasa Pendidikan serta lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sedangkan pada lapangan usaha Jasa Lainnya tidak mengalami perubahan.

Meskipun Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat Pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021, namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih disebabkan pandemi Covid-19. Kategori lapangan usaha yang terkena dampak besar dari Covid-19 akan turut pulih dengan berangsur-angsur dengan pulihnya kondisi ekonomi sosial masyarakat.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, perikanan serta industri pengolahan. Sebagai ibukota provinsi, Bangka Barat menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kabupaten Bangka Barat. Begitu

juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kabupaten Bangka Barat. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bangka Barat. PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 adalah 15,444,44 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang nilainya 13,416,40 miliar rupiah.

Tabel II.27
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022
Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	8,17	12,50	52,99	Meningkat
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	Persentase	20,74	7,56	-63,54	Menurun
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,22	2,32	104,50	Meningkat
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	24,25	25,01	103,13	Meningkat

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan dengan Tahun 2021 ada 3 (tiga) indikator Sasaran dengan status capaian "Meningkat" dan 1 (satu) indikator dengan status capaian "Menurun",

Tabel II.28
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah Tahun 2022
terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TA. 2022	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	12,50	7,50	166,66	Optimis Tercapai
Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	Persentase	7,56	4,64	162,93	Optimis Tercapai
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,32	2,43	95,47	Optimis Tercapai
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	25,01	28,56	87,57	Optimis Tercapai

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Penyuluhan Pertanian.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian.
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA);
8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

10. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan;
11. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
12. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
13. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
14. Program Pengembangan UMKM;
15. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
16. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
17. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
18. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
19. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
20. Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri nasional;
21. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
22. Program Pengelolaan Pelayaran;
23. Program Peningkatan Daya Daya Tarik Destinasi pariwisata;
24. Program Pemasaran Pariwisata;
25. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif;
26. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
27. Program pengembangan kebudayaan;
28. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
29. Program Pembinaan Sejarah;
30. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
31. ProgramPengelolaan Permuseuman;
32. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
33. Program Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistimnya;
34. Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan;
35. Program Stabilitas Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
36. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
37. Program Pengembangan Ekspor;
38. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
39. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Tabel II.29
Analisis Program sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
Tahun 2022

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	10.624.351.324,00	9.464.434.303,00	89,08
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	265.085.200,00	255.924.300,00	96,54
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	852.192.620,00	618.622.100,00	72,59
3.	Program Penyuluhan Pertanian	104.183.800,00	88.107.730,00	84,57
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	173.557.000,00	157.264.250,00	90,61
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	18.326.600,00	13.776.600,00	75,17
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	228.131.015,00	203.453.00,00	89,18

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
7.	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	2.510.478.020,00	2.436.447.080,00	97,05
8.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	-
9.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	45.080.000,00	44.634.100,00	99,01
10.	Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	90.730.000,00	82.617.500,00	91,06
11.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-
12.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-
13.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);	129.874.000,00	123.544.000,00	95,13
14.	Program Pengembangan UMKM	170.089.000,00	148.857.500,00	87,52
15.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120.406.000,00	118.190.518,00	98,16
16.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	115.059.000,00	108.442.498,00	95,25
17.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	583.303.800,00	556.147.454,00	93,20
18.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	223.775.260,00	203.493.460,00	90,94
19.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	22.740.000,00	12.590.000,00	55,36
20.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri nasional	21.300.000,00	18.800.000,00	88,26
21.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	63.204.900,00	63.173.900,00	99,95
22.	Program Pengelolaan Pelayaran	23.690.700,00	10.190.700,00	43,02
23.	Program Peningkatan Daya Daya Tarik Destinasi pariwisata	1.469.619.764,00	1.457.852.214,00	99,19
24.	Program Pemasaran Pariwisata	290.186.650,00	269.652.750,00	92,92
25.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	642.275.000,00	489.233.392,00	76,17
26.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemamfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	7.740.900,00	5.240.000,00	67,69
27.	Program pengembangan kebudayaan	797.011.640,00	622.764.500,00	78,13
28.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	139.148.300,00	137.784.400,00	99,02
29.	Program Pembinaan Sejarah	197.687.405,00	189.319.000,00	95,77
30.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	312.731.770,00	311.686.000,00	99,67
31.	Program Pengelolaan Permuseuman	33.220.000,00	33.154.000,00	99,80
32.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.110.000,00	4.110.000,00	100
33.	Program Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya	421.039.080,00	394.838.780,00	93,78
34.	Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan	327.800.000,00	148.857.500,00	87,52
35.	Program Stabilitas Harga barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.850.000,00	41.840.000,00	80,69
36.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	-	-	-
37.	Program Pengembangan Ekspor	136.125.000,00	88.311.523,00	64,88
38.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-
39.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	95.803.800,00	68.647.454,00	71,65

Tabel II.30
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No.	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Kinerja Per Sasaran	% Penyerapan Anggaran Per Sasaran	Efisiensi
	1	2	3	4 = 2-3
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	137,55	89,08	Efektif

Sasaran Strategis 1.2 "Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan orang yang melakukan investasi adalah disebut investor atau penanam modal. Begitu juga proses penanaman modal di wilayah Kabupaten Bangka Barat, dimana berdasarkan misi pertama pada RPJMD Periode 2021-2026 yakni **“Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”** dan tujuan **“Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah yang didominasi oleh industri pengolahan sebagai *leading sector* dan mampu menggerakkan sektor lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan”** serta sasaran **Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah yang setiap tahun diukur pencapaian kinerjanya.**

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.31
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	1.403 M	805 M	174,28	Baik Sekali

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per 31 Desember 2022 nilai realisasi investasi sementara sebesar Rp. 1.403.739.200.387,- laporan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal untuk Triwulan IV batas waktu untuk menyampaikan laporan tahun 2022 sampai dengan bulan maret tahun berikutnya. Nilai realisasi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan para pelaku usaha rata-rata sudah melaporkan usahanya sehingga pencapaian indikator kinerjanya **“tercapai”** dan dapat dikatakan sangat berhasil.

Tabel II.32
Laporan Kegiatan Penanaman Modal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	JENIS USAHA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	STATUS PERUSAHAAN	CAPAIAN DALAM Milyar RUPIAH
					2022
1	Investasi Sektor Primer	PT. Swarna Nusa Sentosa	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	8.806.895.145
2		PT. Bumi Permai Lestari	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	689.231.154.691
3		PT. Deli Sawit Lestari	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	15.000.000
4		PT. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	52.157.002.045
5		PT. Tata Hampanan Eka Persada	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMDN	1.367.151.050
6		PT. Fenco Pasifik Indonesia	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	3.350.000.000
7		PT. Kharisma Permata Bangka	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	1.010.000.000
8		PT. Budi Agri Sejahtera	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	1.450.000.000
9		PT. Bangka Budidaya Lestari	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	3.400.000.000
10		PT. Cahaya Samudera Bangka	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	18.858.555.230

No.	JENIS USAHA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	STATUS PERUSAHAAN	CAPAIAN DALAM MILYAR RUPIAH
					2022
11		CV Putra Putri Sanusi Sejahterah	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	3.550.000.000
12		PT. Belo Laut Mandiri	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	2.750.000.000
13		PT. Bakit Indah Mandiri	Pembesaran Crustacea Air Payau	PMDN	6.000.000.000
14		PT. Suri Tani Pemuka	Pembenihan Ikan Laut	PMDN	122.585.589
15		PT. Timah Nusantara	Pertambangan Bijih Timah	PMDN	3.588.600.000
16		PT. Kim Hin Utama	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	PMDN	47.866.249.000
17		PT. Jebus Utama	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	PMDN	22.386.349.000
		PT. Gemilang Energi Bangka	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi	PMDN	300.000.000
18.			PT. GSBL	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	PMA
19	Investasi Sektor Sekunder	PT. Deli Sawit Lestari	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawe (Crude Paim Oil)	PMDN	50.000.000
20		PT. Bumi Permai Lestari	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawe (Crude Paim Oil)	PMDN	77.099.721.388
21		PT. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawe (Crude Paim Oil)	PMDN	91.284.890.586
22		PT. Samator Gas Industri	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	PMDN	144.104.700.000
23		PT. Timah TBK	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	PMDN	174.630.000.000
24		PT. Timah Nusantara	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	PMDN	2.000.000.000
25		PT. Bakti Timah Medika	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	PMDN	5.494.364.564
26		PT. Bakti Timah Medika	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	PMDN	10.464.940.016
27		PT. Nirwana Anugerah Medika	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	PMDN	7.500.000.000
28			PT. GSBL	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit	PMA
29	Investasi Sektor Tersier	CV. Arya Gemilang Suksestama	Pemasangan Kerangka Baja	PMDN	500.000.000
30		CV. Al Fazza Mandiri	Konstruksi Gedung Lainnya	PMDN	234.000.000
31		CV. AGG	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	PMDN	5.000.000
32		PT. Inti Putri Pusaka Raya	Perdagangan Eceran Premium, Premix dan Solar di Toko	PMDN	2.075.000.000
33		PT. Semumbang Jaya	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	PMDN	1.500.000
34		PT. Deli Sawit Lestari	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	PMDN	5.000.000
35		PT. Rajatra Oetaru Sentosa	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara	PMDN	7.540.000.000
36		PT. Billiton Energi Sejahtera	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara	PMDN	1.385.000.000
37		PT. Tunas Dwipa Matra	Perdagangan Besar	PMDN	150.000.000

No.	JENIS USAHA	NAMA PERUSAHAAN	JENIS INVESTASI	STATUS PERUSAHAAN	CAPAIAN DALAM Milyar Rupiah
					2022
			Sepeda Motor Baru		
38		CV. Kurnia Utama	Restoran	PMDN	415.000.000
39		PT. Intri Putri Pusaka Raya	Pergudangan dan Penyimpanan	PMDN	400.000.000
40		PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	PMDN	3.216.844.000
41		CV. Kurnia Utama	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	PMDN	470.000.000
	TOTAL				1.403.739.200.387

Berdasarkan LKPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021.

Tabel II.33
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	1.183 M	1.403 M	118,59	Meningkat

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sudah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran **sasaran pertama misi 1** pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.220.683.993.972,- Berdasarkan skala capaian kinerja dikategorikan **"Meningkat"**.

Faktor pendorong terhadap peningkatan capaian indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

- Membuat peraturan tentang kebijakan penanaman modal, terutama mengenai fasilitas, layanan dan jaminan bagi investor jika melakukan investasi di Kabupaten Bangka Barat;
- Giat pelaku usaha dalam melaporkan perkembangan usaha secara berkala;
- Melakukan sub system pengawasan dengan "jemput bola" kepada pelaku usaha yang kurang tertib;
- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam;
- Bekerjasama dengan OPD teknis terkait perbaikan infrastruktur yang menunjang investasi;
- Membuat peta investasi yang akan menjadi referensi bagi calon investor untuk dapat menanamkan investasinya di Kabupaten Bangka Barat;
- Ada beberapa Perusahaan Sawit yang melakukan *replanting* yang membutuhkan dana yang besar;
- Menetapkan SOP untuk perizinan terkait Penanaman Modal seperti izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, dan izin prinsip penanaman modal.

Tabel II.34
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah
Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal (PMA dan PMDN)	Milyar Rupiah	1.403 M	1.253 M	111,88	Optimis Tercapai

Capaian kinerja indikator Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat guna meningkatkan pencapaian jumlah investasi dalam satu tahun untuk tahun-tahun mendatang, sesuai dengan yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani teknis bahwa:

- a. Menggali lebih banyak potensi daerah di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang belum dikelola dengan baik, sehingga ke depannya dapat menarik para investor;
- b. Melakukan pendekatan kepada pelaku usaha/perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku;
- c. Mengoptimalkan secara berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam yang ada;
- d. Disusunnya Perda Kemudahan berInvestasi / Insetif bagi pelaku usaha di Kabupaten Bangka Barat;
- e. Melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam mengambil peluang banyak investasi dari investor di luar Kabupaten Bangka Barat ;

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya jumlah investasi/penanaman modal di daerah secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penanaman modal di daerah Kabupaten Bangka Barat, serta oleh perangkat daerah lain dalam hal peningkatan sarana penunjang investasi di daerah seperti infrastruktur. Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Program Promosi Penanaman Modal.
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Tabel II.35
Analisis Program sasaran Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2022

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	$4=3/2*100$
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	800.039.340	576.657.309	72,07
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.075.000	6.725.000	95,05
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.295.000	84.890.000	85,49
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	387.645.000	228.775.000	59,02
4.	Program Promosi Penanaman Modal	-	-	-
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	306.024.340	256.267.309	83,74

Tabel. II.36
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	72,07	174,28	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2022 maka realisasi anggaran sebesar 72,07% dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 174 % menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 27,93%.

Sasaran Strategis 1.3 “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah”

Capaian indikator kinerja Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah” beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.37
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Perjanjian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,68	0,70	0,72	103	Baik Sekali
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	-	Sedang	Sedang	100	Baik Sekali

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah” diukur dari 2 (dua) indikator yaitu, Indeks Konektivitas dan Indeks Bangunan Gedung. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 indikator Sasaran dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan kategori “**Baik Sekali**” Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Sasaran 1.3.1 “Indeks Konektivitas”

Pada tahun 2022 capaian Indeks konektivitas sebesar 103% dengan status tercapai. Untuk indikator indeks konektivitas dari target 0,70 dapat di realisasikan sebesar 0,72 ada penambahan sebesar 0,02 atau melebihi target. Penambahan jaringan jalan ada pada Desa Air Putih dan Air Limau. Untuk Desa Air Putih ada peningkatan nilai indeks konektivitas 0,5 dan untuk Desa Air Limau 0,33. Kenaikkan ini karena ada dukungan Dana untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp. 28.638.935.950 yang bersumber dari APBD murni, DID dan DAK. Untuk menunjang kenaikan indeks konektivitas ini, Bidang Bina Marga melaksanakan pembuatan 2 DED Jalan yang merupakan persyaratan dalam pembuatan jaringan jalan baru, yakni DED Jalan Simpang Bulin Petar dan DED Jalan Nibung Rumpis. Berikut Tabel Nilai Indeks Konektivitas perdesa pada tahun 2022:

Tabel II.38
Nilai Indeks Konektivitas perdesa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektivitas
1	KELAPA	DESA	KAYUARANG	1	2	0,50
2			MANCUNG	2	3	0,67
3			SINAR SARI	2	3	0,67

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektifitas
4		KELURAHAN	KELAPA	4	5	0,80
5		DESA	BERUAS	3	4	0,75
6			PUSUK	2	3	0,67
7			TEBING	2	3	0,67
8			AIR BULIN	3	4	0,75
9			DENDANG	3	4	0,75
10			KACUNG	3	4	0,75
11			TERENTANG	2	3	0,67
12			TUGANG	2	3	0,67
13			TUIK	2	3	0,67
14			PANGKAL BERAS	2	3	0,67
15	TEMPILANG		TANJUNGIUR	3	4	0,75
16			BENTENG KUTA	2	3	0,67
17			AIR LINTANG	3	4	0,75
18			SINAR SURYA	2	3	0,67
19			TEMPILANG	4	5	0,80
20			BUYAN KELUMBI	2	3	0,67
21			SANGKU	3	4	0,75
22			PENYAMPAK	3	4	0,75
23			SIMPANG YUL	3	4	0,75
24	MENTOK		BELOLAUT	3	4	0,75
25			AIR BELO	2	3	0,67
26		KELURAHAN	SUNGAI BARU	4	5	0,80
27			SUNGAI DAENG	4	5	0,80
28			TANJUNG	4	5	0,80
29		DESA	AIR PUTIH	3	3	1,00
30			AIRLIMAU	4	4	1,00
31	SIMPANG TERITIP		KUNDI	3	4	0,75
32			SIMPANG TIGA	3	4	0,75
33			MAYANG	3	4	0,75
34			RAMBAT	1	2	0,50
35			SIMPANG GONG	2	3	0,67
36			PELANGAS	4	5	0,80
37			BERANG	3	4	0,75
38			IBUL	4	5	0,80
39			PERADONG	2	3	0,67
40			AIR NYATOH	1	2	0,50
41			PANGEK	1	2	0,50
42			AIR MENDUYUNG	1	2	0,50
43			BUKIT TERAK	2	3	0,67
44	JEBUS		JEBUS	3	4	0,75
45			TUMBAK PETAR	4	5	0,80
46			LIMBUNG	2	3	0,67
47			RUKAM	2	3	0,67
48			RANGGI/ASAM	2	3	0,67
49			SUNGAI BULUH	2	3	0,67

No	Kecamatan	Status	Desa/Kelurahan	Jaringan Jalan	Simpul	Konektifitas
50			KETAP	2	3	0,67
51			MISLAK	2	3	0,67
52			AIR KUANG	2	3	0,67
53			PEBUAR	1	2	0,50
54			SINAR MANIK	2	3	0,67
55	PARITTIGA		BAKIT	1	2	0,50
56			SEMULUT	2	3	0,67
57			KAPIT	2	3	0,67
58			TELAK	2	3	0,67
59			SEKAR BIRU	3	4	0,75
60			PUPUT	4	5	0,80
61			AIR GANTANG	2	3	0,67
62			KELABAT	3	4	0,75
63			CUPAT	2	3	0,67
64			TELUK LIMAU	1	2	0,50
				158	220	0,72

KETERANGAN	
	Nasional
	Provinsi
	Kabupaten
	Nas + kab

Sumber DPUPR Kab. Bangka Barat

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2022, dari 6 Kecamatan terdapat kategori Konektifitas terendah $\leq 0,50$ ada 7 Desa dengan rincian Kecamatan Kelapa satu Desa, Kecamatan Simpang Teritip empat Desa, Kecamatan Jebus satu Desa, dan Kecamatan Parittiga satu Desa, sedangkan konektifitas yang tertinggi $\geq 1,00$ ada di Kecamatan Muntok dengan dua Desa. Adapun kendala dan permasalahan dalam meningkatkan Indeks Konektifitas, antara lain :

1. Terkendala pembebasan lahan masyarakat terkait biaya dan dokumen pendukung lahan yang akan dibebaskan;
2. Biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan dan pembangunan jalan membutuhkan biaya yang besar;
3. Sumber daya yang ada lebih diprioritaskan terhadap pemeliharaan jalan yang telah ada daripada pembangunan jalan baru yang berdampak pula terhadap konektifitas jalan.

Upaya-upaya yang akan diterapkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran ini antara lain:

1. Mengoptimalkan wadah aspirasi seperti Reses dari legislatif maupun Musrembang dari masyarakat sebagai masukan guna merencanakan program peningkatan konektifitas wilayah;
2. Menyusun DED pembangunan Jalan baru antar Desa yang siap direalisasikan jika anggaran tersedia.

Indikator sasaran 1.3.2 “Indeks Bangunan Gedung”

Pada tahun 2022 capaian Indeks Bangunan gedung sebesar 85,74% dengan status kondisi bangunan baik dimana Gedung yang menjadi titik periksa di Tahun 2022 adalah Bangunan Gedung Negara. Indeks Bangunan gedung dihitung berdasarkan jumlah persentase kondisi bangunan gedung yang baik berbanding dengan presentase jumlah keseluruhan bangunan gedung terbangun.

Untuk tahun sebelumnya atau tahun 2021 belum dilakukan pendataan bangunan Gedung dikarenakan belum ada kegiatan pendataan yang dilaksanakan, sehingga belum ada data pembandingan untuk tahun 2022 terhadap indeks bangunan Gedung.

Tabel II.39
Berikut Tabel Data Gedung Negara Kabupaten Bangka Barat tahun 2022

No	Nama Gedung	Tingkat Kerusakan Gedung				Jumlah Keseluruhan Gedung	Persentase Kondisi Baik
		Baik	Ringan	Sedang	Berat		
		(≤29%)	(30-44%)	(45-59%)	(65-100%)		
1	Sekretariat DPRD	18	0	0	0	18	100,00%
2	Rumah Dinas Bupati	9	0	0	0	9	100,00%
3	Rumah Dinas Wakil Bupati	8	0	0	0	8	100,00%
4	Bagian Sosial dan Kemasyarakatan	1	0	0	0	1	100,00%
5	Bagian Umum Perlengkapan dan Protokoler	39	0	0	2	41	95,12%
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34	0	0	0	34	100,00%
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	14	0	0	0	14	100,00%
8	Dinas Kesehatan	13	0	0	0	13	100,00%
9	RSUD Sejiran Setason dan BLUD	70	8	0	0	78	89,74%
10	Puskesmas Muntok	31	0	0	0	31	100,00%
11	Puskesmas Simpang Teritip	25	1	0	1	27	92,59%
12	Puskesmas Kundi	13	0	0	0	13	100,00%
13	Puskesmas Jebus	20	2	0	4	26	76,92%
14	Puskesmas Puput	13	0	0	1	14	92,86%
15	Puskesmas Sekar Biru	17	0	0	1	18	94,44%
16	Puskesmas Kelapa	39	0	0	1	40	97,50%
17	Puskesmas Tempilang	20	9	0	0	29	68,97%
18	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9	1	0	0	10	90,00%
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27	0	0	0	27	100,00%
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	1	0	0	11	90,91%
21	Dinas Pertanian dan Pangan	66	5	0	0	71	92,96%
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	11	2	0	2	15	73,33%
23	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	43	0	0	0	43	100,00%
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	0	0	0	12	100,00%
25	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22	0	0	1	23	95,65%
26	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	11	0	0	0	11	100,00%
27	Inspektorat	10	0	0	2	12	83,33%
28	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	8	2	0	1	11	72,73%
29	Dinas Lingkungan Hidup	79	0	0	25	104	75,96%
30	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	91	8	0	0	99	91,92%
31	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	21	0	0	0	21	100,00%
32	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana	7	2	0	0	9	77,78%
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	0	0	0	25	100,00%

No	Nama Gedung	Tingkat Kerusakan Gedung				Jumlah Keseluruhan Gedung	Persentase Kondisi Baik
		Baik	Ringan	Sedang	Berat		
		(≤29%)	(30-44%)	(45-59%)	(65-100%)		
	Daerah						
34	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	0	0	0	9	100,00%
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	89	0	0	1	90	98,89%
36	Kecamatan Muntok	18	3	0	0	21	85,71%
37	Kecamatan Kelapa	28	0	0	0	28	100,00%
38	Kecamatan Jebus	17	1	0	0	18	94,44%
39	Kecamatan Tempilang	19	0	0	0	19	100,00%
40	Kecamatan Simpang Teritip	14	2	0	1	17	82,35%
41	Kecamatan Parittiga	9	0	0	0	9	100,00%
42	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	48	0	0	0	48	100,00%
	a. UPT Dinas Kecamatan Muntok	384	70	10	15	479	80,17%
	b. UPT Dinas Kecamatan Simpang Teritip	296	34	12	15	357	82,91%
	c. UPT Dinas Kecamatan Jebus	272	30	16	28	346	78,61%
	d. UPT Dinas Kecamatan Parittiga	255	27	14	16	312	81,73%
	e. UPT Dinas Kecamatan Kelapa	330	46	6	9	391	84,40%
	f. UPT Dinas Kecamatan Tempilang	297	19	0	29	345	86,09%
Total Bangunan		2.921	273	58	155	3.407	85,74%
Indeks Bangunan Gedung		85,74	8,01	0,02	4,55	85,74	
Kategori Indeks Bangunan Gedung		SEDANG					

Sumber DPUPR Kabupaten Bangka Barat

Dari Tabel tersebut dapat dijelaskan pada tahun 2022, dari seluruh jumlah Bangunan Gedung sebanyak 3.407, Bangunan Gedung dengan kondisi baik atau tidak ada kerusakan sejumlah 339 Bangunan Gedung yang tersebar di 16 OPD/Unit Kerja, dengan persentase sebesar 11,53 %. Sedangkan tingkat kerusakan bangunan yang rusak ringan sebesar 8,01%, tingkat kerusakan bangunan sedang 0,02%, dan tingkat kerusakan bangunan rusak berat sebesar 4,55%. Dan Jumlah total keseluruhan Bangunan Gedung dengan kondisi Baik sebanyak 2.921gedung, Sehingga indeks bangunan diperoleh sebesar **85,74%** atau dengan kategori nilai indeks bangunan gedung "**Sedang**".

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indeks bangunan Gedung diantaranya yaitu :

1. Biaya pemeliharaan bangunan gedung yang cukup tinggi ;
2. Keterbatasan SDM tim teknis untuk menilai tingkat kerusakan bangunan setiap OPD;
3. Beberapa OPD tidak menyampaikan data bangunan gedung sesuai dengan isi formulir data yang disampaikan;
4. Belum tersedianya Sumber Daya Teknik Sipil dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan Gedung di setiap OPD.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan pemeliharaan bangunan Gedung secara berkala dengan menyediakan dan menganggarkan biaya pemeliharaan serta menjaga asset bangunan secara menyeluruh, mengingat umur bangunan yang akan mempengaruhi kekuatan bangunan dan bila tidak rutin dipelihara, maka biaya perbaikan akan semakin meningkat dan menyebabkan rusak berat, sehingga beresiko tidak dapat dipergunakan kembali;
2. Dilakukan inspeksi secara berkala ke bangunan Gedung yang tingkat pemeliharaan rendah agar

dapat melakukan antipasi awal terhadap resiko kerusakan gedung;

3. Perlunya desain perencanaan bangunan sesuai ketentuan keandalan, kesehatan, kekuatan dan kenyamanan bangunan gedung.

Tabel II.40
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,68	0,72	05,88	Meningkat
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	-	Sedang		-

Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah dengan Tahun sebelumnya, dapat dijelaskan untuk Indikator Indeks Konektivitas “Meningkat” sedangkan untuk indikator Indeks bangunan Gedung belum bisa dibandingkan karena Tahun sebelumnya OPD terkait belum melakukan kegiatan penilaian Indeks bangunan Gedung.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN %	STATUS CAPAIAN
Indeks Konektivitas	Nilai	0,72	0,72	100	Optimis Tercapai
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Baik	85	Optimis Tercapai

Dari capaian dua indikator sasaran tersebut jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka sampai dengan Tahun 2022 indikator Sasaran dapat mencapai target dengan kategori tercapai.

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Jalan.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ).
3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.
4. Program Pengelolaan Tanah Kosong.
5. Program Penatagunaan Tanah.
6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
7. Program Penataan Bangunan Gedung.
8. Program Bangunan dan Lingkungannya.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Tabel II.42
Analisis Program Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	87.541.875.215,00	66.914.871.235,89	76,43
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	28.538.935.950,00	27.119.540.905,77	95,03
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)	1.604.447.900,00	1.579.702.394,00	98,45
3.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.482.586.000,00	869.340.800,00	58,64
4.	Program Pengelolaan Tanah Kosong	-	-	
5.	Program Penatagunaan Tanah	517.604.640,00	439.187.609,00	84,85
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	-	-	
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	26.230.000.000,00	9.232.261.221,35	35,20
8.	Program Bangunan dan Lingkungannya	544.875.200,00	470.933.500,00	86,43
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	84.489.575,00	84.363.900,00	99,85

Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari perbandingan realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II.43
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	76,43	101	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2022 maka realisasi anggaran sebesar 76,43 % dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 101% menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 23,57 %.

Sasaran Strategis 1.4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dibentuk dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan serta Indeks Resiko Bencana. Adapun untuk capaian Indikator pada sasaran ini di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II.44
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70.91	69,39	97,85	Baik
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	41.18	52,94	128,55	Baik Sekali
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 3 indikator pada sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, terdapat 1 (satu) indikator yang yang belum memenuhi target yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di mana realisasi tahun 2022 sebesar 69,39 atau sekitar 97,85% dari target

sebesar 70,91. Angka ini jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 yang lalu mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Dan untuk kedua indikator lainnya yaitu Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan capaiannya melebihi dari target yang sudah ditetapkan dan untuk indikator Indeks Resiko Bencana mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pula jika capaian indikator tersebut dibandingkan antara capaian tahun 2022 dengan capaian di tahun 2021 yang lalu, bahwa ketiga indikator ini rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi ada 2 indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan. Sedangkan untuk Indikator Resiko bencana tidak mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu alias tetap. Untuk capaian disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.45
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,21	69,39	0,2	MENINGKAT
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	46,66	52,94	13,45	MENINGKAT
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	0	TETAP

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel II.46
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70.91	69,39	97,85	Baik

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2022 adalah sebesar 69,39 atau mencapai 97,85% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70,91. Angka ini menunjukkan bahwa capaian indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bangka Barat dalam status yang baik walaupun belum mencapai target yang di harapkan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Tujuan penyusunan nilai IKLH dimaksudkan sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat Pusat maupun Daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Mulai tahun 2020 yang lalu, pengukuran indicator kualitas lingkungan hidup mengalami perubahan yang mana sebelumnya menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (IKL) menjadi 4 (empat) indikator yaitu terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut. Namun penerapan 4 (empat) indicator ini baru mulai diterapkan hingga level Kabupaten / Kota sejak tahun 2021 yang lalu, dan juga untuk pengukuran indicator antara Kabupaten/ Kota dengan provinsi dan nasional sedikit berbeda.

Adapun untuk indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota terdiri dari 3 (tiga) indicator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan masing-masing konstanta sebesar konstanta sebesar 0,37 untuk IKA; 0,405 untuk IKU serta 0,219 untuk IKL. Untuk Indeks Kualitas Air diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO3, dan Fecal Coli; sedangkan Indeks Kualitas Udara diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2 dan untuk Indeks Kualitas Lahan diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung.

Adapun untuk perbandingan capaian besaran indicator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan hidup jika dibandingkan dengan tahun kemarin adalah sebagai berikut :

Tabel II.47
Perbandingan Indikator pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat

INDIKATOR IKH	TAHUN 2021	TAHUN 2022
Indeks Kualitas Air (0,37)	66,67	65,79
Indeks Kualitas Udara (0,405)	89,20	89,71
Indeks Kualitas Lahan (0,219)	37,41	37,16
IKLH	69,39	69,21

Dari perbandingan capaian di atas dapat terlihat bahwa dari ketiga indicator pembentuk IKLH tersebut, terdapat 1 (satu) indicator yang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang lalu yaitu pada indicator Indeks Kualitas Udara yaitu dari 89,71 menjadi 89,20 di tahun 2022 atau menurun sebesar 0,51. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pengendalian pencemara udara yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat khususnya Kota Mentok dikarenakan semakin banyaknya pencemaran akibat polusi kebakaran hutan serta asap pembuangan kendaraan bermotor. Adapun untuk lokasi titik penjuatan kualitas udara dilakukan di beberapa titik diantaranya yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kawasan perkantoran, kemudian Taman lokomotif untuk area transportasi, daerah Kebun Nanas untuk area permukiman, Unit Metalurgi Muntok untuk area industri.

Dan untuk kegiatan yang menentukan Indeks Kualitas Air dilakukan dengan melakukan pemantauan kualitas sungai yang berada pada 4 kecamatan dari 6 kecamatan. Adapun untuk sungai-sungai yang dilakukan pemantauan adalah sungai-sungai yang dinilai merupakan sungai besar yang menjadi penghubung antar sungai. Berikut data sungai-sungai yang dilakukan pemantauan pada tahun 2022 yang lalu terdiri dari :

- a. Sungai Anatai di Kecamatan Parittiga;
- b. Sungai Kampak di Kecamatan Jebus;
- c. Sungai Kayu Arang di Kecamatan Kelapa; dan
- d. Sungai Sukal di Kecamatan Muntok

Sedangan untuk sungai yang ada di wilayah Kecamatan Tempilang dan Kecamatan simpangteitip tidak dilakukan pemantauan karena dinilai tidak memiliki sungai yang besar. Adapaun dari hasil pemantaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

Tabel II.48
Data Pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat

ASPEK	TITIK PANTAU
Udara	4
Air	12
Lahan	0
Total	16

Namun walaupun nilai Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan, hal tersebut tidak terjadi pada 2 (dua) indikator yang lain yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Untuk indeks kualitas air jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,88. Hal serupa pula terjadi pada capaian Indeks kualitas lahan yang mengalami peningkatan serupa sebesar 0,25 dari tahun sebelumnya. Adanya peningkatan capaian untuk kedua indikator ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam memperbaiki kualitas air dan lahan dengan pelaksanaan dari program/ kegiatan/ sub kegiatan yang ada di beberapa dinas teknis. Di samping itu pula peningkatan ini juga dipengaruhi oleh adanya kesadaran dari masyarakat serta stakeholder untuk memperbaiki kualitas lingkungan yang ada disekitar.

Jika di bandingkan antara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat dengan Provinsi dan Nasional diperoleh perbandingan adalah sebagai berikut :

Tabel II.49
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 Nasional, Provinsi dan Kabupaten Bangka Barat

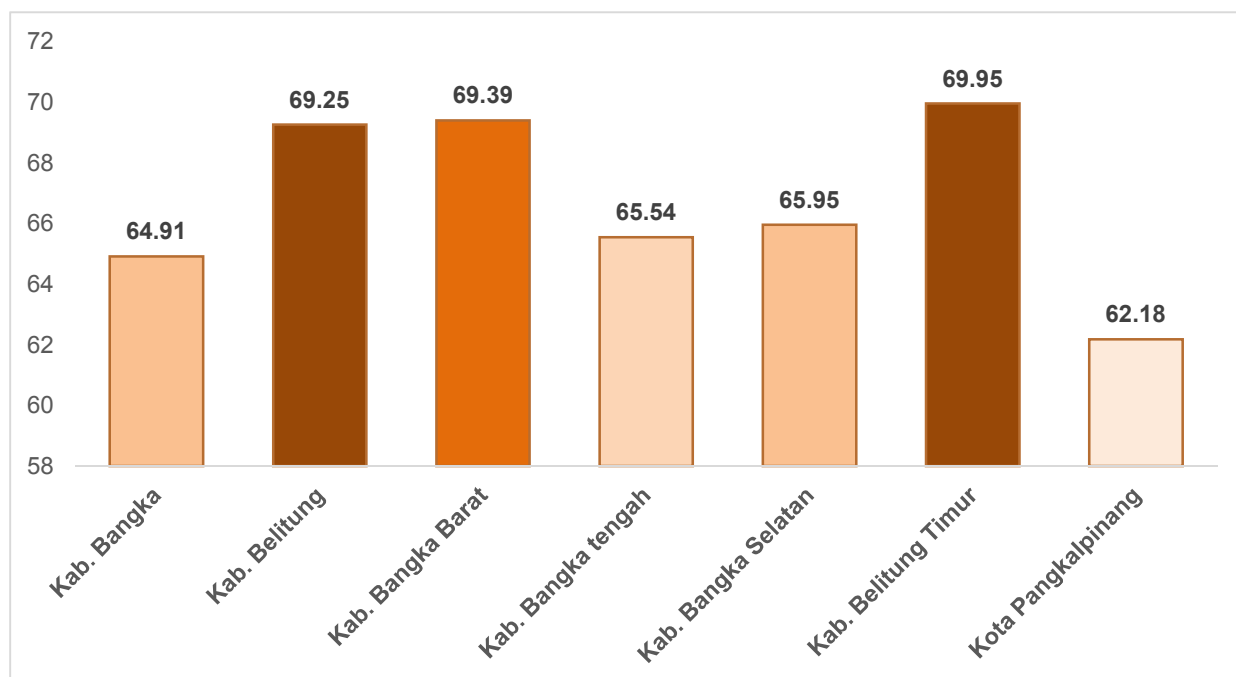
INDIKATOR IKH	NASIONAL	PROVINSI KEP.BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT
Indeks Kualitas Air	53,88	57,68	65,79
Indeks Kualitas Udara	88,06	89,75	89,71
Indeks Kualitas Lahan	60,72	39,28	37,16
Indeks Kualitas Air Laut	84,41	85,02	-
IKLH	72,42	71,67	69,21

Dari tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat secara keseluruhan masih berada di bawah capaian nasional dan Provinsi. Namun jika dilihat dari segi capaian indikator pembentuk IKLH, bahwa untuk capaian Indikator Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi ketimbang dengan capaian nasional dan Provinsi. Hanya saja dikarenakan capaian Provinsi dan Nasional pada Indeks Kualitas Lahan nilainya lebih tinggi dari

capaian Kabupaten Bangka Barat dan juga adanya tambahan Indikator penghitungan IKLH Nasional dan provinsi yang memasukkan nilai Indeks Kualitas Air Laut, maka secara otomatis nilai IKLH Kabupaten Bangka Barat capaiannya lebih rendah ketimbang capaian Nasional dan provinsi.

Sedangkan untuk capaian IKLH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian IKLH Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka IKLH Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Belitung. Dan untuk peringkat IKLH secara Nasional, Kabupten Bangka Barat menduduki peringkat 168 dari 514 Kabupaten/ Kota. Adapun untuk perbandingan capaian IKLH Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 terdapat dalam grafik di bawah ini:

Grafik II.10
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022 Kabupaten/ Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk terus menjaga kualitas lingkungan di Kabupaten Bangka Barat dengan berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah kepada stakeholder yang dapat mendukung pembangunan daerah yang tentunya dinilai dapat menjaga kualitas lingkungannya.

Capaian indikator kedua dari sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan adalah Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan.

Capaian untuk indikator Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah 52,94% dari target sebesar 41,18% atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 128,55%. . Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan sampah perkotaan di wilayah Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik.

Tabel II.50
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	41.18	52,94	128,55	Baik Sekali

Adapun untuk wilayah pelayanan sampah perkotaan yang menjadi target layanan hanya berada di 17 daerah saja yang mana dalam penentuan kriteria perkotaan dengan berpedoman kepada data dari Badan Pusat Statistik. 17 daerah tersebut terdiri dari :

1. Kecamatan Muntok berada pada Kelurahan Tanjung, Sungai Daeng, Sungai Baru, Keranggan, Menjelang, Desa Belo Laut;
2. Kecamatan Simpangteritip berada pada Desa Berang, dan Pelangas;
3. Kecamatan Kelapa berada pada Kelurahan Kelapa;
4. Kecamatan Jebus berada pada Desa Jebus, dan Air Kuang;
5. Kecamatan Parittiga berada pada Desa Puput, Sekar Biru dan Kelabat;
6. Kecamatan Tempilang berada pada Desa Benteng Kota, Air Lintang dan Tempilang.

Dari 17 daerah yang disebutkan diatas, capaian pelayanan sampah perkotaan di tahun 2022 terdapat pada 9 daerah yaitu Kelurahan menjelang, Keranggan, Sungai Daeng, Tanjung, Sungai Baru, Kelapa, Desa Belo Laut, Puput dan, Jebus. Penanganan persampahan di Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pengelolaan persampahan di kawasan pedesaan belum dilakukan secara terpadu. Pengelolaan sampah pada fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan selain Kota Muntok, sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga.

Namun untuk layanan pengelolaan persampahan yang telah ada di Kabupaten Bangka Barat sifatnya hanya pada ruang lingkup pengangkutan saja. Jika dilihat dari segi definisi operasional pengelolaan sampah yang sebenarnya terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulangan dan pengolahan. Sehingga dengan kata lain bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Bangka Barat belum dilakukan secara maksimal.

Disamping itu juga untuk keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, sampai saat ini Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki 1 unit TPA yang berada di Kecamatan Mentok dan dengan kondisi yang sudah *over load*. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebenarnya telah mencoba untuk melakukan perluasan TPA tersebut, namun Perluasan dan pengembangan TPA terhambat alih fungsi lahan dikarenakan lahan Produksi yang telah beralih fungsi menjadi perkebunan masyarakat. Berkaca dengan hal ini diharapkan dikemudian hari Kabupaten Bangka Barat dapat memiliki lebih dari 1 (satu) unit TPA yang dapat tersebar di masing-masing Kecamatan. Walaupun kita tahu bahwa dalam proses pembangunan TPA tersebut memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit namun setidaknya keberadaan TPA menjadi salah satu factor utama dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang persampahan.

Di samping TPA, sebenarnya, saat ini Kabupaten Bangka Barat telah memiliki 2 (dua) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu yang berada di Kecamatan Kelapa dan Jebus, namun kedua TPST tersebut tidak berfungsi dengan baik. Disamping itu pula terdapat Tempat Pembuangan Sampah 3R (*Reduce, Recycle dan Reused*) merupakan hasil pembangunan yang bersumber dari DAK Perumahan dan Permukiman. Adapun untuk keberadaan TPS 3R tersebut berada pada Desa Tempilang, Pelangas, Jebus, Bakit, Air Limau. Namun keberadaan TPS 3R tersebut sama halnya dengan keberadaan TPST yang ada, yang mana TPS 3R juga tidak berfungsi dengan baik sehingga

kedepan perlu peningkatan upaya pembinaan serta peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan yang ada.

Capaian untuk indikator Indeks resiko Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dalam kategori tinggi dengan target tinggi atau dengan persentase tingkat capaian sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari Indeks Resiko Bencana Nasional yang memuat seluruh nilai indeks resiko bencana di Kabupaten/ Kota di wilayah Indonesia.

Tabel II.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Baik

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus resiko dikurangi dengan bahaya dikali dengan kerentanan dan dibagi dengan kapasitas bencana. Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Adapun untuk nilai Indeks Resiko Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel II.52
Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/ KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangka Barat	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40
2	Bangka Selatan	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	179,12
3	Bangka	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
4	Belitung Timur	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
5	Belitung	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	148,48
6	Bangka Tengah	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
7	Pangkalpinang	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022

Dari tabel di atas diperoleh sebuah gambaran bahwa Kabupaten Bangka Barat memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi diantara Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022. Namun jika di lihat pada tahun sebelumnya, terdapat 2 Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki Indeks Resiko Bencana tertinggi yaitu Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka.

Kondisi ini dapat dilihat bahwa untuk wilayah Kabupaten Bangka Barat jika ditinjau dari segi letak geografis memang berada di daerah yang rentan terjadi bencana. Adapun jenis-jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi Banjir, Puting Beliung, abrasi dan Kebakaran Hutan. Dari data capaian kejadian bencana selama 2 tahun terakhir. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Berdasarkan data dari Indeks Resiko Bencana Daerah juga disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kedalam Provinsi yang memiliki potensi kelas tinggi untuk terjadinya bencana diantara 15 Provinsi lainnya. Di dalam buku ini pula telah digambarkan potensi bencana yang ada di masing-masing wilayah dapat dengan melakukan proyeksi atas kejadian bencana yang telah terjadi.

Tabel II.53
Perbandingan Capaian Indeks Resiko Per Ancaman Tahun 2022 dan Tahun 2021
Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS BENCANA	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KET
1	Banjir	36	36	Tinggi
2	Gempa Bumi	10,80	10,80	Sedang
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	36	36	Tinggi
4	Tanah longsor	24	24	Tinggi
5	Gelombang Extrem dan Abrasi	24	24	Tinggi
6	Kekeringan	36	36	Tinggi
7	Cuaca Extrem	13,60	13,60	Tinggi
	IKR	180,40	180,40	Tinggi

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa, jenis bencana yang ada di Kabupaten Bangka Barat berdasarkan tingkat resiko bencananya hamper seluruhnya berada pada resiko tinggi dan hanya bencana gempa bumi yang memiliki resiko sedang. Hal ini digambarkan dikarena banyaknya kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah bencana yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu 2021-2022 adal sebagai berikut :

Tabel II.54
Perbandingan Capaian Kejadian Bencana Tahun 2022 dan Tahun 2021
di Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN (2021)	JUMLAH KORBAN (2022)	KET
1	Banjir	1.423	1.087	
2	Gempa Bumi	0	0	
3	Kebakaran Permukiman	33	9	
4	Tanah longsor	0	0	
5	Gelombang Extrem dan Abrasi	60	0	
6	Kekeringan	0	0	
7	Angin kencang	47	449	
8	Cuaca Extrem	0	0	
	TOTAL	1.563 JIWA	1.545 JIWA	

Dari tabel jumlah korban jiwa pasca bencana terjadi dapat terlihat bahwa bencana banjir merupakan bencana yang memiliki dampak cukup besar bagi masyarakat disetiap tahunnya. Untuk lokasi rawan bencana banjir biasanya terjadi di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Parittiga pada beberapa titik yaitu Kelurahan Tanjung, Desa Puput serta Desa Belo laut. Adapun upaya pemerintah dalam menangani masalah banjir ini diantaranya telah dilakukan normalisasi sungai, kemudian pembuatan tanggul sungai serta upaya-upaya lain yang berkaitan dengan penanganan banjir. Memang tidak dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan sarana dan prasarana struktural pengendali banjir belum sejalan dengan penanganan non struktural terhadap kerusakan DAS. Namun walaupun demikian Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir ini yang salah satunya melalui jalinan kerjasama dengan instansi vertikal serta stakeholder lainnya dalam pencegahan bencana banjir.

Tabel II.55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 Terhadap terhadap Target Akhir
RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,39	71,94	96,45	Optimis Tercapai
Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52,94	64,71	81,81	Optimis Tercapai
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Sedang	50%	Optimis Tercapai

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target capaian di akhir Tahun RPJMD, sudah dapat dikatakan sangat baik/berhasil dan Optimis Tercapai. Terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan maka ,perlu dilakukan berbagai strategi yang nantinya dapat meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut. Adapun untuk strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan;
2. Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu;
3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah.

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup secara umum dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang memiliki urusan lingkungan hidup serta sub urusan kebencanaan serta oleh perangkat daerah lain yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut. Adapun Program yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran ini terdiri dari :

1. Program perencanaan lingkungan hidup
2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
3. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
5. Program pengelolaan persampahan
6. Program penanggulangan bencana
7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

8. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)

Tabel II.56
Analisis Program sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2022

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		14.471.854.210,00	13.698.653.182,00	94,66
1.	Program perencanaan lingkungan hidup	140.258.960,00	128.665.813,00	91,73
2.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	35.405.000,00	35.300.000,00	99,70
3.	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	32.943.000,00	26.748.000,00	81,19
4.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	273.423.000,00	264.112.090,00	96,59
5.	Program pengelolaan persampahan	9.279.905.480,00	8.866.990.049,00	95,55
6.	Program penanggulangan bencana	1.664.000.000,00	1.414.867.750,00	85,03
7.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	535.440.750,00	525.522.400,00	98,15
8.	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	2.510.478.020,00	2.436.447.080,00	97,05

Tabel. II.57
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	94,66	108,8	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2022 maka realisasi anggaran sebesar 94,66% dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 108,8 menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 5,34%.

Sasaran Strategis 2.1 “Menurunnya Angka Kemiskinan”

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.58
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,85	2,46	113,68	Baik Sekali

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 sebesar 2,46%. Jika dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 2,85%, maka tercapai 113,68% yaitu telah melebihi target yang ditetapkan dengan status capaian “Baik Sekali”. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan angka kemiskinan sebesar 2,75%, maka kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0,29 poin atau 10,55%.

Tabel II.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

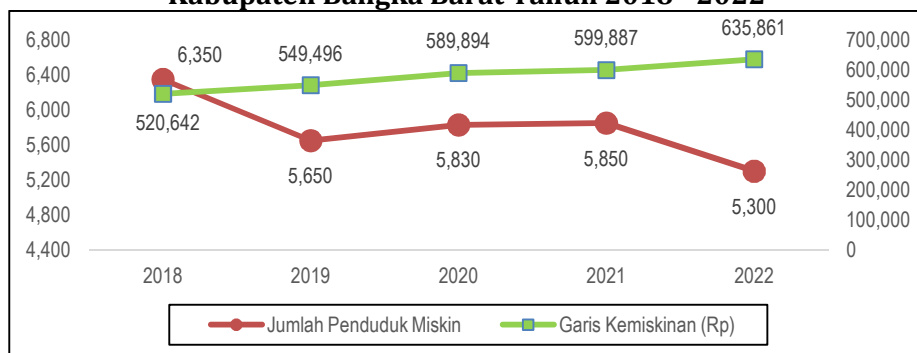
INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,75	2,46	113,68	Meningkat

Sejalan dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin pada Tahun 2022 juga terjadi penurunan yaitu menjadi sebanyak 5.300 jiwa yang sebelumnya sebanyak 5.850 jiwa di Tahun 2021 atau berkurang 550 jiwa.

Berbanding terbalik dengan angka kemiskinan, garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu dengan angka Rp 599.887,00 menjadi Rp 635.861,00 di Tahun 2022. Meningkatnya garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari angka kemiskinan yang menurun di Tahun 2022 jika disandingkan dengan garis kemiskinan dapat diartikan bahwa meskipun terjadi peningkatan garis kemiskinan, namun penduduk Kabupaten Bangka Barat secara rata-rata mengalami perbaikan secara ekonomi atau peningkatan pendapatan sehingga rata-rata pengeluaran perkapita per bulan berada di atas garis kemiskinan.

Grafik II.11
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dilihat dari perkembangan antar waktu, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berfluktuasi. Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 berada di posisi terendah, sedangkan posisi tertinggi sebesar 3,05% pada Tahun 2018.

Jika dilihat dari perkembangan antar wilayah, kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat selama beberapa tahun terakhir berada pada posisi terbaik atau dengan angka kemiskinan terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan di tingkat nasional, pada Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada pada peringkat ketiga terendah dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia setelah Kota Sawah Lunto (2,28%) dan Kota Balikpapan (2,45%).

Sedangkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional dan provinsi, pada Tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Bangka Barat berada jauh di bawah angka nasional sebesar 9,57% dan provinsi sebesar 4,61%.

Tabel II.60
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 - 2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	5,47	4,92	4,51	4,81	4,26
Belitung	7,56	6,29	6,27	7,15	6,45
Bangka Barat	3,05	2,67	2,70	2,75	2,46
Bangka Tengah	5,81	5,02	4,85	5,13	4,86
Bangka Selatan	3,70	3,36	3,52	3,69	3,22
Belitung Timur	7,06	6,60	6,52	7,20	6,49
Kota Pangkalpinang	4,95	4,25	4,36	4,76	4,55
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,50	4,89	4,90	4,61
Nasional	9,66	9,22	10,19	10,14	9,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel II.61
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	2,46	2,43	98,77	Optimis Tercapai

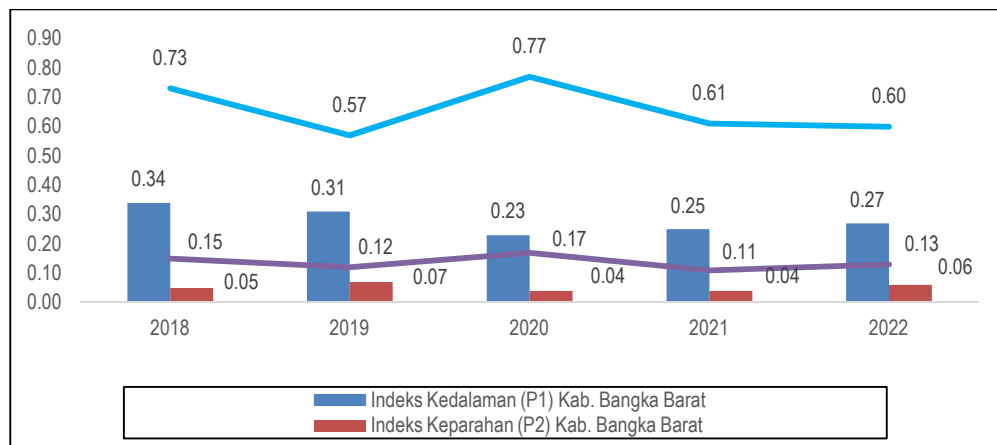
Capaian indikator Angka Kemiskinan di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target di akhir tahun RPJMD Kabupaten Bangka Barat sebesar 2,43%, maka telah mencapai 98,77%. Meskipun belum mencapai target akhir RPJMD di Tahun 2026, namun jika dilakukan intervensi yang tepat dan dilakukan secara kolaboratif bersama seluruh pemangku pembangunan, maka target tersebut optimis akan dapat dicapai.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain kedua ukuran tersebut, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dalam penanggulangan kemiskinan, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang diukur melalui Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2).

Semakin besar Indeks Kedalaman Kemiskinan, mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Semakin tinggi, berarti jaraknya semakin jauh yang berarti upaya untuk mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi tidak miskin akan semakin berat. Pada Tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat meningkat dari Tahun 2021 yaitu dari 0,25 menjadi 0,27 di Tahun 2022. Meskipun terjadi peningkatan, namun nilai ini masih jauh dari Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,60.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 0,06 dari Tahun 2021 sebesar 0,04. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin semakin meningkat. Namun nilai ini juga masih dibawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 0,13.

Grafik II.12
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan
Kabupaten Bangka Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 - 2022

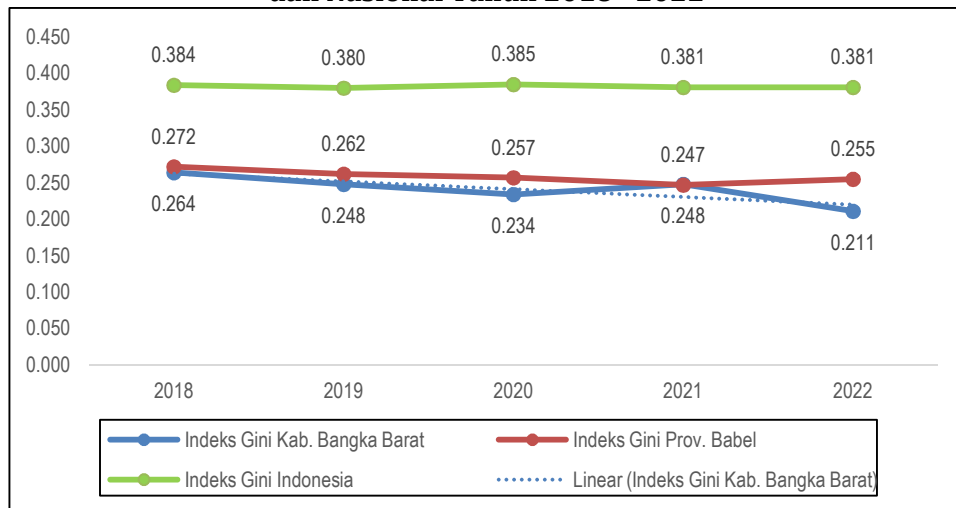


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam pengukuran statistik, dikenal pula Indeks Gini atau *Gini Ratio* yang merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan. Berdasarkan konsep BPS, *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang menggunakan nilai yang berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat selama 5 (lima) tahun terakhir secara trend menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2022 Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat sebesar 0,211 menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,248. Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat juga lebih rendah jika dibandingkan dengan angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2022 sebesar 0,255 dan di tingkat nasional sebesar 0,381.

Grafik II.13
Indeks Gini Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Keberhasilan pencapaian sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022 di Kabupaten Bangka Barat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan secara umum antara lain peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat yang secara kolaboratif didukung oleh pemerintah pusat, daerah serta dunia usaha dan masyarakat. Pada Tahun 2022, pandemi Covid-19 sudah mulai mereda sehingga aktivitas perekonomian masyarakat terus meningkat dan kegiatan sosial, pemerintahan serta aktivitas kemasyarakatan sudah mulai dapat dilakukan tanpa adanya pemberlakuan pembatasan.

Selain itu program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan terus dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), rehabilitasi serta bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Program Pemberdayaan melalui e-Warung, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Rumah Layak Huni, Kegiatan Pasar Murah, dan program yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, serta program lainnya yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat dan inovatif, tapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up-to-date*. Untuk mendapatkan data yang akurat dan *up-to-date* tersebut diperlukan verifikasi dan validasi data secara berkala sesuai dengan jenis programnya. Selain penggunaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* (SIKS-NG) yang diarahkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial kepada seluruh pemerintah daerah, pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah meluncurkan sistem pendukung pendataan kemiskinan yang terintegrasi dengan SIKS-NG untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data PPKS secara lengkap, dinamis dan berkala yaitu Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disingkat SIPERKASA. Melalui aplikasi tersebut diharapkan seluruh penerima bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat program.

Berdasarkan hasil pengelolaan data melalui SIKS-NG dan SIPERKASA, jumlah penduduk dan keluarga di Kabupaten Bangka Barat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Januari 2023 sebanyak 22.598 keluarga dan 62.047 jiwa. Intervensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bangka Barat dilakukan menggunakan data tersebut karena data yang disajikan adalah *by name by address*, serta *up to date* karena dilakukan pemutakhiran data setiap bulan.

Berdasarkan pemetaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Program APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” antara lain :

- a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Program Rehabilitasi Sosial
- c. Program Penanganan Bencana
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- f. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- g. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- h. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- i. Program Pengembangan Perumahan
- j. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- k. Program Kawasan Permukiman
- l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Tabel II.62
Analisis Program Pendukung Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.287.460.000	3.250.064.700	98,86	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Rehabilitasi Sosial	2.438.559.600,00	2.385.903.030,00	97,84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penanganan Bencana	249.410.000,00	201.206.700,00	80,67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Sosial	481.500.000,00	481.445.000	99,99	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.302.425.200,00	3.904.850.998,53	90,76	Kecamatan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	115.273.579,00	86.967.200,00	75,44	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	211.319.190,00	190.915.620,00	90,34	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	70.994.540,00	62.203.000,00	87,62	Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pengembangan Perumahan	374.920.000,00	247.971.478,00	66,14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.218.509.200,00	1.192.774.143,00	97,89	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Kawasan Permukiman	1.290.000.000,00	1.282.674.161,00	99,43	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	136.440.000,00	135.955.000,00	99,64	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Total	14.176.811.309,00	13.422.931.030,53	94,68	

Tabel. II.63
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
Menurunnya Angka Kemiskinan	94,68	113,68	Efektif

Berdasarkan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait penurunan kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 94,68%, dengan capaian indikator sasaran sebesar 113,68%. Dengan capaian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian sasaran tersebut sangatlah efektif. Anggaran yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan dapat secara maksimal dimanfaatkan sehingga tepat sasaran. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa pemberian bantuan berupa hibah maupun bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat bagi penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian sasaran, terintegrasi dan terpadu dengan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran serta direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga tepat sasaran sesuai dengan pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial).

Dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan pendekatan THIS, selain program-program pembangunan yang telah dipetakan untuk pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan”, juga didukung oleh program-program dari perangkat daerah yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat seperti Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Serta program yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki melalui APBD, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya lainnya antara lain melalui pelibatan pihak dunia usaha (swasta) dalam penanggulangan kemiskinan khususnya melalui *Corporate Social Responsibility* atau CSR oleh perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Selain itu, dalam rangka mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat turut melibatkan sumber daya yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Karang Taruna. Melalui PSKS yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan tersebut, maka pelaksanaan pendataan maupun verifikasi dan validasi lapangan terhadap masyarakat penerima manfaat dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 2.2 “Menurunnya Angka Pengangguran”

Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan perhitungan dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi di suatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan. TPT yang tinggi juga dapat menyebabkan tingkat perekonomian di masyarakat melemah. Secara tidak langsung, dampak yang bisa ditimbulkan adalah meningkatnya potensi permasalahan sosial seperti kriminalitas dan kemiskinan.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.64
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,64	4,86	66,48	Cukup

Pada Tahun 2022, realisasi TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,865% sehingga jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 3,64%, maka hanya tercapai 66,48% dengan status capaian “Cukup”.

Dari angka TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,86% tersebut, maka penduduk yang tidak terserap oleh pasar kerja (pengangguran), dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4-5 orang pengangguran.

Tabel II.65
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,83	4,86	66,48	Meningkat

Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan tingkat pengangguran sebesar 3,83%, TPT di Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,89%. Dilihat dari jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Barat, pada Tahun 2022 sebanyak 5.479 orang meningkat 1.485 orang atau 37,20% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan jumlah pengangguran sebanyak 3.994 orang. Sementara jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2026 sebesar 3,61%, maka TPT hanya mencapai 65,37% dengan status capaian “Perlu Upaya Lebih”.

Tabel II.66
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Angka kemiskinan	Persentase	4,86	3,61	65,37	Perlu upaya lebih

Berdasarkan perkembangan antar waktu TPT di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2018 - 2022, maka TPT di Tahun 2022 merupakan angka yang tertinggi, sedangkan TPT terendah sebesar 2,85% pada Tahun 2019.

Tabel II.67
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	106.408	103.518	102.281	104.271	112.728
Bekerja	103.102	100.563	98.067	100.277	107.249
Pengangguran	3.306	2.955	4.214	3.994	5.479
TPAK(Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) (%)	70,47	66,99	65,76	65,98	70,23
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	3,11	2,85	4,12	3,83	4,86

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2023

Angkatan Kerja merupakan salah satu potensi modal pembangunan daerah dalam pembangunan ekonomi. Angkatan kerja yang berkualitas tentu sangat mendukung percepatan pembangunan daerah, namun apabila angkatan kerja tidak difasilitasi dengan lapangan kerja yang tepat, tentu dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan yang selanjutnya akan menjadi beban dalam pembangunan.

Pada Tahun 2022, jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 112.728 orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,23%. TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja suatu daerah. Dengan TPAK sebesar 70,23% artinya dari 100 penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Barat, 70 orang bersedia atau siap untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Tabel II.68
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

No.	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kab. Bangka	4,12	3,80	5,42	5,97	5,39
2.	Kab. Belitung	2,93	2,90	4,82	3,51	4,30
3.	Kab. Bangka Barat	3,11	2,85	4,12	3,83	4,86
4.	Kab. Bangka Tengah	3,93	4,39	5,59	4,95	3,99
5.	Kab. Bangka Selatan	4,35	3,87	5,42	5,29	5,09
6.	Kab. Belitung Timur	1,50	1,71	3,93	3,78	2,50
7.	Kota Pangkalpinang	4,70	5,01	6,93	6,81	5,90
	Prov. Kep. Bangka Belitung	3,65	3,39	5,25	5,03	4,77
	Indonesia	5,30	5,23	7,07	6,49	5,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat keempat tertinggi setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan angka 4,77%, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih tinggi dan jika

dibandingkan dengan nasional dengan angka 5,86%, maka TPT Kabupaten Bangka Barat lebih baik atau lebih rendah.

Meningkatnya TPT Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 diperkirakan masih sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Meskipun pada Tahun 2022 secara umum sudah tidak diberlakukan pembatasan, namun kegiatan ekonomi seperti usaha kecil dan sektor jasa serta konstruksi belum dapat sepenuhnya pulih sedangkan lapangan usaha baru sulit untuk dikembangkan.

Penyebab pengangguran yang juga secara umum terjadi adalah adanya ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja yang meningkat. Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 yang meningkat sebesar 8,11% atau sekitar 8.457 orang dibandingkan dengan Tahun 2021 yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja baru di Tahun 2022, maka dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.

Selain itu berdasarkan fenomena ekonomi yang terjadi di Tahun 2022 terkait menurunnya harga beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Bangka Barat sehingga mempengaruhi tingkat pengangguran terutama di sektor informal. Tenaga kerja yang sebelumnya bekerja karena harga komoditas yang cukup tinggi, namun karena adanya penurunan harga menjadi tidak bekerja lagi. Beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat juga sedang melakukan program *replanting* (penanaman/peremajaan) kelapa sawitnya sehingga tenaga kerja kontrak khususnya yang ditempatkan di bagian panen dilakukan pemutusan kontrak atau kontrak tidak dilanjutkan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait ketenagakerjaan antara lain :

1. Memberikan Pelatihan Berbasis Kompetensi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki agar bisa bekerja secara mandiri;
2. Menyediakan Informasi Pasar Kerja *Online* atau informasi ketenagakerjaan melalui media sosial;
3. Mendorong pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui padat karya;
4. Memberikan bantuan serta pemberdayaan usaha melalui dinas/perangkat daerah terkait;
5. Pengembangan wawasan, pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan khususnya melalui digitalisasi UMKM dan pemasaran melalui jaringan media sosial;
6. Pengembangan usaha melalui penguasaan teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, perusahaan swasta dan pihak lainnya;
7. Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah dalam pengembangan usaha antara lain antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Peningkatan iklim investasi melalui kemudahan perizinan serta pengembangan investasi yang dapat berdampak penyerapan tenaga kerja lokal.
9. Mendorong perusahaan atau badan usaha di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat melibatkan tenaga kerja lokal dan pemberian bantuan serta pemberdayaan di sekitar wilayah usaha khususnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan pemetaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Program APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran” antara lain :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Program Hubungan Industrial.

Tabel II.69
Analisis Program Pendukung Sasaran “Menurunnya Angka Pengangguran”
Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	322.973.000,00	305.816.750,00	94,69	Dinas PM, PPTSP, Nakertrans
Program Penempatan Tenaga Kerja	6.218.500,00	6.218.500,00	100,00	Dinas PM, PPTSP, Nakertrans
Program Hubungan Industrial	45.477.550,00	16.212.550,00	35,65	Dinas PM, PPTSP, Nakertrans
Total	374.669.050,00	328.247.800,00	87,61	

Tabel II.70
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
Menurunnya Angka Pengangguran	87,61	66,48	Tidak Efektif

Dengan realisasi anggaran program pendukung pencapaian sasaran terkait penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 sebesar 87,61%, dibandingkan dengan capaian indikator sasaran sebesar 66,48%, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya anggaran belum/kurang efektif. Dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan belum dapat secara maksimal mendukung pencapaian sasaran terkait penurunan pengangguran.

Penerapan efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam peningkatan kinerja ketenagakerjaan antara lain melalui koordinasi dengan dinas di tingkat provinsi terkait pemagangan serta pelatihan tenaga kerja sehingga dapat bekerja secara mandiri melalui Balai Pelatihan Kerja Provinsi ataupun pemagangan tenaga kerja di perusahaan.

Sasaran Strategis 3.1 “Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan”

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut.

Tabel II.71
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,38	7,46	98,28	Baik
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,72	11,72	100	Sangat Baik
3.	Persentase sekolah Terakreditasi A	%	24,32	20,53	84,41	Baik

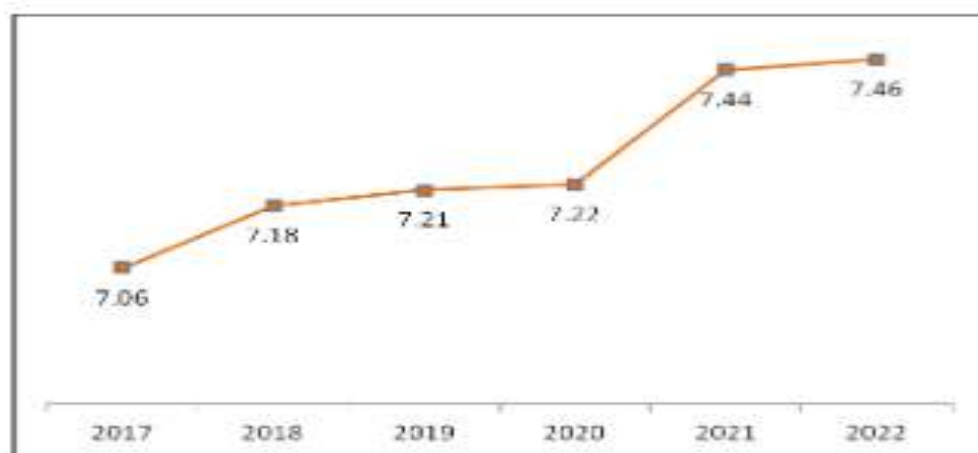
Pencapaian sasaran "**Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**" diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah dan Persentasi sekolah yang terakreditasi A. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori "Baik" dan 1 (satu) indikator sasaran dengan status "sangat baik", jika dikonfersi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran Tahun 2022 sebesar 94,23% (sembilan puluh empat koma dua puluh tiga persen). Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Sasaran 3.1.1 "**Rata-Rata Lama Sekolah**"

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun (standar UNDP) mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka RLS/ *Mean Years of Schooling* (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 mencapai 7,46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.

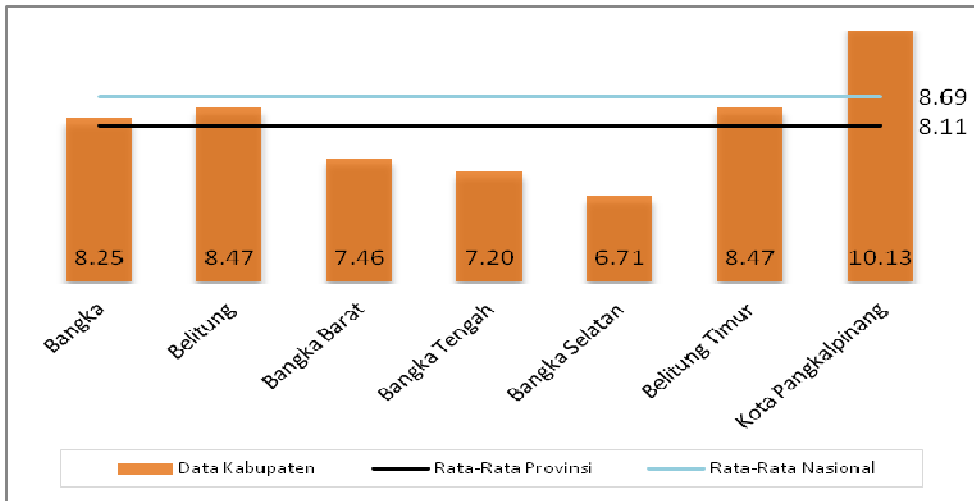
Grafik II.14
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2023.

Sementara jika dibandingkan dengan Angka RLS dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Grafik II.15
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023

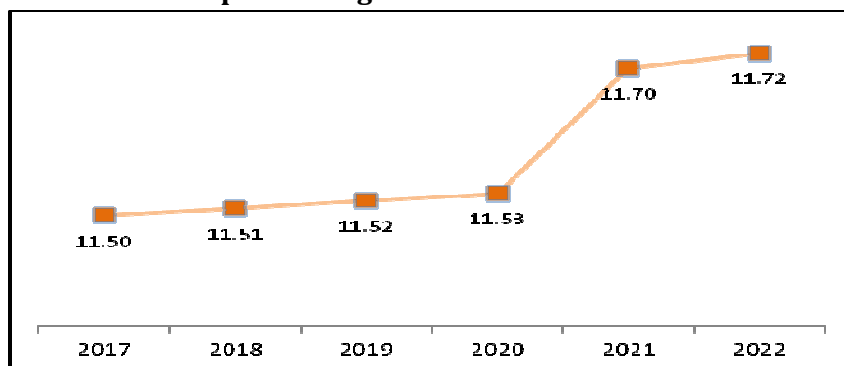
Indikator Sasaran 3.1.2 “Harapan Lama Sekolah”

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian Angka HLS di tahun 2022 11.72 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

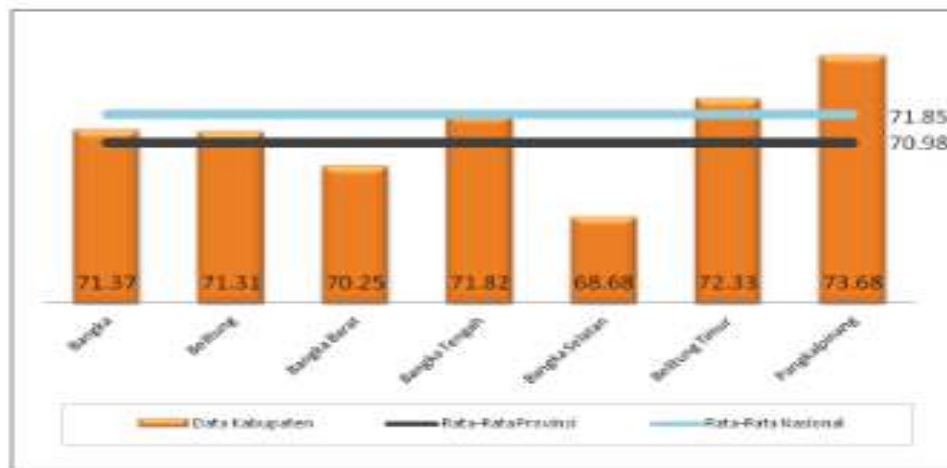
Grafik II.16
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,18 tahun dan dibawah capaian Nasional yang mencapai 13,10 tahun.

Grafik II.17
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

Indikator Sasaran 3.1.3 “Persentase Sekolah Terakreditasi A”

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2022 tampak pada tabel berikut.

Tabel II.72
Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2022

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Sekolah Dasar/MI							
	Terakreditasi A	25	30	31	29	25	24	22
	Terakreditasi B	87	90	92	93	95	98	101
	Terakreditasi C	18	13	9	14	16	16	14
	Belum Terakreditasi	8	5	6	3	3	3	5
2.	SMP/MTs							
	Terakreditasi A	19	20	20	19	19	18	17
	Terakreditasi B	16	17	18	20	20	20	21
	Terakreditasi C	2	3	4	4	4	8	8
	Belum Terakreditasi	8	6	4	3	3	0	2

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi A hingga tahun 2022 sebanyak 39 sekolah dari 190 sekolah, sehingga capaian sekolah terakreditasi A tahun 2022 yaitu 20.53%. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP. Capaian tersebut antara lain didukung oleh: (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi; (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.

Tabel II.73
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
1.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,44	7,46	100,26	Meningkat
2.	Harapan lama sekolah	Tahun	11,70	11,72	100,17	Meningkat
3.	Persentase sekolah Terakreditasi A	%	22,10	21,84	98,82	Menurun

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran " **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**" jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.74
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,46	7,38	101,08	Optimis tercapai
Harapan lama sekolah	Tahun	11,72	11,58	101,20	Optimis tercapai
Persentase sekolah Terakreditasi A	%	21,84	26,49	82,44	Optimis tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran " **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**" di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, semuanya telah tercapai

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pembinaan Perpustakaan

Tabel II.75
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan				
1	Program Pengelolaan Pendidikan	91,973,058,467.00	50,977,900,010.00	55.42
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20,930,000.00	19,330,000.00	92.35
3	Program Pengembangan Kurikulum	-	-	-
4	Program Pembinaan Perpustakaan	202,921,415.00	200,292,990.00	98.70
	Total	92,196,909,882.00	51,197,523,000.00	55.53

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	55,53	96,02	efektif

Sasaran Strategis 3.2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”

Pengukuran Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dilakukan melalui indikator Angka Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.76
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,41	70,25	99,77	Baik
Prevalensi Stunting	%	8,75	9,56	90,74	Baik

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” diukur dari 2 (dua) indikator yaitu Angka harapan hidup dan Prevalensi stunting. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 semua indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan dengan kategori “Baik”, jika dikonfersi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 145,14 % . Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator sasaran 3.2.1 “Angka Harapan Hidup”

Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Barat adalah meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan indikator angka harapan hidup (Misi 2 RPJMD Kabupaten Bangka Barat). Berdasarkan data statistik, angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat saat ini 70,25 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Menurut Statistics Indonesia, angka harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Meningkatnya atau menurunnya Angka Harapan Hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor penyebab dari Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sosial- ekonomi, lingkungan, dan demografi. Sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat jika kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan dari suatu wilayah itu sudah baik. Perlunya peran seluruh sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Angka harapan hidup Kabupaten Bangka Barat dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.77
Angka harapan hidup
Tahun 2011 s.d 2022

TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup	69,32	69,39	69,44	69,46	69,47	69,52

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup	69,56	69,73	69,99	70,06	70,08	70,25

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan capaian saat ini 70,25, hal ini berarti derajat kesehatan masyarakat juga mengalami peningkatan. Namun peningkatannya tidak signifikan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Indikator kesehatan dalam IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH)/Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan untuk mengukur pembangunan kesehatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Diharapkan pembangunan manusia dari sektor kesehatan, selain mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang tetapi juga sehat berkualitas dan tidak bergantung pada orang lain. Selain itu, belum ada arah intervensi yang jelas khususnya di bidang kesehatan untuk meningkatkan UHH, sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci dari indikator kesehatan yang terkait dengan UHH. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI menyusun Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahun sebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. Sebagian besar indikator dalam IPKM 2018 menggunakan data Riskesdas 2018, karena kebutuhan penyediaan data untuk menyusun IPKM menjadi salah satu pertimbangan saat penyusunan indikator dalam Riskesdas. Selain pertimbangan utama lainnya yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan, Rencana strategis (Renstra), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK), dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta pertimbangan secara referensi dan rekomendasi pelaksana program kesehatan.

Tujuh (7) sub indeks dalam IPKM 2018 yang informasinya diperoleh dari data hasil Riskesdas 2018, Susenas 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan Podes 2018, yakni:

- a. Sub indeks kesehatan balita, terdiri dari 6 indikator, yaitu: balita gizi buruk dan kurang, balita sangat pendek dan pendek (stunting), balita gemuk, penimbangan balita, kunjungan neonatal (KN) 1, imunisasi lengkap
- b. Sub indeks kesehatan reproduksi, terdiri dari 3 indikator, yakni: penggunaan alat kontrasepsi, pemeriksaan kehamilan (K4), Kurang Energi Kronis (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS).

- c. Sub indeks pelayanan kesehatan, terdiri dari 5 indikator, yaitu: persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah posyandu per desa, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan
- d. Sub indeks perilaku kesehatan, terdiri dari 5 indikator pembentuknya, yaitu: kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik dan kebiasaan menggosok gigi.
- e. Sub indeks Penyakit Tidak Menular (PTM) dan faktor risikonya, mencakup enam indikator pembentuknya, antara lain: hipertensi, cedera, diabetes mellitus, gangguan mental emosional (kesehatan jiwa), obesitas sentral, kesehatan gigi dan mulut.
- f. Sub indeks Penyakit Menular (PM), terdiri dari tiga indikator, yakni: pneumonia, diare balita, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) balita.
- g. Sub indeks kesehatan lingkungan, terdiri dari dua indikator yakni akses sanitasi dan akses air bersih

Nilai IPKM Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 sebesar **0,6059**, hal ini berarti kondisi kesehatan masyarakat membaik karena mendekati indeks 1. Adapun capaian IPKM Kabupaten Bangka Barat tahun 2018 perindikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.78
Indikator Sub Indeks dalam IPKM Kabupaten Bangka Barat 2018

No	Indikator	Indeks rata-rata
1	Sub Indeks Kesehatan Balita	0,7084
2	Sub Indeks Kesehatan Reproduksi	0,5900
3	Sub Indeks Pelayanan Kesehatan	0,3596
4	Sub Indeks Perilaku Kesehatan	0,4498
5	Sub Indeks Penyakit Tidak Menular	0,4612
6	Sub Indeks Penyakit Menular	0,9513
7	Sub Indeks Kesehatan Lingkungan	0,7213

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari 7 sub indeks rata-rata sub indeks yang masih jauh dari nilai indeks 1 yaitu sub indeks pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan dan penyakit tidak menular. Hal ini sejalan dengan banyaknya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sehingga masyarakat puas terhadap pelayanan dan arah kejadian penyakit yang saat ini lebih difokuskan kepada penyakit tidak menular sebagai akibat pola hidup yang semakin kurang sehat serta perilaku yang merupakan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu perhatian pada indikator yang menjadi alat ukur sub indeks tersebut diantaranya persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk, proporsi desa dengan kecukupan jumlah bidan per penduduk, kepemilikan jaminan pelayanan kesehatan, kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, aktivitas fisik, hipertensi, cedera, diabetes mellitus, gangguan mental emosional (kesehatan jiwa), obesitas sentral, kesehatan gigi dan mulut.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa perlunya perhatian khusus terhadap indikator IPKM yang capaiannya masih rendah atau jauh dari target untuk meningkatkan angka harapan hidup dari sektor kesehatan. Selain itu angka harapan hidup juga berkaitan dengan angka kematian bayi dan angka kematian neonates, karena semakin kecil umur kematian maka akan semakin kecil pula angka harapan hidup. Angka kematian bayi dan neonates selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.79
Angka Kematian Bayi dan Neonates Selama 5 Tahun

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target Nasional
1	Angka kematian neonatus (per 1000 KH)	5	4	5	4	6	7	15
2	Angka kematian bayi (per 1000 KH)	6	5	6	7	9	8	24
3	Angka kematian balita (per 1000 KH)	8	7	7	8	9	10	32

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian Kabupaten Bangka Barat masih dibawah target nasional, namun mengalami peningkatan kematian dari tahun sebelumnya. Selain angka kematian, angka kesakitan juga mengalami peningkatan, jika dilihat dari data tahunan yang ada dibidang kesehatan, contohnya untuk DM dengan ketetapan sasaran Riskesdas 2018, capaian Kabupaten Bangka Barat lebih dari 100%, hal ini menandakan bahwa saat ini ada peningkatan angka kesakitan. Selain sektor kesehatan ada beberapa sektor yang juga sangat berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup (AHH). Sektor ekonomi, sosial dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap AHH, jika melihat beberapa tahun ini dimana adanya penyakit covid 19 juga mempengaruhi sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu angka harapan hidup tidak hanya bisa ditingkatkan melalui sektor kesehatan. Kemampuan dan kesadaran masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan angka harapan hidup. Melalui kebiasaan untuk deteksi dini penyakit akan diketahui lebih awal kejadian penyakit sehingga dapat diobati dengan cepat. Namun hal ini harus diikuti dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Karna jika kemampuan ekonomi masyarakat hanya mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maka kecil kemungkinan masyarakat untuk sadar dengan arti pentingnya kesehatan sehingga akan sulit untuk meningkatkan usia harapan hidup seseorang.

Capaian usia harapan hidup tahun 2022 yaitu 70,25 tahun, hal ini berarti capaian tahun 2022 belum mencapai target jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2022 (70,41 tahun). Banyak faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target, seperti yang telah dijelaskan diatas, diantaranya:

1. Pelayanan kesehatan yang terfokus pada jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai terutama jumlah dokter, kepemilikan jaminan kesehatan yang belum maksimal. Saat ini kondisi jaminan kesehatan sudah UHC atau lebih dari 80% masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan, tetapi kepemilikan tersebut yang didanai secara mandiri masih terbatas dan ada yang tidak aktif. Selain itu jaminan kesehatan yang didanai Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menggunakan sebagian besar dana APBD Bangka Barat sehingga tidak bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk program kesehatan yang lain.
2. Semakin meningkatnya penyakit tidak menular seperti DM, hipertensi, jiwa, dan lainnya yang menyebabkan kualitas hidup seseorang menurun, sehingga menurunnya angka usia harapan hidup.

3. Perilaku kesehatan seperti kebiasaan merokok, kebiasaan cuci tangan, buang air besar (BAB) di jamban, dan aktivitas fisik masih belum menjadi kesadaran yang penting untuk masyarakat Bangka Barat. Saat ini hanya 32% desa di Kabupaten Bangka Barat yang sudah ODF, yang berarti bahwa masih ada masyarakat yang tidak memiliki jamban. Capaian perilaku hidup bersih dan sehat hanya 30,74% yang masih jauh dari target nasional (45%), hal ini sebagian besar didominasi oleh kebiasaan merokok, ASI eksklusif, makan buah dan sayur serta aktivitas fisik yang masih sangat rendah. Selain hal-hal tersebut diatas kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit, ikut dalam seluruh aktivitas kesehatan seperti melakukan kunjungan 4 kali selama hamil, kunjungan neonatus 3 kali untuk bayi, persalinan di fasilitas kesehatan, melakukan penimbangan balita 8 kali setahun, kunjungan ke Posyandu Usila, serta kunjungan ke Posbindu juga masih rendah.
4. Kondisi sosial- ekonomi, lingkungan, dan demografi juga sangat berpengaruh terhadap capaian usia harapan hidup. Penting untuk seseorang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, karna dengan hal itu akan sedikit memungkinkan untuk seseorang peduli dengan kesehatannya, karena rendahnya tingkat ekonomi seseorang akan menyebabkan seseorang peduli hanya dengan kebutuhan sehari-harinya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup, diantaranya:

1. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor, karna usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga tidak akan bisa ditingkatkan jika hanya difokuskan pada sektor kesehatan saja.
2. Edukasi masyarakat yang bisa dilakukan dengan berbagai cara penyuluhan, bimbingan, kunjungan rumah maupun komitmen pemerintah melalui surat edaran, peraturan dan lainnya yang bisa berpengaruh dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.
3. Pemenuhan tenaga kesehatan terutama dokter karena saat ini Kabupaten Bangka Barat masih kekurangan dokter, perlu inovasi agar dokter tertarik untuk menjadi tenaga kesehatan di Kabupaten Bangka Barat. Karena saat ini minat dokter untuk bekerja di Kabupaten Bangka Barat masih rendah.

Indikator sasaran 3.2.2 “Prevalensi Stunting”

Pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi. Palsunya, tinggi badan anak termasuk faktor yang menandai stunting dan menjadi penanda apakah nutrisi anak sudah tercukupi atau belum. stunting adalah kondisi yang ditandai ketika panjang atau tinggi badan anak kurang jika dibandingkan dengan umurnya. Mudahnya, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek ketimbang teman-teman seusianya dan memiliki penyebab utama kekurangan nutrisi. Banyak yang tidak tahu kalau anak pendek adalah tanda dari adanya masalah gizi kronis pada pertumbuhan tubuh si kecil. Hanya saja, perlu diingat bahwa anak [pendek belum tentu stunting](#), sedangkan anak stunting pasti terlihat pendek.

Anak masuk ke dalam kategori stunting ketika panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi (SD). Terlebih lagi, jika kondisi ini dialami anak yang masih di bawah usia 2 tahun dan harus ditangani dengan segera dan tepat. [Penilaian status gizi](#) dengan standar deviasi tersebut biasanya menggunakan grafik pertumbuhan anak (GPA) dari WHO. Tubuh pendek pada anak

yang berada di bawah standar normal merupakan akibat dari kondisi [kurang gizi](#) yang telah berlangsung dalam waktu lama. Hal tersebut yang kemudian membuat pertumbuhan tinggi badan anak terhambat sehingga mengakibatkan dirinya tergolong stunting. Namun, anak dengan tubuh pendek belum tentu serta merta mengalami stunting. Kondisi ini hanya terjadi ketika asupan nutrisi harian anak kurang sehingga memengaruhi perkembangan tinggi badannya. Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu. Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, [bayi lahir prematur](#), serta [berat badan lahir rendah \(BBLR\)](#). Kondisi tidak tercukupinya asupan gizi anak ini biasanya tidak hanya terjadi setelah ia lahir saja, melainkan bisa dimulai sejak ia masih di dalam kandungan.

Dua poin utama yang menjadi faktor penyebab stunting pada anak:

1. Kurang asupan gizi selama hamil

[WHO](#) atau badan kesehatan dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu, penting untuk mencukupi [berbagai nutrisi penting selama hamil](#).

2. Kebutuhan gizi anak tidak tercukupi

Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat [makanan balita](#) saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti [posisi menyusui](#) yang kurang tepat, tidak diberikan [ASI eksklusif](#), hingga [MPASI](#) (makanan pendamping ASI) yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting. Khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral zinc (seng) dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Setelah itu, grafik penilaian tinggi badan berdasarkan umur (TB/U), terus bergerak mengikuti kurva standar tapi dengan posisi berada di bawah. Ada sedikit perbedaan kondisi stunting yang dialami oleh kelompok usia 2 – 3 tahun dan anak dengan usia lebih dari 3 tahun. Pada anak yang berusia di bawah 2 – 3 tahun, rendahnya pengukuran grafik tinggi badan menurut usia (TB/U) bisa menggambarkan proses stunting yang sedang berlangsung. Sementara pada anak yang berusia lebih dari itu, kondisi tersebut menunjukkan kalau kegagalan pertumbuhan anak memang telah terjadi (*stunted*).

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu:

- Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
- Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan).
- Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
- Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

Tabel II.80
Kondisi stunting di Kabupaten Bangka Barat

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DIUKUR TINGGI BADAN	BALITA PENDEK (TB/U)	
				JUMLAH	%
1	Muntok	Muntok	2774	145	5,2
2	Simpang Teritip	Simpang Teritip	1402	261	18,6
		Kundi	619	141	22,8
3	Jebus	Jebus	2504	261	10,4
4	Parit Tiga	Puput	1604	137	8,5
		Sekar Biru	1343	101	7,5
5	Kelapa	Kelapa	859	81	9,4
6	Tempilang Kabupaten	Tempilang	2092	135	6,5
			13197	1262	9,6

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat semua kecamatan sudah dibawah target nasional (20%) kecuali Kecamatan Simpang Teritip diwilayah kerja Puskesmas Kundi dengan capai 22,8%, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) sudah mengalami penurunan stunting dengan capaian tahun 2021 sebesar 32,47%. Meskipun secara kecamatan sudah mencapai target 20%, namun bisa jadi diwilayah desa masih ada yang lebih dari 20%. Adapun desa yang capaian stunting tahun 2022 lebih dari 20% diantaranya desa Rambat (26,2%), Pelangas (22%), Berang (20,7%), Ibul (30,9%), Peradong (23,4%), Air Nyatoh (20,2%), Kundi (21,5%), Simpang Tiga (34,5%), dan Pangkal Beras (26,7%). Faktor ekonomi sangat berpengaruh tercapai capaian stunting dikarenakan sebagian desa balita stunting disebabkan pola asuh yang diantaranya disebabkan kesibukan orang tua untuk mencari nafkah sehingga tidak mampu menyediakan asupan gizi yang seimbang serta kurang peduli dengan asupan gizi anaknya. Selain faktor ekonomi juga disebabkan pengetahuan orang tua tentang gizi yang masih rendah sehingga gizi anak tidak menjadi prioritas dalam rumah tangga.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka diharapkan kerjasama seluruh sektor yang sudah mulai digerakan sejak tahun 2016 dengan nama GT2S24 yaitu Gerakan Terarahnya Tangani Stunting dengan 24 langkah yang dilaksanakan bersama OPD-OPD terkait stunting. Melalui SG2S24 sudah mulai ada penurunan kejadian stunting diwilayah Kabupaten Bangka Barat, karena melalui dana yang terfokus dengan stunting tetapi dikerjakan seluruh OPD sangat besar pengaruhnya terhadap capaian penurunan stunting.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Prevelensi stunting Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sudah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2022 masih menggunakan metode yang sama dalam pengukuran prevalensi stunting yakni data status gizi balita berdasarkan EPPGBM Bulan Agustus 2022.

Secara umum, masalah stunting tidak bisa diselesaikan melalui program gizi saja, tetapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketersediaan air bersih dan sanitasi layak juga berkontribusi besar dalam hal penanganan stunting. Memiliki sanitasi yang layak pun tidak serta merta membebaskan suatu lingkungan dari stunting, jika tidak disertai dengan perubahan perilaku. Begitu pula dengan tidak optimalnya program gizi dan asupan makanan serta vitamin jika tidak disertai dengan pola asuh yang benar.

Mengingat hal tersebut, maka masalah percepatan penurunan stunting tidak bisa selesai dari capaian kinerja satu OPD saja namun kontribusi besar dari masing-masing stake holder yang beririsan dengan “masalah percepatan penurunan stunting. Sebagaimana dapat di lihat dari tabel di bawah ini, adalah hasil evaluasi pemetaan program dari Tim Percepatan Penurunan Stunting:

Tabel II.81
Hasil Evaluasi Pemetaan Program dari Tim Percepatan Penurunan Stunting

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
1	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK	Jumlah ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	69.930.000,00	APBD	DINAS KESEHATAN
2	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Pelatihan Kader konselor PMBA	Jumlah kader yang dilatih kader PMBA	22.880.000,00	APBN	DINAS KESEHATAN
3	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi dengan masalah gizi	Jumlah balita gizi kurang mendapat makanan tambahan	210.840.000,00	APBD	DINAS KESEHATAN
4	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Pelaksanaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap	426.304.500,00	APBD & DAK NON FISIK	DINAS KESEHATAN
5	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Lomba masak ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	63.204.900,00	APBD	DINAS PERIKANAN
6	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB	Meningkatnya Kesertaan Ber KB, serta menurunkan TFR dan Unmeetneed	59.214.174,00	APBN-APBD	DINAS KB
7	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Pendampingan Catin, Bumil, Bufas dan surveillance Keluarga	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting	1.084.062.000,00	DAK NON-FISIK	DINAS KB
8	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Rapat koordinasi Pencegahan dan penanganan Stunting	Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	7.306.000,00	APBD	DINAS KB
9	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Terlaksananya Sinergitas Kelembagaan Pengawasan antar OPD	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat	25.278.600,00	APBD	DINAS PERTANIAN
10	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pemetaan dan Analisis	Peta dan Analisa SKPG	29.575.000,00	APBD	DINAS PERTANIAN
11	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Penyusunan dan penetapan Target Komsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	Tersusunnya dan penetapan Target Komsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	14.282.100,00	APBD	DINAS PERTANIAN
12	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pendampingan dan Pembinaan	Kelompok yang Melaksanakan Pemanfaatan Pekarangan	164.999.540,00	APBN	DINAS PERTANIAN
13	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Pengadaan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	82.744.000,00	APBD & DAK FISIK	DINAS PERTANIAN
14	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Pembangunan Sarpras Air Bersih Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayanimelalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	895.467.800,00	APBD	DINAS PU / CIPTA KARYA
15	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Peningkatan Kapasitas SPAM	926.146.080,00	DAK FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA

16	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	Kapasitas IPLT Terbangun	3.219.150.000,00	APBD & DAK FISIK	DINAS PU / CIPTA KARYA
17	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Pembangunan Jamban Individual	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki TangkiSeptik	905.637.600,00	APBD	DINAS PU / CIPTA KARYA
18	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Luran (PBI) Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	31.566.931.200,00	APBD	DINAS KESEHATAN
19	Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi	Belanja jasa tenaga penanganan sosial	Terlatihnya pendamping PKH untuk modul kesehatan dan gizi	5.400.000,00	APBD	DINAS SOSIAL
20	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Bnagka Barat	55.980.000,00	APBD	BAPELITBANGDA
21	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Percepatan penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Bangka Barat	45.714.000,00	APBD	BAPELITBANGDA
22	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting	Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi	Jumlah petugas gizi mengikuti Pertemuan Pengumpulan dan Pelaporan Data Surveilans Gizi	12.780.000,00	APBN	DINAS KESEHATAN
23	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota	Diseminasi hasil pengukuran stunting	Jumlah peserta diseminasi hasil pengukuran stunting	24.291.000,00	APBN	DINAS KESEHATAN
24	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	mengumpulkan, menyusun dan mempublikasikan informasi melalui media komunikasi yang dikelola Diskominfo Bangka Barat	Jumlah berita yang di upload pada website Kabupaten Bangka Barat	18.000.000,00	APBD	DINAS KOMINFO
25	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Membuat informasi dalam bentuk konten audiovisual	Jumlah dokumentasi audiovisual Kabupaten Bangka Barat	28.105.220,00	APBD	DINAS KOMINFO
26	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Melaksanakan fungsi humas dengan pihak internal dan eksternal Pemerintah kabupaten Bangka Barat	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan	449.789.000,00	APBD	DINAS KOMINFO
27	Terlaksananya Kampanye nasional pencegahan Stunting	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan dengan mitra pemerintah dan komunitas	Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan dengan mitra pemerintah dan komunitas	449.789.000,00	APBD	DINAS KOMINFO
28	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)	sosialisasi Bunda PAUD ke Lembaga	Tersosialisasinya Program PAUD oleh Bunda PAUD	160.000.000,00	APBD	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
29	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting	Pelaksanaan Identifikasi Keluarga Berisiko Stunting, Desiminasi dan Evaluasi Audit Kasus Stunting	Tersedianya Laporan Audit Kasus Stunting	42.000.000,00	DAK NON-FISIK	DINAS KB
30	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	Tersedianya data Keluarga Berisiko Stunting	98.280.000,00	DAK NON-FISIK	DINAS KB
31	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga	Cetak form Update Keluarga Berisiko Stunting	Tersedianya data Keluarga Berisiko Stunting	3.390.000,00	DAK NON-FISIK	DINAS KB
32	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Pembinaan BKB, BKR, BKL, PIK R dan UPPKA Serta Pemilihan Duta Generasi Berencana dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting	Terlaksananya dukungan Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga	76.311.100,00	APBD	DINAS KB
33	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK	Pengadaan BKB Kit Stunting dan Kit Siap Nikah Anti Stunting	Media KIE Pencegahan dan Penanganan Stunting	173.150.000,00	DAK FISIK	DINAS KB
			Total	41.416.932.814,00		

Faktor pendukung yang mempengaruhi Prevelensi stunting adalah adanya komitmen pemerintah daerah melalui program/kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dan kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah:

- Sasaran Prevalensi Stunting itu disasar ke Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga dalam capaian kinerjanya tidak hanya bisa diukur dari status capaian satu OPD saja.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya berfokus pada percepatan penurunan stunting intervensi sensitive, yakni pola asuh.
- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya manusia terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Sedangkan, yang menjadi upaya pemecahan masalah, di antaranya:

- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dalam upaya percepatan penurunan stunting.
- Berkoordinasi terkait percepatan penurunan stunting dengan lintas OPD dan lintas sektor dengan adanya evaluasi setelah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
- Berkolaborasi dan elaborasi antara stigma “ percepatan penurunan stunting” dan “konvergensi penurunan stunting”.

Tabel II.82
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Realisasi Tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,25	100,24 %	Meningkat
Prevalensi Stunting	%	11,10	9,56	86,12 %	Meningkat

Secara keseluruhan untuk pencapaian kinerja indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran ” **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**” jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.83
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Angka Harapan Hidup	Tahun	7,46	7,38	101,08 %	Optimis Tercapai
Prevalensi Stunting	%	9,56	4,79	50,10 %	Perlu Upaya Lebih

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**” di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, semuanya telah tercapai.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
3. Program Pengendalian Penduduk;
4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Tabel II.84
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.2 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat				
	Total	107.225.654.923	89.438.300.055	83,41
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	80.100.265.674	63.794.286.389	79,64
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	229.112.000	108.997.000	47,57
3	Program Pengendalian Penduduk	131.985.660	127.624.240	96,69
4	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.806.183.324	1.544.517.000	85,51
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	408.994.000	366.120.000	89,51
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.994.185.600	7.877.683.524	98,54
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.965.073.800	7.871.004.532	98,82
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.988.815	21.988.815	100
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	
10	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.227.035.300	6.937.914.500	95,99
11	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.340.830.750	788.164.055	58,78

Tabel II.85
Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	83,41	95,25	Efektif

Sasaran Strategis 3.3 "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak"

Sasaran "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 2 indikator yang keseluruhannya merupakan indikator makro pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Pencapaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak (KLA). Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 ada 1 (satu) indikator Sasaran dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan kategori "Sangat Baik" dan 1 (satu) indikator di antara target yang ingin dicapai terdiri dari 1 (satu) indikator dengan kategori "Baik".

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

II.86
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04	90,67 (Indeks)	99,30%	Baik
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama (kategori)	Pratama (kategori)	100%	Sangat Baik

Tabel II.87
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04	90,04	100%	Tetap
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama (kategori)	Pratama (kategori)	100%	Tetap

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sudah tercapai. Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pertama misi 2 pada indikator kinerja tersebut, realisasi capaian Tahun 2022 masih menggunakan indeks IPG Tahun 2021 dikarenakan data BPS untuk Tahun 2022 belum diliris. Maka sementara, Berdasarkan skala capaian kinerja yang ada dikategorikan "Tetap".

Faktor pendukung yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender dan Status Kabupaten Layak Anak pada tahun 2022 adalah adanya komitmen pemerintah daerah melalui program/kegiatan yang telah laksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat melalui OPD terkait secara berkala dan berkesinambungan.

Beberapa faktor yang menjadi Hambatan dan kendala yang dihadapi pada indikator ini adalah :

- Infrastruktur pendukungnya masih kurang terkait kebutuhan Kabupaten Layak Anak.

- Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya manusia terutama peningkatan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi.

Sedangkan, yang menjadi upaya pemecahan masalah, di antaranya:

- Membuat peraturan terkait Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangka Barat
- Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia dalam pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi terutama perempuan-perempuan korban kasus kekerasan.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah terkait Kabupaten Layak Anak;
- Bekerjasama dan berkomitmen dengan OPD teknis terkait perbaikan dan penambahan infrastruktur yang menunjang Kabupaten Layak Anak seperti meningkatkan potensi Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Taman Bermain Ramah Anak, Pojok Laktasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
- Membuat peta pengisian kluster Kabupaten Layak Anak, dimana mengoptimalkan potensi yang kurang baik nilai di tahun sebelumnya untuk mempersiapkan penilaian tahun berikutnya .
- Menetapkan SOP terkait Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

Realisasi capaian sasaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.88
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Pembangunan Gender	indeks	90,04	91,50	98,40	Optimis Tercapai
Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	katagori	Pratama (kategori)	Madya	50	Perlu Upaya Lebih

Program dalam APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang berkaitan dengan sasaran antara lain :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Pemenuhan Hak Anak;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Perlindungan Khusus Anak;

Tabel II.89
Program Pendukung
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Program Prioritas	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
	1	2	3	4=3/2*100
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	955.435.347,00	555.473.807	58,14
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	506.021.000	245.293.407	76,22
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	124.744.000	46.179.000	89,49
3.	Program Perlindungan Perempuan	124.667.000	111.567.800	37,01
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	200.003.347	152.433.600	48,47

Tabel. II.90
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	58,14	99,65	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka dibandingkan dengan kinerja yang dicapai di tahun 2022 maka realisasi anggaran sebesar 58,14 persen dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 99,65 persen menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana sebesar 41,51 persen. Atau dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel II.91
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran (Rp)	Efektifitas
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	955.435.347,00	555.473.807	58,14	99,65	Efektif dan dapat dikategorikan sangat efisiensi belanja

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak lebih dari 60 persen, namun capaian sasarnya berada pada 99,65 persen. Itu artinya dalam mencapai target sasaran sangat efektif dengan efisiensi belanja yang signifikan.

Untuk mewujudkan misi pada RPJMD, maka OPD DP2KBP3A menetapkan sasaran Mewujudkan Bangsa Kencana yang Berprestasi, Berkarakter dan Berdaya Saing dengan Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak.

Sasaran Strategis 3.4 “Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat”

Kesalehan sosial seringkali dipahami hanya diperuntukkan pada masyarakat muslim saja bahkan lebih mengarah pada kesalehan yang bersifat individual. Padahal, pada kenyataannya kesalehan sosial tidak terbatas pada ritual ibadah seorang individu dengan Tuhannya saja, melainkan juga antar individu dan lingkungannya. Falah (2016) mengungkapkan bahwasannya kesalehan seperti ini yang seringkali diartikan sempit dan tunggal untuk dapat menjadi lebih luas atau universal. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan apapun agamanya, harus melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Aturan mengenai “perintah” dan “larangan” yang mendasari hubungan manusia dengan Tuhan inilah yang disebut ibadah

Kesalehan sosial adalah suatu kepatuhan atau ketaatan seseorang di dalam menjalankan ibadah di dalam agamanya masing-masing yang dicerminkan atau diaplikasikan dalam sikap hidupnya sehari-hari. Indeks Kesalehan Sosial di Indonesia, dapat diukur melalui beberapa dimensi atau indikator, yaitu:

1. Dimensi pemahaman serta praktik akan ajaran keberagaman pada pemeluk agamanya;
2. Dimensi pengetahuan dan penghayatan masyarakat terhadap kesalehan sosial;

3. Dimensi sikap dan perilaku yang mencerminkan kesalehan sosial.

Berbagai ruang sosial yang terkait dengan dimensi ini adalah praktik akan kepedulian sosialnya, lingkungannya dan ketaatannya akan hukum yang ada, sebagaimana dibagi kedalam beberapa indikator yaitu :

1. kepedulian sosial;
2. relasi antarmanusia;
3. melestarikan lingkungan;
4. etika dan budi pekerti; serta
5. kepatuhan terhadap negara dan pemerintah.

Misi kedua Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026, yakni memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berahlak mulia. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam bidang pendidikan, kesehatan yang memiliki tubuh dan jiwa yang sehat, dan berahlak mulia.

Mengidentifikasi kesalehan sosial melalui pengamalan keagamaan bukan hal mudah. Pengamalan keagamaan umumnya bersifat individual, unik, dan sering bersifat manifest bahkan emosional serta sarat dengan subjektifitas pelakunya, sehingga sepertinya sulit dikuantifikasikan. Meski demikian bukan berarti hal itu tidak bisa diidentifikasi.

Kesalehan sosial tetap bisa diidentifikasi dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu, pertama, pengamalan atau perilaku keagamaan adalah lahir dari sikap keagamaan, sementara sikap keagamaan lahir dari pemahaman seseorang atas nilai-nilai yang difahami (kognitif), dirasakan (afektif), dan dilakukan (konatif). Oktonika (2020) mengkategorikan kesadaran beragama tersebut ke dalam beberapa segi seperti segi aqidah, segi akhlaq, dan dari segi sosial. Berbagai dimensi tersebut dengan bantuan ilmu psikologi dapat uraikan dan dikaji secara lebih cermat. Kedua, perilaku seseorang termasuk dalam hal pengamalan kesalehan sosial didasari atas kebiasaan hidup sehingga membentuk pola perilaku atau kecenderungan sikap, hal inilah yang kemudian termanifestasi dan bisa dikuantifikasi. Dengan demikian secara konseptual kesalehan sosial bisa dikaji secara kuantitatif.

Pada masyarakat Bangka Barat dimensi atau variable yang digunakan untuk mengukur Indeks Kesalehan Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel kegiatan ibadah individu,
- 2) Variabel pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan
- 3) Variabel sikap dan perilaku yang menunjukkan kesalehan sosial.

Indeks kesalehan sosial masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan hasil rata-rata dari 3 (tiga) variabel diatas dengan rentang skala pengukuran kategori 0-100, dengan rician:

- 1) Skala pengukuran 80,01-100 kategori sangat tinggi
- 2) Skala pengukuran 60,01-80,00 kategori tinggi
- 3) Skala pengukuran 40,01-60,00 kategori sedang
- 4) Kala pengukuran 20,01-40,00 kategori rendah
- 5) Skala pengukuran 0-20,00 kategori sangat rendah.

Sasaran strategis ini diukur dari capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.92
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
1.	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Cukup	Tinggi	>100	Sangat Baik

Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Kabupaten Bangka Barat ini diperoleh dari nilai rerata Indeks Kegiatan Ibadah Individual (V1), nilai rerata Indeks Pengetahuan Responden mengenai Kesalehan Sosial (V2), dan nilai rerata Indeks Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Kesalehan Sosial Responden (V3). Secara rumus diperoleh skor rata-rata Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Bangka Barat $\bar{R} = (V1 + V2 + V3)/3 = (65,22 + 77,19 + 66,31)/3 = 208,72/3 = 69,57$ termasuk kategori **TINGGI**.

Rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial masyarakat Bangka Barat, maka pemerintah dapat mendahulukan peningkatan dari indikator dari ketiga indeks tersebut:

1. Kesalehan individu/ritual, yakni keaktifan dalam melakukan pengajian dan keikutsertaan dalam organisasi keagamaan;
2. Pengetahuan tentang keterlibatan dalam Good Government, dan Pengetahuan tentang keterlibatan dalam Konservasi Pemeliharaan Lingkungan dan Restorasi (Perbaikan Kembali Lingkungan); dan
3. Sikap/perilaku, yakni menghargai dan menghormati perbedaan dan keterlibatan dalam Good Government.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran " **Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat**" jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.93
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kesalehan Sosial Masyarakat Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Indeks Kesalehan Sosial	Tahun	Tinggi	Baik	>100%	Optimis tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat** di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, optimis tercapai

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;

4. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
5. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
8. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
9. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
10. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
11. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
12. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tabel II.94
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.4 Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat				
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,773,534,150.00	6,471,008,350.00	95.53
2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350,000,000.00	350,000,000.00	100
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	746,470,000.00	720,040,880.00	96.45
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	-
5	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4,504,820,010.00	4,433,890,610.00	98.42
6	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	424,515,000.00	267,895,700.00	63.10
7	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	554,695,300.00	535,842,700.00	96.60
8	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1,490,369,750.00	1,480,569,750.00	99.34
9	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46,775,100.00	43,965,100.00	93.99
10	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	182,341,600.00	159,217,600.00	87.31
11	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	193,105,450.00	159,281,800.00	82.48
12	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	263,218,845.00	233,860,325.00	88.84
Total		15,529,845,205.00	14,855,572,815.00	95.66

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	95,66%	100%	Efektif

Sasaran Strategis 4.1 “Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable”

Sasaran strategis ini diukur dari beberapa capaian indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.95
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan Akuntable terhadap Perjanjian Kerja

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
1.	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70	68,66	98,08	Baik
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik
3.	Maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang	Berkembang	100	Sangat Baik
4.	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kategori	cukup	cukup	100	Sangat Baik
5.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	64,4	63,52	98,63	Baik

Pencapaian sasaran “**Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable**” diukur dari 5 (lima) indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah, Opini BPK, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Profesionalitas ASN. Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2022 ada 3 (tiga) indikator sasaran yang ditetapkan dengan kategori “**Sangat Baik**” dan 2 (dua) indikator sasaran dengan status “**Baik**”, jika dikonversi ke dalam bentuk persentase maka capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 99,34% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh empat persen).

Secara rinci, capaian masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Sasaran 4.1.1 “Nilai SAKIP”

Indikator pertama dari Sasaran Strategis **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel** ialah Nilai Sakip. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut :

Tabel II.96

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2022 terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,66	70,98	96,73	Baik

Pada Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat adalah Nilai SAKIP Tahun 2022, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan Nilai **68,66** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.97

Hasil Evaluasi Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap NILAI SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,27
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,07
3.	Pelaporan Kinerja	15	11
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,30
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber Kemenpan RB Republik Indonesia

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Tabel II.98

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2022 Terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN SEBELUMNYA	REALISASI 2022	%	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,06	68,66	98,08	Baik

Berdasarkan Evaluasi yang diberikan oleh Kemenpan RB Nilai SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,4 terhadap Nilai SAKIP Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 69,06.

Tabel II.99

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	(%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,66	73,30	96,97	Optimis Tercapai

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat Perangkat Daerah. RPJMD periode 2021-2026 yang disusun juga lebih berkualitas dibandingkan RPJMD periode sebelumnya. Kinerja yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut telah menjawab isu strategis yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah memperbaiki dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi lebih berorientasi hasil/outcome dan selaras dengan sasaran strategisnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Masih terdapat dokumen perencanaan yang belum disampaikan pada esakip reviu, sehingga belum diketahui sejauh mana perbaikan yang dilakukan, diantaranya dokumen perjanjian kinerja Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PMPTSP;
- b. Belum disusunnya pedoman teknis perencanaan kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen kinerja;
- c. Masih ditemukan indikator yang tidak disertai sumber data yang jelas dan belum memiliki formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut. Diantaranya pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian;
- d. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur/measurable, relevan dan cukup serta belum berorientasi hasil/outcome. Sebagai contoh pada indikator "Jumlah pelaku usaha berbasis ekonomi kreatif" yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mendukung sasaran "Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif";
- e. Penjenjangan/cascading kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan logical framework dan Critical Success Factor (CSF) atas pencapaian kinerja, sehingga penjenjangan kinerja tersebut belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

2) Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan sebagian Perangkat Daerah telah disertai dengan definisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan serta dilengkapi dengan sub indikator yang tercakup pada setiap indikator kinerja.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh Perangkat Daerah dan telah menyusun rencana aksi dalam pencapaian kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Belum disusunnya pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan di level Pemda maupun pada unit kerja;

- b. Aplikasi E-SAKIP Kabupaten Bangka Barat sedang dibangun dan masih dalam proses input data pada dashboard;
- c. Belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, sehingga tidak dapat dipastikan strategi yang digunakan relevan dalam mendukung ketercapaian kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021 baik tingkat Pemda maupun tingkat Perangkat Daerah. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan analisis yang cukup mendalam terkait realisasi kinerja yang telah diperjanjikan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga telah mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 secara umum melalui website [Bangka BaratKabupaten.go.id](http://BangkaBaratKabupaten.go.id) sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja pada level Perangkat Daerah belum cukup menyajikan informasi yang memadai. Hal tersebut terlihat pada laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang belum sepenuhnya menjelaskan faktor keberhasilan atau hambatan dalam mencapai sasaran strategis beserta tren capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 untuk indikator kinerja "Persentase Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder Berkondisi Baik",
- c. LPPD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 maupun Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum dipublikasikan secara umum.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah dengan hasil 22 dari 30 PD memiliki predikat BB. Selanjutnya Inspektorat juga telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada seluruh PD.. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi yang belum disesuaikan dengan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- a. Belum memiliki pedoman evaluasi untuk mendukung pelaksanaan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- b. Sebagian besar perangkat daerah belum menindaklanjuti hasil evaluasinya;
- b. Laporan hasil evaluasi yang dilakukan belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah;

- c. Belum ada kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi SAKIP yang mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, beberapa hal yang menjadi atensi sebagai berikut :

- a. Menyempurnakan indikator kinerja agar lebih relevan dengan tujuan dan sasaran, serta memastikan formulasi perhitungannya sehingga komponen kunci yang memengaruhi keberhasilan dapat dipahami serta dipastikan validitasnya;
- b. Mereviu kembali dokumen penjenjangan kinerja (cascade down) dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menyusun pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas dan kualitas capaian data yang dihasilkan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah;
- d. Menyelesaikan pembuatan sistem manajemen kinerja berbasis digital melalui aplikasi E-SAKIP untuk menunjang dalam melakukan monitoring pencapaian target dan manajemen kinerja organisasi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja dan realisasi di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah beserta rencana aksinya, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian dan efektivitas strategi yang digunakan;
- f. Meningkatkan kualitas laporan kinerja baik di tingkat Pemda maupun Perangkat Daerah, antara lain dengan menyajikan analisis yang komprehensif, serta memanfaatkan laporan kinerja sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- g. Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk targettarget yang telah tercapai serta menjadikan Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
- h. Menyampaikan Laporan Kinerja Pemda maupun Perangkat Daerah melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik;
- i. i. Membuat kebijakan reward and punishment atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah;
- j. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Indikator Sasaran 4.1.2 “Opini BPK”

Penilaian yang dilakukan pada Tahun 2022 adalah untuk pemeriksaan laporan keuangan pada Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dapat diartikan Target dari Indikator Sasaran Opini BPK Terhadap Keuangan Daerah Tercapai yaitu Opini WTP dengan status capaian baik sekali.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tercapai. Dalam penyusunan capaian kinerja Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah,

disepakati jika Opini BPK berupa WTP mendapat capaian 100 persen, jika Opini BPK berupa WDP mendapat Capaian 50 persen, dan jika Opini BPK berupa *disclaimer* mendapat Capaian 0 persen.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Meningkatkan sistem penatausahaan dan pengelolaan aset daerah.
4. Melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Faktor Penghambat/kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Belanja daerah masih bergantung dengan pemerintah pusat;
3. Sistem perencanaan OPD yang belum disusun secara komperhensif;
4. Penyusunan KUA PPAS APBD belum tertib;
5. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal.

Indikator Sasaran 4.1.3 “Maturitas sistim pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)”.

Dalam capaian Tingkat Maturitas tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Tingkat Maturitas level 2 (Berkembang), adapun rincian tingkat capaian serta presentase capaiannya sebagai berikut :

Pada tahun 2022 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **level 2 Berkembang, dengan rincian sebagai berikut:**

Tabel II.100
Rincian Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Unsur	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	2,500	1,000
2.	Struktur dan Proses	30%	2,241	0,672
3.	Pencapaian Tujuan	30%	3,000	0,900
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP				2,572

1) Penetapan Tujuan

Penilaian cepat pada tahap penetapan tujuan di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 dengan B. Dengan demikian nilai pada penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Tabel II.101
Kualitas Sasaran Strategis

No	Uraian	Bobot	Skor	Skor Akhir	Validasi Perwakilan BPKP		
					Predikat SAKIP	Skor	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis Pemda	100		100,00%			85,56%
	a. Sasaran Strategis Tepat	40	100%	40,00%		88,89%	35,56%
	b. Indikator Kinerja Tepat dan Baik	30	100%	30,00%		88,89%	26,67%
	c. Target Kinerja Baik	30	100%	30,00%		77,78%	23,33%
2	Sasaran Strategis Satker	100		100,00%			74,96%
	a. Ketertarikan dengan Sasaran Strategis Pemda	30	100%	30,00%		77,57%	23,27%
	b. Sasaran Strategis Tepat	30	100%	30,00%		73,00%	21,90%
	c. Indikator Kinerja Tepat dan Baik	20	100%	20,00%		73,00%	14,60%
	d. Target Kinerja Baik	20	100%	20,00%		73,00%	14,60%
	Skor Akhir			100,00%			79,96%
	Level			5	B		3

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel II.102
Kualitas Sasaran Strategis

No	Uraian	Bobot	Skor	Skor Akhir	Validasi PerwakilanBPKP		
					Predikat SAKIP	Skor	Skor Akhir
1	Kualitas Program	100		100,00%			72,22%
	a. Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD	30	100%	40,00%		73,00%	21,90%
	b. Kualitas Sasaran Program OPD	30	100%	30,00%		73,00%	21,90%
	c. Kualitas indikator kinerja program OPD	20	100%	20,00%		72,50%	14,50%
	d. Kualitas target kinerja program OPD	20	100%	30,00%		69,60%	13,92%
2	Kualitas Kegiatan	100		100,00%			74,96%
	a. Ketertarikan dengan Sasaran Program	40	100%	40,00%		73,00%	29,20%
	b. Kualitas indikator kinerja program OPD	30	100%	30,00%		68,50%	20,55%
	c. Kualitas target kinerja kegiatan OPD	30	100%	30,00%		60,00%	18,00%
	Skor Akhir			100,00%			69,99%
	Level			5	B		2

2) Struktur dan Proses

Penilaian cepat pada tahap struktur dan proses didasarkan pada hasil penilaian *baseline* tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan proses implementasi atas

manajemen risiko dan efektivitas pengendalian korupsi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan hasil sebagaimana disampaikan pada lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Berikut ini permasalahan yang masih belum dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bangka Barat:

- Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan penilaian risiko hanya pada tataran operasional dan telah menghasilkan register risiko yang sudah dilengkapi dengan rencana tindak pengendalian. Namun revidu ataupun evaluasi atas efektivitas pengendalian tersebut belum dilakukan;
- Belum adanya komitmen yang dilakukan oleh pimpinan daerah untuk dapat menyusun kebijakan dan mengimplementasikan manajemen risiko secara menyeluruh di wilayahnya;
- Program antikorupsi belum didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit dan memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana.

3) Pencapaian Tujuan

Penilaian cepat pada tahap pencapaian tujuan di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada nilai SAKIP tahun 2021 dengan nilai B. Dengan demikian nilai pada pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel II.103
Tahap Pencapaian Tujuan Di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Didasarkan Pada Nilai SAKIP tahun 2021

No.	Pencapaian Tujuan Indikator	Capaian Pemda	Validasi Perwakilan BPKP	
			Predikat SAKIP	Skor Akhir
A	Efektivitas dan Efisiensi			
1.	Capaian Outcome	5	B	3
2.	Kualitas Sasaran Program OPD	5	B	3
B	Keandalan pelaporan keuangan			
1.	Opini BPK atas Laporan Keuangan – BPK RI	3		3
C	Pengamanan Atas Aset Negara/Daerah			
1.	Keamanan Administrasi	3		3
2.	Keamanan Hukum	3		3
3.	Keamanan Fisik	3		3
D.	Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan			
1.	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	3		3
2.	Adanya Kasus Korupsi	Tidak		Tidak

Dalam capaian Tingkat Maturitas dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya Jika kita klasifikasikan tingkat capaian target, prosentase capaian, serta status capaian dalam penyusunan capaian Tingkat Maturitas, maka jika capaian Tingkat Maturitas melebihi realisasi tahun sebelumnya yaitu level 3 (terdefinisi) maka prosentase capaiannya 200% dengan status capaiannya Baik sekali, jika capaian Tingkat Maturitas mencapai/sama dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu level 2 (berkembang) maka prosentase

capaiannya 100% dengan status capaiannya Baik dan jika Tingkat Maturitas mengalami penurunan ke Level 1 (Rintisan) maka mendapat capaian 0% dengan status capaian Buruk.

Indikator Sasaran 4.1.4 “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia untuk nilai Indeks SPBE sebesar 2,31 dengan kategori “Cukup” sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

**Tabel II.104
Uraian Penilaian SPBE Kabupaten Bangka Barat tahun 2022**

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,31
Domain Kebijakan SPBE	2,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,90
Domain Tata Kelola SPBE	1,70
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75
Penyelenggara SPBE	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,94
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,90
Layanan Berbasis Elektronik	3,00

**Tabel II.105
Aspek Penilaian SPBE**

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	5	< 1,8	Kurang
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

Tabel II.106
Perbandingan Indeks SPBE Secara Nasional tahun 2022

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Prov.	Kab.	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

Tabel II.107
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

NO	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	3	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	2	2
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2	4

NO	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	2	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	2	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4	3

Capaian Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sama sama telah mencapai kategori “Cukup”, akan tetapi jika dilihat dari aspek penilaian secara angka terjadi sedikit peningkatan pada capaian Indeks SPBE tahun 2022 yaitu 2,31 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 2,27, maka dapat disimpulkan prosentase capaian Indeks SPBE dibandingkan tahun sebelumnya 100% dengan status capaian “Baik”.

Indikator Sasaran 4.1.5 “Indeks profesionalitas ASN”

Perhitungan Indeks profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, sehingga pengukuran Indeks Profesional ASN dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan berkesinambungan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dimana Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi **kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin**. Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 adalah sebesar 62,47. Pencapaian ini dibawah target yang ditetapkan pada saat diperjanjikan yaitu sebesar 64,60.

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (tahun 2021) yang memperoleh nilai 60,16.

Tabel II.108
Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN

No.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran	Hasil Pengukuran 2021	Hasil Pengukuran 2022	Target 2022	Penurunan / Kenaikan	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	12,83	13,25	12,90	3,27%	102,71%
2.	Kompetensi	40	17,17	19,03	21,30	10,83%	89,34%
3.	Kinerja	30	25,17	25,20	25,41	0,12%	99,17%
4.	Disiplin	5	4,99	4,99	4,99	0,00%	100,00%
	Total	100	60,16	62,47	64,60	3,84%	96,70%

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pencapaian indikator IP ASN yaitu sebagai berikut:

- a. Diterbitkannya Peraturan Bupati Bangka Barat No. 16 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta Surat Edaran Bupati Nomor 800/544/BKPSDMD/2021 Tentang Peningkatan Kompetensi ASN.
- b. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara oleh BKPSDMD bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.
- c. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai dan wewenang pejabat menjatuhkan hukuman disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat, serta Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh BKPSDMD bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator IP ASN sebagai berikut:

- a. Di tahun 2022 banyak Pejabat eselon II yang memasuki masa purna tugas, sehingga Jabatan Eselon II yang terisi sebanyak 21 orang dari 31 formasi jabatan eselon II yang ada. Pejabat Eselon II yang telah mengikuti Diklat Struktural PIM II sebanyak 10 orang.
- b. Dari 11 orang yang belum mengikuti Diklat PIM II, 9 orang adalah Pejabat Eselon II yang baru dilantik melalui proses seleksi JPT tahun 2022 sehingga belum berkesempatan untuk mengikuti Diklat PIM II dan Jumlah Jabatan Eselon II yang dapat mengikuti Diklat Pimpinan Tk II setiap tahunnya ditentukan oleh kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara.
- c. Rendahnya minat Pegawai untuk meningkatkan kompetensinya melalui Diklat Teknis/Fungsional, Seminar/ Workshop/ Magang/Kursus atau sejenisnya yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatannya khususnya dimasa Pandemi Covid-19 ini dan keterbatasan biaya perjalanan dinas bagi peserta diklat.

Secara keseluruhan untuk pencapaian indikator Sasaran **"Meningkatnya tata kelola pemerintah yang Profesional, dan akuntable"** jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.109
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntable Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN (%)	STATUS CAPAIAN
Nilai SAKIP Daerah	Nilai	68,66	70,53	97,35	Optimis Tercapai
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	Optimis Tercapai
Maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang	Terdefinisi	76,66	Optimis Tercapai
Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kategori	Cukup	Baik	88,46	Optimis Tercapai
Indeks profesionalitas ASN	Indeks	63,52	65,53	96,93	Optimis Tercapai

Pencapaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, dan akuntabel** di Tahun 2022 dengan indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah, Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Indeks Profesionalitas ASN jika dibandingkan dengan target capaian akhir tahun RPJMD, dengan status capaian "Optimis Tercapai", Walaupun capaian target indikator sasaran ini masih belum semua tercapai di tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD, akan tetapi masih sangat optimis dapat tercapai pada akhir tahun RPJMD karena tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJMD dan masih menyisahkan beberapa tahun lagi untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), persentase capaian dihitung dari hasil bagi capaian tahun 2022 dengan nilai range terendah target RPJMD dikali seratus persen. Target RPJMD yaitu pada tingkat maturitas TERDEFINISI pada range nilai 3,0 - < 4,0 sedangkan capaian tahun 2022 adalah BERKEMBANG pada nilai 2,3, sehingga persentase capaian indikator maturitas sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 76,66% (tujuh puluh enam koma enam puluh enam persen).

Untuk indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), persentase capaian dilihat dari range target pada akhir tahun RPJMD yaitu kategori BAIK dengan range nilai 2,6 - < 3,5, sedangkan capaian tahun 2022 yaitu kategori CUKUP dengan nilai 2,30, sehingga persentase dihitung dari nilai capaian tahun 2022 dibagi nilai range terendah target RPJMD dikali seratus persen yaitu sebesar 88,46% delapan puluh delapan koma empat puluh enam persen.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan target capaian indikator sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Professional dan Akuntabel pada tahun mendatang.

Langkah strategis atau upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan nilai SAKIP antara lain :

- a. Melakukan reuiu perbaikan terhadap perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah seperti : manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan pembangunan (*integrated development plan*) serta mekanisme *casecade* kinerja;
- b. *Casecade down* kinerja sampai level organisasi terendah perlu dibangun guna memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam RPJMD;
- c. Melakukan reuiu atas keselarasan antara kegiatan, program, dengan sasaran strategis sehingga dapat meyakinkan bahwa terdapat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi pengelolaan program secara berkala dengan berfokus pada ketercapaian hasil program serta keterpaduan lintas perangkat daerah;
- e. Menyempurnakan aplikasi E-SAKIP agar dapat optimal digunakan untuk monitoring dan evaluasi kinerja serta terintegrasi dengan aplikasi lainnya, seperti aplikasi perencanaan dan penganggaran;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat dengan meningkatkan kapabilitas para evaluator agar mampu memacu perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah; dan

- g. Mendorong penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP yang ditunjang dengan pelaksanaan reuiu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh unit kerja.

Adapun strategi untuk meningkatkan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan risiko dan menerapkannya secara menyeluruh diwilayahnya.
- b. Menuangkan pernyataan komitmen bersama mengenai penerapan manajemen risiko oleh sekretaris daerah dan seluruh OPD.
- c. Meningkatkan sosialisai terkait manajemen risiko yang telah ditetapkan kepada seuruh OPD.
- d. Memberikan pendampingan kepada seluruh OPD dalam mengimplementasikan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- e. Mengalokasikan sumber daya secara memadai terkait efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Berikut langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan nilai indeks SPBE adalah sebagai berikiut :

- a. Penguatan Peran Tim Koordinasi SPBE dalam rangka memaksimalkan penerapan SPBE di Kabupaten Bangka Barat
- b. Menyusun Regulasi/Kebijakan yang belum terpenuhi terkait penerapan SPBE seperti Penyusunan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE dan aturan terkait Audit TIK.
- c. Menerapkan dan Mengembangkan Layanan-Layanan SPBE yang terintegrasi baik layanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat (dalam hal ini Apliaksi Umum seperti LPSE, SRIKANDI, SP4N Lapor, SIPD, OSS dan lain lain) maupun layanan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini aplikasi Khusus seperti JDIH, EKIN PHL, E-PRESENSI, PPDB Online dan lain-lain).

Beberapa langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran IP ASN adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi Pegawai Pejabat Eselon II, III dan IV untuk mengikuti Diklat Struktural sesuai dengan Jabatannya. Dan memfasilitasi Pegawai Pejabat Fungsional dan Teknis Lainnya untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Teknis Lainnya sesuai dengan Jabatannya.
- b. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- c. Menyusun regulasi daerah tentang pemberian penghargaan/reward bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi.
- d. Melakukan kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai di lingkungan Pemkab. Bangka Barat.

Dalam pencapaian sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel**, didukung oleh program pembangunan yang dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Penyelenggaraan Pengawasan
9. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
11. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi
12. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
13. Program Pengelolaan Arsip
14. Program Perizinan Penggunaan Arsip
15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
16. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
17. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
18. Program Kepegawaian Daerah
19. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tabel II.110
Analisis Program Sasaran
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
3.1.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.835.802.500,00	4.582.831.996,00	94,77%
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	361.671.892,00	346.145.500,00	95,71%
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	813.023.400,00	648.242.400,00	79,73%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	460.764.750,00	290.617.235,00	63,07%
5	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	156.295.000,00	155.175.000,00	99,28%
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	116.945.340.608,00	98.309.939.376,00	84,06%
7	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	718.551.150,00	603.974.056,00	84,05%
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.374.279.900,00	1.364.582.500,00	99,29%
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	359.572.000,00	316.020.600,00	87,89%
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.342.112.858,00	13.668.084.359,00	74,52%
11	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengaman Informasi	39.755.000,00	38.975.000,00	98,04%
12	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	29.604.740,00	18.082.100,00	61,08%
13	Program Pengelolaan Arsip	11.584.925,00	11.354.600,00	98,01%
14	Program Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	-
15	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.262.819.000,00	2.239.551.573,00	98,97%
16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	706.129.780,00	682.769.146,00	96,69%
17	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	885.907.600,00	641.923.500,00	72,46%
18	Program Kepegawaian Daerah	1.362.310.218,00	1.040.808.707,00	76,40%
19	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.773.534.150,00	6.471.008.350,00	95,53%
Total		156.439.059.471,00	131.430.085.998,00	84,01

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, dan Akuntabel	84,01	99,34	efektif

Sasaran Strategis 4.2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah”

Pengukuran Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah” dilakukan melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan secara periodik.

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan pelayanan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, adalah sebagai berikut:

Tabel II.111
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah terhadap Perjanjian Kerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,52	83,06	101,88	Sangat Baik

Pada tahun 2022, pencapaian target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,06 dimana target tahun 2022 sebesar 81,52 sehingga pencapaian realisasi pada tahun 2022 telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel II.112
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah terhadap Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,74	83,06	100,38	Meningkat

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, maka capaian IKM tahun 2022 juga mengalami peningkatan indeks sebesar 0,32 atau jika dikonversi kedalam persentase sebesar 0,38%.

Tabel II.113
Indeks Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelayanan Publik (UPP) Tahun 2022

No	OPD/ Unit Pelayanan Publik	Nilai IKM	Kategori
1	Dinas Kesehatan	82,39	B (Baik)
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	73,75	C (Kurang Baik)
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,72	B (Baik)
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A	86,09	B (Baik)
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,78	B (Baik)
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	88,88	A (Sangat Baik)
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	83,77	B (Baik)
8	RSUD Sejiran Setason	82,79	B (Baik)
9	Kecamatan Muntok	81,92	B (Baik)
10	Kecamatan Simpang Teritip	90,99	A (Sangat Baik)
11	Kecamatan Kelapa	80,85	B (Baik)
12	Kecamatan Jebus	83,43	B (Baik)
13	Kecamatan Parittiga	82	B (Baik)
14	Kecamatan Tempilang	88,58	A (Sangat Baik)
15	Puskesmas Muntok	79,29	B (Baik)
16	Puskesmas Simpang Teritip	80,03	B (Baik)
17	Puskesmas Kelapa	82,56	B (Baik)
18	Puskesmas Sekar Biru	82,54	B (Baik)
19	Puskesmas Puput	82,49	B (Baik)
20	Puskesmas Tempilang	82,28	B (Baik)
21	Puskesmas Jebus	83,98	B (Baik)
22	Puskesmas Kundi	79,18	B (Baik)
	Rata-rata	83,06	B (Baik)

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Jika dilihat tren nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2022 cenderung meningkat, walaupun sempat terjadi penurunan pada masa pandemic covid 19 yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Perkembangan nilai indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat digambarkan pada grafik di bawah ini:

Grafik II.18
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014-2022



Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Tabel II.114
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2022 terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,06	82,72	100,41	Optimis Tercapai

Jika melihat capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Tahun 2022 sebesar 83,06, jika dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 82,72 maka target telah tercapai yaitu sebesar 100,41 persen. Beberapa faktor pendorong pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2022 yaitu antara lain:

- a. Telah disusun standar pelayanan serta dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan pada OPD/UPP pelayanan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- b. Dilakukan pembinaan secara berkala kepada OPD/UPP guna pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pada setiap tahun periodik dilakukan evaluasi oleh pihak eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada beberapa perangkat daerah atau unit pelayanan yang ditunjuk sebagai *sample* lokus, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB RI dan Ombudsman RI. Hasil evaluasi ini menghasilkan rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh OPD/UPP untuk perbaikan pelayanan;
- d. OPD/UPP berupaya seoptimal mungkin memperbaiki pelayanan pada OPD/UPP masing-masing, baik dari aspek administrasi, pelaksana, sarana prasarana, dan lain-lain.
- e. Beberapa OPD/UPP melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan lain-lain.

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah sebanyak 10 program, sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
7. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
8. Program Penataan Desa
9. Program Administrasi Pemerintahan Desa
10. Program Perekonomian dan Pembangunan

Tabel II.115
Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
4.2 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah				
1	Program Pendaftaran Penduduk	287.110.000,00	286.272.000,00	99,71%
2	Program Pencatatan Sipil	34.313.300,00	33.187.700,00	96,72%

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	27.736.700,00	26.531.600,00	95,66%
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	10.090.000,00	10.070.000,00	99,80%
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	749.053.500,00	734.917.958,00	98,11%
8	Program Penataan Desa	-	-	-
9	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.370.417.000,00	3.099.472.300,00	91,96%
10	Program Perekonomian dan Pembangunan	683.045.637,00	486.751.857,00	71,26%
Total		5.161.766.137.000,00	4.677.203.415,00	90,61

Tabel II.116
Efisiensi Penggunaan Sumber daya
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja (%)	Efektifitas
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	90,61	101,88	Efektif

Berdasarkan tabel di atas maka realisasi anggaran sebesar 90,61% dibanding dengan realisasi kinerja sebesar 100,38 % menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana.

Sasaran Strategis 5.1 “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”

Sasaran Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah didukung oleh satu indikator yaitu capaian derajat otonomi fiskal daerah. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan suatu rasio guna mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah khususnya Pemerintah Daerah. Meningkatnya PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Adapun salah satu rasio yang digunakan sebagai tolok ukur dalam hal ini yaitu dengan membandingkan Total Realisasi PAD dengan Total Pendapatan Daerah. Capaian indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasinya, sebagai berikut:

Tabel II.117
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,87	9,14	103,04	Tercapai

Pada Tahun 2022, capaian Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebesar 9,14 persen. Pencapaian ini di atas dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pemerintah daerah dimana target yang ditetapkan pada Tahun 2022 terkait DOFD sebesar 8,87 persen. Pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat sebesar 9,14 persen didapat dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 59.693.536.555,86 dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 879.865.299.394,06 Detail perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Bulan Desember tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 969,110,061,203.73 atau sebesar 104,09 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 931,058,006,642.39 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.118
Realisasi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	30,163,590,000.00	21,724,706,868.90	72.02%
Retribusi Daerah	10,173.655.155.00	7,355,787,438.00	72,30%
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,115,000,000.00	5,306,960,199.78	103,75%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59,215,482,010.43	54,142,303,100.05	91,43%
Pendapatan Transfer	811,275.802.666.96	871,463,693,70.00	107,42 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	15,114,466,810.00	9,116,565,272.00	60,32 %
Total Pendapatan Daerah	931,058,006,642.39	969,110,061,203.73	104,09%

Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 mencapai Rp. 88.529.802.222,73.- atau 84,43 persen dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp., 104.667.737.165,43 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel II.119
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jumlah Pajak Daerah	30.163.590.000,00	21.724.751.484,90	72,02%
Retribusi Daerah	10.173.665.155,00	7.355.787.438,00	72,30%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.115.000.000,00	5.306.960.199,78	103,75%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	59.215.482.010,43	54.142.303.100,05	91,43%
Total Pendapatan Daerah	104.667.737.165,43	88.529.802.222,73	84,58%

Berikut rincian Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel II.120
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
PENDAPATAN PAJAK DAERAH	30.163.590.000	21.724.706.868,90	72,02
Pajak Hotel	100.750.000,00	65.351.001,00	64,86
Pajak Restoran	2.820.000.000,00	2.055.812.417,00	72,90
Pajak Hiburan	35.700.000,00	40.526.399,00	113,52
Pajak Reklame	450.000.000,00	342.360.716,10	76,08
Pajak Penerangan Jalan	13.500.000.000,00	12.465.654.940,00	92,34
Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	381.669.363,00	7,63

JENIS PENERIMAAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	%
Pajak Parkir	7.140.000,00	4.100.000,00	57,42
Pajak Air Tanah	250.000.000,00	126.994.263,80	50,80
Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	232.118.500,00	46,42
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	6.000.000.000,00	4.775.580.941,00	79,59
BPHTB	1.500.000.000,00	1.234.582.944,00	82,31

Tabel II.121
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah dibandingkan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	6,78	9,14	134,80	Meningkat

Perbandingan Meningkatnya Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator indikator Derajat Otonomi Fiskal daerah dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,36 persen.

Tabel II.122
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah
Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TARGET AKHIR RPJMD	%	STATUS CAPAIAN
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,14	9,00	101,55	Optimis Tercapai

Dari pencapaian DOFD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 9,14 persen, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 9,00 persen maka target akhir masa RPJMD telah tercapai. Dalam hal pencapaian target indikator DOFD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah khususnya pada komponen pajak dan retribusi daerah. Strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan DOFD antara lain melalui intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.

Upaya-upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi serta ekstensifikasi antara lain:

- a. Memberikan surat peringatan kepada pengelola rumah makan/restoran/cape yang selama ini belum melakukan pembayaran pajak restoran;
- b. Melakukan relaksasi denda untuk PBB P2;
- c. Kerjasama dengan operator telekomunikasi terkait SMS *Gateway* kepada wajib pajak;
- d. Berkoordinasi dengan BUMN dan swasta terkait potensi pajak yang ada di BUMN dan swasta;
- e. Melakukan penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah;
- f. Melakukan penagihan-penagihan pajak terutang yang timbul;
- g. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran, dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
- h. Melakukan penyusunan *data base* potensi pajak;
- i. Menyempurnakan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi secara optimal;
- j. Melakukan kerja sama dengan pihak terkait yaitu kejaksaan sebagai pengacara negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak;

Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah sebanyak 3 program, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Tabel II.123
Analisis Program Sasaran Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5=4/3*100%
5.1 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah				
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.327.083.300,00	813.610.349,00	61,31%
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	683.045.637,00	486.751.857,00	71,26%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	16.270.000,00	15.146.750,00	93,10%

Tabel II.124
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

NO	SASARAN STRATEGIS	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kinerja	Efektifitas
1	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	75,22	103,04	Efektif

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2022 tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat. Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-090.02.4.690538/2022 serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Nonsistem Resi Gudang Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan Melalui Dana Tugas Pembantuan. Sedangkan Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 terkait Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat melalui Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menerima tugas pembantuan yang berasal dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dengan total pagu anggaran sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi Pasar Muntok).

Melalui Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan menerima tugas pembantuan yang berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi

Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total pagu anggaran sebesar Rp 1.044.505.000,00 yang digunakan untuk membiayai 4 kegiatan, antara lain :

1. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
2. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian;
3. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida;
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian;

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.1.1. Target Kinerja

a) Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat

Tugas pembantuan ini diterima dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat melalui bidang Perdagangan. Tugas pembantuan yang harus dilaksanakan yakni Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi Pasar Muntok)	3.000.000.000,00
	TOTAL PAGU KEGIATAN	3.000.000.000,00

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi Pasar Muntok)	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Sehat dan Kondusif di Kabupaten Bangka Barat

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

NO.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi Pasar Muntok)	Terevitalisasinya lapak pedagang di Pasar Mentok dengan rincian : pedagang lapak sayur sebanyak 111 unit, pedagang lapak ikan sebanyak 116 unit, pedagang lapak daging ayam sebanyak: 24 unit, pedagang lapak daging sapi sebanyak 11 unit, pedagang lapak PKL 1 sebanyak: 36 unit, pedagang lapak PKL 2 sebanyak: 36 unit, pedagang lapak buah/sayur sebanyak 40 unit, pedagang petak toko sebanyak 23 unit, pedagang petak ruko sebanyak 10 unit, dengan total 407 unit.

Untuk tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga di tahun 2022 tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat hanya berasal

dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

b) Bidang Prasarana Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat

Tugas pembantuan ini diterima dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk kemudian dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat melalui bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Tugas pembantuan yang harus dilaksanakan yakni program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan jumlah kegiatan sebanyak 4 (empat) buah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA KEGIATAN	PAGU KEGIATAN
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	770.000.000
2.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	10.000.000
3.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	135.385.000
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	129.120.000
	TOTAL PAGU KEGIATAN	1.044.505.000

Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	NAMA KEGIATAN	TARGET KINERJA
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	a) Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi; b) Meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman; c) Memberikan peningkatan terhadap partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapokton terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi; d) Terbangunnya sistem irigasi perpompaan sebanyak 1000 unit untuk mendukung komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; e) Meningkatkan ketersediaan air sebagai suplai pada lahan pertanian tanaman pangan.
2.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	a) Menghindari terjadinya penyimpangan dalam penyaluran maupun pembayaran pupuk bersubsidi; b) Tersedianya pupuk bersubsidi kepada petani secara tepat waktu dengan mutu terjamin dan dengan harga eceran sesuai dengan ketentuan pemerintah
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	a) Terselenggaranya tertib administrasi secara efektif dan efisien; b) Tersusunnya pelaporan yang sistematis, transparan dan akuntabel.

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

NO.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Terealisasinya kegiatan pembangunan pekerjaan konstruksi irigasi perpompaan Gapoktan Limau Jaya Desa Air Limau Kec.Mentok Kab.Bangka Barat, kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Poktan Prima Tani Dsn.Kamat Desa Sp.Yul Kec. Tempilang, Gapoktan Sempana Desa Beruas Kec.Kelapa, Gapoktan Bukit Lestari Buyan Dusun Buyan Desa Buyan Kelumbi Kec. Tempilang, Poktan Indah Permai Desa Air Bulin Kec.Kelapa, Poktan Karya Tani Dusun Taragunung Desa Air

NO.	NAMA KEGIATAN	REALISASI
		Nyatoh Kec.Simpang Teritip, Gapoktan Tebing Jaya Dusun Tebing Kec.Kelapa
2.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida secara tepat guna dan tepat sasaran untuk kelompok tani; Tersedianya pupuk bersubsidi untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Bangka Barat;
3.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan sebanyak 1 paket untuk masing-masing kegiatan

Untuk tahun 2022 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga di tahun 2022 tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat hanya berasal dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

3.1.2. Realisasi

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A. Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat											
1.	Kementerian Perdagangan RI	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 090.02.4.690538/2022	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab.Bangka Barat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	Rp 3.000.000.000,00	Rp 2.818.149.948,00	93,94	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan yang Sehat dan Kondusif di Kabupaten Bangka Barat		
B. Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan											
1.	Kementerian Pertanian RI	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 018.08.309168/2022	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Kab.Bangka Barat	Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat	Rp 1.044.505.000,00	Rp,1.039.831.390,00	99,55	Terpenuhinya sarana dan prasarana pertanian secara optimal		
			Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian			Rp 770.000.000,00	Rp 769.800.000,00	99,56	Tersedianya irigasi perpompaan dan RJIT di desa-desa yang membutuhkan		
			Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian			Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100,00	Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan Aspek teknis, Bisnis dan Manajemen Kelembagaan UPJA		

NO.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
			Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida			Rp 135.385.000,00	Rp 134.041.000,00	99,01	Terselenggaranya penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi secara tepat sasaran		
			Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			Rp. 129.120.000	Rp. 125.990.390,00	97,58	Tersedianya laporan yang sistematis dan akuntabel untuk keperluan pelaporan		

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Untuk tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat tidak menerima Tugas Pembantuan dari Provinsi akan tetapi hanya melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

3.3. Permasalahan dan Kendala

- **Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat**

Dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Revitalisasi Pasar Muntok) tidak ada kendala berarti yang ditemui oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat. Seluruh tahapan dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kegiatan ini diharapkan sarana distribusi perdagangan yang sehat dan kondusif di Kabupaten Bangka Barat dapat tercipta dengan optimal.

- **Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022 antara lain :

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, yakni sehubungan dengan tidak adanya dana pendampingan dari APBD, hal ini tentu saja berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan tugas pembantuan yang diberikan tersebut.
2. Perubahan Pedum Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Tahun 2022 yang awalnya berupa bantuan pemerintah (banpem) beralih ke swakelola tipe IV. Peralihan pedum ke swakelola tipe IV ini berlangsung dalam tenggat yang lama, sedangkan Kab.Bangka Barat telah melakukan pencairan/realisasi di awal waktu. Oleh karena itu, untuk mengurus perubahan ini memerlukan waktu yang cukup lama.
3. Dikarenakan perubahan waktu peralihan antara banpem dan swakelola ini, terjadi keterlambatan pelaksanaan di bulan Oktober, kondisi curah hujan meningkat sehingga menyulitkan percepatan pekerjaan.

Sulitnya mencari tukang dan tenaga kerja di lahan pertanian dikarenakan masyarakat yang beralih ke mata pencaharian penambang timah dikarenakan naiknya harga timah.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

- **Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat**

Kegiatan seperti ini kedepannya agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan serta bersifat menyeluruh, dalam artian dapat pula dinikmati oleh pasar-pasar lain di Kabupaten Bangka Barat yang berada di luar Kecamatan Mentok. Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan bantuan serupa secara merata untuk Kecamatan lain di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi kondisi pasar yang ada di Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat lebih layak, kondusif serta berdaya saing sehingga mampu memberikan pengaruh signifikan bagi perekonomian lokal dan daerah.

- **Bidang Prasarana Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan tentu saja tetap membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu kegiatan ini juga memerlukan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal pengawalan anggaran dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.

Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya dapat memberikan arahan operasional terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mampu menciptakan koordinasi terhadap pengawasan pupuk dan pestisida.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2022

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 butir 17 disampaikan bahwa setiap Warga Negara berhak untuk memperoleh pelayanan minimal sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan dasar. Pada Pasal 18 ayat (1) juga disampaikan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Maka dari itu pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal. Kedua regulasi inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Untuk jenis pelayanan dasar yang dimaksud adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Dan untuk mutu pelayanan dasar sendiri adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelaksanaan dasar sesuai standar teknis agar hidup layak. Di dalam Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disampaikan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Sehingga dengan adanya aturan tersebut sudah menjadi hal yang mutlak bagi pemerintah untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal ini.

Untuk cakupan penerapan Standar Pelayanan Minimal ini ditujukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang diterjemahkan kedalam bentuk indikator pelayanan. Masing-masing tingkatan pemerintah tentunya memiliki indikator yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan yang dimiliki. Untuk Pemerintah Provinsi terdapat 14 jenis indikator SPM serta untuk pemerintah Kabupaten/ Kota terdapat 29 jenis indikator yang terbagi ke dalam masing-masing bidang urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun ke 29 indikator layanan SPM Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

Indikator Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten/ Kota

No	JENIS LAYANAN
	PENDIDIKAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini
2.	Pendidikan Dasar
3.	Pendidikan Kesetaraan

No	JENIS LAYANAN
	KESEHATAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4.	Pelayanan Kesehatan Balita
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
	PEKERJAAN UMUM
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
	PERUMAHAN RAKYAT
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota
	TRANTIBUMLINMAS
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
	SOSIAL
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Pant
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pant
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Pant
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut dilakukan oleh OPD pengampuh yang memiliki urusan yang berkaitan Dengan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar. Di Kabupaten/ Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD pelaksana penerapan SPM memiliki perbedaan nomenklatur jika dibandingkan antar Kabupaten/ Kota lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kebijakan dalam penataan organisasi di masing-masing pemerintah Kabupaten/ kota yang disesuaikan kebutuhan daerah masing-masing. Namun walaupun demikian, tidak menjadi permasalahan sejauh ini terkait dengan perbedaan nomenklatur tersebut yang paling utama asalkan penerapan SPM dapat terlaksana dengan optimal.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri untuk OPD pengampuh SPM yang ada saat ini berjumlah 7 OPD dari 6 urusan SPM tersebut, yaitu :

- a. Pendidikan dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Kesehatan dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dengan OPD tekhnisnya yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;

- e. Trantibumlinmas dengan 2 (dua) OPD teknisnya yang terbagi menjadi sub urusan trantibumlinas dan sub urusan pemadam kebakaran oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Sub urusan bencana oleh BPBD;
- f. Sosial dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.

Penerapan SPM sendiri jika merujuk kepada regulasi yang berlaku terdiri dari 4 tahapan yaitu :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan ini merupakan suatu bentuk instrument dari tahapan dalam penerapan SPM yang mana akan menjadi kertas kerja OPD dalam merencanakan, mengalokasikan dan melaksanakan program/ kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan erat dengan penerapan SPM. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2020 tersebut pada pertengahan tahun 2022 yang lalu telah dilakukan pencabutan dikarenakan belum dapat memuat secara terperinci terkait penjabaran 4 (empat) tahapan kebijakan penerapan SPM tersebut serta hal hal yang bersifat teknis lainnya. Sehingga dengan adanya pencabutan tersebut maka Pemerintah pusat lalu menyusun aturan perubahan yang akan memuat penjabaran pelaksanaan SPM melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk pengaturan secara teknis Standar Pelayanan Minimal masing-masing urusan, maka masing-masing Kementerian/Lembaga juga telah menyusun peraturan standar teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusannya masing-masing yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Di dalam peraturan kementerian yang membidangi SPM tersebut mengatur terkait dengan definisi opsional masing-masing layanan, jenis mutu layanan, kriteria pemberian pelayanan, kriteria sasaran penerima layanan serta pelaporan SPM masing-masing urusan.

Kemudian di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ini juga tidak hanya mengatur terkait dengan pemenuhan jenis pelayanan kepada penerima manfaat saja, namun juga harus memperhatikan mutu pelayanan dasar. Sehingga sejak adanya aturan terbaru tersebut maka Pemerintah Pusat telah menetapkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk menghitung pencapaian Standar Minimal Daerah masing-masing daerah yang dilihat dari capaian pelayanan penerima manfaat serta capaian mutu pelayanan dasar.

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan masing-masing pemerintah daerah dapat lebih focus dalam memenuhi pelayanan dasar di masing-masing daerah yang tentunya tidak hanya dalam pemenuhan kepada penerima layanan saja namun juga harus sesuai dengan mutu layanan dasar yang telah ditentukan.

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimalnya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.2

Tabel Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	Setiap Tahun

4.1.3. Realisasi

Untuk perbandingan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada Tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.3

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	31.822	36.731	86,64	35.475	37.527	94,53	7723	7723	100%	100 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.019	4.788	21,28	363	6.604	5,50	365	365	100%	100 %
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.265	7.640	95,09	7.560	7.728	97,83	5888	5888	100%	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					62,25			65,95			100%	

Jika dilihat berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM Urusan Pendidikan selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan terutama pada tahun 2022 dimana capaian SPM Urusan Pendidikan mencapai target yaitu sebesar 100%. Namun tentunya ketercapaiannya ini disebabkan oleh adanya perbedaan penggunaan data sasaran di tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan data sasaran di tahun 2021 kemarin. Yang mana sejak dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) point a yaitu warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan :

- a) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c) kondisi bencana; dan/atau
- d) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Sehingga berdasarkan aturan tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa untuk penggunaan data sasaran penerima pelayanan dasar hanya diperuntukkan kepada warga negara yang tidak mampu saja bukan kepada sasaran seluruh penduduk yang berada pada range usia yang dimaksud.

Dan untuk SPM Urusan Pendidikan pun dalam penentuan targetnya diprioritaskan kepada warga negeri yang kurang mampu atau miskin sebagai penerima manfaat yang telah tercantum di dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- a. Untuk capaian pendidikan dasar dihitung dari persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan data yang berasal dari masing-masing sekolah (yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar) dibagi dengan jumlah penduduk pada Usia 7-15 Tahun berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari total Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) sebesar 31.492 orang terdapat 7.723 orang siswa yang masuk dalam kategori Warga Negara yang kurang mampu. Sehingga untuk capaian di tahun 2022 dari 7.723 orang warga negara usia pendidikan dasar dapat diberikan pemenuhan pelayanan dasar melalui bantuan biaya Pendidikan serta pemenuhan perlengkapan sekolah dengan capaian 100%.

Capaian pada indikator ini jika dilihat dari capaian Tahun 2021 dengan capaian 94,53% mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan realisasi 100% atau mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dalam penetapan sasaran penerima manfaat yang diperuntukkan pada keluarga tidak mampu saja.

Kemudian dari segi pemenuhan mutu pelayanan pada jenis layanan Pendidikan dasar dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel IV.4
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku teks pelajaran	7.723	7.723	100
2.	Perlengkapan belajar	7.723	7.723	100
3.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	182	182	100
4.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	719	719	100
5.	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.376	1.376	100
6.	Penyediaan biaya personil peserta didik	7.723	7.723	100
7.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.817	1.697	93
8.	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	176	166	94
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				98,46

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pemenuhan mutu pelayanan dasar pada indikator Pendidikan Dasar sebesar 98,46% dapat disimpulkan sudah sangat baik, namun masih terdapat 2 jenis mutu layanan yang belum terpenuhi yaitu kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/ D-IV dan Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C. Dari total seluruh pendidik berjumlah 1.817 guru, masih terdapat 120 guru yang belum berkualifikasi S-1. Dan juga untuk pelaksanaan akreditasi sekolah dari 176 sekolah masih terdapat 10 sekolah yang sampai dengan saat ini belum memiliki akreditasi. Untuk menyikapi hal ini diharapkan untuk kebijakan pemerintah daerah dibidang pendidikan di tahun selanjutnya salah satunya diarahkan kepada pemenuhan kualifikasi guru pada jenjang S-1 serta peningkatan pembinaan kepada 10 sekolah yang sama sekali belum terakreditasi.

Namun cakupan pemenuhan SPM untuk kategori SPM Pendidikan Dasar ini belum ditunjang dengan ketercukupan tenaga pendidik dengan jumlah yang minimal. Sehingga jika dilihat dari segi kemampuan serta ketercukupan SDM dengan kisaran kurang lebih sebesar 50%, masih belum cukup optimal untuk memenuhi mutu Standar Pelayanan Minimal. Di samping itu pula, capaian pada indikator ini belum mengakomodir jumlah siswa yang bersekolah pada pondok pesantren serta di luar Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan di dalam definesi operasional tidak memuat hal tersebut di atas. Sehingga sangat memungkingka sekali jika sebenarnya capaian terhadap Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs) ini dapat melebihi angka yang telah tersajikan.

- b. Sedangkan untuk capaian pendidikan kesetaraan dihitung dari sisa Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan di bagi dengan total Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dari total jumlah warga negara usia Jumlah gganak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten sebanyak 7.423 orang, terdapat

365 orang warga negara yang telah mendapat pemenuhan layanan di bidang kesetaraan atau sekitar 4,92%. Dan dari 365 orang ini merupakan siswa pendidikan kesetaraan yang dinilai kurang mampu dan telah menerima bantuan pembebasan biaya pendidikan serta penerima perlengkapan dasar dari pemerintah. Sehingga untuk capaian indikator Pendidikan kesetaraan di tahun 2022 mencapai 100%.

Namun jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 yang lalu jika dibandingkan dari sisi tingkat ketercapaian mengalami peningkatan dari 5,50% menjadi 100%. Hal serupa juga terjadi pada penerima layanan yang mengalami peningkatan dari 363 orang penerima layanan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 2 orang menjadi 365 orang di tahun 2022. Namun jika dilihat dari segi cakupan penduduk 7-18 Tahun yang belum yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 6.604 orang di tahun 2021 meningkat menjadi 7.423 orang ditahun 2022. Dari angka ini dapat terlihat bahwa peningkatan sasaran penduduk 7-18 Tahun yang belum yang belum menyelesaikan pendidikan dasar ini disebabkan oleh meningkatnya angka putus sekolah yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu diperlukan sebuah kebijakan pemerintah daerah untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten bangka Barat dengan meningkatkan inovasi di bidang pendidikan kesetaraan yang nantinya dapat memperbaiki angka putus sekolah di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV.5

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Modul belajar	365	365	100
2.	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	46	46	100
3.	Penyediaan biaya personil peserta didik	365	365	100
4.	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	70	59	84
5.	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	6	5	83
6.	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	9	9	100
7.	Perlengkapan belajar	365	365	100
8.	PKBM Terakreditasi minimal C	6	4	67
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				91.79

Dari table diatas dapat di simpulkan bahwa untuk mutu layanan yang memerlukan perhatian adalah pada akreditasi PKBM yang sampai saat ini dari 6 PKBM baru 4 PKBM yang telah terakreditasi C. Sehingga 2 PKBM yang belum terakreditasi tersebut perlu upaya peningkatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas serta harus didukung dengan program pemerintah daerah yang dapat mendorong peningkatan cakupan akreditasi tersebut.

Permasalahan dari pemenuhan indikator SPM Pendidikan kesetaraan diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana serta terobosan untuk siswa yang putus sekolah yang dapat secara langsung “ditangkap” untuk melanjutkan di pendidikan

kesetaraan. Namun pada kenyataannya saat ini untuk kondisi anak yang putus sekolah sangat sulit sekali untuk kembali melanjutkan sekolah, yang mana dalam hal ini didominasi oleh pengaruh lingkungan sekitar yang tidak mendukung anak tersebut untuk bersekolah. Kemudian lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan.

- c. Untuk capaian pendidikan usia dini diperoleh dari jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang telah berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini) di bagi dengan total jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun berdasarkan capaian di Tahun 2021 dengan capaian sebesar 97,83 % mengalami peningkatan di Tahun 2022 menjadi 100%. Peningkatan ketercapaian ini sama halnya dengan 2 (dua) indikator urusan pendidikan yang lainnya yaitu dikarenakan untuk sasaran penerima layanan dasar adalah warga negara yang kurang mampu sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel IV.6

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku gambar	5.888	5.888	100
2.	Alat mewarnai	5.888	5.888	100
3.	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	5.888	5.888	100
4. a r	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	164	76	46
5. i	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	531	309	58
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				80,80

T

Table diatas dapat di simpulkan bahwa dari 5 (lima) jenis mutu layanan terdapat 2 (dua) mutu layanan yang memerlukan perhatian adalah yaitu kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dan kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV yang capaiannya masih rendah. Untuk jumlah Kepala Sekolah yang berkualifikasi S1/ D-IV dari 164 orang Kepala sekolah hanya 76 orang yang telah berkualifikasi S1/ D-4 sedangkan 88 orang kepala sekolah lainnya belum berkualifikasi S1/ DIV. Di samping itu pula untuk jumlah tenaga pendidik PAUD dari total seluruh pendidik yang berjumlah 531 orang yang telah berkualifikasi S1/ DIV hanya 309 orang sehingga masih terdapat 222 orang yang belum berkualifikasi S1/ DIV. Dari capaian tersebut, tentunya untuk pemenuhan kualitas tenaga kependidikan serta tenaga pendidik perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah dikarenakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini pemenuhan kualitas SDM masih sangat jauh tingkatan pemenuhannya jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan usia dasar dan kesetaraan. Untuk itu dukungan kebijakan serta program Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Usia Dini.

Dari ketiga capaian indicator di atas, rata-rata capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan adalah sebesar 96,79%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian di tahun yang lalu dikarenakan pada tahun yang lalu penghitungan capaian hanya pada pemenuhan pelayanan penerima manfaat tidak memperhitungkan capaian mutu pelayanan dasar.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2022 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.7
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Peayanan Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.710.851.000,00
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	167.300.000,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	149.360.000,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	16.105.330.000,00
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	187.500.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.778.285.000,00
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	222.280.000,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	157.410.000,00
				Perlengkapan Belajar Peserta Didik	13.339.000,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.604.520.000,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	47.755.600,00
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	133.627.500,00
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.976.690.000,00
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	604.554.000,00
				Penambahan Ruang Kelas Baru	299.350.000,00
3.	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.610.530.000,00
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan	20.930.000,00

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
TOTAL					42.130.557.100,00

4.1.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.8

Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

NO	INSTANSI/BIDANG	URAIAN
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	41 orang PNS dan 49 orang PHL
2	Tenaga kependidikan	Sekolah Dasar 439 orang Sekolah Menengah Pertama 280 orang
3.	Tenaga Pendidik	PAUD 532 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 309 orang Sekolah Dasar 1.406 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 1.277 orang Sekolah Menengah Pertama 672 orang yang terdiri dari yang telah memiliki ijazah diploma IV atau S1 sebanyak 626 orang dan bersertifikasi sebanyak 244 orang
4.	Kepala Sekolah	PAUD 76 orang Sekolah Dasar 136 orang Sekolah Menengah Pertama 48 orang
5.	Tenaga penunjang	Sekolah Dasar 242 orang Sekolah Menengah Pertama 152 orang
6.	Pengawas Sekolah	Pengawas PAUD 1 orang Pengawas SD 10 orang Pengawas SMP 8 orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh Dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya data jumlah anak yang putus sekolah secara keseluruhan yang mana data yang tersedia saat ini hanya berupa data anak putus sekolah di masing-masing sekolah sehingga membuat Dinas teknis kesulitan dalam melakukan penghitungan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk anak putus sekolah;
- b. Masih rendahnya cakupan pendidikan kesetaraan di Kabupaten bangka Barat sehingga diperlukan sebuah inovasi dan intervensi khusus untuk indicator ini agar dapat meningkatkan masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kesetaraan ;
- c. Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;

- d. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten;
- e. Belum maksimalnya penyediaan tenaga kependidikan yang dianggap belum memenuhi standar kualifikasi walaupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.

Adapun solusi yang hendaknya dilakukan untuk menanggapi permasalahan di atas dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendataan anak putus sekolah sebagai *baseline* data dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian dengan melibatkan lintas sektor ;
- b. Melakukan upaya inovasi serta intervensi program keegiatan yang ada di pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bangka Barat;
- c. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan di masyarakat terutama untuk Pendidikan Kesetaraan di usia 7-18 Tahun dengan meningkatkan ketersediaan sumber daya yang dapat mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam menempuh pendidikan kesetaraan;
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.
- e. Dalam penyusunan pengadaan/ rekrutmen pegawai di daerah agar dapat mempertimbangkan ketersediaan pegawai yang ada yang dibandingkan dengan pelayanan yang akan diberikan. Sehingga pengadaan pegawai daerah dapat dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.9
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan pada Tahun 2022, Tahun 2021 serta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.10

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	3.651	3.833	95,25	3.459	3.725	92,86	3439	3641	94.45%	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	3.505	3.628	96,61	3.348	3.524	95,01	3304	3463	95.41%	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	3.521	3.543	99,38	3.344	3.493	95,73	3255	3425	95.04%	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	11.371	12.182	93,34	10.931	11.708	93,36	11031	11541	95.58%	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	35.918	36.722	97,81	36.890	37.506	98,36	36546	37541	97.35%	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	89.508	127.449	70,23	111.404	133.183	83,65	101787	133754	76.10%	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12.651	16.152	78,32	13.756	16.395	83,90	14894	17125	86.97%	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	39.249	46.182	84,99	42.316	48.104	87,97	43555	48523	89.76%	100 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	3.977	.777	105,30	4.080	3.934	103,71	4098	4098	100%	100 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	493	493	100,00	492	492	100,00	487	487	100%	100 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	1.377	1.921	71,68	1.077	1.749	61,58	2266	2266	100%	100 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	4.622	4.386	105,38	5.249	4.862	107,96	5432	5432	100%	100 %
RATA-RATA CAPAIAN					91,52			92,01			93,10	

Dari table di atas dapat dilihat bahwa secara rata-rata capaian SPM dibidang Kesehatan mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini dapat terlihat dari meningkatnya capaian kinerja pelayanan SPM bidang Kesehatan sampai Dengan tahun 2022 menjadi 94,22% dari awalnya di tahun 2022 sebesar 91,52%. Walaupun dalam hal ini untuk capaian kinerja SPM di tahun 2022 sedikit mengalami perbedaan dikarenakan adanya perubahan cara penghitungan capaian SPM yang tidak hanya dilihat dari segi capaian pemenuhan jenis layanan kepada penerima manfaat Dengan bobot penghtungan 80% namun juga dilihat berdasarkan capaian mutu pelayanan Dengan bobot 20%r yang menjadi komponen penghitungan dari Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Daerah sehingga untuk capaian SPM bidang kesehatan sebesar 93,10%.

Jika dilihat dari table di atas, dari 12 indikator SPM di bidang Kesehatan, terdapat 6 indikator yang mengalami peningkatan jika di dibandingkan Dengan capaian di tahun 2021 yang lalu dan terdapat 3 indikator yang tidak mengalami peningkatan serta 3 indikator yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Adapun untuk indicator yang mengalami peningkatan dibandingkan Dengan tahun lalu yaitu:

1. Pelayanan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Ibu bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Balita;
4. Pelayanan kesehatan usia Lanjut;
5. Pelayanan Hipertensi; serta
6. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis.

Dan untuk indicator yang tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan Dengan tahun lalu adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes;
2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; serta
3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);

Dan untuk capaian indicator yang mengalami penurunan jika dibandingkan Dengan tahun lalu adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
2. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar; serta
3. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif.

Sehingga dari 12 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indicator yang mencapai target sedangkan 8 indikator lainnya belum mencapai target. Dan untuk analisa dari capaian masing-masing adalah sebagai Berikut:

Sehingga dari 12 indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target sedangkan 8 indikator lainnya belum mencapai target. Dan untuk analisa dari capaian masing-masing adalah sebagai Berikut:

- a) Capaian ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, Untuk capaian pada indikator ini jika di lihat dari segi capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan Dengan tahun lalu yaitu 92,86% menjadi 94,45% di tahun 2022. Peningkatan capaian ini dikarenakan adanya peningkatan layanan serta kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil. Dari data sasaran sebesar 3.641 jiwa, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan sesuai Dengan standar adalah sebanyak 3.439 jiwa sedangkan sisanya sebesar 202 jiwa atau sebesar 5,55% yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar. Adapun untuk ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan tersebut disebabkan oleh abortus serta *Binding Atpu, premature*. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk meningkatkan cakupan pelayanan ini dilakukan melalui peningkatan edukasi dan advokasi kepada masyarakat terutama kepada ibu hamil melalui melibatkan lintas sektor baik dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan hingga pemerintah Kabupaten.

Dibawah ini adalah data pelayanan Kesehatan ibu hamil yang tidak mendapatkan layanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.11

Jumlah Ibu Hamil yang tidak mendapatkan layanan sesuai dengan standar berdasarkan factor penyebab

NO	PENYEBAB	JUMLAH
1	<i>Abortus</i>	52 orang
2	<i>Blended Ovum</i>	3 orang
3	Persalinan premature	9 orang
4	IUFD	1 orang
5	K1 akses	37 orang
6	Belum masuk jadwal kunjungan antenatal trimester ke 2 dan ke 3	89 orang
7	Lainnya	10 orang
TOTAL		219 orang

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat

Capaian atas indikator tersebut tidak sejalan dengan rumus perhitungan kinerja yang ada dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Selain itu rendahnya capaian karena masih tingginya angka kehamilan di usia anak sehingga menyebabkan tingginya K1 akses (kunjungan pertama kehamilan tidak di trimester pertama kehamilan).

Tabel IV.12

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Hamil Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	11,469	10,833	94,45

2	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,641	3,439	94,45
3	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	469	469	100,08
4	Tablet tambah darah	327,690	327,690	100
5	Kartu ibu/rekam medis ibu	3,641	3,439	94,45
6	Dokter/dokter spesialis kebidanan	26	26	100
7	Bidan	98	98	100
8	Perawat	40	40	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				97,93

Dari capaian pemenuhan mutu pelayanan dasar Ibu Hamil pada table di atas mencapai sebesar 97,93%. Hal ini menunjukkan bahwa dapat terlihat bahwa ketersediaan mutu pelayanan pada ibu hamil sudah sangat baik sekali dimana telah terpenuhi hampir mencapai 100%.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Peningkatan cakupan dengan meningkatkan kualitas pelayanan antenatal sesuai indikator program pemeriksaan kehamilan K6. Lakukan deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil melalui pelayanan antenatal 10 T yang didukung dengan ketersediaan alat, obat dan tenaga yang kompeten baik di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan. Peningkatan peran dokter dalam pemeriksaan kehamilan terutama pada trimester 1 dan 3 agar faktor risiko kehamilan dapat segera diatasi sehingga dapat menurunkan kasus komplikasi.
 2. Pemantauan kesehatan ibu hamil melalui e-kohort
 3. Perlu ditingkatkan peran stakeholders yang terlibat dalam kelembagaan untuk mengatasi perkawinan usia anak.
 4. Untuk pencapaian 100 % indikator pelayanan kesehatan ibu hamil perlu dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi mengenai rumus perhitungan kinerja.
- b) Untuk capaian pelayanan ibu bersalin di tahun 2022 adalah sebesar 95,41% yang mana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 yang lalu yaitu sebesar 95,01% atau mengalami peningkatan sebesar 0,42%. Adapun yang melatarbelakangi peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang telah ada dibandingkan pada faslitasi non kesehatan yang dalam hal ini seperti dukun beranak.

Sama halnya dengan capaian ibu hamil, adanya peningkatan kesadaran ini dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi serta edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melibatkan stakeholder lainnya untuk dapat memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada fasilitasi kesehatan yang ada. Disamping itu juga adanya upaya pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan dukun beranak yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat terutama pada daerah-daerah terpencil.

Dari jumlah ibu bersalin sebanyak 3.463 orang, terdapat 3.304 orang ibu bersalin yang melakukan persalinan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau sebesar 95,41%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, untuk angka sasaran di tahun 2022 sedikit mengalami penurunan yaitu dari 3.524 orang di tahun 2021 menjadi 3.463 orang di tahun 2022 atau berkurang sebesar 61 orang.

Jika dilihat dari segi jumlah sasaran di tahun 2022 sebanyak 3.463 orang, jumlah pelayanan ibu hamil sesuai standar pelayanan minimal sebesar 3.304 orang atau terdapat 159 orang yang tidak mendapat pelayanan minimal ibu bersalin yang mana 7 diantaranya disebabkan oleh kelahiran di dukun beranak, 8 persalinan tidak di faskes dan sisanya belum masuk persalinan. Adapun untuk data 159 orang tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV.13

Data Jumlah ibu hamil yang tidak mendapat pelayanan ibu melahirkan

No	Puskesmas	Jumlah ibu hamil yang tidak dilayani		
		Melahirkan di dukun	Persalinan tidak di Faskes	Belum masuk masa persalinan
1	Muntok	1	0	53
2	Simpangteritip	4	1	10
3	Jebus	0	1	6
4	Puput	0	5	34
5	Sekarbiru	0	0	25
6	Kelapa	2	2	0
7	Tempilang	0	0	0
8	Kundi	0	6	9
TOTAL		7 kasus	8 kasus	145 kasus

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Dari data di atas dapat terlihat bahwa angka kelahiran yang dilakukan di dukun beranak terbanyak berada di Kecamatan Simpangteritip. Sehingga dengan adanya datanya diharapkan dapat menjadi sebuah catatan bagi OPD teknis untuk melakukan intervensi khusus kepada Kecamatan tersebut untuk menekan angka kelahiran di fasilitas non kesehatan.

Sampai dengan saat ini, telah tercatat sebanyak 21 orang dukun beranak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV. 14

Data Tenaga Kesehatan (Bidan) dan Jumlah dukun beranak di Kabupaten Bangka Barat

No	Puskesmas	Jumlah Bidan	Jumlah Dukun Beranak
1	Muntok	78	1
2	Simpangteritip	29	17
3	Kundi	14	0
4	Puput	18	0
5	Sekarbiru	24	0
6	Jebus	32	0
7	Kelapa	47	3
8	Tempilang	25	0
TOTAL		145 orang	21 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Untuk itu kedepan masih diperlukan upaya pendekatan kepada para dukun beranak untuk dapat meningkatkan kemitraan dengan tenaga kesehatan dalam menangani kelahiran pada ibu hamil, disamping itu pula perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada para dukun beranak yang ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk dapat tetap berkomitmen dalam bermitra dengan para tenaga kesehatan.

Disamping itu pula, pelayanan kesehatan ibu melahirkan tidak lepas dengan kondisi kematian ibu yang mana berdasarkan Profil kesehatan Tahun 2022 angka kematian ibu kebanyakan disebabkan oleh factor diantaranya :

Tabel IV. 15
Data kematian ibu menurut penyebab per Puskesmas Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KASUS
1.	Muntok	1 Persalinan dan 1 Nifas
2.	Simpangteritip	1 Ibu Hamil
3.	Jebus	-
4.	Puput	1 Persalinan
5.	Kelapa	1 Ibu Hamil
6.	Sekar Biru	1 Ibu Hamil
7.	Tempilang	1 lain-lainnya
8.	Kundi	-
	TOTAL KASUS	7 kasus

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Kemudian jika dilihat dari pemenuhan mutu layanan Kesehatan ibu melahirkan di peroleh bahwa dari segi pemenuhan kualitas mutu layanan juga sudah sangat baik dimana dengan capaian sebesar 97,70%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pelayanan ibu melahirkan di Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik.

Tabel IV.16
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Ibu Melahirkan Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,463	3,304	95,41
2	Formulir Partograf	3,463	3,304	95,41
3	Kartu ibu (rekam medis)	3,463	3,304	95,41
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	26	26	100
5	Bidan	98	98	100
6	Perawat	40	40	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				97,70%

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu bersalin sesuai standar yaitu dilakukan di fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan penolong minimal 2 orang terdiri dari Dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.

2. Peningkatan cakupan 100 % ibu hamil mengikuti kelas ibu untuk penguatan informasi pelayanan persalinan termasuk tanda - tanda persalinan.
- 3) Peningkatan peran lintas program dan lintas sektor dalam mengatasi pertolongan persalinan oleh dukun termasuk menindaklanjuti perjanjian antara puskesmas dan dukun bersalin yang telah dilakukan tahun - tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perencanaan berikutnya.
- c) Berbeda hal dengan capaian pelayanan 2 (dua) indicator sebelumnya, capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan di tahun 2022 dengan capaian sebesar 95,04 dari capaian tahun 2021 sebesar 95,73% atau sebanyak 170 bayi baru lahir tidak mendapatkan pelayanan minimal. . Penurunan capaian ini dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya yaitu kunjungan pelayanan kepada bayi baru lahir tidak dilakukan secara lengkap yang mana kunjungan untuk bayi baru lahir yang seharusnya dilakukan 3 kali dalam 24 jam pertama, namun jika bayi tersebut dilahirkan di dukun beranak maka pemeriksaan KN 1 dianggap sudah gugur, kemudian diantaranya bayi umur 0-6 hari tidak mendapatkan imunisasi HB0.
- Saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 sudah terdapat 26 angka kematian bayi yang mana kejadiannya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Tabel IV. 17
Data kematian bayi menurut penyebab per Puskesmas Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH KASUS
1.	Muntok	2 BBLR dan 1 lain-lain
2.	Simpangteritip	5 BBLR, 1 Asfiksia, 1 kelainan Koneenital, dan 1 lain-lain
3.	Jebus	2 BBLR dan 2 kelainan kongenital jantung
4.	Puput	-
5.	Kelapa	2 BBLR, 1 Asfiksia, 1 infeksi, dan 2 lain-lain
6.	Sekar Biru	3 BBLR dan 1 lain lainnya
7.	Tempilang	-
8.	Kundi	1 BBLR dan 1 lain-lain
	TOTAL KASUS	28 kasus

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Dari data di atas terlihat bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Bangka Barat masih cukup tinggi yaitu sebanyak 28 kasus dan juga dalam hal terdapat 1 Puskesmas yang tidak memiliki angka kelairan yaitu Puskesmas Tempilang. Berkaca dengan hal ini bahwa masih diperlukan dukungan program/ kegiatan dalam pencapaian tersebut. Dan untuk dengan ketersediaan SDM sebagai tenaga kesehatan sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat di masing-masing desa telah memiliki 2 nakes yang terdiri dari 1 bidan dan 1 perawat yang akan membantu masyarakat dalam tahapan persalinan.

Tabel IV.18
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bayi Baru Lahir Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3,425	3,255	95.04%
2	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	10,275	9,765	95.04%
3	Vaksin Hepatitis B0	3,425	3,255	95.04%
4	Salep/tetes mata antibiotik	3,425	3,255	95.04%

5	Vitamin K1 injeksi	3,425	3,255	95.04%
6	Formulir bayi baru lahir	3,425	3,255	95.04%
7	Dokter/dokter spesialis Anak	29	29	100.00%
8	Bidan	98	98	100.00%
9	Perawat	40	40	100.00%
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				96,69%

Dan untuk pemenuhan mutu pelayanan pada bayi baru lahir hamper sama kondisi dengan 2 (dua) capaian lainnya yaitu sebesar 96,69% sudah dikatakan baik. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Peningkatan kualitas pencatatan pelaporan
 2. Pemantauan kunjungan neonatal melalui e-kohort bayi.
- d) Capaian pelayanan kesehatan balita di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian di 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang lalu dengan capaian sebesar 95,58% atau meningkat sebesar 2,20%. Untuk pemenuhan SPM pada Pelayanan Kesehatan Balita tidak dapat 100% dikarenakan tidak tercapainya target disebabkan karena ada 510 balita selama tahun 2022 tidak mendapatkan pelayanan balita sesuai standar dimana pelayanan yang harus diberikan salah satunya adalah harus diberikan pelayanan pemantauan perkembangan minimal 2 x pertahun tidak tercapai. Adapun untuk layanan kesehatan balita meliputi pemberian vitamin A, kemudian penimbangan yang dilakukan secara rutin di fasilitas layanan kesehatan seperti posyandu desa.

Tabel IV.19
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Balita Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Peralatan Anafilaktik	16	16	100
2	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	11.541	11.031	95,58
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	3.641	3.439	94,45
4	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	11.541	11.031	95,58
5	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	34.623	33.093	95,58
6	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	35.516	31.258	88,01
7	Vitamin A Biru	6.850	6.510	95.04
8	Vitamin A Merah	23.082	22.062	95,58
9	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	78.255	74.685	95,44
10	Bidan	98	98	100
11	Dokter	26	26	100
12	Perawat	40	40	100
13	Ahli Gizi	8	8	100
14	Guru PAUD	448	448	100
15	Kader Kesehatan	935	935	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				97,02%

Untuk pemenuhan mutu pelayanan pada balita hamper sama kondisi dengan 2 (dua) capaian lainnya yaitu sebesar 95,58% sudah dikatakan baik. Ini dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang telah memenuhi standar pelayanan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut diantaranya :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten menganggarkan pelatihan DDTK untuk guru PAUD/TK dan Kader.
 2. Peningkatan kolaborasi lintas program dan lintas sektor dalam pemberian pelayanan kesehatan pada balita.
 3. Perlu pemantauan e kohort balita oleh petugas kesehatan.
- e) Capaian pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 sebesar 1,38 %. Walaupun capaian di tahun 2022 mengalami penurunan yang mana terdapat 995 (97,35%) anak usia pendidikan dasar tidak bisa dilakukan skrining kesehatan karena tidak semua anak usia pendidikan dasar berada di wilayah kerja Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dukcapil tidak memiliki data anak usia pendidikan dasar yang tidak sekolah/putus sekolah, anak yang pindah sekolah atau bersekolah di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat sehingga skrining kesehatan pada anak usia pendidikan dasar tidak bisa dilakukan 100%, hal ini sehubungan dengan data sasaran yang dipakai adalah data sasaran yang dikeluarkan Dukcapil pada anak usia 7-15 tahun sesuai DO.

Tabel IV.20

Cakupan pelayanan kesehatan pendidikan dasar Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	2.245
2.	Simpangteritip	736
3.	Jebus	1.056
4.	Puput	968
5.	Kelapa	1130
6.	Sekar Biru	360
7.	Tempilang	1.010
8.	Kundi	422
	TOTAL balita	6.917 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan pendidikan dasar, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 97,02%.Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada pendidikan dasar sudah baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Tabel IV.21

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Kuesioner skrining kesehatan	16	16	100
2	Buku pemantauan kesehatan	39.418	36.546	95,58
3	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan	1.877	-	94,45

	kehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah			
4	Buku raport kesehatanku	66	-	95,58
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	37.541	36.546	92,87
6	Dokter/Dokter gigi	192	192	88,01
7	Bidan	16	16	95,04
8	Perawat	16	16	95,58
9	Ahli Gizi	16	16	95,44
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	16	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				97,02%

Capaian pelayanan kehatan pada usia pendidikan dasar yang diterima oleh siswa sekolah di Kabupaten Bangka Barat dihadapkan dengan kendala masih terbatasnya tenaga kehatan (dokter) untuk melakukan penjangingan terhadap anak sekolah, yang terdiri dari dokter, perawat gigi, gizi, perawat dan pengelola program di puskesmas tersebut. Sehingga jadwal yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan tersebut. Sedangkan untuk anak usia sekolah namun yang tidak bersekolah atau putus sekolah penjangingan tetap dilakukan penjangingan oleh pihak kader kehatan remaja yang di masing-masing desa di bawah binaan Puskesmas

- f) Sama hal dengan pelayanan pendidikan dasar, untuk pelayanan kehatan pada usia produktif, di Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 dengan capaian sebesar 76,10% atau menurun sebesar 7,55% dari tahun lalu. Penurunan capaian pelayanan kehatan pada usia produktif dari tahun lalu dikarenakan adanya pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan sasaran layanan menjadi lebih banyak namun tidak ditunjang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini yang perlu menjadi bahan perhatian untuk wilayah kerja Puskesmas Muntok tidak sebanding dengan ketersediaan SDM dengan sasaran yang ada di wilayah Kecamatan Muntok. Jumlah SDM di setiap Puskesmas sama namun yang membedakan adalah sasaran di masing-masing Puskesmas. Adapun untuk sebaran layanan kehatan untuk usia produktif di masing-masing wilayah Puskesmas adalah sebagai berikut :

Tabel IV.22
Cakupan pelayanan kehatan Usia Produktif Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	17.050
2.	Simpangteritip	13.872
3.	Jebus	14.867
4.	Puput	10.166
5.	Kelapa	16.592
6.	Sekar Biru	7.737
7.	Tempilang	16.106
8.	Kundi	5.347
	TOTAL	101.787 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Dari total sasaran pelayanan usia produktif yang belum menerima layanan sebesar 31.967 orang masih terdapat sebagian penduduk yang belum mendapatkan skrining Uspro dikarenakan ada yang menolak dilakukan skrining kesehatan dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, luas wilayah juga menjadi kendala ketidakseimbangan dengan SDM nakes yang tersedia seperti di Puskesmas Mentok dan Puskesmas Kelapa. Disamping itu pula, petugas Kesehatan sudah melakukan pelayanan pemeriksaan door to door kerumah penduduk namun ternyata masih ada penduduk yang tidak membukakan pintu rumah untuk petugas melakukan skrining kesehatan. Dukungan dari Lintas sektor belum optimal.

Tabel IV.23
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Usia Produktif Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	16	14	87,50
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	133.754	101.787	76,10
3	Formulir pencatat100an dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	133.754	101.787	76,10
4	Perawat	32	32	100
5	Dokter	16	16	100
6	Bidan	82	82	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	330	330	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				93,30%

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan usia produktif, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 93,30%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada usia produktif sudah cukup baik baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan. Hanay saja memang perlu dilakukan upaya peningkatan promosi serta pendekatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan ini.

- g) Sedangkan capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut capaian di tahun 2022 lebih tinggi ketimbangan Tahun 2021 yang kemarin yaitu 5,58% atau dengan capaian sebesar 86,97%. Sama halnya dengan peningkatan pada pelayanan kesehatan pada usia produktif, peningkatan ini disebabkan oleh adanya kebijakan vaksinasi yang dilakukan kepada para lansia, sehingga secara otomatis banyak lansia harus melakukan vaksinasi yang mana tahapannya terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum pelaksanaan vaksinansi Covid-19 dilakukan, Namun walaupun dari segi capaiannya meningkat jika di bandingkan dengan tahun 2021 masih terdapat lansia dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas pemeriksaan kesehatan, kemudian kurangnya dukungan dari pihak keluarga, dan di samping itu masih adanya persepsi di masyarakat yang masih beranggapan anti tenaga medis.

Tabel IV.24

Cakupan pelayanan kesehatan Lanjut Usia Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	3.472
2.	Simpangteritip	1.372
3.	Jebus	1.810
4.	Puput	2.126
5.	Kelapa	2.333
6.	Sekar Biru	913
7.	Tempilang	2.191
8.	Kundi	677
	TOTAL	14.894 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Dari data di atas dapat terlihat bahwa untuk sebaran layanan lanjut usia yang tertinggi capaiannya ada di Kabupaten Bangka Barat adalah di wilayah perkotaan seperti Mentok, Puput, Kelapa dan tempilang,

Sama halnya dengan capaian usia produktif, tidak Tercapainya target disebabkan karena terdapat 2231 jiwa (13,03%) usia lanjut yang belum terskrining kesehatan sesuai standar dimana pelayanan yang harus diberikan antara lain ; pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut , Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah, Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, Deteksi kadar kolestrol dalam darah, Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku termasuk kepikunan dengan menggunakan mini cog atau *Mini Mental Status Examination* dan *Geriatric Depression Scale*, Deteksi Pemeriksaan Tingkat kemandirian (Instrument P3G) dan Anamnese Perilaku Beresiko pada Usia lanjut minimal 1 x dalam satu tahun. Disamping itu pula terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana juga belum disebabkan oleh tidak tersediannya alat pemeriksaan kesehatan di puskesmas selama 6 bulan serta masih ada usia lanjut yang tidak mau diperiksa kesehatan sesuai standar 81 usia lanjut (3,63%) dikarenakan khawatir dengan pemeriksaan yang akan dilakukan akan berdampak kepada kondisi psikis pihak keluarga.

Tabel IV.25

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Lanjut Usia Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	17.125	14.894	86,97
2	Buku kesehatan lansia	17.125	10.881	63,54
3	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	17.125	14.894	86,97
4	Dokter	16	16	100
5	Bidan	16	16	100
6	Perawat	16	16	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	324	324	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				93,05%

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan lansia, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 93,05%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada usia produktif sudah cukup baik baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan. Hanya saja memang perlu dilakukan upaya peningkatan promosi serta pendekatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan cakupan pelayanan ini.

- h) Capaian Pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar di Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 yaitu sebesar 1,79%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi penduduk yang mana didahulukan dengan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Namun untuk SPM indikator pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi masih ditemukan banyak warga negara yang belum melakukan pemeriksaan ke Puskesmas namun telah mengunjungi klinik2 kesehatan lain yang dalam hal ini klinik-klinik kesehatan swasta tersebut tidak melakukan pelaporan kepada pihak Puskemas terkait layanan pemeriksaan yang dilakukan sehingga capaian pelayanan SPM pada indicator ini tidak tercapai. Saat ini Dinas terkait memiliki kebijakan terkait dengan rencana untuk mensyaratkan pengeluaran izin usaha/ praktek dokter harus melibatkan tenaga kesehatan di Puskesmas setempat. Hal ini dilakukan agar klinik-klinik swasta nantinya akan bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang ada Puskesmas untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang nantinya akan diikuti dengan tertibnya administrasi pencatatan pelayanan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilakukan.

Disamping itu pula, dari 4.968 orang yang belum terskrining dari jumlah yang harus dilayani 48.523 orang dikarenakan jumlah sasaran yang digunakan adalah sasaran prevalensi dari rikesdas 2018. Bisa jadi memang tidak ada penderita lain atau pasien dengan Hipertensi nya *silent. The forgotten killer* dengan kata lain penderita tidak merasakan gejala yang berarti mereka beranggapan tidak termasuk salah satu dari 32.16% prevalensi dari rikesdas. Sehingga penderita hipertensi tidak datang ke FKTP atau faskes kesehatan untuk kontrol ataupun berobat.

Tabel IV.26
Cakupan pelayanan kesehatan Hipertensi Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH YANG TERLAYANI
1.	Muntok	7.057
2.	Simpangteritip	5.258
3.	Jebus	5.361
4.	Puput	5.883
5.	Kelapa	8.259
6.	Sekar Biru	3.002
7.	Tempilang	67,49
8.	Kundi	1.986
	TOTAL	43.555 orang

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Dari capaian di atas dapat terlihat bahwa cakupan layanan hipertensi yang diberikan yang paling banyak memberikan layanan dalam di Puskesmas wilayah Kelapa dan Muntok. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin maju sebuah daerah maka semakin tinggi penyebab terjadinya hipertensi. Sehingga kedepan perlu penggalakan kader di setiap desa untuk diberdayakan dalam melakukan screening secara masiv sehingga tidak ada lagi kasus hipertensi yg tidak dilakukan tata laksana sesuai standar. Misalnya Muntok yang notabeneanya tidak tercapai semua desanya maka dapat dilakukan dengan cara setiap kunjungan Posbindu kader di haruskan mengajak minimal 100 warga utk melakukan skrining PTM.

Tabel IV.27
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Hipertensi Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	16	8	50
2	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	48.523	43.555	89,76
3	Tensimeter	24	8	33,33
4	Dokter	8	8	100
5	Bidan	8	8	100
6	Perawat	16	16	100
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				89,76%

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan mutu pelayanan hipertensi, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 89,76%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan pada hipertensi sudah cukup baik baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan

- i) Sedangkan untuk capaian pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus di Tahun 2022 sifanya tetap jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu sama-sama 100%. Namun jika dilihat dari sasaran mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 4.098 jiwa dari sebelumnya sebesar 4.080 jiwa. Pada indicator pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dilakukan pemeriksaan secara bersamaan dengan usia produktif. Sehingga ketidaktercapaian indicator pelayanan pada usia produktif tersebut dikarenakan belum mencukupinya ketersediaan SDM yang belum dapat mengcover seluruh kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Yang mana dalam hal ini Puskesmas Muntok yang memiliki cakupan sasaran lebih tinggi dibandingkan dengan Puskesmas lainnya dikarenakan jumlah penduduk yang lebih banyak ketimbang Puskesmas lainnya.

Tabel IV.28
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Diabetes Melitus Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	3.968	3.968	100
2	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	47.616	47.616	100
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	16	8	50
4	Dokter	8	8	100
5	Bidan	8	8	100
6	Perawat	16	16	100
7	Ahli Gizi	8	8	100
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	8	8	
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				93,75%

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Diabetes Millitus, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu telah mencapai angka 89,76%. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan mutu layanan sudah cukup baik baik dimana jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya sudah memadai untuk memberikan pelayanan.

Capaian indikator DM sebenarnya dari tahun ketahun angkanya tidak jauh berbeda. Saat ini hanya penatalaksanakan kasus yang ada dan tambahan kasus baru sedikit. Capaian yang lebih dari 100% disebabkan karena untuk penentuan sasaran, kita masih menggunakan hasil Riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 2,63%. hal ini menggambarkan bahwa saat ini di Kabupaten Bangka Barat angka kesakitan DM sudah diatas 2,63%.

- j) Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pencapaian sesuai dengan target dikarenakan cakupan pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sudah menjadi sebuah kewajiban Daerah untuk memenuhi pelayanan kesehatannya.

Tabel IV.29
Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2022

NO	PUSKESMAS	KLASIFIKASI ODGJ		JUMLAH YANG TERLAYANI (orang)
		SKIZOFRENIA	PSIKOTIK AKUT	
1.	Muntok	109	0	1.031
2.	Simpangteritip	60	0	436
3.	Jebus	71	0	451
4.	Puput	53	0	487
5.	Kelapa	65	0	733
6.	Sekar Biru	25	0	247
7.	Tempilang	75	0	554
8.	Kundi	29	0	159
TOTAL				487 orang

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu berada di angka 26,25%. Angka ini menunjukkan bahwa capaian pemenuhan mutu layanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat di

Kabupaten Bangka Barat masih belum maksimal, yang mana untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang masih belum terpenuhi. Sehingga walaupun jika dilihat dari segi cakupan pelayanan kepada penerima layanan sudah 100% namun dari segi mutu pelayanan masih sangat rendah dan perlu intervensi.

Tabel IV.30
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan ODGJ Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	8	-	0
2	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	16	-	0
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	487	487	100
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	400	-	0
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	16	5	31,25
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				26,25%

k) Untuk capaian pelayanan penderita Tuberculosis yang mendapat pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis, di Tahun 2022 mengalami peningkatan dan mencapai target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 yaitu sebesar 61,58%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan cakupan pelayanan penderita Tuberculosis yang dilakukan di masing-masing puskesmas oleh pengelola program serta adanya upaya penjangkaran secara massif kepada penduduk yang terduga TB di setiap layanan pasca pandemic Covid-19. Dari 358 target TB (46% dari 780 kasus utk wilayah Bangka Barat) merupakan koordinasi estimasi di tingkat provinsi sebesar 46% (ketentuan 46% dilihat dari 3 tahun terakhir capaian kabupaten Bangka Barat). Capaian yang lebih dari 100% menggambarkan bahwa orang terduga TB di Kabupaten Bangka Barat saat ini lebih dari 46%.

Tabel IV.31
Jumlah terduga Tuberculosis, Kasus Tuberculosis Anak dan *Treatment Coverage* Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	PUSKESMAS	JUMLAH KASUS TB		KASUS TB ANAK 0-14 TAHUN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Muntok	71	53	12
2.	Simpangteritip	11	11	0
3.	Jebus	9	1	1
4.	Puput	10	100	0
5.	Kelapa	11	6	0
6.	Sekar Biru	6	4	1
7.	Tempilang	8	5	1
8.	Kundi	4	1	0
TOTAL				487 orang

Tabel IV.32

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Tuberculosis Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	4,532	4,532	100
2	Catridge tes cepat molekuler	1,900	1,830	96,32
3	Formulir pencatatan dan pelaporan	10,000	10,000	100
4	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100
5	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	10	10	100
6	Reagen Zn TB	33	33	100
7	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	13,596	13,596	100
8	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	9	9	100
9	Penata Rontgen	3	3	100
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	48	48	100
11	Tenaga kesehatan masyarakat	8	8	100
12	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2	2	100
13	Perawat	10	10	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				99,72%

Dari segi pemenuhan mutu pelayanan Orang Terduga Tuberculosis, dapat terlihat bahwa pemenuhan mutu berada di angka 99,72% yang merupakan capaian mutu tertinggi jika dibandingkan dengan indikator SPM bidang Kesehatan lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa capaian pemenuhan mutu layanan Orang Terduga Tuberculosis di Kabupaten Bangka Barat sudah sangat baik sekali yang merupakan komitmen daerah pasca pandemic Covid. 19

- l) Untuk capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), di Tahun 2022 mengalami peningkatan capaian sasaran jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2021 yaitu dari 4.862 orang menjadi 5.432 orang di tahun 2022 Hal ini dikarenakan adanya peningkatan capaian sasaran dari pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV memiliki target sasaran terdiri dari 3 unsur yaitu ibu hamil, warga binaan serta PSK. Yang mana untuk sarannya lebih tinggi dari tahun kemarin dan melebihi target yang telah ditetapkan.

Dan untuk kasus HIV di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 sebanyak 32 kasus dengan kasus terbanyak di kelompok umur 25-49 tahun sebanyak 27 orang. Sehingga berkaca dengan angka ini maka perlu penekanan angka kasus HIV di Kabupaten Bangka Barat melalui program kegiatan yang diperuntukkan dalam menekan angka kejadian kasus HIV.

Tabel IV.33

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tes cepat HIV (RDT) pertama	5,432	5,432	100
2	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	5,080	-	0
3	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	21,739	21,739	100
4	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	5,432	5,432	100
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	10	10	100
6	Perawat	9	9	100
7	Bidan	9	9	100
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	9	9	100
9	Tenaga kesehatan masyarakat	8	8	100
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	9	9	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				90,00%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2022 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.34

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			2.508.414.940,00
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.080.212.000
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	379.392.000
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109.320.000
	Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	564.170.000
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	484.168.000
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	374.735.000
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	374.735.000
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	29.970.000,00
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.013.698.100,00
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	133.484.000
	Pelayanan Kesehatan Orang			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	594.111.000

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Terduga Tuberkulosis			Terduga Tuberkulosis	
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	238.180.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.267.740.000
				Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	130.000,00
			TOTAL		7.661.775.100

4.2.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, sebagai berikut:

TABEL IV.35

Dukungan Personil dalam mendukung Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	TENAGA	SARANA KESEHATAN										TOTAL	KET	
		PKM MENTOK	PKM SIMTER	PKM KUNDI	PKM JEBUS	PKM PUPUT	PKM SEKAR BIRU	PKM KELAPA	PKM TEMPILANG	RS/KLINIK DI KAB BANGKA BARAT	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			
1	dr. SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	
2	DOKTER	8	2	3	5	2	5	3	3	3	32	7	70	
3	DOKTER GIGI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	10	
4	BIDAN	26	29	14	32	14	24	47	25	25	57	32	300	
5	PERAWAT	32	20	20	26	14	27	39	29	29	178	32	417	
6	GIZI	4	4	3	4	3	3	5	3	3	8	3	40	
7	TENAGA KESMAS	6	3	4	2	2	3	6	5	5	7	10	48	
8	ANALISIS TEKNIK LAB MEDIK	4	1	2	4	2	3	3	2	2	23	2	46	
9	PENATA RONGENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	
TOTAL		81	60	47	74	38	66	104	68	68	344	86	968	

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Tabel IV.36
Dukungan Tenaga Medis Per Indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

INDIKATOR SPM	dr. SPESIALIS	DOKTER	DOKTER GIGI	BIDAN	PERAWAT	GIZI	TENAGA KESMAS	ANALISIS TEKNIK LAB MEDIK	PENATA RONGENT
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		26		98	40				
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		26		98	40				
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		29		98	40				
Pelayanan Kesehatan Balita		26		98	40	8			
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		8	8	16	16	16	8		
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		16		16	16	8	8		
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		16		82	32	8	8		
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		8		8	16		8		
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		8		8	16	8	8		
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		9							
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2	8			10		8	9	3
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV	2	8		9	9		8	9	

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, baik permasalahan eksternal maupun internal antara lain yaitu:

- a. Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjangkaran di masyarakat serta belum sesuai ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- b. Masih terbatasnya program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sector dalam mendorong masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan/ posbindu/ posyandu yang ada di desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
- c. Masih ditemukan belum keseragaman dalam pengalokasian kebutuhan besaran biaya transport kader yang ada di desa ;
- d. Masih adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan kapasitas pegawai dalam melakukan pelayanan kesehatan

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- a. Melakukan inisiasi dan advokasi pendekatan kepada seluruh kepala desa dalam optimalisasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan ;
- b. Sudah ada rencana dalam hal pembentukan puskesmas baru terutama di wilayah Kecamatan Mentok ;
- c. Sudah adanya pemetaan kebutuhan pegawai di beberapa sisi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas;
- d. Sudah dilakukan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Non Pemerintah dalam mendukung optimalisasi pencapaian SPM di bidang Kesehatan.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan

pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.37
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2022, 2021 serta Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.38

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	183.401	199.823	91,78	184.768	199.784	92,48	22942	24505	93.62%	100 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	189.052	199.823	94,61	109.856	199.784	54,99	8115	24505	33.12%	100 %
	RATA-RATA				93,20			73,74			63,37%	

Penerapan Standar pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat. Pelaksanaan SPM urusan Pekerjaan Umum merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari kedua indikator tersebut hanya 1 (satu) indikator yang capaiannya meningkat jika di bandingkan tahun kemarin dan 1 (satu) indikator yang capaiannya lebih rendah dari tahun kemarin. Namun walaupun ada indikator yang mengalami peningkatan di tahun 2021, kedua indikator tersebut tidak ada yang mencapai target 100%.

Pada indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari jika dilihat dari capaian pelayanan SPM memang mengalami peningkatan jika di bandingkan dengan tahun yang lalu namun tidak terjadi pada cakupan sasaran yang mengalami penurunan dari tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dalam definisi operasional dimana untuk penentuan warga negara yang menerima layanan kebutuhan air minum hanya di peruntukkan pada desa yang menjadi wilayah intervensi dari kegiatan tersebut sebanyak 23 desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Adapun untuk 23 desa yang menjadi lokasi intervensi program/ kegiatan pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum adalah :

- a) **Kecamatan Muntok** terdiri dari Kelurahan Tanjung, Sungai Baru, Sungai Daeng, Keranggan dan Menjelang serta Desa Air Belo dan belo Laut
- b) **Kecamatan Simpangteritip** terdiri dari Desa Kundi, Peradong, Air Nyatoh dan Rambat
- c) **Kecamatan Jebus** terdiri dari Desa Rukam, Ranggi Asam, Ketap, Pebuar, Sinar Manik dan Air Kuang
- d) **Kecamatan Parittiga** terdiri dari Desa Kelabat dan Puput
- e) **Kecamatan Kelapa** terdiri dari Kelurahan Kelapa dan Desa Tugang
- f) **Kecamatan Tempilang** terdiri dari Desa Benteng Kota dan Air Lintang.

Untuk sarana dan prasarana air minum kategori layak untuk kebutuhan air bersih adalah berupa saluran perpipaan atau sumur yang memiliki tutup dengan jarak dengan tanki septik lebih dari 10 meter, dengan kondisi air tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Bangka Barat pada kategori pemenuhan air untuk kebutuhan air minum baru pada kategori layak belum mengarah ke akses aman yaitu sebesar 22.942 unit rumah dari total sebanyak 24.505 rumah (93,62%). Hal ini dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana air minum yang ada belum memenuhi syarat akses aman.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri masih ada masyarakat yang menggunakan akses air minum yang tidak layak yang berasal dari sungai dan pemandian sebesar 1.563 rumah atau sekitar 6,38%. Untuk itu berbagai program pemerintah serta stakeholder lainnya masih sangat di butuhkan untuk memenuhi ketersediaan sumber air bersih di daerah..

Kebutuhan air minum manusia harus ditunjang dengan ketersediaan air yang layak untuk dikonsumsi. Untuk kawasan perdesaan kebutuhan minimal air minum adalah 60 liter/hari per orang dan 80 liter/hari per orang di kawasan perkotaan dengan akses ke sumber air minum yang jarak tempuh tidak lebih dari 30 menit serta jarak sumber air baku (sumur) dengan septitank terdekat lebih dari 10 meter.

Tabel IV.39
Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Layanan Air Minum Tahun 2022
Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	TARGET	REALISASI		
		Total	Terlayani JP	Terlayani BJP	Belum Terlayani
		(unit Jiwa)	(unit Jiwa)	(unit Jiwa)	(unit Jiwa)
1	2	4	5	6	7
1	MUNTOK	12.192	3.714	5.883	406
2	SP TERITIP	2.240	401	1.656	183
3	JEBUS	3.098	149	2.732	183
4	PARITTIGA	2.323	134	2.154	35
5	KELAPA	2.614	148	1.960	506
6	TEMPILANG	2.038	139	1.765	134
Total		24.505	4.685	18.257	1.563
Persentase Layanan		93,62%	19,11%	74,50%	6,37%

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat

Dari table di atas dapat terlihat bahwa untuk cakupan pemenuhan air yang belum terlayani masih sebesar 6,37% dari total target SPM 100%. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sasaran penerima manfaat serta pemenuhan mutu pelayanan pada pelayanan air bersih sudah hampir mencapai target 100%. Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas mutu pelayanan pada table di bawah ini capaiannya sebesar 98,16% dimana jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas layanan hampir maksimal. Hal ini dapat terlihat pada pemenuhan kuantitas dan kualitas air yang belum mencapai 100%.

Tabel IV.40
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Minum Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	24.505	22.942	96,32
2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	24.505	22.942	96,32
3	Jaringan perpipaan	6.248	4.685	100
4	Jaringan bukan perpipaan	18.257	18.257	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				50,00%

Kemudian terkait dengan capaian indikator penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang mana capaian di tahun 2022 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan capaian tahun 2021 yang lalu. Sama halnya dengan indikator

penyediaan layanan air bersih, penurunan ini disebabkan oleh perubahan cara penghitungan capaian indikator tersebut di mana pada tahun sebelumnya untuk capaiannya dihitung dari rumah tangga yang memiliki jamban layak dianggap sudah masuk kategori mendapat pelayanan SPM air limbah, namun sejak tahun 2021 cara penghitungan bukan menggunakan jamban layak lagi tetapi dilihat dari keberadaan tanki septik kriteria dasar (berupa cubluk di kawasan perdesaan) dan layak (sesuai SNI). Untuk kawasan perdesaan persyaratan tanki septik hanya pada kriteria dasar saja namun untuk wilayah perkotaan persyaratan tanki septik tidak hanya dilihat dari yang telah memiliki kriteria dasar saja namun juga harus memenuhi kriteria layak.

Tabel IV.41
Data Capaian Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah Menurut Kategori
Tahun 2022 Kabupaten Bangka Barat

No	Kecamatan	Kategori	TARGET	REALISASI				
			Total	Tanpa Akses	Akses Dasar	Akses Layak	Akses Aman SPALD-S	Akses Aman SPALD-T
			(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)	(unit Rumah)
1	MUNTOK	Perkotaan	12.192	10.813	0	1.227	25	127
		Perdesaan	0	0	0	0	0	0
2	SP TERITIP	Perkotaan	0	0	0	0	0	0
		Perdesaan	2.240	205	1.920	115	0	0
3	JEBUS	Perkotaan	0	0	0	0	0	0
		Perdesaan	3.098	176	2.872	48	2	0
4	PARITTIGA	Perkotaan	892	892	0	0	0	0
		Perdesaan	1.431	1.431	0	0	0	0
5	KELAPA	Perkotaan	1.764	1.764	0	0	0	0
		Perdesaan	850	141	589	120	0	0
6	TEMPILANG	Perkotaan	968	968	0	0	0	0
		Perdesaan	1.070	0	1.070	0	0	0
Total			24.505	16.390	6.451	1.510	27	127

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat

Jika di lihat dari table di atas, dari total rumah tangga desa intervensi program SPM yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 24.505 RT, bahwa terdapat 8.115 RT yang telah terpenuhi pelayanan air limbah domestik yang mana angka ini diperoleh dari 6.451 RT yang telah memiliki akses dasar ditambah dengan 1.510 RT yang telah memiliki akses layak, 27 akses aman SPALD-S dan 127 akses aman SPALD-T. Sehingga dari data tersebut terlihat bahwa masih terdapat 16.390 RT di Kabupaten Bangka Barat yang sarana pengolahan Air Limbah domestiknya tanpa akses. Perubahan kategori penghitungan inilah yang membuat penurunan capaian pada indikator pelayanan air limbah domestic sejak tahun 2021. Di samping itu pula, dari data di atas dapat terlihat bahwa untuk jumlah tangga yang menjadi target pemenuhan SPM adalah 24.505 rumah tangga atau sekitar 98.020 jiwa dengan asumsi bahwa dalam 1 (satu) rumah tangga terdapat 1 orang Kepala Rumah Tangga beserta 3 orang anggota rumah tangga.

Tabel IV.42
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Air Limbah Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	24.505	23.983	97,86
2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	24.505	8115	33,11
3	Sub-Sistem pengolahan setempat	15.868	1.537	9,68
4	Sub-sistem pengangkutan	1.057	127	12,01
5.	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	15.868	154	97,05
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				33,13%

Kemudian jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas mutu pelayanan pada table di bawah ini capaiannya sebesar 33,13% dimana jika dilihat dari segi pemenuhan kualitas layanan sangat minim sekali. Hal ini dapat terlihat pada pemenuhan kualitas air limbah sebesar 33,11% serta Sub-Sistem pengolahan setempat dengan capaian sebesar 9,68%.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk capaian SPM bidang Pekerjaan Umum dari 2 (dua) indicator tersebut keseluruhannya tidak ada yang mencapai target SPM. Sehingga perlu dilakukan percepatan serta peningkatan koordinasi dalam pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum ini.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2022 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.43
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	926.146.080
				Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.330.514.920
				Peningkatan SPAM jaringan perpipaan dikawasan perdesaan	895.467.800
				Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	98.945.000
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	3.219.150.000

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
			Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan/penyediaan sub system pengolahan setempat	905.637.600
				Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	228.011.185
			TOTAL		12.603.872.585

4.3.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat berjumlah 5 orang PNS, 6 orang PHL dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, dan TFL Sanitasi 6 orang.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum adalah masih terbatasnya dukungan penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dikarenakan untuk sumber penganggaran hanya bergantung pada DAK bukan APBD.

Adapun solusi yang harus diambil dari permasalahan yang telah disebutkan di atas adalah adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)nya oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan

pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.44

Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	100 %	Setiap Tahun

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.45

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	2	2	100	2	2	100	67	67	100%	100 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara Masyarakat yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100 %
RATA-RATA					50%			50%			50%	

Untuk capaian SPM bidang Perumahan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana sebesar 100% (mencapai target) serta Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 0%. Sehingga untuk rata-rata capaian SPM bidang Perumahan di tahun 2021 adalah sebesar 50%. Untuk capaian SPM bidang perumahan jika di bandingkan dengan capaian tahun lalu tidak mengalami perubahan alias tetap. Hal ini dikarenakan untuk capaian indikator Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten dalam 3 tahun terakhir sebesar 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi rumah masyarakat ke tempat yang aman, jauh dari tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya misalkan sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah sempadan sungai, daerah rawan bencana serta daerah-daerah lainnya yang masuk dalam kategori daerah yang rawan bahaya.

Adapun untuk penjelasan dari capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

- a. Capaian indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana di Kabupaten Bangka Barat untuk Tahun 2022 adalah 100%. Hal ini dikarenakan target capaian dari indikator yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) unit rumah layak huni, terealisasi sebanyak 67 (enam puluh tujuh) unit yang mana untuk penetapan 67 (enam puluh tujuh) unit rumah layak huni korban bencana tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah adalah sebagai berikut : .

Tabel IV.46

Data penerima Bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
1.	Nomor : 188.45/187.b/DISPERKIMHUB/2022	1. Rudi Hartanto 2. Halimi 3. Rusman Hadi 4. Nanang Hardiansyah	Angin Puting	Dusun kelabat parittiga
2.	Nomor : 188.45/321.A/DISPERKIMHUB/2022	1. Sapriyanto 2. Eko Periyono	Angin Kencang	Kelurahan Kelapa Dusun Jebus
3.	Nomor : 188.45/100.A/DISPERKIMHUB/2022	1. Jupri	Sebagian penutup atap melayang dikarenakan angin kencang	Dusun Tambang desa Mislak Jebus
4.	Nomor : 188.45/14/DISPEKRIMHUB/2022	1. Fitri Yani	Rumah tertimpa pohon kelapa yang disebabkan angin kencang	RT. 002 Jln. Raya Desa Bakit Kecamatan Parittiga

NO	SURAT KEPUTUSAN	NAMA	PENYEBAB BENCANA	LOKASI
5.	Nomor : 188.45/154/DISPEKRIMHUB/2022	1. Rani Ahyana	Sebagian penutup atap melayang dikarenakan angin kencang	Jalan cempaka, RT 005/ RW 003, Desa Air Lintang
6.	Nomor : 188.45/98.D/DISPERKIMHUB/2022	1. Ayub 2. Gunawan 3. Prayogo 4. Robani 5. Saparudin 6. Iskandar 7. Suhalmi 8. Durani 9. Sandariko 10. Lasri 11. Mansar 12. Ardius 13. Agus Murdiyanto 14. Zainudin 15. Sainun 16. Ropi'ah 17. Sapri 18. Jemari 19. Asmadi 20. Tolip 21. Ramubon 22. Ayut 23. Zuraini 24. Marini 25. Adi Nata 26. Jiwan 27. Sahrul 28. Jamasito 29. Dodi 30. Yopita Sari 31. Muriati 32. Mega 33. Nurhasan 34. Lindawati 35. Sukri 36. A. Sani 37. Syahroni 38. Subro 39. Sugianto 40. Agus Salim 41. Andri Sari 42. Paimin 43. Burlian 44. Ci'uyah 45. Sidik 46. Suaina 47. Basik 48. Hariyanto 49. Sandri 50. Asun 51. Ase 52. Musmulyadi 53. Jamin 54. Sukarni 55. Rusman 56. Nyoman Sukonadi 57. Rohidin	Angin Puting	Desa Sinar Sari

Dari 67 rumah yang dilakukan rehabilitasi, terdapat 1(satu) rumah yang dilakukan pembangunan kembali dikarenakan kondisi sudah rusak berat. Sedangkan 66 unit rumah lainnya sifatnya hanya renovasi dengan cara melakukan penggantian material pada bagian rumah yang rusak.

Tabel IV.47
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	67	67	100
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	66	66	100
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	100
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				100%

Kemudian dari pencapaian mutu pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana diperoleh capaian sebesar 100% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

- b. Untuk Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten belum terealisasi yaitu dengan capaian 0, dikarenakan belum adanya masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah serta belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi kepada masyarakat dalam 3 (tiga) Tahun ini dikarenakan belum adanya penetapan daerah yang dapat dijadikan sebagai lokasi relokasi atas program pemerintah. Namun di tahun 2022 telah dilakukan identifikasi terhadap beberapa lokasi yang dimungkinkan dapat menjadi lokasi relokasi atas program pemerintah. Sehingga jika dilihat dari segi pemenuhan mutu layahnan untuk indicator ini capaiannya masih 0%.

Tabel IV.48
Capaian Pemenuhan Mutu Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0
2	Subsidi uang sewa	0	0	0
3	Penyediaan rumah layak huni	0	0	0
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				0%

Penerapan SPM bidang Perumahan tidak dapat terlepas dari penerapan SPM bidang trantibumlinmas dimana untuk pemenuhan kedua SPM ini harus didukung dengan ketersediaan dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen

penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi yang mana sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah baru memiliki satu dari ketiga dokumen tersebut yaitu Kajian Resiko Bencana. Namun tentunya dalam penggunaan dokumen tersebut harus dilakukan penetapan dengan Peraturan Daerah terlebih dahulu yang akan direncanakan akan dilakukan penetapan di tahun 2023 mendatang.

Ketiga dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting untuk dimiliki oleh masing-masing Pemerintah Daerah karena didalamnya termuat diantaranya titik-titik daerah rawan bencana beserta jumlah jiwa yang menjadi pijakan dalam perencanaan SPM khususnya yang berkaitan dengan kejadian bencana. Dengan keberadaan dari dokumen ini juga nantinya akan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana dalam upaya penanggulangan bencana daerah.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2022 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.49
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana yang Memiliki Rumah Terkena Dampak Bencana	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	360.000.000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	14.920.000
TOTAL					374.920.000

4.4.5. Dukungan Personil

Secara umum keterlibatan seluruh pegawai dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat berada pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah personil PNS 33 Orang, PHL 55 Orang. Namun yang terlibat secara langsung dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari 5 Orang PNS dan 2 Orang PHL.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Tentunya dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu :

- a. Tingkat pemahaman dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah yang belum komprehensif antar *stakeholder*/sektor sehingga membuat belum maksimalnya penerapan Standar pelayanan Minimal di daerah;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peningkatan komitmen, koordinasi lintas sektor serta penyamaan persepsi antar pihak-pihak yang terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat.
- b. Agar daerah dapat segera dilakukan penyusunan ketiga dokumen tersebut dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan akan dokumen tersebut yang tentunya dengan melibatkan lintas sektor;
- c. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. penyediaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.50
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	100 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	100 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	100 %	Setiap Tahun

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2022, 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.51

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	12	12	100	567	567	100	72	72	100%	100 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	218	2.765	7,88	150	2765	5,42	115	2080	5.53%	100 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	164	2.765	5,93	190	2765	6,87	179	2080	8.61%	100 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana	536	536	100	7042	7042	100	2972	2972	100%	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Kebakaran atau Terdampak Kebakaran	13	13	100	24	24	100	14	18	77.78%	100 %
	RATA-RATA				62,76			62,46			58,38	

Pelaksanaan SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bangka Barat dilakukan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan indikator :
 - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan indikator :
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun untuk rata-rata capaian SPM bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian di tahun 2021 yang lalu dari 62,46% menjadi 58,38% di tahun 2022. Hal ini dikarenakan untuk capaian beberapa indikator tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Namun tentunya untuk capaian dari masing- masing indikator masing-masing berbeda tipis capaiannya dengan tahun 2021 yang lalu, di mana jika tahun 2021 dari 5 indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang capaiannya 100% yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, namun di tahun 2022 hanya 2 (dua) indikator saja yang mencapai target alias 100% yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Sedangkan untuk 3 indikator lainnya belum mencapai target yang ditetapkan.

Adapun untuk penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- a) Capaian pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Tahun 2022 sama halnya dengan capaian di Tahun 2021 yaitu mencapai target. Hal ini dikarenakan seluruh warga yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran mendapatkan pelayanan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Namun jika dilihat dari sasaran serta capaian indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan jika di bandingkan dengan capaian dan sasaran tahun lalu. Hal ini dikarenakan telah adanya perbaikan perilaku di masyarakat dalam mematuhi aturan hokum sehingga dapat menekan angka pengaduan.

Tabel IV.52
Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat yang ditegakkan Tahun 2022

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum	a) Pengawasan Rumah Makan dan Tempat Hiburan b) Pengecekan Lahan Milik Pemda c) Penertiban Tambang Inkonvensional Ilegal

NO	NAMA PERDA	JENIS PENEGAKAN
		d) Penerbitan Tempat Hiburan Malam e) Pengecekan Pemilik Kontraan dan kos-kosan
2.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pengecekan Data Kependudukan Penghuni Kontrakan dan kos-kosan
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar
4.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Razia kawasan tanpa rokok
5.	Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Percepatan Pencegahan Penyebaran <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	Protokol Kesehatan di Sekolah dan Pasar

Dari table di atas sebenarnya ada banyak sekali Peraturan daerah/ kerangka kebijakan yang dapat menjadi bahan untuk di lakukan penertiban. Berdasarkan data dari Bagian hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 37 peraturan baik itu Peraturan Daerah maupun Peraturan Keala Daerah yang telah memuat sanksi hukum yang jelas. Namun dari 37 aturan tersebut yang hanya dilakukan penegakaln cakupannya hanya kepada 5 aturan saja dengan memperhatikan ketersediaan personil yang ada.

Tabel IV.53

Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0
3	Standar sarana prasarana Satpol PP	0	0	0
4	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	144	13	9,03
5	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				21,80%

Kemudian dari pencapaian mutu pelayanan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun diperoleh capaian sebesar 21,80% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan sebuah kebijakan khusus dari daerah untuk dapat memaksimalkan ketersediaan mutu pelayanan pada masing-masing indicator SPM.

b) Sedangkan untuk capaian indikator pelayanan informasi rawan bencana mengalami sedikit peningkatan dari angka 5,42% di Tahun 2021 menjadi 5,53% di Tahun 2021. Peningkatan ini dikarenakan adanya perluasan cakupan kegiatan dan peserta pelayanan informasi rawan bencana yang lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di kawasan bencana tersebut. Di samping itu pula di tahun 2022 telah disusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana sebagai pemenuhan mutu pelayanan di sub urusan bencana. Namun untuk keabsahan dari dokumen tersebut masih menunggu waktu pengesahan oleh pihak DPRD dikarenakan penetapan dokumen Kajian resiko bencana harus ditetapkan oleh eksekutif dan legislative.

Kemudian di samping itu pula untuk layanan informasi rawan bencana yang akan diberikan kepada masyarakat di tahun-tahun selanjutnya diharapkan dapat sesuai hasil pemetaan dalam dokumen Kajian Resiko bencana dan juga penetapan sarasannya juga agar dapat memperhatikan yang tertuang di dalam dokumen tersebut agar dapat lebih tepat sasaran.

Tabel IV.54
Capaian Pemenuhan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	2031	1111	54,70
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2769	2769	100
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	50	10	20
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	20	2	10
5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	2080	2080	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				56,94%

Untuk pencapaian mutu pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 56,94% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun angka ini dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan capaian mutu indikator sebelumnya.

c) Sedangkan untuk capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2021 mengalami peningkatan. Namun jika dilihat dari segi populasi penduduk di daerah rawan bencana antara data tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan jumlah dikarenakan adanya perubahan penetapan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana yang menjadi sasaran pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Perubahan penetapan sasaran masyarakat di kawasan rawan bencana dari

2.765 di tahun 2021 menjadi 2.080 di tahun 2022 sudah dilakukan dengan memperhatikan dokumen Kajian resiko Bencana yang telah di susun.

Tabel IV.55
Capaian Pemenuhan Mutu pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	315	315	100
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	145	35	24,13
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				62,06%

Untuk pencapaian mutu pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 62,06% di mana untuk seluruh pemenuhan mutu terealisasi belum sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga kedepan perlu untuk menjadi perhatian bersama.

- d) Untuk indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Tahun 2022 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan capaian di Tahun 2021 yang lalu. Penurunan ini juga disebabkan oleh menurunnya angka kejadian bencana yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan sekitarnya baik yang merupakan bencana alam maupun non alam dalam hal ini yaitu Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan aparaturnya serta masyarakat.

Jika dilihat dari segi data Indeks Resiko Bencana, Kabupaten Bangka Barat masuk dalam kategori resiko tinggi untuk kebencanaan jika di bandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selama kurun waktu 5 tahun kebelakang. Adapun untuk kejadian bencana yang melatarbelakangi hal ini yaitu terjadi bencana banjir dan puting beliung merupakan jenis bencana yang dapat dikatakan setiap tahun terjadi di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel IV. 56
Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2022
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	KABUPATEN/ KOTA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bangka Barat	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40
2	Bangka Selatan	180,40	180,40	180,40	180,40	180,40	179,12
3	Bangka	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
4	Belitung Timur	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40
5	Belitung	168,40	168,40	168,40	168,40	168,40	148,48
6	Bangka Tengah	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40	144,40
7	Pangkalpinang	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40

Sumber : Buku Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022

Jika dilihat dari segi data jumlah evakuasi korban bencana, angka kejadian di tahun 2022 cenderung lebih rendah dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan angka kejadian

kasus Pandemi Covid-19 pada tahun 2022 yang berangsur-angsur membaik. Adapun dengan rincian penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.57
Jumlah Evakuasi Kejadian Bencana di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan 2022

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN BENCANA	
		2022	2021
1.	Banjir	1.087	1.423
2.	Kebakaran Permukiman	14	33
3.	Angin Kencang	449	47
4.	SAR	20	14
5.	Abrasi	0	60
6.	Covid-19	1.436	5.465
	TOTAL	2.972	7.042

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangka Barat

Untuk pencapaian mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 80,00% di mana dalam hal ini jika dibandingkan dengan capaian mutu di indicator lainnya di sub urusan bencana merupakan capaian mutu tertinggi. Namun tetap dalam hal ini untuk layanan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana agar dapat menjadi perhatian di tahun-tahun berikutnya.

Tabel IV.58
Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	0	0	0
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	2972	2972	100
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	418	418	100
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1436	1436	100
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	2972	2972	100
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				80,00%

e) Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran capaiannya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 77,78%. Ini mengartikan bahwa seluruh kejadian kebakaran belum mendapatkan penyelamatan dan evakuasi oleh petugas dikarenakan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta jarak tempuh yang tidak memungkinkan untuk mencapai respon times. Dari total kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2022 terdapat 9 kejadian dan 2 diantaranya tidak memenuhi kategori respons time dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana.

Tabel IV.59
Data Kejadian Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	TANGGAL KEJADIAN	LOKASI	JUMLAH KORBAN	RESPON TIME
1.	3 Januari 2022	Desa Sinar Sari	4 jiwa	0'
2.	8 Januari 2022	Desa Belo Laut	0 jiwa	10'
3.	13 Februari 2022	Kelurahan Sungai Daeng	2 jiwa	5'
4.	25 Maret 2022	Desa Air Belo	3 jiwa	10'
5.	07 Mei 2022	Desa Belo Laut	3 jiwa	5'
6.	07 Juni 2022	Desa Belo Laut	2 jiwa	10'
7.	12 Agustus 2022	Kelurahan Tanjung	2 jiwa	10'
8.	14 September 2022	Kelurahan Tanjung	2 jiwa	10'
9.	1 Desember 2022	Desa Sinar Surya	2 jiwa	0'

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka Barat

Untuk pencapaian mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana kebakaran Tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 72,00%. Capaian ini dapat dikatakan cukup baik namun masih perlu peningkatan kualitas mutu di tahun berikutnya.

Tabel IV.60
Capaian Pemenuhan Mutu Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO.	JENIS LAYANAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	9	7	78
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	100
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	40	40	100
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	21	2	10
% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				72,00%

Pelaksanaan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kedepannya diharapkan dapat lebih meningkat, yang mana hal ini dikarenakan pada Tahun 2021 yang lalu adanya pembentukan organisasi perangkat daerah di bidang penanganan bencana yang juga dalam hal ini ditunjang dengan adanya Satuan Tugas Tanggap Bencana sebanyak dari 26 orang serta petugas pemadam kebakaran akan membuat pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencegahan serta penanganan bencana di daerah dapat lebih optimal lagi.

4.5.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2022 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah untuk bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.61

Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Bangka Barat Tahun 2022

Kabupaten

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	93.937.000
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18.342.500
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3.675.445.000
				Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	488.363.000
				Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	34.591.800
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12.743.200
				Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	181.397.510
2	Jumlah Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	561.275.000

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
				Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	13.820.000
				Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	1.715.000
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	941.085.00
4	Jumlah Warga Negara yang Menjadi Korban Bencana atau yang Terdampak Terkena Bencana			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19.405.000
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	127.700.000
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	111.226.250
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	405.140.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	19.074.500
			TOTAL		6.705.260.760

4.5.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berjumlah 46 orang terdiri dari 31 orang PNS serta 15 orang PHL;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berjumlah 21 orang terdiri dari 14 orang PNS serta 7 orang PHL;
- c. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah personil 115 Orang merupakan PHL SatPol PP;
- d. Anggota Tim Reaksi Cepat dengan jumlah personil 20 orang PHL TRC ;dan
- e. Anggota Pemadam Kebakaran berjumlah 8 orang PHL dengan 2 orang yang telah memiliki aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pihak Pemerintah Daerah, yang diantaranya yaitu;

- a. Masih ada kegiatan yang belum diakomodir untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal dikarenakan keterbatasan anggaran ;
- b. Belum tersedianya dokumen –dokumen penanganan daerah rawan bencana yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu kajian resiko bencana, dokumen penanggulangan bencana serta dokumen rencana kontigensi dipergunakan dalam identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
- c. Masih terbatasnya sarana prasarana dan personil untuk mendukung pencapaian SPM di mana jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di setiap kecamatan harus ada personil Polisi Pamong Praja serta harus ada UPT Kebakaran di setiap kecamatan;
- d. Minimnya alokasi anggaran kegiatan penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun solusi yang harus dilakukan untuk menjawab semua permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan perencanaan OPD teknis pengampuh SPM agar dapat diprioritaskan pada pemenuhan program/ kegiatan/ sub kegiatan Stnadar Pelayanan Minimal;
- b. Agar daerah dapat segera dilakukan penyusunan ketiga dokumen tersebut dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan akan dokumen tersebut yang tentunya dengan melibatkan lintas sektor;
- c. Adanya peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (*SPM*) Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya telah dituangkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan lanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.62
Indikator dan Target Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan diluar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususna Gelandangan dan Pengemis di Luar dan di Dalam Panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Setiap Tahun

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Tahun 2022, 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.63

Perbandingan Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, 2021 dengan 2020

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	CAPAIAN 2020	SASARAN 2020	ANGKA 2020	CAPAIAN 2021	SASARAN 2021	ANGKA 2021	CAPAIAN 2022	SASARAN 2022	ANGKA 2022	TARGET CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti	332	332	100	816	816	100	389	389	100%	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar Panti	642	642	100	11164	11164	100	751	751	100%	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	469	269	174,35	5968	5968	100	965	965	100%	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8	8	100	4	4	100	1	1	100%	100 %
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	431	431	100	3317	3.317	100	502	502	100%	100 %
TOTAL						159,97			100		100	

Pada tahun 2022 capaian untuk masing-masing indikator SPM bidang sosial seluruhnya mencapai target (100%) dengan jumlah sasaran di masing-masing indikator mengalami penurunan jika di bandingkan dengan sasaran di tahun 2021 yang lalu. Total seluruh sasaran pada indikator SPM bidang sosial sub urusan rehabilitasi sosial sebanyak 28.457 jiwa dengan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dimiliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Tabel IV.64
Data Jumlah Warga Negara Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2022
Kabupaten Bangka Barat

NO	JENIS LAYANAN	BANTUAN				
		PERMAKAMANAN	SANDANG	ALAT BANTU	KIP	KIS
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	377	28	15	15	816
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	283	0	0	7096	19.268
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	850	152	3	0	8373
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1	0	0	0	0

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial kementerian Sosial Tahun 2022

Untuk penjelasan capaian masing-masing indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

- a) Capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti di Tahun 2022 sama halnya dengan capaian Tahun 2021 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2021 indikator ini mengalami penurunan baik dari segi capaian maupun sasaran dimana dari 816 jiwa di tahun 2021 menjadi 389 jiwa di tahun 2022.
- b) Untuk capaian sasaran indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti capaian di Tahun 2022 sama halnya dengan capaian Tahun 2021 yang lalu yaitu mencapai target 100%. Di tahun 2021 indikator ini mengalami penurunan baik dari segi capaian maupun sasaran dimana dari 11.164 jiwa di tahun 2021 menjadi 751 jiwa di tahun 2022..
- c) Sama halnya dengan indikator lainnya, untuk indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti untuk cakupan sasaran dan capaian di Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan cakupan sasaran dan capaian Tahun 2021 yaitu dari 5.968 jiwa menjadi 965 jiwa.
- d) Sedangkan untuk capaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Tahun 2022 sama seperti capaian 2021 yaitu 100% walaupun dari segi sasaran penerima pelayanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti mengalami penurunan yaitu dari 4 orang di Tahun 2021 menjadi 1 orang di Tahun 2022.

- e) Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota juga sama seperti capaian tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

4.6.4. Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2021 jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah untuk bidang sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.65
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam dan diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	2.375.896.625
				Penyediaan Sandang	20.020.00
				Penyediaan alat bantu	3.900.000
				Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	19.730.000
				Pemberian layanan rujukan	114.529.800
2	Jumlah Warga Negara sebagai Anak Terlantar di Luar dan di Dalam Panti				
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar di Luar dan di Dalam Panti				
4	Jumlah Warga Negara yang menjadi Korban Bencana yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	88.045.000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota/ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksana Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksana Taruna Siaga Bencana	161.365.000
TOTAL					2.648.936.625

4.6.5. Dukungan Personil

Secara umum seluruh pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terdiri dari pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat yang membidangi urusan sosial dan Rehabilitasi Sosial dengan jumlah personil PNS 8 Orang (1 Pekerja Sosial dan 1 Penyuluh Sosial) serta PHL 10 orang.

Di samping itu dalam pelaksanaan tugas di Bagian Rehabilitasi Sosial juga dibantu oleh 6 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 1 pekerja sosial anak, 1 fungsional pekerja sosial, 74 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan pendamping rehabilitasi sosial 3 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun untuk permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya alokasi anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemenuhan pelayanan dasar pada pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- b. Belum optimalnya kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang dibebankan kepada mereka di luar tugas fungsi pokoknya;
- c. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelayanan sosial.

Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, antara lain:

- a. Adanya kebijakan pemerintah daerah untuk melibatkan stakeholder lain dalam mendukung pembiayaan pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah sehingga penganggaran tidak bergantung pada sumber penganggaran APBD saja.
- b. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan di masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan lintas sektor;
- c. Meningkatkan kuantitas sumber daya manusia sosial/ kader sosial berbasis masyarakat sehingga mampu melaksanakan tugas untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
- d. Adanya kebijakan untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2022, didukung program dan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang memiliki urusan pemenuhan bidang Standar Pelayanan Minimal. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran untuk mencapai penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp 75.125.322.170 yang bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Berdasarkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, ditetapkan program pembangunan sebagai pendukung pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat sebanyak 10 program yang berada pada 7 (tujuh) OPD yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.66

Alokasi Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN
	PENDIDIKAN			45.130.557.100,00
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar	20.914.646.000,00
		Penambahan Ruang Kelas Baru		299.350.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		3.398.851.000,00
		Rehabilitasi Sedang Berat Ruang Kelas SD		1.715.285.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Siswa		189.990.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		15.123.670.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		187.500.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		7.647.324.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		1.612.552.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Siswa		199.590.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		306.770.000,00
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik		13.339.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		5.392.120.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		122.953.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini	6.373.227.100,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		794.227.500,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		4.976.690.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		554.554.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		47.755.600,00
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan	10.174.430.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		10.174.430.000,00
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Dasar	20.930.000,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Anak Usia Dini	
			Pendidikan Kesetaraan	
	KESEHATAN			7.661.775.100,00
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.080.212.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	397.392.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	109.320.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	564.170.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	484.168.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	374.465.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	374.735.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	29.970.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1.013.698.100,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	133.484.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	594.111.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	238.180.000,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		1.267.740.000,00
		Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana		130.000,00
	PERUMAHAN RAKYAT			12.603.872.585,00
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8.251.073.800,00
		Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		926.146.080,00
		Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan		6.330.514.920,00
		Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		895.467.800,00
		Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan		98.945.000,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4.352.798.785,00
		Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat		905.637.600,00
		Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		228.011.185
		Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT		3.219.150.000
	PERUMAHAN RAKYAT			374.920.000,00
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	14.920.000,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		14.920.000,00
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota		360.000.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana		360.000.000,00
			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.705.260.760,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.310.679.300,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		93.937.000,00
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		488.363.000,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		18.342.500,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		3.675.445.000,00
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		34.591.800,00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		194.140.710,00
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		12.743.200,00
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		181.397.510,00
2		SUB URUSAN KEBAKARAN		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	516.366.250,000
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		111.226.250,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		405.140.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		19.074.500,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		19.074.500,00
	SUB URUSAN BENCANA			1.665.000.000
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	127.700.000
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota		127.700.000
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	576.810.000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota		13.820.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota		1.715.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota		561.275.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	960.490.000
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas		941.085.000
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota		19.405.000
	SOSIAL			2.648.936.625,00
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial/ Penyediaan Permakanan		
		<i>Penyediaan Permakanan</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2.375.896.625
		<i>Penyediaan Sandang</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	20.020.000
		<i>Penyediaan alat bantu</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	3.900.000
		<i>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial</i>	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	19.730.000

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial/Pemberian Layanan Kedaruratan		
		<i>Pemberian Layanan Rujukan</i>		114.529.800
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		<i>Penyediaan Makanan</i>		88.045.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota/ Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksana Taruna Siaga Bencana		
		<i>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksana Taruna Siaga Bencana</i>		161.365.000
TOTAL ANGGARAN PENERAPAN SPM TAHUN 2022				75.125.322.170,00

Dari total anggaran Program/ kegiatan yang mendukung dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 dapat terlihat bahwa total anggaran di Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan total anggaran di Tahun 2021 yang lalu yaitu Rp. 154.846.668.547,00 menjadi Rp. 75.125.322.170,00 atau menurun sekitar 51,48% dari total anggaran tahun sebelumnya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penurunan alokasi APBD yang disesuaikan dengan pendapatan daerah sehingga untuk penganggaran program pencapaian SPM yang bersumber pada penganggaran daerahpun mengalami penurunan.

Dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di atas, dapat diperoleh hasil bahwa dari total jumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebanyak 29 indikator terdapat 14 indikator yang telah memenuhi target atau dengan persentase sebesar 48,27%. Sedangkan 15 indikator lainnya belum memenuhi target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ini akan menjadi sebuah gambaran kedepan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk menindaklanjutinya dan menyusun strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat dalam arah kebijakan Daerah.

Di samping itu pula, pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Tahun 2021 sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di karenakan adanya perubahan kebijakan penerapan SPM untuk dijadikan sebagai salah satu parameter perhitungan besaran dana transfer ke daerah dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah masing-masing. Disamping itu pula mulai tahun 2022 pula untuk penghitungan capaian SPM sudah menggunakan Indeks Pencapaian SPM yang mana dalam hal ini dalam melihat keberhasilan penerapan SPM tidak hanya dilihat dari pemenuhan layanan kepada penerima sasaran saja namun juga harus dilihat dari segi pemenuhan mutu layanan. Sehingga dikarenakan adanya perubahan metode penghitungan ini secara otomatis membuat capaian SPM nilainya akan lebih rendah ketimbang dengan capaian SPM tahun lalu. Untuk itu dalam hal ini perlu

adanya perbaikan serta peningkatan komitmen bersama untuk dapat memandang penerapan SPM di daerah menjadi sebuah hal yang strategis untuk di laksanakan.

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat Daerah memang masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan masih banyak terdapat keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi diantaranya sumber daya manusia, pengetahuan, komitmen, komunikasi serta ketersediaan anggaran. Namun setidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat berusaha untuk melakukan pembenahan serta peningkatan kualitas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan serta peran Pemerintah Pusat dalam upaya optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Harapan Kami melalui Laporan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangka Barat ini menjadi sebuah pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Daerah dengan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi warga di Kabupaten Bangka Barat sepenuhnya yang nantinya akan membawa kepada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang seutuhnya.

Berdasarkan hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 di atas, tentunya telah memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah tentang capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) saat ini. Tentunya dari hasil tersebut, akan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dalam arah kebijakan Daerah untuk mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bangka Barat.

Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan, penyusunan rencana pemenuhan serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
2. Peningkatan koordinasi serta komitmen pemangku kepentingan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah mulai dari Kepala Daerah hingga Perangkat Daerah yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Peningkatan dukungan kebijakan dan sumber penganggaran di luar APBD sebagai bentuk penguatan program dan kegiatan pemenuhan penyelenggaraan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); serta
4. Penguatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah sebagai bentuk pengawalan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk pemenuhan kewajiban pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022 ini merupakan perwujudan realisasi dari capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat, baik capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran atas capaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2022. Dalam upaya untuk pencapaian target kinerja yang maksimal dan terwujudnya *good governance*, optimalisasi dan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 ini sebagai barometer untuk melihat capaian kemajuan dan permasalahan yang ada. Capaian kemajuan yang diindikasikan oleh kemandirian, produktif, inovatif, adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat dalam segala sektor. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya sejahtera. Upaya pemerintah untuk memajukan daerah adalah juga langkah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, yang dicirikan oleh peningkatan capaian kinerja di berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, kemajuan suatu daerah juga diindikasikan oleh capaian pengembangan inovasi daerah, penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penghargaan yang diterima oleh daerah sebagai wujud pengakuan dari pemerintah dan masyarakat atas kinerja yang telah diwujudkan.

Melalui penyusunan LPPD ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan selama satu tahun anggaran atau periode tertentu, serta dapat mengetahui pencapaian dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sejatinya pembangunan daerah di Kabupaten Bangka Barat selalu diorientasikan untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Upaya tersebut dijabarkan melalui berbagai program dan kegiatan yang ditujukan secara luas dan merata bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan peluang untuk menaikkan taraf ekonomi makro yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

Secara menyeluruh penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan prinsip *good governance*, meskipun ada permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang masih tetap melanda hampir di seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bangka Barat. Sehingga diperlukan berbagai penyesuaian baik dari segi anggaran maupun kebijakan terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan. Namun hal ini tidak membuat birokrasi menjadi terhambat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tersendat. Semua hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah diupayakan tetap berjalan dengan optimal dan maksimal. Tantangan pandemi Covid-19 juga telah mentransformasi berbagai kegiatan urusan pemerintahan dengan lebih intensif didalam memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini tentu saja menjadi momentum positif didalam peningkatan urusan dan pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan pemanfaatan teknologi informasi bagi seluruh aparat pemerintahan daerah pada tahun kedepan.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat akan senantiasa melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, kami sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat guna mengoptimalkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Buku laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diharapkan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, serta tercipta timbal-balik (*feedback*) sebagai masukan untuk alternatif perbaikan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka Barat pada masa yang akan datang. Sesungguhnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2022 menjadi kebanggaan kita bersama dan perlu disyukuri. Oleh karena itu disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini.

Akhirnya melalui laporan ini kami selaku pemerintah daerah berharap, agar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian kinerja oleh Pemerintah Pusat atas capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2022. Harapkan kedepan, hasil evaluasi kinerja yang telah dievaluasi dapat menjadi sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan arah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam upaya peningkatan manajemen kinerja yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di masa yang akan datang. Dan perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan daerah di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bersama.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

LPPD 2022